

Terakreditasi No. : 405/AU3/P2MI-LIPI/04/2012

PATRAWIDYA

seri penerbitan penelitian sejarah dan budaya

*Westernisasi dan Gaya Hidup Bangsawan
di Kadipaten Pakualaman pada Masa Paku Alam V*
Oleh : Baha' Uddin

Gerakan Kiri di Klaten: 1950 - 1965
Oleh : H. Purwanta

*Kedaulatan Rakyat dan Solopos:
Pilar Kehidupan Bahasa Jawa dan Kebudayaan Lokal Masyarakat*
Oleh : Heri Priyatmoko


*Menjadi Melayu :
Perempuan Jawa sebagai Agen Transformasi Sosial
dalam Masyarakat Jawa di Semenanjung Malaya
Tahun 1900-2000*
Oleh : Lucia Juningsih

*....Selanjutnya Kami Memilih Pergi ...
Kisah-kisah Etnis Tionghoa Asal Indonesia yang Kembali ke
Taiwan 1950-1960an*
Oleh : Devi Riskianingrum

*Strategi Peningkatan Pendapatan Melalui Budidaya Rumput Laut
di Kecamatan Talango, Pulau Poteran, Sumenep*
Oleh : Emiliana Sadilah

Usaha Gula Kelapa : Pertukaran dalam Produksi dan Distribusi
Oleh : Sumintarsih

*Dampak Pembangunan Jembatan Suramadu
Terhadap Mobilitas dan Kondisi Sosial Budaya Penduduk
(Kasus Lima Keluarga di Desa Pangpong, Kecamatan Labang,
Kabupaten Bangkalan)*
Oleh : Ernawati Purwaningsih

| | | | | | |
|--|---------|-------|----------------|------------------------------|----------------|
|  seri penerbitan penelitian sejarah dan budaya | Vol. 15 | No. 3 | Hal. 341 - 504 | Yogyakarta September 2014 | ISSN 1411-5239 |
|--|---------|-------|----------------|------------------------------|----------------|

Patrawidya merupakan seri penerbitan hasil penelitian **Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB)** Yogyakarta dan peneliti tamu, serta penulis undangan yang meliputi bidang sejarah dan budaya. **Patrawidya** terbit secara berkala tiga bulan sekali, yaitu pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Nama **Patrawidya** berasal dari dua kata “*patra*” dan “*widya*”, yang berasal dari bahasa Sansekerta, yang kemudian menjadi kata serapan dalam bahasa Jawa Kuna. Kata “*patra*” berasal dari kata “*pattra*”, dari akar kata *pat*=*melayang*, yang kemudian diartikan sayap burug; bulu; daun; bunga; tanaman yang harum semerbak; daun yang digunakan untuk ditulis; surat; dokumen; logam tipis atau daun emas. Kata “*widya*” berasal dari kata “*vidya*”, dari akar kata *vid*=*tahu*, yang kemudian diartikan sebagai “**ilmu pengetahuan**”. Jadi **Patrawidya** dapat diartikan sebagai “**lembaran yang berisi ilmu pengetahuan**”, yang dalam hal ini tentang sejarah dan budaya.

DEWAN REDAKSI PATRAWIDYA

| | |
|----------------------------|---|
| Mitra Bestari | : Prof. Dr. Djoko Suryo (Sejarah) Prof. Dr. Su Ritohardoyo, MA (Geografi) Prof. Dr. Suhartono Wiryopranoto (Sejarah) Prof. Dr. Heddy Shri Ahimsa-Putra, M.A. (Antropologi) |
| Penyunting Bahasa Inggris | : Drs. Eddy Pursubaryanto, M.Hum |
| Ketua Dewan Redaksi | : Dra. Taryati (Geografi) |
| Pemimpin Redaksi Pelaksana | : Dra. Dwi Ratna Nurhajarini, M.Hum. (Sejarah) |
| Dewan Redaksi | : Dra. Sumintarsih, M.Hum. (Antropologi) Dra. Suyami, M.Hum. (Sastra Jawa) Dra. Emiliana Sadilah (Geografi) Drs. Hisbaron Muryantoro (Sejarah) Drs. Sindu Galba (Antropologi) Yustina Hastrini Nurwanti, S.S. (Sejarah) Dra. Isni Herawati (Antropologi) |
| Pemeriksa Naskah | : Dra. Sumintarsih, M.Hum (Antropologi) Dra. Dwi Ratna Nurhajarini, M.Hum. (Sejarah) Ernawati Purwaningsih, M.Sc. (Geografi) |

Alamat Redaksi:

Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta
Jalan Brigjen Katamso 139, *Dalem* Jayadipuran Yogyakarta 55152
Telp. (0274) 373241, 379308 Fax. (0274) 381555
e-mail:patrawidya@bpnb-jogja.info | Website:<http://www.bpn-b-jogja.info>

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena perkenanNya Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta dapat menerbitkan jurnal Patrawidya Seri Sejarah dan Budaya Vol. 15 No.3, September 2014. Jurnal Patrawidya edisi ini memuat artikel tentang sejarah dan budaya, dari peneliti Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta, peneliti tamu dan peneliti undangan.

Jurnal Patrawidya tidak mungkin bisa sampai dihadapan para pembaca tanpa kerja sama dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan baik ini Dewan Redaksi Patrawidya dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari yang telah meluangkan waktu untuk membaca semua artikel dan memberi pertimbangan terhadap isi artikel. Ucapan terima kasih juga kami sampai kepada editor bahasa Inggris.

Edisi bulan September ini diawali dengan artikel dari Baha'Uddin tentang dampak sosial budaya yang terjadi pada kehidupan bangsawan di Kadipaten Pakualaman pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Pada periode tersebut modal Barat banyak mengalir ke Hindia Belanda termasuk daerah Pakualaman. Modal dari para pengusaha Eropa tersebut ditanamkan untuk membuka perusahaan perkebunan dengan menyewa lahan-lahan milik para bangsawan. Fenomena tersebut telah mengubah pola pendapatan para bangsawan dan kemudian hal tersebut juga berdampak terhadap kehidupan dan gaya hidup para bangsawan Pakualaman. Perubahan apa yang terjadi pada para bangsawan Pakualaman dapat ditemukan dalam tulisan tentang *Westernisasi dan Gaya Hidup di Kadipaten Pakualaman pada Masa Paku Alam V*.

Rekonstruksi gerakan kiri di Klaten ditulis dengan lugas oleh H. Purwana. Menurut H. Purwanta berdasarkan hasil kajiannya gerakan kiri di Klaten telah tumbuh pada awal kemerdekaan dalam bentuk gerakan anti swapraja. Gerakan kiri tersebut tumbuh karena adanya masalah tanah dan kemiskinan. Pada tahun 1950an gerakan kiri mendapat respon positif dan dipandang membela rakyat kecil. Pada tahun 1960an gerakan kiri semakin intensif dan cenderung keras. Hal itu antara lain didorong oleh sikap bupati yang tidak bersedia melaksanakan berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah pusat.

Heri Priyatmoko mengusung artikel tentang *Kedaulatan Rakyat dan Solopos: Pilar Kehidupan Bahasa Jawa dan Kebudayaan Lokal Masyarakat Yogyakarta dan Surakarta*. Kedua koran tersebut memiliki halaman suplemen yang berbahasa Jawa. Melalui suplemen berbahasa Jawa tersebut kedua harian itu turut membantu meningkatkan peran bahasa dan sastra Jawa dalam menguatkan identitas lokal masyarakat pembacanya. Media tersebut memberdayakan kebudayaan lokal. Hasil penelitian Heri Priyatmoko menunjukkan bahwa materi yang disajikan dalam halaman suplemen sering digunakan untuk bahan mengajar oleh para guru.

Artikel berikutnya dari Lucia Juningsih yang membahas tentang sejumlah perempuan etnis Jawa yang bermigrasi ke Semenanjung Malaya untuk bekerja di perkebunan karet. Di perkebunan karet mereka menjadi buruh bersama dengan para buruh dari India dan Cina. Selesai bekerja sebagian dari mereka pulang ke Jawa namun ada juga yang memutuskan untuk tetap tinggal di Semenanjung Malaya. Mereka yang menetap melakukan berbagai strategi dalam upaya membangun masa depan, salah satunya adalah menjadi etnis Melayu. Persoalan mengapa dan bagaimana perempuan Jawa mengambil bagian dalam transformasi sosial dari etnis Jawa menjadi etnis Melayu dapat dibaca secara lengkap dalam artikel *Menjadi Melayu: Perempuan Jawa sebagai Agen Transformasi Sosial dalam Masyarakat Jawa di*

Semenanjung Malaya Tahun 1900-2000.

Devi Riskianingrum menyumbang artikel berjudul *Selanjutnya Kami Memilih: Kisah-Kisah Etnis Tionghoa Asal Indonesia yang Kembali ke Taiwan 1950-1960an*. Menurut hasil penelitian Devi Riskianingrum pada periode transisi pergantian kekuasaan sejak periode akhir kolonial sampai tahun 1965 telah memberikan pengaruh yang besar terhadap etnis Tionghoa di Indonesia. Perasaan tidak aman, tertindas serta masa depan yang suram menyebabkan mereka harus mempertimbangkan kembali keberadaannya di Indonesia. Setelah kemerdekaan pemerintah membuat kebijakan asimilasi dan integrasi etnis Tionghoa yang cenderung represif. Hal itu berakibat terjadinya tindak kekerasan, baik fisik maupun properti yang mereka miliki. Hasilnya, banyak diantara mereka memilih meninggalkan Indonesia demi keamanan. Kondisi tersebut terus berlanjut sampai akhir periode 1960an. Tulisan tersebut mengambil fokus pada etnis Tionghoa yang kembali ke Taiwan, dengan melihat alasan meninggalkan Indonesia, strategi bertahan serta formasi identitas mereka.

Tulisan lain membahas tentang strategi yang dilakukan oleh para petani yang bergerak bidang budidaya rumput laut dalam usahanya untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Emiliana Sadilah melakukan penelitian tersebut di Kecamatan Talango, Sumenep. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa budidaya rumput laut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sumintarsih mengulas secara rinci tentang usaha gula kelapa yang berada di Kecamatan Cilogok, sebagai sebuah unit usaha ekonomi rumah tangga. Dalam kegiatannya nira menjadi faktor produksi yang penting, selain *penderes* dan *pengindel*. Dalam aspek distribusi, pengepul menjadi pelaku ekonomi yang penting dalam usaha gula kelapa. Sumintarsih menunjukkan bahwa jalinan kerjasama dalam usaha gula kelapa ada pembagian tugas secara jelas, suami sebagai *penderes* dan istri sebagai *pengindel*. Jalinan pertukaran tidak memperhitungkan untung rugi. Namun jalinan pertukaran antara *penderes* dengan *pengepul* tampak adanya eksploitasi. Pemberian pinjaman dan perhatian yang bersifat sosial kemasyarakatan menjadi pengikat antara *pengepul* dengan *penderes*. Dan jalinan seperti itu menjadikan mata rantai hubungan kerja antara *pengepul* dengan *penderes* sulit diputus.

Edisi September ini ditutup dengan tulisan yang membahas tentang dampak pembangunan Suramadu terhadap mobilitas dan kondisi sosial budaya masyarakat. Tulisan dari Ernawati Purwaningsih tersebut mengambil sampel lima keluarga dari Desa Pangpong, Labang, Bangkalan. Hasil penelitian Ernawati Purwaningsih menunjukkan wilayah Desa Pangpong mengalami perubahan pasca pembangunan Jembatan Suramadu. Mobilitas penduduk menjadi lebih bervariasi. Jika tadinya penduduk melakukan mobilitas permanen atau seminggu sekali kini mereka bisa melakukan mobilitas ulang alik. Walaupun daerah Pangpong menjadi lebih terbuka, namun dalam kehidupan sosial budaya tidak mengalami banyak perubahan. Uraian secara lengkap dapat ditemukan dalam artikel yang ditulis Ernawati Purwaningsih.

Ibarat pepatah “tiada gading yang tak retak”, penerbitan jurnal Patrawidya Seri Sejarah dan Budaya Vol. 15 No. 3, September 2014 ini masih ada kekurangannya. Namun begitu kami berharap semoga hasil terbitan ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan buku ini. Selamat membaca.

DEWAN REDAKSI

Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya

- Pengantar Redaksi
- Daftar Isi
- Abstrak
- Baha' Uddin - *Westernisasi* dan Gaya Hidup Bangsawan di Kadipaten Pakualaman pada Masa Paku Alam V (hlm. 341 - 356).
- H. Purwanta - Gerakan Kiri di Klaten: 1950 - 1965 (hlm. 357 - 372).
- Heri Priyatmoko - *Kedaulatan Rakyat* dan *Solopos*: Pilar Kehidupan Bahasa Jawa dan Kebudayaan Lokal Masyarakat (hlm. 373 - 384).
- Lucia Juningsih - Menjadi Melayu: Perempuan Jawa sebagai Agen Transformasi Sosial dalam Masyarakat Jawa di Semenanjung Malaya Tahun 1900-2000 (hlm. 385 - 398).
- Devi Riskianingrum - ... Selanjutnya Kami Memilih Pergi ... Kisah-kisah Etnis Tionghoa Asal Indonesia yang Kembali ke Taiwan 1950-1960an (hlm. 399 - 428).
- Emiliana Sadilah - Strategi Peningkatan Pendapatan Melalui Budidaya Rumput Laut di Kecamatan Talango, Pulau Poteran, Sumenep (hlm. 429 - 452).
- Sumintarsih - Usaha Gula Kelapa : Pertukaran dalam Produksi dan Distribusi (hlm. 453 - 480).
- Ernawati Purwaningsih - Dampak Pembangunan Jembatan Suramadu Terhadap Mobilitas dan Kondisi Sosial Budaya Penduduk (Kasus Lima Keluarga di Desa Pangpong, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan) (hlm. 481 - 504).

WESTERNIZATION AND LIFESTYLE OF THE NOBILITY IN KADIPATEN PAKUALAMAN DURING THE REIGN PAKUALAM V

Baha' Uddin

Abstract

This short article aims to describe the social and cultural impacts that occur in the life of nobles in Vorstenlanden and in the Kadipaten Pakualaman in the late 19th century and early 20th century. This period occurs in Vorstenlanden socio-economic change significantly as more expansive Western capital entered to open the plantation companies who rent lands of the nobles, including Kadipaten Pakualaman. This phenomenon has changed the pattern of the income of the nobility of the results in the form of compulsory labor and tribute from his subjects into cash rental results appanage to Western investors. Changes in income patterns have a major impact on the lives and lifestyles of the nobles. Most the nobles are not prepared to deal with these changes, especially financial management and the impact of their dealings with the West. Generally, they do not realize that the cash he received from the rental yield is the cost of living during the period of the land lease. Interaction with the West has led to more intensive of consumerism and profligacy hit the lives of the nobility. To meet the needs of the nobles then owe it to both the Dutch and the Chinese people.

Keywords: life style, noble, Pakualaman

LEFT MOVEMENT IN KLATEN : 1950 - 1965

H. Purwanta

Abstract

This study aims to understand the left movement in Klaten, Central Java in the period 1950 - 1965. The objective was motivated by concern that the scarcity of historical study for that period. Through studies that are conducted, gradually could be gained a more comprehensive understanding of the national history of Indonesia from 1950 to 1965. The method used is historical method, i.e. collection of sources, criticism, selection, analysis/interpretation and writing. Most of the time and energy used to collect written sources and in-depth interviews with historical actors. Library research was conducted in both off line and online. Interviews were conducted in the home of the history actors at the time agreed. Result of this research is the reconstruction of the left movement in Klaten, which is divided into two parts: background and their activities. In the background, it was found that the left in Klaten have grown in the early days of independence, called the anti self-governing (swapraja). The growth of the left movements in Klaten was supported by the chronic problems: soil and poverty. In the 1950s, the left movement obtained a positive response, especially came from people who are poor and oppressed. In the 1960s leftist movement was intensified and tend to be hard. This was partly driven by attitude of regent who was not willing to implement various national laws and regulations.

Keywords: history, left movement, Klaten, landreform

KEDAULATAN RAKYAT AND SOLOPOS : JAVANESE LIFE PILLAR AND LOCAL CULTURE OF YOGYAKARTA AND SURAKARTA SOCIETY

Heri Priyatmoko

Abstract

Yogyakarta and Surakarta are well known as the Javanese cultural center; mainly because of the Sultanate Palace and Kasunanan Hadiningrat. The various elements of Javanese culture that derive from the palace are channeled to the society, one of them through Javanese press. In the past there was Sedyo Tomo in Yogyakarta, while in Surakarta there were Bromartani, Jurumartani, Retnodumilah, Dharmo Kondho, and others. These newspapers in the past played important role in the preservation of Javanese culture and to give space for local culture lovers which loaded with well spoken (pitutur luhur) as the foundation of personality. In fact now, in the ex-city kingdom contains printed media of the Kedaulation Rakyat which prints 125,000 copies, and Solopos reaches 35,000 copies. Both newspapers provide Javanese pages, which present once a week. In Kedaulation Rakyat is Mekar Sari, and Solopos is Jagad Jawa. The type of column includes articles, cerkak (Javanese short story), macapatan, geguritan (Javanese poem), kawruh Jawa, fairy tales, dhudah buku (book review) and jagad pewayangan (puppet world). This research is important to be done in looking at the extent the work of journalism and the role of the media in an effort to preserve and spread the Javanese culture in urban areas. From this research, it is known that Kedaulation and Solopos through its supplements help improving the role of the Javanese and literature in strengthening local identity of public readers. The supplements of Javanese have many fans especially old people and teachers which contact with the Javanese cultural materials. Those media empower local culture, include looking after of Javanese literature in the threat of modernization. The materials which presented often used for teaching materials to the teachers at schools.

Keywords : Yogyakarta, Surakarta, newspapers, Javanese culture

BECOMING A MALAY : JAVANESE WOMAN AS SOCIAL TRANSFORMATION AGENTS ON JAVANESE SOCIETY IN MALAY PENINSULA 1900 - 2000

Lucia Juningsih

Abstract

In the 1900s, there were a number of Javanese ethnic migrated to the Malay Peninsula. They worked in the rubber plantations and then they also worked in the rubber smallholding owned by the ethnic of Malays. In the rubber plantations, the Javanese laborers worked together with the laborers from Chinese and Indian. They could establish social interaction, but it was difficult for them to adapt because of the differences in cultural and traditions. Meanwhile, the Javanese laborers who worked in the rubber smallholding that belongs to the Malays could interact with the ethnic of Malays because of the similarities in culture, language and religion. In the rubber plantations, they worked for two years. After their work contract finished, most of them went back to Java, some decided to settle in the Malay Peninsula. Those who settled there created some different strategies to build their future; one of the strategies was to be Malay. This study to discuss the problems how and why Javanese women took part in social transformation from ethnic Java to Malays

Keywords: Javanese, Malaynese, adaptation, transformation

... THEN WE SHALL MOVE ...
INDONESIAN CHINESE RETURNING TO TAIWAN 1950s-1960s

Devi Riskianingrum

Abstract

The violent period of transition from the Dutch colonial government to indigenous rule in 1945-1949, the period of democratic trialsthe so-called guided democracy of president Soekarno in 1950sand the following period after failed coup in 1965, made great impact on the Chinese population group in Indonesia. The Chinese minority felt insecure as their future position in the new republic was unclear: were they Chinese nationals, or Indonesian Chinese or Chinese with a Dutch passport? After independence, the Indonesian government, natives and the Chinese minority were not quite ready to face one another. The policies were developed stood on the shaky ground of nationalism and actually created instability. The regulation indicated that neither assimilation and nor integration was the real objective of the government. Numerous suffered the destruction of property, if not physical violence. These unhappy situations encouraged them to seek refuge outside Indonesia. As a result of this, the Chinese exodus occurred to Mainland, Taiwan, European countries and elsewhere. The situation continued until the late 1960s. Focus to those who returned to Taiwan, the paper tries to delve into the motives for leaving Indonesia, the survival strategy, and the form of identity among these people.

Keywords: Indonesian Chinese, migration, survival strategy, and identity.

**STRATEGY OF INCOME IMPROVEMENT THROUGH SEAWEED
CULTIVATION IN TALANGO SUBDISTRICT, POTERAN ISLAND,
SUMENEP**

Emiliana Sadilah

Abstract

In Talango sub-district, Poteran Island, Sumenep, the society is in full swing in cultivating seaweed. This seaweed cultivation activities has been started since the financial crisis began in 1998. For the people of Poteran Island, seaweed cultivation is a novelty, but now it is a part of their economic activities. This study aims to look at the portrait of the seaweed farmers society, describe the seaweed cultivation activities, and to see the contribution of those activities towards the families income. In this study, qualitative method is used and descriptive analysis is presented in narrative form. The results of this study showed that the cultivation of seaweed can increase the income of the people living in Poteran island. Besides seaweed cultivation, the people of the Poteran island have other additional jobs such as dryland farmers, fishermen and livestock. The seaweed cultivation activities has made their lives much better.

Keywords : strategy to increase income , Poteran Island, cultivation seaword.

PALM SUGAR BUSINESS: IN EXCHANGE OF PRODUCTION AND DISTRIBUTION

Sumintarsih

Abstract

Palm Sugar Business in Cilongok Districts is a form of household economy business unit. In its activities, sap becomes a very valuable production factor, besides penderes and pengindel. In Distribution, collectors act as an economic actor who coloring the life of palm sugar business. The research wants to see the description of relation's connection and the exchange of distribution and production which build between penderes-pengepul (collectors) in palm sugar business. The research is using qualitative and exchange perspective (social exchange) methods. Data collecting was done by conducting depth interview, observation, and library studies. The result of the research shows that there are a strict rules for dividing job field in cooperation system of palm sugar business, the husband will act as penderes and wife as pengindel. Exchange connection is a form of cooperation which not considering the benefit and the loss. The exchange connections between penderes and collectors (pengepul) was susceptible of exploitation. Giving loan and other kinds of attention which have social value are what binds the collectors and penderes. This strategy strengthen the collectors position in their society. Loan from the collectors as binder was defined as help by penderes. This possibility is what makes the chain of job relation between penderes and collectors are hard to be break.

Keywords: exchange, penderes, pengepul (collectors), production, distribution

THE IMPACT OF SURAMADU BRIDGE BUILDING TOWARDS SOCIETY'S MOBILITY AND SOCIO-CULTURE CONDITION (CASE OF FIVE FAMILIES IN PANGPONG VILLAGE, LABANG SUB DISTRICT, BANGKALAN DISTRICT)

Abstract

The research have a purpose to make a description about area condition, mobility, and socio-culture of Pangpong village society after the Suramadu bridge was built. This research is using descriptive qualitative analyzing methods. The result of the research shows that Pangpong village area change significantly after Suramadu bridge was built. At first, the village was an isolated area, but now it already have numerous access, facilities such as education, health and trading and another means of economy is already exist. Society's mobility also changed for part of Pangpong village peoples. People who used to have a permanent mobility or every once a week, now change to shuttle mobility. But the socio-culture condition of Pangpong village society has not change significantly. They still regard their tradition and norm highly. Religious life is still important, and scholars still have a significant role in making policy. Change in Socio-community is not to significant, but the modernizations is already happening

Keywords : mobility, socio-culture, Suramadu bridge

WESTERNISASI DAN GAYA HIDUP BANGSAWAN DI KADIPATEN PAKUALAMAN PADA MASA PAKU ALAM V

Baha' Uddin

Jurusan Sejarah, FIB, UGM
e-mail: bahauddin@ugm.ac.id
Hp. 08156878440

Abstrak

Artikel singkat ini bertujuan untuk menggambarkan dampak sosial budaya yang terjadi pada kehidupan bangsawan di Vorstenlanden pada umumnya dan di Kadipaten Pakualaman pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Periode ini di Vorstenlanden terjadi perubahan sosial ekonomi yang sangat signifikan karena semakin ekspansifnya modal Barat masuk untuk membuka perusahaan perkebunan yang menyewa lahan-lahan milik para bangsawan, termasuk di Pakualaman. Fenomena ini telah mengubah pola pendapatan para bangsawan dari bagi hasil dan upeti berupa kerja wajib dari rakyatnya menjadi uang tunai hasil penyewaan tanah lungguh kepada para investor Barat. Perubahan pola pendapatan ini berdampak besar terhadap kehidupan dan gaya hidup bangsawan. Hampir sebagian besar bangsawan tidak siap dalam menghadapi perubahan ini terutama pengelolaan keuangannya dan dampak pergaulan dengan orang Barat. Mereka umumnya tidak menyadari bahwa uang kas yang diterimanya dari hasil sewa itu adalah biaya hidup selama jangka waktu sewa tanahnya. Pergaulan dengan orang Barat yang semakin intensif telah mengakibatkan budaya konsumerisme dan gaya hidup boros melanda kehidupan para bangsawan ini. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya para bangsawan kemudian berhutang baik kepada orang Belanda maupun kepada orang Cina.

Kata kunci: gaya hidup, bangsawan, Pakualaman

WESTERNIZATION AND LIFESTYLE OF THE NOBILITY IN KADIPATEN PAKUALAMAN DURING THE REIGN PAKUALAM V

Abstract

This short article aims to describe the social and cultural impacts that occur in the life of nobles in Vorstenlanden and in the Kadipaten Pakualaman in the late 19th century and early 20th century. This period occurs in Vorstenlanden socio-economic change significantly as more expansive Western capital entered to open the plantation companies who rent lands of the nobles, including Kadipaten Pakualaman. This phenomenon has changed the pattern of the income of the nobility of the results in the form of compulsory labor and tribute from his subjects into cash rental results appanage to Western investors. Changes in income patterns have a major impact on the lives and lifestyles of the nobles. Most the nobles are not prepared to deal with these changes, especially financial management and the impact of their dealings with the West. Generally, they do not realize that the cash he received from the rental yield is the cost of living during the period of the land lease. Interaction with the West has led to more intensive of consumerism and profligacy hit the lives of the nobility. To meet the needs of the nobles then owe it to both the Dutch and the Chinese people.

Keywords: life style, noble, Pakualaman

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana sistem tanam paksa, sistem liberal yang mulai diterapkan pada tahun 1870an oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, juga telah mengakibatkan perubahan sosial ekonomi yang mendasar bagi masyarakat Jawa pada umumnya, tidak kecuali di wilayah Vorstenlanden. Perubahan sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh sistem sewa tanah di Yogyakarta telah mengganggu hubungan-hubungan sosial orang Jawa. Para pemilik *apanage* beserta *bekel* dan *sikep* dibuat saling bermusuhan. Sebaliknya, posisi kepala kampung (desa) dari tanah yang tidak disewakan semakin diperkuat, karena para penyewa tanah berkepentingan dengan fungsi kepala desa itu sebagai mediator untuk memperoleh tenaga kerja dari penduduk setempat.

Perkembangan sistem perekonomian kapitalistik Barat yang menggantikan perekonomian pribumi yang bersifat agraris feodal tradisional ini dukung oleh perkembangan transportasi terutama dibukanya jalur kereta api Semarang-Yogyakarta (1864-1867) (Suryo, 1989: 76). Pertumbuhan penduduk, struktur sosial baru, dan pembaharuan sistem administrasi dan birokrasi pemerintahan kolonial Belanda telah membawa masyarakat Jawa mengalami transformasi sosial dan budaya (Kartodirdjo, 1987: 67). Proses ini terjadi karena kontak secara intensif antar unsur-unsur kebudayaan yang didukung oleh elit birokrat dan elit ekonomi, serta elit pribumi yang lebih mengarah kepada dominasi kebudayaan Barat atas kebudayaan agraris tradisional yang oleh Wertheim dimaksudkan sebagai proses *westernisasi*. (Wertheim, 1999: 35).

Proses ini juga menyebabkan perubahan pada tata nilai, perilaku maupun gaya hidup bagi masyarakat di Jawa. Salah satunya adalah gaya rumah loji yang menjadi *trend* mode arsitektur yang digemari oleh para pejabat pemerintah Indo-Eropa, priyayi modern pribumi, dokter pribumi, priyayi keraton, dan sebagainya. Pengaruh tata cara budaya borjuasi Eropa juga terlihat dari semakin banyaknya makanan kaleng dan impor yang beredar. Oleh karena itu, mulailah dikenal berbagai jenis makanan modern Barat seperti *spekkoek*, *koningskroon*, bolu, biskuit, roti kalengan, *tart*, *beefsteak*, sop, *frikaddel*, sosis, dan sebagainya. (Riyanto, 2000: 52).

Selain makanan, pengaruh budaya Barat dalam kaum elit pribumi adalah minuman keras. Stratifikasi minuman ini beragam, mulai dari kaum elit pribumi hingga rakyat, tergantung dari harga yang ditawarkannya. Pada masa itu telah dikenal pula berbagai minuman keras maupun *soft drink* yang dikemas dalam botol seperti *whiskey*, anggur, *cognag*, *bier*, *bier* hitam, *lemonade*, air Belanda, sari buah, *siroop*, dan sebagainya.

Seperti juga terjadi di wilayah *Vorstenlanden* lainnya, gaya hidup bangsawan di Kadipaten Pakualaman pada periode ini sangat terpengaruh dengan pergaulan ala Barat sebagai dampak dari interaksi dengan orang-orang Eropa di Yogyakarta. Pergaulan dengan orang-orang Eropa dengan gaya hidupnya yang glamour mengakibatkan para bangsawan ini larut dalam kehidupan yang menjurus pada kemewahan dan bahkan bersifat hedonis.

Semua aktivitas dan gaya hidup hedonis bangsawan di Yogyakarta didukung dengan kehadiran gedung *societeit* yang tidak jauh dari keraton sebagai tempat dansa-dansi ala Barat. Akibatnya banyak keluarga Pakualaman pada masa Pakualam V yang kehilangan kewaspadaan dan akhirnya kehidupannya terjerumus pada kesengsaraan. Banyak dari anak-anak bangsawan Pakualaman yang terlantar sekolahnya karena tidak terurus sebab orang tua mereka memikirkan kesenangannya sendiri dan uangnya dihabiskan untuk kesenangan dan kemewahan. (Poerwokoesoemo, 1985: 230).

Dikarenakan uang sewa tanah itu sebagian besar digunakan untuk memenuhi gaya hidup bangsawan yang boros sehingga menyebabkan mereka terlilit banyak hutang. Karena uang hasil sewa itu habis lebih cepat dibandingkan dengan masa sewa tanah yang bisa mencapai 75 tahun. Hal ini sering menimbulkan sengketa diantara debitor dan kreditor. Selain berhutang untuk memenuhi kebutuhan mewah hidupnya para bangsawan Pakualaman juga semakin menekan para *bekel* untuk mendapatkan pendapatan lebih, oleh karena itu dapat dipahami beban hidup yang harus ditanggung oleh para *patuh* dan *sikep* menjadi semakin berat. Untuk memenuhi beban kehidupannya, banyak diantara penduduk yang kemudian menggadaikan barang berharganya kepada penduduk lain, terutama kepada orang Cina.

Bagian penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai dampak dan perubahan sosial dari pertumbuhan liberalisasi yang diterapkan di Jawa pada paruh kedua abad ke-19. Secara khusus mengenai perubahan gaya hidup para elit Pakualaman pada masa Pakualam V beserta

masyarakatnya, terutama ketika kebiasaan hidup bermewah-mewahan itu harus dipenuhi dengan berhutang sehingga memunculkan masalah perdata. Kondisi ini berdampak domino dengan permasalahan serupa pada kehidupan masyarakat di pedesaan. Ada dua pertanyaan penelitian utama yang akan dijawab dalam bagian penelitian ini, *Pertama* bagaimana liberalisasi ekonomi yang terjadi di wilayah Pakualaman berpengaruh terhadap gaya hidup bangsawan. *Kedua* bagaimana dampak dari tuntutan gaya hidup bangsawan terhadap masalah-masalah sosial baik yang di dalam istana Pakualaman maupun masyarakat secara luas.

II. KERANGKA TEORITIS

Sartono, Houben, Kuntowijoyo, dan Wertheim sepakat bahwa pada akhir abad ke-19, dalam masyarakat Jawa telah terjadi transformasi baik ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Houben dan Sartono lebih memilih istilah modernisasi sedangkan Wertheim menggunakan westernisasi untuk menggambarkan perubahan yang sedang terjadi di masyarakat Jawa pada periode itu. Sebenarnya modernisasi yang terjadi pada periode ini merupakan dampak dari diterapkannya liberalisme yang ditandai dengan muncul dan beroperasinya perusahaan-perusahaan swasta asing di Hindia Belanda. Kehadiran perusahaan inilah yang kemudian mendorong dibangunnya jalur transportasi dan komunikasi terutama di Jawa sebagai penopang utamanya. Selain itu, fenomena ini juga telah menimbulkan diferensiasi pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga kerja sehingga telah menyebabkan pertumbuhan demografi yang cukup signifikan. (Kartodirdjo, 1987; Houben, 2002; Kuntowijoyo, 2004; Wertheim, 1999).

Dalam aspek sosial kehadiran orang-orang Eropa ditengah-tengah kehidupan masyarakat Jawa telah memunculkan sebuah tatanan atau struktur sosial yang baru. Selain itu pergaulan yang terjadi antara orang-orang Eropa dengan elit pribumi telah membawa pengaruh masuknya cara hidup Barat kedalam lingkungan istana. Hampir semua aspek kehidupan elit pribumi kemudian meniru gaya hidup Barat sebagai sesuatu yang baru, dimulai dari aspek pakaian, makanan, minuman, dan sebagainya. Perlahan namun pasti, adopsi gaya hidup Barat yang dilakukan oleh para elit istana di Jawa membentuk sebuah budaya baru.

Disisi lain, Houben menjelaskan bahwa secara ekonomi sebenarnya para bangsawan ini mengalami krisis karena berubahnya sistem perekonomian yaitu dari sistem agraris feodal tradisional ke sistem yang bersifat kapitalistik (Houben, 2002: 608). Perubahan ini secara langsung telah mengubah pola pendapatan para elit pribumi dari bagi hasil dan upeti berupa kerja wajib dari rakyatnya menjadi uang tunai hasil penyewaan tanah *lungguh* kepada para investor Barat. Perubahan pola pendapatan para bangsawan yang terjadi sedemikian cepat seiring dengan perubahan sistem perekonomian yang terjadi di Hindia Belanda ini berdampak signifikan terhadap kehidupan bangsawan itu sendiri. Para bangsawan ini mengalami kesulitan dalam memenuhi tuntutan gaya hidupnya yang boros sementara pendapatannya justru berkurang. Oleh karena itu tidak mengherankan, sebagaimana diceritakan Soedarisman, mereka kemudian banyak yang terlilit masalah hutang untuk mencukupi kehidupannya baik dengan orang-orang Eropa maupun Cina. (Kantor Arsip Daerah, 2008: xviii).

III. KEHIDUPAN BANGSAWAN DI VORSTENLANDEN

Pada pertengahan abad ke-19 di wilayah *Vorstenlanden*, kehidupan raja-raja, para bangsawan, dan priyayi tingkat atas menganut gaya hidup yang mengutamakan status

sosialnya. Sikap ini kemudian menyebabkan mereka mengeluarkan uang lebih besar dari pendapatannya, akibatnya banyak diantara mereka yang kemudian terlilit hutang cukup banyak. Di Surakarta, pasca Perang Dipanegara, hutang raja dan pembesar di kraton Surakarta semuanya berjumlah f 1.194.787,17. Bangsawan yang termasuk mempunyai hutang besar adalah Pangeran Purbaya yang dikemudian hari menjadi Paku Buwana III. Selain itu juga disebut bangsawan-bangsawan lain yang mempunyai hutang tidak kalah besarnya antara lain Mangkunegara III, Pangeran Buminata, Pangeran Hangabei, K.R Adipati Sasradiningrat II, dan R. Ng. Wirakusuma (Soeratman: 1989, 105).

Di Kadipaten Mangkunegaran, masa pemerintahan Mangkunegara V merupakan masa yang sangat sulit bagi perkembangan perekonomian Mangkunegaran. Kesulitan-kesulitan tersebut antara lain disebabkan oleh buruknya manajemen keuangan oleh Mangkunegara V, gaya hidup mewah yang diterapkan raja, keluarga dan para kerabat Mangkunegaran. Pola hidup senang mewah dan hedonis Mangkunegara V tersebut menyebabkan terjadinya pemborosan keuangan. Di Kesultanan Yogyakarta, kehidupan Hamengku Buwono IV juga dikenal dengan gaya hidupnya yang mewah. Bahkan pada masa pemerintahannya, raja ini memasukkan aktivitas baru dan asing ke dalam kraton.

Selain dikarenakan gaya hidup yang boros para bangsawan di *Vorstenlanden* yang menyebabkan menumpuknya hutang raja, pangeran, dan para pembesar kraton itu pada beberapa aspek juga karena disebabkan oleh peraturan Gubernur Jenderal Van Der Capellen (1818-1826) mengenai sewa menyewa tanah. Peraturan yang dikeluarkan secara mendadak mengenai larangan penyewaan tanah kepada para pengusaha Eropa dan Cina (1823) itu mengakibatkan timbulnya kebingungan baik pada para pengusaha asing maupun pada mereka yang menyewakan tanah. Untuk memenuhi tuntutan para penyewa mengenai kembalinya uang muka dan seluruh biaya untuk perbaikan lahan, yang disertai dengan perhitungan sangat mahal, maka pemilik tanah itu terpaksa juga harus mencari pinjaman uang dengan bunga yang cukup tinggi.

Pengeluaran kraton untuk kepentingan pesta dan rekreasi memakan biaya yang cukup besar. Raja-raja Jawa baik di Surakarta maupun Yogyakarta pada waktu itu terkenal dengan mewahnya penyelenggaraan pesta-pesta perkawinannya. Di Surakarta Paku Buwono VII dan IX dikenal dengan penyelenggaraan pesta-pesta perkawinannya yang sangat mewah dan memakan banyak biaya. Sesudah dilangsungkannya upacara pernikahan, pada malam harinya diadakan pesta besar-besaran dengan mengundang para pembesar yang kemudian disertai dengan acara dansa (Soeratman: 1989, 107).

A. Kehidupan Bangsawan di Kadipaten Pakualaman

Perjanjian Giyanti yang terjadi pada tanggal 13 Februari 1755 menjadikan wilayah Kerajaan Mataram terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Pada tahun 1757, sebagai akibat dari Perjanjian Salatiga, wilayah kekuasaan Kasunanan Surakarta dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran. Sementara itu, kehadiran Inggris di tanah Jawa menyebabkan wilayah kekuasaan Kasultanan Yogyakarta juga terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Keempat wilayah *Vorstenlanden* itu masing-masing dipimpin oleh penguasa *Vorstenlanden* itu sendiri, yaitu Sultan, Sunan dan Adipati.

Keberadaan Kadipaten Pakualaman merupakan yang termuda dari keempat kraton yang berada di Jawa bagian tengah ini. Seperti halnya dengan wilayah Mangkunegaran di Solo, yang didirikan oleh dinasti Paku Buwono yang lebih muda, wilayah Pakualaman adalah kerajaan terpisah dari Kesultanan Yogyakarta. Walaupun terpisah dan merdeka mereka tetap mengakui kesenioran Kraton Yogyakarta Hadiningrat.

Sistem pemerintahan dalam Kadipaten Pakualaman mirip sekali dengan sistem pemerintahan di kraton, hal ini dikarenakan Pakualaman muncul dari sebagian wilayah kasultanan dan para penguasanya masih sedarah dengan para kerabat kraton. Wilayah Kadipaten Pakualaman sendiri terdiri dari Kabupaten Brosot ditambah sebagian kecil wilayah Ibukota Yogyakarta, yaitu di daerah yang teletak di timur sungai Code yang menjadi tempat kediaman Sri Paku Alam I. Tempat tersebut dijadikan sebagai pusat pemerintahan bagi Kadipaten Pakualaman atau sering disebut dengan Puro Pakualaman. Sementara Kabupaten Brosot sendiri terdiri dari empat distrik yaitu Galur, Tawangrejo, Tawangsoaka, dan Tawangkarto.

Wilayah Kadipaten Pakualaman yang berada di daerah kota atau sekitar Puro Pakualaman merupakan daerah dataran rendah. Daerah tersebut berbatasan langsung dengan wilayah kasultanan Yogyakarta dari berbagai arah. Wilayah Pakualaman yang lainnya berada jauh dari wilayah Yogyakarta, yaitu ada di sebagian wilayah di Kulon Progo dan berbatasan dengan wilayah-wilayah yang masuk dalam kekuasaan Yogyakarta namun berada di wilayah Adikarto.

Dalam konteks sosial, sebagaimana di wilayah kerajaan lainnya di Jawa, masyarakat di Pakualaman secara garis besar terbagi dalam dua golongan besar yaitu golongan atas yang terdiri dari kaum bangsawan dan priyayi, serta golongan bawah yang terdiri dari para petani, buruh, pedagang, tukang, dan lain-lain. Mereka ini disebut juga *wong cilik*. Bangsawan adalah golongan sosial atas yang memiliki hubungan genealogis dengan raja, mereka adalah *sentono* atau keluarga raja. Sementara priyayi, yang meskipun juga termasuk dalam golongan atas, namun kedudukannya di bawah kaum bangsawan, merupakan pejabat dalam pemerintahan yang diangkat dari kalangan rakyat biasa (Soemardjan: 1984, 26). Mereka bekerja di dalam jaringan pemerintahan kerajaan yang kemudian disebut dengan istilah *natapraja*.

Abdi dalem Natapraja di Pura Pakualaman terdapat 3 golongan yaitu:

1. Golongan *Pangreh Praja* merupakan abdi dalem yang bertugas di Praja Kadipaten dan disebut sebagai abdi dalem Bupati-Patih.
2. Golongan *Suragama* merupakan abdi dalem yang diberi kekuasaan sebagai Pengulu dan bertugas dalam bidang keagamaan.
3. Golongan *Reh Njero* merupakan abdi dalem yang bertugas untuk memenuhi keperluan Pura Pakualaman, dengan pangkat Wedana. Golongan abdi dalem ini dibedakan menjadi 8 yaitu: golongan Reksawibawa, Reksasumbaga, Reksawahana, Reksawarstra, Langenpraja, Keparak, Punakawan, dan Narakarya (Moestika: 1941, 9).

Sementara itu kelas *wong cilik* atau orang biasa merupakan suatu kelas yang pada umumnya terpisah secara sosial dari kelas lain. Sesuai dengan namanya, kelas itu dibebani dengan kewajiban dan hanya memiliki sedikit hak. Keseluruhan dari kelas *wong cilik* status sosial dan ekonominya dan juga peranan dan fungsinya sangat diperhitungkan berdasarkan kepemilikan atas tanah dan diidentikkan dengan sebutan *kuli*. Di Kadipaten Adikarto, oleh Jonkers (1936, 326-327) *kuli* diklasifikan kedalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah *kuli kenceng* yang menunjuk pada penduduk desa yang memiliki rumah sendiri, sawah, tegalan, atau pekarangan. Sementara kelompok yang kedua adalah *kuli indung*, kelompok ini dibagi lagi menjadi dua kelompok yaitu *kuli indung gandok* yang merujuk pada penduduk desa yang tidak memiliki sawah tetapi memiliki rumah diatas tanah milik orang lain. Kelompok kedua dari *kuli indung* disebut dengan *kuli indung tlosor* yang merujuk pada penduduk pedesaan yang tidak mempunyai rumah maupun sawah dan hidupnya hanya menumpang pada keluarga lain dan bekerja untuk keluarga yang ditumpangnya itu sebagai imbalannya.

Selain tanah yang menjadi faktor utama penentu tinggi rendahnya status sosial dan ekonomi penduduk di pedesaan, faktor jabatan atau pekerjaan juga menentukan hal itu. Dalam konteks masyarakat agraris, seorang kepala desa (*lurah*) beserta para aparat pembantunya (*pamong desa*) memiliki *prestige* yang relatif tinggi. Selain itu ada beberapa profesi yang dianggap terhormat dalam kehidupan sosial di pedesaan yaitu guru dan pedagang besar. Status sosial ini akan nampak pada pertemuan-pertemuan atau pesta yang diadakan di pedesaan. Mereka yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi biasanya diberi tempat duduk di barisan depan, semakin ke belakang tempat duduk itu berarti semakin rendah status sosial dan ekonominya.

Pangeran Natakusuma (Paku Alam I) menduduki tahta Pakualaman mulai 17 Maret 1813 sampai dengan tahun 1829. Setelah itu hingga tahun 1858 tahta Kadipaten Pura Pakualaman diperintah oleh puteranya, Pangeran Natadiningrat (Paku Alam II). Selanjutnya, dari 1858 hingga 1864 tahta Pakualaman dipegang oleh Pangeran Surya Sasraningrat (Paku Alam III). Hasil perkawinannya dengan permaisurinya Paku Alam III mempunyai dua orang putera, yaitu Suryaningrat dan Sasraningrat. Kanjeng Pangeran Arya (KPA) Suryaningrat adalah putera tertua Paku Alam III atau berkedudukan sebagai putera mahkota yang berhak menggantikan kedudukan ayahnya untuk selanjutnya menjadi Paku Alam IV. Namun menjelang dewasa beliau terserang penyakit mata hingga akhirnya menjadi tuna netra. Dengan kondisi seperti itu maka tidak memungkinkan untuk naik tahta karena dalam tradisi Jawa tidak diperbolehkan seorang raja mengalami cacat fisik ataupun mental (Budiawan: 2006, 23).

Oleh karena itu maka sebagai pengganti Paku Alam III diangkatlah Raden mas Natanigrat, yang kemudian setelah menjadi Paku Alam IV bergelar KGPAA Suryo Sasraningrat yang memerintah dari tahun 1864 sampai dengan 1878. Berbeda dengan kehidupan bangsawan di Pura Pakualaman pada masa-masa sebelumnya. Kehidupan Paku Alam IV di kalangan keluarga Pakualaman dikenal dengan kehidupannya yang bersifat glamour dan mewah. Berbagai pesta untuk mengangkat kebesarannya seolah-olah telah menjadi bagian rutin dari kehidupan sehari-hari terutama di lingkungan bangsawan Pakualaman pada masa itu.

Sebagai akibat dari gaya hidup bangsawan di Pura Pakualaman pada masa Paku Alam IV ini maka anggaran pengeluaran keraton selalu lebih besar dari pendapatan yang diterimanya pada setiap tahunnya. Keadaan ini kemudian menyebabkan terjadi defisit anggaran Kadipaten Pakualaman. Naskah *Ringkesanig wawaton (patakon punten)* bahkan menyebutkan dalam masa pemerintahan Paku Alam IV ini hampir mengalami kekosongan kas anggaran. Walaupun kondisi keuangan Kadipaten Pura Pakualaman sudah menghawatirkan namun tidak mampu menghalangi dan mengurangi gaya hidup hedonis dan glamour yang dipraktekkan oleh bangsawan Pakualaman yang dipelopori oleh Paku Alam IV sendiri. Pesta-pesta tetap dilakukan secara rutin sementara pemasukan dan kas yang dimiliki oleh Pakualaman semakin menipis.

Seperti juga yang terjadi di wilayah *Vorstenlanden* lainnya, kondisi diatas kemudian mendorong para bangsawan Kadipaten Pura Pakualaman pada masa Paku Alam IV untuk berhutang terutama kepada pemerintah Hindia Belanda, lembaga keuangan milik Belanda, ataupun para pengusaha Belanda untuk memenuhi kebutuhan dari gaya hidupnya. Bahkan Paku Alam IV berani berhutang kepada Belanda dengan bunga antara 15-30% per tahunnya (Dewantara: 1967, 345).

Pada masa Paku Alam IV ini pergaulan antara bangsawan Pakualaman dengan orang-orang Belanda semakin lama semakin erat. Dari pergaulan yang erat dengan orang-orang Belanda ini kemudian berdampak pada peniruan gaya hidup ala Barat oleh para pangeran dan

bangsawan di Kadipaten Pakualaman. Gejala-gejala mengadopsi budaya Barat atau westernisasi di Kadipaten Pakualaman mulai tampak pada masa Paku Alam IV ini. Hal itu bisa dilihat dengan mulai banyaknya keluarga Pakualaman yang ingin meniru kebiasaan-kebiasaan orang-orang Belanda dengan hidup berfoya-foya, minum bir sampai mabuk dan sebagainya (Soedarisman: 1985, 227) Kebiasaan minum-minum bagi keluarga Pakualaman pada masa Paku Alam IV ini secara jelas terekam dalam secara kultural dalam tarian *beksan inum kakung*¹ dan *beksan schermen*.²

Gaya hidup mewah dan hedonis yang berlangsung pada masa pemerintahan Paku Alam IV ini telah menyebabkan mundurnya kehidupan bangsawan di kalangan Kadipaten Pakualaman. Hal itu bisa dilihat dari mulai terlantarnya pendidikan anak-anak bangsawan Pakualaman dan keadaan mereka yang mulai tidak terurus. Fenomena ini merupakan akibat dari perilaku para bangsawan yang menjadi orang tua mereka yang kehidupannya lebih memikirkan kesenangannya sendiri dan menghabiskan uangnya bukan untuk kesejahteraan keluarga dan anak-anaknya melainkan berfoya-foya. Harian Belanda *De Locomotief* menggambarkan situasi kehidupan bangsawan Pakualaman pada masa itu. Menurut surat kabar itu tujuan kehidupan bangsawan Pakualaman pada masa itu tidak lain adalah *Wein, Weib und Gesang* atau minum, perempuan, dan menyanyi (*De Locomotief*, 6 November 1900).

Suasana kehidupan bangsawan pada masa pemerintahan Paku Alam V mewarisi gaya dan pola kehidupan dari Paku Alam IV yang dalam keadaan *sengkala* dan menghadapi banyak kesulitan, rintangan dan gangguan yang diakibatkan oleh gaya hidup bangsawan Pakualaman yang bersifat mewah dan hedonis. Secara umum gaya dan pola hidup bangsawan pada masa pemerintahan Paku Alam V belum berubah seperti pada masa Paku Alam IV. Kesulitan yang dihadapi oleh Paku Alam V dalam mewarisi kondisi keuangan Pura Pakualaman yang defisit seperti diceritakan dalam *Ringkesaning Wawaton* berikut ini:

"Ing sasampoening djoemenengdalem Kandjeng Goesti kaping V ing ngrikoe ladjeng kaboekten, jen Pradja Pakoelaman sadjatosipoen panjen nedeng ngalami reribet ingkang kasababaken saking borosing kahartakan, saengga ngantos dados kalangkaboeting kawontenan, dados toemrapping ngarsadalem Kandjeng Goesti kaping V, poenika kenging kawastanan nampi ampasing kaprihatosan, katingal njedihaken..." (Ringkesaning Wawaton, tt, xi).

Namun kepribadian Paku Alam V ternyata yang sangat berbeda dengan Paku Alam IV sehingga memberi warna lain pada pola kehidupan di Pura Pakualaman pada saat itu. Jika Paku Alam IV mempraktekkan gaya hidup boros dan glamour, gaya hidup sebaliknya justru dipraktekkan oleh Paku Alam V yang mengedepankan prinsip hidup sederhana. Pola hidup sederhana keluarga Paku Alam V terlihat pada prinsip-prinsip kebijakan dalam mengelola Pura Pakualaman, yaitu:

1. mengadakan penghematan dalam pengeluaran Kadipaten Pakualaman.
2. mencegah segala pengeluaran yang dianggap tidak perlu.
3. memberi pendidikan kepada putera-puteri dari keluarga *dalem*.

Garis kebijakan yang ditempuh oleh Paku Alam V membawa konsekuensi terhadap kehidupan pribadi dan keluarganya sehari-hari. Keluarga Paku Alam V terpaksa harus mengurangi biaya untuk makan sehari-hari dan membeli pakaian agar bisa menghemat biaya

¹ Tari ini ditampilkan oleh empat orang laki-laki dengan kelengkapan tari berupa dua botol khusus berisi minuman dan dua gelas khusus untuk minum minuman beralkohol. Tari ini menggambarkan para lelaki yang sedang merayakan suatu peristiwa penting dengan cara minum bersama atau bersulang (*toast*). Di Kasultanan Yogyakarta, tarian serupa juga ditemukan bernama *Beksan Sekar Madura* atau *Beksan Gendul*. Lihat Atika Suryodilogo dkk, *Warnasari Sistem Budaya Kadipaten Pakualaman Yogyakarta*. Jakarta: Hudyana, 2012, hlm. 79.

² Jika *Beksan Inum Kakung* diyakini sudah ada pada masa sebelum pemerintahan Paku Alam IV, maka *Beksan Schermen* dan juga *Beksan Floret* diciptakan oleh Paku Alam IV. Keduanya dengan jelas mengadopsi budaya Barat, *Beksan Schermen* merupakan stilisasi tari-tarian Eropa, sedangkan *Beksan Floret* diciptakan berdasarkan pengamatan Paku Alam IV ketika melihat opsir-opsir Belanda yang berlatih menggunakan jenis pedang floret. Selain pedang floret, adopsi budaya Eropa juga terlihat pada pakaian penari atau prajurit Paku Alam yang sangat kental dipengaruhi oleh Eropa.

untuk keperluan pendidikan anak-anaknya. Paku Alam V justru dikenal sebagai sosok yang gemar bertapa (ahli lampah). Setelah menjadi Paku Alam V, dia masih senantiasa melakukan tapa-brata dan tidak pernah mempraktekkan hidup berfoya-foya, hedonis, dan mewah. (*Ringkesanig wawaton (patakon punten*), xiii).

Kebiasaan Paku Alam V yang selalu dilakukan pada setiap pagi atau sore hari adalah memeriksa keadaan, baik yang ada di dalam maupun di luar Puro Pakualaman. Untuk itu Paku Alam V hanya meminta dikawal oleh beberapa orang *sentono* dan *punokawan*. Sembari memeriksa keadaan, Paku Alam V membawa kursi, payung, tempat rokok, dan *upet* (Poerwokoesoemo: 1985, 242). Kursi yang dibawa akan dipakai duduk sewaktu-waktu ketika istirahat sembari memberi wejangan kepada para *sentono* dan *punokawan* yang mengiringinya mengenai hal-hal yang harus segera dikerjakan oleh mereka seperti membersihkan tempat-tempat yang kotor di lingkungan Puro Pakualaman. Kesederhanaan kehidupan Paku Alam V juga tercermin dari jamuan makan yang setiap hari disuguhkan kepadanya. Di meja makannya tidak terhidang makanan-makanan mewah.

Kesederhanaan hidup yang dijalankan oleh Paku Alam V dan keluarga intinya setidaknya dapat dilihat dari 2 fenomena. Fenomena pertama berupa realitas sejarah yaitu ketika puteranya yang ke-11, R.M. Notowiroyo, yang sedang menempuh pendidikan di Amsterdam Belanda menderita penyakit TBC. Setelah mendapatkan perawatan medis di negeri Belanda kondisi R.M. Notowiroyo tidak mengalami perubahan yang berarti. Oleh karena itu R.M. Notowiroyo kemudian dibawa ke Swiss untuk mendapatkan perawatan kesehatan di sebuah sanatorium. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan dengan maksimal namun ternyata takdir berkehendak lain, R.M. Notowiroyo akhirnya meninggal dunia di Swiss (Poeze, 2008: 152).

Karena keterbatasan biaya dan dana yang dimiliki oleh Paku Alam V, kematian anaknya ini kemudian menjadi sebuah kisah yang sedikit menyedihkan, jika dihubungkan dengan status sosialnya sebagai salah seorang pangeran dari *Vorstenlanden*. Selama lebih kurang empat hari jenazah R.M. Notowiroyo tidak ada yang mengurusnya dikarenakan tidak ada satu pihakpun, baik di Swiss maupun di Belanda, yang bersedia bertanggung jawab. Diduga wali R.M. Notowiroyo tidak berbuat apapun karena tidak mendapatkan kiriman biaya pengurusan jenazah dari keluarga Puro Pakualaman.

Kematian R.M. Notowiroyo ini kemudian menjadi berita besar di kalangan perhimpunan mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di Belanda, khususnya di Leiden. Akhirnya, mereka melaporkan kejadian tragis itu kepada Abendanon yang dengan segera kemudian menuju Swiss untuk mengurus administrasi kematian R.M. Notowiroyo. Berkat jasa Abendanon, jenazah R.M. Notowiroyo kemudian berhasil dikuburkan di Swiss (Rivai, 2000: 7). Peristiwa kematian R.M. Notowiroyo ini menunjukkan bahwa krisis finansial yang dihadapi oleh Kadipaten Pakualaman belum sepenuhnya dapat diatasi pada masa pemerintahan Paku Alam V.

Fenomena kedua berupa fakta tekstual yang tergambar dengan jelas dalam Naskah *Baratayudha* koleksi Puro Pakualaman. Teks ini disalin oleh Jayengutara atas prakarsa Paku Alam V. Awal penyalinan dilakukan pada 27 Januari 1890 dan berakhir pada 28 Juni 1890. Terdapat gambar 16 *widana* dengan nama *ringgan*-nya dan sejumlah *riringgan* wayang, serta lukisan realis untuk menggambarkan persiapan pasukan perang dan bangunan-bangunan beteng.

Konteks yang berhubungan dengan penggambaran kesederhanaan kehidupan Paku Alam V adalah *riringgan* tentang persiapan perjamuan makan pada adegan Kresna Duta. Pada *riringgan* adegan persiapan perjamuan makan yang terdapat dalam naskah *Baratayuda* pada

masa Paku Alam V. Divisualisasikan dalam naskah *Baratayuda* masa Paku Alam V lebih sederhana jika dibandingkan dengan naskah yang sama pada masa Paku Alam II. Pada masa Paku Alam V digambarkan pada meja jamuan makan hanya ada 18 porsi sedangkan pada masa Paku Alam II terdapat 29 porsi. Selain itu menu yang dihidangkan juga sangat berbeda, jika pada masa Paku Alam II setiap porsi selalu dilengkapi dengan botol minuman sedangkan pada masa Paku Alam V hanya dilengkapi sebuah gelas kosong (Saktimulya, 2014).

B.Faktor-faktor Pendukung

Tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena hidup mewah dikalangan para bangsawan di *Vorstenlanden* ini selain untuk menunjukkan status mereka yang tinggi juga disebabkan karena adanya invasi ekonomi moneter yang mulai terjadi pada pertengahan abad ke-19 di Jawa. Uang tunai dalam jumlah besar yang masuk ke kantong para raja dan bangsawan pemegang tanah *lungguh* dalam bentuk sewa-sewa dan kompensasi ekstra sebagai imbalan atas layanan-layanan yang menjadi hak mereka telah mengubah sebagian besar pola kehidupan ekonominya. Apalagi sejak tahun 1857 raja berhak atas pajak stempel yaitu sejumlah uang yang diterima untuk tiap-tiap kontrak sewa yang disetujui. Maka dengan banyaknya kontrak yang diloloskan untuk tiap-tiap pengusaha semakin besar jumlah pajak stempel yang diterimanya (Houben:1994, 61).

Para bangsawan pemegang tanah *lungguh* yang menyewakan tanahnya kepada para pengusaha Eropa memiliki penghasilan yang lebih besar dalam bentuk uang jika dibandingkan dengan masa sebelumnya. Sebelumnya dari tanah *lungguh* yang dikuasainya para bangsawan ini mendapatkan penghasilan 2 kali dalam setahun dalam bentuk barang. Dengan sistem sewa tanah ini para bangsawan mendapatkan pendapatan yang sama sekali baik dalam bentuk maupun jumlahnya. Pada tahun 1850 dengan sistem sewa tanah, para pemilik tanah *lungguh* bisa mendapatkan uang sewa sebesar f 130.000 sementara dengan sistem lama mereka tidak akan bisa mendapatkan uang sebanyak f 40.000 dari *bekel*. Pada tahun 1875 di wilayah *Vorstenlanden* terdapat total 331.746 bau yang disewakan dengan total nilai sebesar f1.242.130 (Zuidhollander, 1851: 440).

Fenomena yang kemudian terjadi adalah terjadinya perubahan pola dan bentuk pendapatan para bangsawan yang kemudian tidak disertai dengan sistem pengelolaan keuangannya yang baru. Hal ini diperparah dengan pergaulan para bangsawan yang intensif dengan orang-orang Belanda telah menyebabkan mereka harus menjalani pola kehidupan yang boros. Jika pada masa sebelumnya mereka bisa mengelola pendapatannya yang tidak terlalu besar dan diterima setiap tahun, sehingga mereka juga bisa melakukan perencanaan dan pengeluarannya secara teratur pula. Namun dengan sistem sewa tanah pendapatan para bangsawan ini berubah total, mereka tidak lagi menerima bagi hasil dan upeti berupa kerja wajib dari rakyatnya pada tiap tahun melainkan menerima uang tunai dalam jumlah yang besar sebagai uang sewa tanah *lungguh* untuk jangka waktu tertentu.

Hal yang kurang mendapatkan perhatian dari para bangsawan ini ketika mendapatkan uang sewa itu adalah, bahwa pendapatan besar yang diterimanya itu adalah untuk sewa tanah dalam jangka waktu yang panjang misalnya 10 atau 15, 20, bahkan 25 tahun. Sehingga seharusnya uang sewa yang diterimanya itu juga baru dihabiskan sesuai dengan jangka waktu sewa tanah itu. Dampak yang timbul ketika terdapat perubahan pola pendapatan para bangsawan di *Vorstenlanden* adalah gaya kehidupannya yang cenderung konsumtif karena merasa memiliki uang tunai dalam jumlah besar. Hal inilah sebenarnya yang mendorong gaya hidup boros yang banyak dipraktekkan oleh para bangsawan Jawa yang diperparah dengan tidak adanya budaya menabung. Sehingga tidak mengherankan ketika waktu penyewaan tanah masih berlangsung lama namun uang hasil sewa tanah itu sudah habis. Kondisi inilah juga menjadi penyebab sebagian besar para bangsawan berhutang untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya.

Aspek lain yang juga andil mendukung keberlangsungan gaya hidup mewah para bangsawan Jawa adalah dibangunnya transportasi modern terutama kereta api. Proyek pembangunan jalur kereta api pertama di Hindia Belanda diterapkan pada jalur yang menghubungkan Semarang dengan *Vorstenlanden*. Konsesi pembangunan tersebut diberikan oleh pemerintah kepada pihak swasta, yakni NISM (*Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij*) pada tahun 1862 dan selesai pada tahun 1872 (Wardojo, 2012: 75).

Pembangunan sistem kereta api tidak bisa dipungkiri telah memudahkan akses dari pedalaman ke pelabuhan untuk mengekspor hasil produksi dan juga sebaliknya mengimpor barang-barang mewah konsumtif dari luar negeri untuk dinikmati elit pribumi. Hal tersebut memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja ekspor dan dampak sosial-ekonomi lain seperti kemudahan akses, kemudahan perpindahan manusia dan sebagainya. Terhubungnya secara langsung wilayah *Vorstenlanden* dengan Semarang pada sisi yang lain bisa dimaknai sebagai salah satu sarana pendukung terjadinya pola hidup hedonis yang dipraktekkan oleh orang-orang Belanda dan juga oleh para bangsawan.

Impor barang melalui pelabuhan Semarang pada dekade kedua abad ke-19 sebagian besar didominasi oleh barang-barang konsumsi (*consumer goods*), termasuk didalamnya antara lain tepung, susu, gandum, keju, tekstil, dan pakaian. Salah satu barang konsumsi impor yang mendukung berlangsungnya gaya hidup para bangsawan ini adalah minuman keras atau arak. Jumlah arak yang diimpor dari Hongkong melalui pelabuhan Semarang ini dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan yang signifikan pada akhir abad ke-19, dari awalnya hanya 313 liter/tahun menjadi 1683 liter/tahun dan pada menjelang abad ke-20 menjadi 5.311 liter/tahun. Sementara itu untuk komoditas anggur (*wine*) yang diimpor dari Singapura jumlahnya stabil kurang lebih 278 liter/tahun (Overzicht: 1900). Memang tidak ditemukan data pasti mengenai konsumsi minuman-minuman impor ini dikalangan bangsawan pribumi terutama di *Vorstenlanden*, namun diyakini bahwa pada periode itu minuman-minuman impor ini merupakan konsumsi kalangan masyarakat elit baik berasal dari kalangan Eropa maupun pribumi. Selain masalah akses, harga minuman arak dan *wine* impor ini jelas diluar jangkauan kemampuan masyarakat umum.

C. Krisis Finansial dan Hutang Para Bangsawan Pakualaman

Seperti sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, sebagai dampak dari gaya hidup konsumtif dan mewah, maka para bangsawan di *Vorstenlanden* secara umum akhirnya berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di Kadipaten Pakualaman secara umum telah menimbulkan krisis finansial dalam konteks makro sedangkan dalam konteks mikro kondisi ini menimbulkan permasalahan serius dalam ekonomi rumah tangga para bangsawan karena untuk menutup defisit keuangannya mereka kemudian berhutang.

Gambaran krisis finansial yang sedang dialami pada masa pemerintahan Paku Alam V tergambar jelas pada surat yang ditulis oleh K.P.H. Notodirojo (anak Paku Alam V) melalui surat yang ditujukan kepada anak-anaknya yang sedang menempuh pendidikan di negeri Belanda. Surat itu kurang lebih berbunyi sebagai berikut: "Oh anak-anakku, kalian pasti tak bisa membayangkan seperti apa keadaannya ketika aku mulai bertugas di Kadipaten. Bahkan sebagian besar kebutuhan pokok kami tak punya. Bayangkan, ketika eyang kalian ingin mengadakan resepsi atau pesta, kami selalu harus meminjam kursi, lampu, gelas, dan sebagainya, dari sana-sini agar dapat menjamu tamu..." (Sudibyo, 2011 : 21 22).

Salah satu strategi untuk bertahan dalam kondisi krisis finansial maka dilakukan pengurangan jumlah *abdi dalem* yang bersifat untuk kepentingan pribadi bagi Paku Alam V seperti diceritakan dalam *Ringkesaning Waweton* berikut ini:

"*Tumrap ing ngarsadalim Kanjeng Gusti kaping V, botèn patos kaparing nyilakakèn abdi ingkang ngantos kathah, mila abdi ingkang kacilakakèn wontin ing ngarsadalim bakunipun namung situnggal, makatèn ugi tumrap K.P.A. Notokusumo. Nanging tumrap K.P.A. Notodirojo abdinipun lare jalir kathah sangit ...*" (Ringkisaning Wawaton, t.t. : xxiii).

Sementara itu dalam hal berhutang terdapat 2 pola yang dilakukan oleh bangsawan di Pakualaman berhutang, sesuai dengan status sosialnya:

1. Raja, pangeran dan bangsawan keluarga raja berhutang dalam jumlah yang besar kepada pemerintah, lembaga, atau perusahaan milik Belanda.
2. Para bangsawan dengan golongan bawah berhutang dalam jumlah yang tidak besar kepada para pengusaha Cina.

Dalam arsip koleksi Pura Pakualaman banyak ditemukan mengenai hutang piutang karena baik berupa perjanjiannya maupun berupa proses verbal. Beberapa diantaranya adalah:

1. Pada tahun 1877, Paku Alam IV meminjam uang sebesar f73.000 kepada pihak *Venoot* di Semarang dan akan dilunasi selama waktu sebelas tahun dengan bunga 6% (*Arsip Pakualaman*, No. 1741). Setiap tahun hutang ini dicicil sebesar f 4000 (*Arsip Pakualaman*, No. 1288).
2. Pada tahun 1880 PA V meminjam uang kepada Tuwan J.B. Van der Els sebanyak f4000 rupiah gelo (*Arsip Pakualaman*, No. 4135).
3. Pada tahun 1881 Tumenggung Sasropranoto (bekas Patih Pakualaman) yang digugat oleh H.C. van Oosterzee karena mempunyai hutang sebesar f18000 dan baru membayar f 17000 (*Arsip Pakualaman*, No. 858).
4. Pada tahun 1884 KGPAA Suryodilogo meminjam uang kepada Hendrik Boomgaarten dan kepada Oosterzee sebesar f40.000 (*Arsip Pakualaman*, No. 4160).
5. Pada tahun 1884, KPH Pakuningprang meminjam uang sebanyak 4700 rupiah putih (petak), kepada Tuwan Zoeshler dengan cicilan tiap bulan mulud atau puasa (siyam) sebanyak 200 rupiah putih (*pethak*). (*Arsip Pakualaman*, No.4161).
6. Pada tahun 1887, KPH Pakuningprang meminjam uang kepada J.W.S Zoeshler sebanyak f5000 rupiah perak, dengan perjanjian akan membayar dengan cara mencicil pada tiap bulan puasa mulud sebesar f400 rupiah perak dan mulai membayar pada bulan puasa tahun 1810 atau Agustus 1881 sampai lunas pinjaman. Namun ternyata janji PKH Pakuningprang tidak ditepati terbukti J.W.Zoeshsler kemudian mengirim surat kepada K.P.A.A.Prabu Suryadilaga untuk membayar hutang KPH Pakuningprang, karena KPH Pakuningprang tidak menepati janji dengan hutangnya, baru membayar f.500 dan selanjutnya tidak mengansur hutangnya pada tiap bulannya. (*Arsip Pakualaman*, No.4182).
7. Pada tahun 1890 Pangeran Adipati Arya Suryadilaga V berhutang kepada Nyonya Hendrik Boomgarten, sebanyak 42000 rupiah gelo, dan sanggup membayar bunga uang, setiap uang 100 rupiah gelo bunganya 1 rupiah gelo setiap bulannya (*Arsip Pakualaman*, No. 1749).
8. Pada tahun 1894, Ngabehi Ranareja berhutang uang kepada Ang Hun Gun sebanyak 25 gelo, dengan perjanjian akan memberi bunga sebesar 2 gelo 50 sen, jumlah keseluruhan 105 gelo, dihitung pinjaman dan bunga menjadi 130 gelo. Ngabehi Ranareja baru membayar bunga uang 24 gelo sehingga hutangnya masih 106 gelo. (*Arsip Pakualaman*,

No. 4292).

9. Pada tahun 1898, M. Ng. Padmowicoro berhutang kepada F.K. Hole Residen Yogyakarta sebesar f625 dan berjanji akan dilunasi termasuk bunganya dalam waktu 3 tahun. Namun ternyata M. Ng. Padmowicoro ingkar janji dan kemudian digugat oleh F. K. Hole ke pengadilan. (*Arsip Pakualaman*, No. 4383).
10. Pada tahun 1895, Raden Mas Panji Natawijaya berhutang pada Lie Wang Sing sebanyak 20 gelo, dengan perjanjian akan memberi bunga selama 5 bulan dengan total bunga 37 gelo, 50 sen, tetapi R.M.Panji Natawijaya baru membayar 17 wang, 16 dhuwit. Lie wang Sing mengalami kerugian 56 gelo, 10 sen. (*Arsip Pakualaman*, No. 4329).

Jika dilihat jejak rekam arsip di atas bahwa hampir semua tingkatan bangsawan di Pakualaman berhutang kepada pihak lain termasuk Paku Alam V. Hal ini memberi gambaran dengan jelas mengenai krisis finansial yang parah terjadi pada waktu itu yang dialami oleh Kadipaten Pakualaman. Khusus untuk hutang yang dilakukan oleh Paku Alam V agak sedikit sulit menganalisis apakah tujuannya berhutang untuk memenuhi kebutuhan Puro Pakualaman atau untuk keperluan keluarganya sendiri. Hal itu dikarenakan pada masa Paku Alam V belum ada sistem anggaran keuangan modern yang diterapkan di Puro Pakualaman sebagaimana diceritakan dalam *Ringkesaning Wawaton* berikut ini:

"Djamanipoen samanten Pradja Pakoelaman dereng ngawontenaken tepas kahartakan (kas) saha panitiarta (comptabel). Awit saking poenika mila sadaja ingkang nama panghasilan saking waeloewedaling wewengkon ingkang kalebet wonten ing pangoewasa dalem inggih ladjeng teroes kaoendjoekaken wonten ing ngarsadalem. Sadaja beja kabetahaning Pradja toewin sasaminipun ingkang dados tatanggekaning Pradja kadasta blandja-blandja lan kabetahan ageng alit, pandjadonging betjet noewoen inggih ladjeng wonten Ngarsadalem ingkang djoemeneng...Tatanan ingkang makaten poenika taksih lastantoen wonten ing djaman djoemenengdalem Kandjeng Gusti kaping V. (Ringkesaning Wawaton, tt. x)".

Namun jika menilik pola kehidupan keluarga sederhana yang dipraktekkan oleh Paku Alam V dan juga jika dihubungkan dengan peristiwa kematian R.M. Notowiroyo di Swiss, hutang yang dilakukan oleh Paku Alam V cenderung lebih diperuntukkan melakukan pembaharuan dan modernisasi di Kadipaten Pakualaman baik yang bersifat ekonomi maupun pendidikan bagi anak-anaknya. Pembaruan yang bersifat ekonomi dilakukan oleh Paku Alam V dengan merombak bidang agraria terutama wilayah pertanian yang ada di Adikarto. Kebijakan ini kemudian berhasil mengubah potensi perekonomian agraris dari sebuah wilayah yang tandus dan gersang karena sebagian besar wilayah itu berupa rawa dan tanah berpasir, menjadi lahan-lahan pertanian yang cukup subur dan relatif potensial untuk pengembangan produksi pertanian.

Kebijakan ekonomi yang cukup penting lainnya adalah pembukaan beberapa perkebunan dan pabrik pengolahaannya di wilayah Adikarto khususnya untuk perkebunan tebu (Pabrik Gula Sewu Galur) dan nila (Sumber Nila). Dari usahanya ini setelah empat tahun, Pakualaman mampu melunasi hutangnya sebesar f100.000 kepada gubernemen Belanda. Jika melihat kebijakan-kebijakan yang ditempuhnya dan hasil yang dicapainya tidak salah jika surat kabar *De Locomotief* edisi 27 September 1878 menyebut penunjukan K.P.H. Aria Suryadilaga yang kemudian bergelar Paku Alam V sebagai penerus pemerintahan di Kadipaten Pakualaman pada waktu itu dengan istilah "the right man in the right place".

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Introduksi liberalisasi ekonomi yang terjadi di wilayah Hindia Belanda secara umum dan di *Vorstenlanden* khususnya telah membawa dampak besar bagi perubahan kehidupan para bangsawan. Perubahan pola pendapatan para bangsawan dari pajak in natura menjadi uang sewa seiring dengan adanya kebijakan sistem sewa tanah telah menyebabkan perubahan sosial dalam kehidupannya. Hubungan dan pergaulan yang intensif dengan orang-orang Barat telah membuat para bangsawan khususnya pada masa Paku Alam IV mulai melakukan adopsi terhadap budaya dan gaya hidup ala Barat.

Monetisasi dan dikembangkannya transportasi modern terutama kereta api yang menghubungkan wilayah *Vorstenlanden* dengan Semarang sebagai gerbang impor barang-barang mewah untuk keperluan konsumsi pada paruh kedua abad ke-19 semakin mendukung berlangsungnya proses adopsi kehidupan Barat di lingkungan Pura Pakualaman baik pada masa Paku Alam IV dan Paku Alam V. Sistem sewa tanah dalam jangka panjang yang diterapkan di *Vorstenlanden* telah mengubah pola pendapatan dari para bangsawan. Jika pada pola tradisional para bangsawan mendapatkan pendapatan rutin setiap tahun dalam bentuk bagi hasil dan upeti berupa kerja wajib namun pada sistem sewa para bangsawan mendapatkan uang kas yang besarnya sesuai dengan jangka waktu sewa tanahnya.

Perubahan pola pendapatan para bangsawan ini ternyata tidak diikuti dengan pola konsumsi dan gaya hidupnya. Uang kas selain sebagai bentuk baru pendapatan para bangsawan juga memberi kebebasan mereka dalam membelanjakan uang untuk keperluan konsumtif. Para bangsawan ini tidak menyadari sepenuhnya bahwa uang kas yang diterimanya itu seharusnya dibelanjakan menyesuaikan dengan waktu sewa tanahnya. Oleh karena itu maka yang terjadi kemudian adalah uang kas para bangsawan ini habis lebih cepat dibandingkan dengan waktu sewa tanah. Tidak adanya budaya menabung di kalangan mereka telah menyebabkan hasil uang sewa tanah *lungguh* tidak mencukupi kebutuhan hidupnya sesuai dengan jangka waktu penyewaan tanah. Sebagai akibatnya sebagian besar bangsawan di Pura Pakualaman sejak masa pemerintahan Paku Alam IV sampai pertengahan masa pemerintahan Paku Alam V banyak terlilit hutang baik kepada pihak orang-orang Belanda maupun orang-orang Cina.

Sementara itu cerminan terjadinya adopsi budaya Barat juga terjadi secara kultural pada masa ini. Hal itu bisa dilihat dari aspek kesenian dan aspek kuliner yang dimiliki oleh Pura Pakualaman. Kebiasaan minum-minum bagi para bangsawan di Pakualaman secara jelas terekam dalam tarian *Beksan Inum Kakung* dan sementara pengaruh kesenian dan pakaian prajurit Belanda termanifestasi dalam *Beksan Schermen* dan *Beksan Floret*. Adopsi gaya hidup Belanda di Pura Pakualaman juga terlihat dalam hal kuliner yang termanifestasi dalam beberapa bentuk masakan dan kue seperti *Klappertart* dan *Pannekoek*.

B. Saran

Pura Pakualaman mempunyai koleksi arsip yang relatif banyak dan sangat mudah untuk mengaksesnya. Koleksi arsip di Pura Pakualaman ini memiliki keragaman bidang substansi mulai dari masalah pemerintahan, pendidikan, hukum, agraria, keuangan, dan juga sosial. Dalam konteks penulisan sejarah mengenai wilayah *Vorstenlanden*, selain memanfaatkan laporan pemerintah kolonial, penggunaan arsip lokal akan memberi warna lebih dalam merekonstruksi peristiwa karena dapat memahami alam pikiran masyarakat pribumi dalam melihat sebuah fenomena sosial yang terjadi pada waktu itu. Selain itu, arsip lokal juga melengkapi fakta yang tidak termuat dalam laporan kolonial. Fakta yang secara tidak langsung mengungkap mengenai kehidupan sosial dan gaya hidup bangsawan di

Vorstenlanden khususnya di Pakualaman pada akhir abad ke-19 tidak dapat ditemukan secara utuh dalam laporan-laporan kolonial, namun ternyata hal itu dapat ditemukan dalam surat-surat perjanjian hutang piutang antara bangsawan Pakualaman dengan orang Belanda maupun dalam arsip *proses verbaal* sebagai akibat terjadinya persengketaan perkara perdata khususnya mengenai hutang piutang.

Untuk itu dalam merekonstruksi peristiwa-peristiwa masa lalu di Indonesia perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh dalam menggunakan arsip lokal yang dipadukan dengan laporan kolonial. Diharapkan dengan metode itu akan mampu menggambarkan konstruksi peristiwa dalam berbagai perspektif. Pengenalan arsip-arsip koleksi Puro Pakualaman beberapa tahun terakhir telah dilakukan oleh Badan Perpustakaan Arsip Daerah DIY dengan menerbitkan seri terbitan naskah sumber arsip. Diharapkan dengan upaya-upaya ini akan ada semangat yang lebih untuk memanfaatkan arsip lokal di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Koleksi Puro Pakualaman, No. 858.
Arsip Koleksi Puro Pakualaman, No. 1288.
Arsip Koleksi Puro Pakualaman, No. 1749.
Arsip Koleksi Puro Pakualaman, No. 4135.
Arsip Koleksi Puro Pakualaman, No. 4160.
Arsip Koleksi Puro Pakualaman, No. 4161.
Arsip Koleksi Puro Pakualaman, No. 4182.
Arsip Koleksi Puro Pakualaman, No. 4292.
Arsip Koleksi Puro Pakualaman, No. 4329.
Arsip Koleksi Puro Pakualaman, No. 4383.
- Budiawan, 2006. *Anak Bangsawan Bertukar Jalan*, Yogyakarta: LKiS.
- _____. *De Locomotief*, 27 September 1878.
- _____. 6 November 1900.
- Dewantara, K.H., 1967. "Pangeran Ario Notodirodjo dan Sumbangannya dalam Kebangkitan Kembali Bangsa Jawa" dalam *Karja Ki Hadjar Dewantara*, Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa.
- Houben, V. J. H., 2002. *Keraton dan Kompeni; Surakarta dan Yogyakarta, 1830-1870*, Yogyakarta: Bentang.
- Jonkers, A., 1936. *Nota. De Agrarische Hervorming en Economische werkzaamheid in Koelon Progo en Adikarto*. Yogyakarta: t.p.
- Kantor Arsip Daerah DIY, 2008. *Konteks Historis Sosiologis Sengketa Hukum di Kadipaten Pakualaman pada masa Kolonial*, Yogyakarta, 2008.
- Kartodirdjo, S., 1987. *Perkembangan Peradaban Priyayi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- _____. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia.
- Kuntowijoyo. 2004. *Raja Priyayi, dan Kawula*, Yogyakarta, Ombak.
- _____. 2003. *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Majalah *Moestika*, Volume XV Tahun 1941.
- Overzicht van de voornaamste invoeren in Semarang uit British-Indie, Singapore, de Philippijnen, Fransch Indo-China, Hongkong, China, Japan, Vereenigde Staten en Australie over de jaren 1900*.
- Poerwokoesoemo, S., 1985. *Kadipaten Pakualaman*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Poeze, H. A., Cees van Dijk en Inge van der Meulen, 1986. *In het Land van de Overheersers I:*

- Indonesiërs in Nederland 1600-1950*. Dordrecht-Cinnaminson: Foris Publications.
- Ringkesaning Wawaton (Patakon-Punten)*. tt.
- Riyanto, B., 2000. *Iklan Surat Kabar dan Perubahan Masyarakat di Jawa Masa Kolonial (1870-1915)*, Yogyakarta: Tarawang.
- Rivai, A., 2000. *Student Indonesia di Eropa*. Jakarta: KPG-IKAPI-The Ford Foundation.
- Saktimulya, Sri Ratna, 2014. "Renaissans Skriptorium Pakualaman Pada Masa Paku Alam V" dalam *Atavisme* Vol. 21 Nomor 1 Juni 2014
- Soeratman, D., 1989. *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta, 1830-1939*: Yogyakarta: Tamansiswa.
- Sudibyo, 2011. "Berdirinya Kadipaten Pakualaman dan Posisi Pangeran Notokusumo dalam Turbulensi Politik di Keraton Yogyakarta, 1811-1816" Laporan Penelitian LPPM UGM, Yogyakarta.
- Suryodilogo, A., dkk., 2012. *Warnasari Sistem Budaya Kadipaten Pakualaman Yogyakarta*. Jakarta: Hudyana.
- Suryo, D., 1989. *Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900*, Yogyakarta: PSSAT.
- Wardojo, W. W., 2012. "Jalur Kereta Api Semarang-Surakarta dan Pengaruh Sosial Ekonomi di Karesidenan Surakarta 1864-1930", *Tesis Pascasarjana Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya UGM*.
- Wertheim, W. F., 1999. *Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Studi Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Zuidhollander, "Varia" dalam *Tijdschrift voor Nederlandsh Indie* 13, II, 1851.

GERAKAN KIRI DI KLATEN: 1950 - 1965

H. Purwanta

Jurusan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
Jl. Afandi, Mrican Yogyakarta
Kontak 085721995935

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami gerakan kiri di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah periode 1950-1965. Tujuan itu dilatarbelakangi oleh keprihatinan bahwa secara nasional terhadap kelangkaan kajian historis untuk periode itu. Melalui kajian yang dilakukan diharapkan secara bertahap akan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang sejarah nasional Indonesia periode 1950 - 1965. Metode penelitian yang digunakan metode sejarah, mencakup pengumpulan sumber, kritik sumber, seleksi sumber, analisis/interpretasi dan penulisan. Sebagian besar waktu dan energi penelitian digunakan untuk mengumpulkan sumber tertulis dan wawancara mendalam (deep interview) dengan para pelaku sejarah. Pengumpulan sumber tertulis dilakukan di Perpustakaan, baik off line maupun online. Wawancara dilakukan di rumah para pelaku sejarah pada waktu yang telah disepakati bersama. Luaran dari penelitian ini adalah rekonstruksi gerakan kiri di Klaten, yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu latar belakang dan aktivitas gerakan kiri. Pada bagian latar belakang, ditemukan bahwa gerakan kiri di Klaten sudah tumbuh pada awal zaman kemerdekaan, yaitu pada gerakan anti swapraja. Tumbuhnya gerakan kiri itu didukung oleh problem kronis pertanian dan kemiskinan di Klaten. Pada aktivitas gerakan kiri tahun 1950-an ditemukan bahwa kegiatan aktivis gerakan kiri memperoleh respon positif dan dipandang membela kepentingan rakyat kecil yang miskin dan tertindas. Pada tahun 1960-an gerakan kiri semakin intensif dan cenderung keras. Hal itu antara lain didorong oleh sikap Bupati yang tidak bersedia melaksanakan berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah pusat.

Kata Kunci: sejarah, gerakan kiri, Klaten, agraria.

LEFT MOVEMENT IN KLATEN : 1950 - 1965

Abstract

This study aims to understand the left movement in Klaten, Central Java in the period 1950 - 1965. The objective was motivated by concern that the scarcity of historical study for that period. Through studies that are conducted, gradually could be gained a more comprehensive understanding of the national history of Indonesia from 1950 to 1965. The method used is historical method, i.e. collection of sources, criticism, selection, analysis/interpretation and writing. Most of the time and energy used to collect written sources and in-depth interviews with historical actors. Library research was conducted in both off line and online. Interviews were conducted in the home of the history actors at the time agreed. Result of this research is the reconstruction of the left movement in Klaten, which is divided into two parts: background and their activities. In the background, it was found that the left in Klaten have grown in the early days of independence, called the anti self-governing (swapraja). The growth of the left movements in Klaten was supported by the chronic problems: soil and poverty. In the 1950s, the left movement obtained a positive response, especially came from people who are poor and oppressed. In the 1960s leftist movement was intensified and tend to be hard. This was partly driven by attitude of regent who was not willing to implement various national laws and regulations.

Keywords: history, left movement, Klaten, landreform

I. PENDAHULUAN

Tragedi nasional pada tahun 1965 yang membawa banyak korban pada rakyat, baik berbagai pihak yang dianggap terkait dengan Gerakan 30 September (G30S) maupun keluarganya. Cribb (2001: 82) memperkirakan korban meninggal mencapai setengah juta orang selama 6 bulan setelah G30S. Banyak analisis disusun untuk menjelaskan latar belakang meletusnya tragedi 1965. Soebandrio (2006: 118), salah satu pemimpin nasional Indonesia yang menjadi saksi dan bahkan aktor politik pada saat meletusnya G30S, merefleksikan peristiwa itu dalam kaitan konstalasi internasional sebagai berikut:

Penghancuran PKI yang diikuti pembunuhan jutaan manusia mendapat dukungan kekuatan imperialisme internasional, terutama Amerika Serikat yang mengklaim diri sebagai negara demokrasi. Ini bentuk penghancuran struktur di suatu negara (Indonesia) yang sangat besar sejak Perang Dunia II. Kekejamannya tidak pernah dibayangkan sebelumnya, oleh siapa pun, termasuk oleh kita sendiri, juga termasuk saya yang menyaksikan langsung semua peristiwa di tingkat elit politik Indonesia saat itu.

Peristiwa itu bukan hanya peristiwa intern Indonesia, tetapi Indonesia dan Dunia. Ini merupakan letupan konflik yang sebenarnya sudah lama ada antara maha kuasa imperialisme internasional dengan hak menentukan nasib sendiri bangsa Indonesia di pihak lain. Indonesia hanyalah tempat peristiwa. Sedangkan karakternya bersifat dunia. Ini sebuah tragedi yang secara moral merupakan kejahatan peradaban umat manusia. Sebagai konsekuensi logis dari peristiwa ini adalah mem-fasis-kan kehidupan negara, bertentangan dengan harapan dari ahli-ahli teori modernisasi.

Selain meninggalkan luka yang mendalam, tragedi 1965 juga meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk dikaji. Salah satu pertanyaan yang selama satu tahun terakhir dicoba mencari jawabnya adalah: Sudah layak dan sepantasnya kah mereka diperlakukan dengan begitu kejam oleh pemerintah Orde Baru? Pertanyaan itu menjadi energi untuk melakukan penelitian pada sebuah kabupaten di Jawa Tengah bagian selatan, yaitu Klaten.

Kabupaten Klaten dipilih karena merupakan salah satu ladang pembantaian “orang-orang kiri” dari daerah segitiga yang terkenal, bersama Solo dan Boyolali. Pada ketiga daerah ribuan orang dibunuh, dihukum dan ditahan atas nama Gerakan Pemberantasan PKI dan antek-anteknya. Khusus untuk wilayah Kabupaten Klaten, terdapat berbagai tempat yang diyakini sebagai lokasi pembunuhan massal dan meski tinggal sedikit, masih terdapat orang-orang yang dahulu ditahan, dihukum, bahkan di “pulau Buru” kan.

Tak terelakkan, di mana-mana terjadi aksi balas dendam terhadap PKI atau mereka yang dicurigai simpatisan PKI. Pembantaian besar-besaran pun tak bisa dibendung. Walaupun, tidak sedikit korban fitnah, lalu dihabisi tanpa diberi kesempatan membela diri. Tidak hanya itu, di kalangan militer setingkat kodim, ada semacam pemberian hadiah bagi anggota militer yang bisa membunuh orang atau simpatisan PKI. Makin banyak yang dibunuh, seorang anggota militer makin cepat naik pangkat. Maka tidak heran, jika di tepi Kali Wedi, Klaten, Jateng, misalnya, setiap hari dijumpai pemandangan mengerikan: pembantaian manusia. Tidak jarang orang satu kampung digiring, lalu dibantai ramai-ramai di tepi kali. "Ini cerita sungguhan bukan fiktif," tegas Subandyo (Kasemin, 2004: 44)

Kekhawatiran akan kehilangan momentum, yaitu habisnya para pelaku sejarah periode 1950 - 1965 oleh waktu, karena sebagian besar mereka berusia di atas 70 tahun, menjadi motivasi tersendiri untuk menyegerakan penelusuran jejak-jejak kiprah mereka di masa lampau.

Permasalahan tentang kelayakpantasan para aktivis gerakan kiri di Klaten menerima perlakuan kejam oleh pemerintah Orde Baru diurai dalam dua pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana genetika historis gerakan kiri di Klaten?
2. Bagaimana aktivitas gerakan kiri Klaten periode 1950 - 1965?

Untuk menjawab kedua pertanyaan penelitian, penelusuran historis dimulai dengan pelacakan teoritis tentang gerakan kiri. Istilah “gerakan kiri” diasosiasikan dengan gerakan melawan ketidakadilan. Dalam rangka melakukan pembelaan, Wardaya (2006: 194) menjelaskan berbagai tradisi “baik” yang ditinggalkan gerakan kiri sebagai berikut:

Gerakan-gerakan kiri yang tumbuh pada masa pra-1965 telah mengajarkan kepada bangsa ini sejumlah tradisi penting. Misalnya saja tradisi mengorganisir masyarakat (serikat buruh di zaman Kebangkitan Nasional, mengorganisir pemuda di zaman revolusi, lalu mengorganisir petani, wanita, seniman, wartawan, dan lain-lain); tradisi intelektual dengan membentuk kelompok-kelompok diskusi, kelompok kebudayaan,

lembaga-lembaga pendidikan, dsb; juga tradisi membangun front bersama demi kepentingan masyarakat luas. Sayangnya bahwa tradisi-tradisi macam itu banyak yang mati karena terlanjur dicap "kiri" atau "ateis".

Dari penjelasan di atas tampak bahwa gerakan kiri dipandang mewariskan tradisi organisasi dan intelektual yang bernilai tinggi bagi bangsa Indonesia. Tanpa bermaksud menyanggah pembelaan pada kutipan di atas, pandangan yang lebih netral dan akademis diberikan oleh Kuntowijoyo (2008: 498) sebagai berikut:

Di Asia, Amerika Latin, Afrika, dan bahkan Timur Tengah, gerakan-gerakan kiri menjadi terkenal karena program-program yang mereka ajukan sangat relevandengan aspirasi-aspirasi pemerataan dan keadilan sosial. Partai-partaikiri dengan analisis kelasnya memang sering cukup berhasilmerumuskan artikulasi politik yang jelas dalam rangkamenariksimpati dandukungan. Seringjuga, realitas sosial objektifdi Dunia Ketiga berupa kesenjangan kaya-rniskin yang begitu tajam, sistem politik yang represif dan otoriter, atau mandulnya agama-agama dalam merespons perubahan sosial menyebabkangerakan-gerakan kiri itu begitu berhasil menghimpun kekuatanrakyat.

Dengan mengombinasikan dua kutipan di atas dapat diambil pemahaman bahwa gerakan kiri merupakan gerakan politik yang menggunakan analisis kelas dalam memperjuangkan keadilan, melalui pengorganisasian massa rakyat.

Di Indonesia, pemikiran kiri mewarnai pandangan hampir seluruh tokoh pergerakan nasional. Dengan mengadaptasi pada kondisi Indonesia yang berada dalam penjajahan, pemikiran kiri digunakan untuk mengkritisi eksploitasi kapitalistik pemerintah kolonial Belanda dan kaki tangannya terhadap rakyat Indonesia. Salah satu aktivis yang terkenal dan pengaruh pemikirannya relatif besar terhadap gerakan kiri Indonesia adalah Tan Malaka. Vikers (2005: 95) menggambarkan Tan Malaka sebagai tokoh legendaris, seperti diceritakannya sebagai berikut:

He had been an early member of the Communist Party, but was regarded as a Trotskyite by its leadership because he had opposed the 1926-7 uprising and was against Stalin's policies. He had been in exile since 1922, during which time his reputation had assumed legendary proportions because of his involvement in spreading Communism throughout South-east and East Asia. By 1942 he was back in Indonesia, witnessing the suffering of forced labourers...

Salah satu pemikiran Tan Malaka yang dapat dirunut asal usulnya dari pandangan Marx adalah keberadaan kelas penindas dan kelas tertindas. Permasalahan bangsa Indonesia bukanlah pada rendahnya nilai buruh dan tingginya nilai modal yang memicu pertentangan kelas antara majikan dan buruh sejak Revolusi Industri di Eropa. Menurut Tan Malaka kelas penindas pada bangsa Indonesia ada dua, yaitu feodalisme lokal dan kolonialisme / imperialisme Barat. Tentang feodalisme lokal, Malaka (2000: 67) pada tulisannya yang diterbitkan tahun 1926 menjelaskan sebagai berikut:

Sebagaimana dalam kebanyakan negeri feodalistis di Indonesia, pemerintahan negeri dipegang oleh seorang raja dan komplotannya. Seorang raja sesudah berhasil menjalankan peran "jagoan", lalu mengangkat dirinya jadi raja yang bertuan. Anaknyayang bodohnya lebih dari seekor kerbau atau seorang tukang pelesir, di belakang hari, menggantikan ayahnya sebagai yang dipertuan di dalam negeri. Peraturan turun-temurun ini "lenyap" apabila seorang "jagoan" baru datang menjatuhkan yang lama, dari mengangkat dirinya pula jadi raja.

Selain oleh raja dan "para-yayi"-nya, penindasan juga dilakukan oleh penjajah Barat, khususnya Belanda. Malaka (2000: 6-7) menggambarkan penindasan oleh imperialisme Belanda sebagai berikut:

Pusat industri Belanda sekarang terletak di Indonesia, sedang pusat perdagangan dan keuangannya ada di negeri Belanda. Bankir, industrialis dan saudagar tinggal di negeri Belanda, sedang buruh dan tani di Indonesia. Jika kita perhatikan kedua lautan yang memisahkan Belanda dengan Indonesia itu, serta tidak pula kita lupakan perbedaan bangsa, agama, bahasa, adat istiadat antara penjajah dan si terjajah, antara pemeas dan si terperas, tampaklah kepada kita satu perbandingan dari pergaulan yang luar biasa di dunia imperialisme waktu sekarang. Luar biasa, sebab kaum modal bumiputra tak ada. Jadi, titian antara negeri Belanda dengan Indonesia putus sama sekali.

Pada kutipan di atas, Tan Malaka menempatkan rakyat Indonesia sebagai area penanaman modal yang seluruh keuntungannya mengalir ke negeri Belanda. Bahkan untuk menjaga agar imperialisme berjalan abadi, Belanda tidak mendorong tumbuhnya pengusaha bumiputera. Akibatnya seluruh rakyat Indonesia, kecuali raja dan para bangsawan, hidup sebagai buruh dan tani. Dari perspektif ini, Malaka (2000: 9) mengambil kesimpulan bahwa “Pendeknya, Indonesia tak mempunyai faktor-faktor ekonomi, sosial ataupun intelektual buat melepaskan diri dari perbudakan ekonomi dan politik di dalam lingkungan imperialisme Belanda”.

Pemikiran tentang gerakan kiri mengalami perkembangan yang penting setelah tahun 1945. Kemerdekaan Indonesia menjadikan perlawanan terhadap imperialisme Barat dalam arti fisik tidak lagi relevan untuk dipikirkan secara nasional. Pemikiran kaum kiri lebih terarah pada membongkar ketidakadilan struktural yang terdapat dalam masyarakat Indonesia sendiri. Salah satu tokoh yang pengaruh pemikirannya cukup besar terhadap gerakan kiri Indonesia adalah Dipa Nusantara Aidit. Posisinya sebagai Ketua CC PKI menjadikan pemikirannya sebagai acuan utama gerakan kiri, khususnya organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan PKI.

Seperti pemikiran kiri lain yang memandang dinamika kehidupan masyarakat dari perspektif pertentangan kelas, Aidit berpandangan bahwa dalam masyarakat Indonesia kelompok yang secara struktural menindas sebagian besar anggotanya. Di daerah pedesaan, kelompok penindas itu adalah tuan tanah, lintah darat, tukang-ijon, tengkulak, kapitalis birokrat, petani kaya, bandit desa, dan penguasa desa yang jahat. Di daerah pantai, kelompok penindasnya adalah juragan perahu atau tuan nelayan.

Tuan tanah memiliki keberagaman dalam luas kepemilikan tanah. Meskipun demikian, “tuan tanah yang memiliki luas tanah yang relatif kecil, melakukan penghisapan yang sama kedjamnya seperti mereka yang memiliki luas tanah yang besar, bahkan ada kalanya justru karena pemilikan yang kecil itu, lebih kedjam” (Aidit, 1964: 20). Pola penghisapan yang umum dilakukan adalah dengan menyewakan tanahnya kepada petani miskin dengan sistem bagi hasil. Pola lain yang digunakan oleh tuan tanah adalah dengan memperkerjakan buruh tani (Aidit, 1964: 22).

Selain tuan tanah, penindas kaum miskin lain di desa adalah petani kaya. Aidit menggambarkan petani kaya dan pola penindasan yang dilakukannya adalah sebagai berikut:

Pada umumnya kaum tanikaja masih turut dalam pekerjaan produksi pertanian dan tanahnya sebagian dikerdjakan dengan menggunakan tenaga-upahan buruhtani. Tetapi sebagai akibat terbelakangnya ekonomi desa maka penghisapan kaum tanikaja juga banjak mengandung sifat2 feodal. Misalnja, buruhtani yang dipekerdjakan itu bukan buruh yang bebas, tapi sedikit banjak masih ada ikatan yang bersifat perhambaan. Begitu pula ada tanikaja2 yang sebagian tanahnya digarapkan dengan tjara menjewakan. .

Banjak tanikaja juga melakukan praktek lintahdarat, idjon dan tengkulak. Mereka mempunyai ketjenderungan kuat untuk .memusatkari tanah dan ada yang berkembang menjadi tuan tanah.

Enam pihak selanjutnya yang dikategorikan sebagai penindas masyarakat kecil di desa adalah lintah darat, tukang-ijon, tengkulak, kapitalis birokrat dan bandit desa. (Aidit, 1964: 26-27).

Dalam rangka menghadapi para penghisap, Aidit memilahkan strategi menjadi dua kelompok. Pertama adalah sikap mental yang perlu dimiliki pemimpin dan anggota gerakan kiri. Sikap mental itu dikenal dengan sebutan semangat 5 lebih: lebih berani, lebih pandai, lebih waspada, lebih gigih, dan lebih tekun (Aidit, 1964: 54). Kelima sikap mental itu menjadikan aktivis gerakan kiri memiliki militansi yang tinggi dalam membongkar penindasan yang terjadi di desa.

Kedua adalah metode atau cara yang ditempuh oleh aktivis gerakan kiri dalam menghadapi kaum penindas di desa. Aidit memilah metode gerakan menjadi dua, yaitu bidang politik dan ekonomi. Pada bidang politik, gerakan kiri diarahkan pada penguasa formal di lingkungan desa. Metode gerakan yang ditempuh adalah menelanjangi “perbuatan2nja jang anti-Manipol, jang mensabot UUPBH dan UUPA, jang menipu Rakjat, jang korup dsb” dalam rapat desa (Aidit, 1964: 45).

Gerakan kiri di bidang ekonomi polanya hampir sama dengan bidang politik. Perbedaannnya adalah sasaran gerakan, yaitu tuan tanah. Untuk melawan tuan tanah, Aidit memberikan jalan sebagai berikut:

- a) menelanjangi tuantanah djahat sebagai pensabot pelaksanaan UUPA dan UUPBH;
- b) menelanjangi perbuatan2 lainnja jang korup dan menipu Rakjat;
- c) menelanjangi perbuatan2nja jang melanggar moral (biasanja banjak sekali);
- d) menelanjangi kegiatan tuantanah djahat jang masih meneruskan politik Masjumi-PSI jang sudah dilarang serta hubungannja dengan gerombolan DI-TII diwaktu jang lalu atau dengan gerakan rasialis kontra-revolusioner.

Untuk daerah di luar Jawa Barat, metode yang dikemukakan oleh Aidit perlu diadaptasi dengan wilayah setempat.

Apabila langkah atau metode yang lebih bersifat musyawarah mengalami jalan buntu, Aidit menganjurkan untuk melakukan Aksi Sepihak. Setiawan (2003: 6) menjelaskan Aksi Sepihak sebagai berikut:

...merupakan tindakan secara sepihak yang diambil oleh kaum tani, karena aksi-aksi yang ditempuh secara timbal balik sebelumnya, yaitu dalam arti aksi menempuh jalan dialog dengan tuan tanah dan penguasa, mengalami jalan buntu.

Dengan demikian aksi sepihak tidak lain merupakan gerakan kaum tani menagih janji pemerintah, agar dengan bersungguh-sungguh melaksanakan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) dan UUBH (Undang-Undang Bagi Hasil) yang telah diundangkan tahun 1960.

Dari penjelasan pada kutipan di atas dapat diambil pemahaman bahwa aksi sepihak merupakan jalan terakhir ketika jalan dialog dan musyawarah mengalami kebuntuan. Selain itu, aksi sepihak merupakan usaha untuk mengawal agar UUPBH dan UUPA diterapkan secara sungguh-sungguh serta mencegah berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi.

Gerakan Kiri di Klaten periode 1950-1965 dalam konteks ini ditempatkan sebagai gerakan yang didasari oleh pemikiran Marxisme Indonesia yang secara politik berafiliasi pada Partai Komunis Indonesia dan Partai Sosialis Indonesia. Para aktivis gerakan kiri Klaten dipahami sebagai tokoh-tokoh historis yang berusaha membongkar kemiskinan struktural yang dialami para buruh dan petani tak bersawah melalui penentangan terhadap perilaku eksploitatif yang dilakukan berbagai pihak.

II. LATAR BELAKANG GERAKAN KIRI

Salah satu permasalahan yang kronis di Klaten adalah agraria. Semenjak perjanjian Giyanti tahun 1755, Kabupaten Klaten menjadi bagian wilayah Kerajaan Kasunanan Surakarta yang dalam sistem pemerintahan kolonial Belanda dikategorikan sebagai daerah *vorstenlanden*. Seperti daerah *vorstenlanden* lainnya di Jawa, Kasunanan Surakarta merupakan kerajaan agraris, yaitu kerajaan yang bertumpu pada pertanian sebagai basis kehidupan hampir seluruh penduduknya.

Ketika pengusaha Barat masuk ke pedesaan Jawa, Kabupaten Klaten menjadi salah satu wilayah yang menjadi objek. Sebagai bagian wilayah kerajaan, pengusaha swasta tidak menyewa langsung kepada rakyat, tetapi melakukan kontrak dengan para bangsawan pemilik lungguh (patuh) (Padmo, 2002: 14).

Pola kontrak melalui bangsawan pemilik tanah lungguh mengakibatkan rakyat petani tidak memperoleh keuntungan terhadap masuknya perusahaan Barat di wilayah mereka. Bahkan sebaliknya, petani justru mengalami kerugian dan penderitaan. Padmo lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam melaksanakan usahanya, para pekebun secara intensif telah memanfaatkan ratusan ribu hektar tanah di pegunungan untuk mengusahakan tanaman keras seperti teh, karet, dan kopi dengan melibatkan wong cilik yang ada di desa sekitarnya. Apabila tenaga kerja tidak tersedia di desa sekitar maka tenaga kerja itu harus didatangkan dari desa yang berjarak 7 - 10 kilometer secara periodik. Tidak jarang penduduk pedesaan (wong cilik) selama puluhan tahun dipaksa melaksanakan kerja wajib itu lahir, hidup, dan mati di kebun kopi. Para petani di daerah persawahan yang subur dipaksa untuk menanam tebu, tembakau, dan nila dalam kerja wajib yang disebut gubernemenan di samping kerja wajib bagi penguasa tradisional yang disebut *pancen diensten* dan *heeren diensten* dan kewajiban kepada desa yang disebut *kerigan* dan *gugur gunung* (Padmo, 2002: 15).

Salah satu sumber penderitaan rakyat selama penyewaan tanah oleh perusahaan perkebunan Barat adalah sistem glebagan, yaitu sistem pengolahan tanah secara bergantian:

Tanah garapan rakyat dibagi menjadi dua. Untuk tahun pertama dikerjakan persil A, musim penanaman selanjutnya berpindah ke persil B bekas yang ditanami onderneming. Bekas yang ditanami rakyat kemudian ganti ditanami oleh onderneming. Ada juga yang dijalankan bergiliran dengan membagi 3 persil, yaitu A, B, dan C. Jadi sekalipun onderneming hanya menanam tanah separonya, tetapi praktis semua tanah sudah dikuasai sepenuhnya oleh onderneming. Kesempatan yang diberikan kepada rakyat hanya sebagai pemberian pinjaman untuk diambil bilamana dibutuhkan di lain tahun (Tauchid, 2009: 81).

Seperti dijelaskan pada kutipan, sistem glebagan mengakibatkan tanah garapan petani berkurang setengahnya, karena ditanami tanaman perdagangan (*cash crop*) oleh pengusaha Barat, seperti tembakau, tebu atau nila. Apabila diambil rata-rata, di daerah Klaten, di bagian tanah yang sangat subur, tanah garapan petani rata-rata hanya 1/3 bau, atau kurang dari 1/4 ha. Di bagian yang tidak subur agak sedikit lebih luas (Tauchid, 2009: 88).

Pada awal abad XX terjadi perubahan kebijakan agraria yang penting, antara lain kepada rakyat diberikan hak memakai turun temurun (*erfelijk gebrukisrecht*, wewenang *anggaduh* turun temurun). Akan tetapi, secara ekonomis kebijakan itu tidak membuat rakyat menjadi lebih sejahtera. Bahkan sebaliknya, rakyat semakin miskin dan tidak sedikit yang melepaskan hak "*anggaduh salawas lawase*" yang diberikan Sunan. Padmo (2000: 44) membuat tabel sebagai berikut:

Tabel 1: Jumlah Petani Pemilik Sawah di Lima Kalurahan

| Kalurahan | Petani Pemilik Tanah | Prosentase | Petani Tak Bertanah | Prosentase |
|--------------|----------------------|------------|---------------------|------------|
| Mlese | 281 | 26,76 | 769 | 73,24 |
| Lumbungkerep | 276 | 17,46 | 1.305 | 82,54 |
| Kraguman | 183 | 46,45 | 211 | 53,55 |
| Cucukan | 203 | 24,73 | 618 | 75,27 |
| Semawung | 203 | 27,32 | 540 | 71,46 |

Sumber : Padmo (2000:44)

Dari tabel di atas dapat diambil pemahaman bahwa di Kabupaten Klaten telah terjadi polarisasi kepemilikan lahan pertanian. Di satu sisi banyak petani tanpa tanah dan di lain pihak sedikit petani yang memiliki tanah sangat luas. Situasi ini menjadikan Kabupaten Klaten sebagai daerah yang memiliki potensi besar bagi terjadinya konflik kepemilikan lahan pertanian.

Kemiskinan struktural masyarakat Kasunanan Surakarta pada umumnya dan Kabupaten Klaten khususnya menjadi potensi yang mampu menumbuhkan gerakan kiri pada masa kemerdekaan. Salah satu ekspresi gerakan kiri di masa awal kemerdekaan adalah penentangan terhadap kekuasaan Kasunanan Surakarta dalam bentuk Gerakan Anti Swapraja. Gerakan itu dipelopori oleh kaum kiri pimpinan Tan Malaka. Dia menuliskan rancangan program ekonomi untuk kaum proletar di Indonesia, antara lain menekankan:

- Membagi-bagikan tanah yang kosong kepada tani yang tak bertanah dan miskin dengan memberikan sokongan uang untuk mengusahakan tanah itu.
- Menghapuskan sisa-sisa feodal dan tanah-tanah partikelir dan membagikan yang tersebut belakangan ini kepada tani-tani yang miskin (Malaka, 2000: 121).

Pengaruh Gerakan Anti Swapraja semakin lama semakin meluas. Pada awalnya sasaran utamanya adalah lingkup pusat pemerintahan istana kerajaan, seperti penculikan dan pembunuhan patih Kasunanan Surakarta, KRMH Sosrodiningrat, pada 17 Oktober 1945. Pada waktu-waktu selanjutnya, pengaruh Gerakan Anti Swapraja berkembang ke tingkat kabupaten. Hal itu antara lain terlihat dari penculikan dan pembunuhan para bupati seperti yang terjadi di Klaten (RT Pringgonegoro) dan Boyolali (KRT Reksonegoro). Untuk mengatasi situasi yang semakin tidak terkendali, pemerintah pusat kemudian mengakhiri Daerah Istimewa Surakarta pada 16 Juni 1946 dan menggantinya dengan status sebagai Karesidenan Surakarta.

Kesuksesan menjatuhkan kekuasaan aristokratis Kasunanan Surakarta menjadikan gerakan kiri semakin percaya diri untuk tetap membela kepentingan rakyat kecil. Bahkan pemerintah pada tanggal 26 April 1948 menandatangani Undang Undang No 13 yang diberi judul Undang Undang Perubahan *Vorstenlandsch Grondhuurreglement*. UU itu menunjukkan bahwa pemerintah Republik Indonesia memiliki semangat untuk menyejahterakan rakyat, khususnya petani. Di sisi lain, pemerintah juga melihat bahwa *Vorstenlandsch Grondhuurreglement* mengandung banyak ketidakadilan bagi petani.

Kepercayaan diri para aktivis gerakan kiri di Surakarta pada umumnya dan Kabupaten Klaten khususnya tampak dari meletusnya pemogokan buruh Badan Tekstil Negara (BTN) di Delanggu pada tanggal 19 Mei 1948. Dalam rangka melakukan perundingan dan negosiasi dengan direksi BTN, buruh dan petani bersatu dalam Lembaga Buruh Tani (LBT). Dalam siaran pers yang dimuat pada surat kabar *Suara Ibu Kota* 21 Mei 1948 dan dikutip dalam Arsip Kementrian Penerangan No. 242 dijelaskan antara lain (1) Aksi ini bukan saja dilakukan oleh Sarbupri saja tetapi oleh B.T.I sebab banyak kaum tani kecil turut berburuh pada perusahaan-

perusahaan BTN. Nasib mereka dan anggota-anggota Sarbupri sama. Kali ini buruh dan tani menghadapi satu majikan. (2) Perselisian antara Sarbupri dan Dewan Pimpinan B.T.N. sudah berjalan lama ialah 7 bulan selama waktu itu majikan tak menunjukkan goodwillnya. (3) Upah pekerja yang diijinkan oleh B.T.N ialah Rp. 2 sehari dengan kupon beras 200 gram yang harus dibelinya Rp. 1,5 se-kg. Dibandingkan dengan upah buruh tani di luar kebun dari Rp. 10.- sampai Rp.15.-, maka upah BTN sangat tak menarik rakyat.

Pemogokan berlangsung secara bergelombang dan baru sepenuhnya berakhir pada 17 Juni 1948 yang ditandai oleh keluarnya perintah dari Biro Sentral SOBSI kepada Sarbupri dan B.T.I di Delanggu supaya mulai hari Ahad tanggal 18 Juli 1948 pukul 07.00 segenap buruh dan buruh tani di daerah tersebut bekerja seperti biasa. Panjangnya waktu yang diperlukan untuk penyelesaian perselisihan buruh dengan BTN, selain karena tuntutan yang dipandang cukup berat untuk dipenuhi, baik oleh BTN maupun Menteri Kemakmuran, juga karena pemogokan telah berkembang menjadi komoditas politik. Akhirnya Perdana Menteri Moh. Hatta turun tangan, sehingga perselisihan dapat diselesaikan. Penyelesaian terjadi setelah dicapai kesepakatan antara lain tentang (a) Pemberian bahan pakaian kepada pegawai dan pekerja bulanan, pekerja harian tetap, pekerja borongan tetap dan pekerja lepas (*seizoen arbeiders*) serta petani pemaro. (b) Pembagian beras kepada pegawai, pekerja bulanan, pekerja harian dan borongan. (c) Pemberian upah yang jumlahnya sesuai dengan gelombang upah buruh perusahaan partikelir dengan ketentuan bahwa sebagian dari upah itu diberikan berupa beras dan sebagian berupa uang. Jika persediaan beras tidak memungkinkan pemberian upah dengan beras itu, maka upah sepenuhnya diberikan dengan uang ("Merdeka" No.785, Tahun III, 19 Juli 1948:2).

III. GERAKAN KIRI KLATEN 1950AN

Keberhasilan dalam memperjuangkan nasib melalui pemogokan pada 19 Mei - 17 Juni 1948 memberi harapan baru bagi petani miskin untuk mengubah nasib mereka. Keberhasilan itu tidak dapat dipungkiri berkat bantuan dan dukungan para aktivis gerakan kiri, baik yang bernaung pada organisasi sosial maupun partai politik. Oleh karena itu menjadi wajar apabila pada tahun 1950-an banyak aktivis dari Kabupaten Klaten berafiliasi dengan gerakan kiri nasional, baik sebagai anggota maupun simpatisan. Pada Pemilihan Umum 1955, untuk daerah pemilihan Kabupaten Klaten, Partai Komunis Indonesia memperoleh 204.869, sedang PNI: 109.667 dan Masjumi: 48.530 (*Politiek en Cultuur*, 1955: 708).

Kemenangan PKI yang hampir dua kali lipat dari PNI dengan sangat jelas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Klaten menaruh harapan kepadanya. Dominasi golongan kiri di Kabupaten Klaten tidak hanya pada isu-isu politik nasional, tetapi juga pada kegiatan sosial dan kebudayaan di tingkat lokal. Organisasi-organisasi pemuda, pelajar dan kesenian yang berafiliasi dengan PKI juga berkembang dengan pesat di hampir seluruh wilayah Kabupaten Klaten. Semua kecamatan memiliki cabang dari Pemuda Rakyat (PR), Lembaga Kesenian Rakyat (Lekra) dan Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI), Barisan Tani Indonesia (BTI), dan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Melalui komunikasi lisan antar teman dan tetangga, para pelajar dan pemuda direkrut menjadi anggota organisasi dan ikut terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya. Agustinus Mulyono, yang pernah menjabat sebagai ketua Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI) Kecamatan Wedi menjelaskan bahwa perekrutan anggota dilakukan dengan sistem *jawilan* untuk diajak ikut pertemuan. Melalui keikutsertaan pada pertemuan-pertemuan itu, secara alamiah akan tersaring siapa saja yang tertarik dan bersedia terlibat aktif dalam berbagai kegiatan IPPI serta siapa saja yang tidak tertarik.

Kegiatan organisasi gerakan kiri yang menjadi *underbouw* atau berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia memang beragam dan menjadi daya tarik sendiri bagi anggota masyarakat untuk melibatkan diri. IPPI yang ditujukan untuk pelajar SMP dan SMA, memiliki kegiatan yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu akademik dan non akademik. Dalam bidang akademik, IPPI mengembangkan kelompok-kelompok belajar, sehingga terjadi saling belajar antar teman. Melalui belajar bersama, berbagai kendala akademik, seperti keterbatasan sumber belajar, kekurangpahaman terhadap materi belajar dapat diatasi. Selain itu, kegiatan ini dipandang sangat penting, terutama ketika terjadi persaingan prestasi akademik dengan organisasi sejenis dari kelompok lain, seperti dari Partai Katholik, Partai Masyumi dan Partai Nasional Indonesia.

Pada kegiatan non akademik, IPPI mengembangkan diri pada olahraga dan kesenian, sesuai dengan minat pelajar di Kabupaten Klaten. Rajiyo Widyo Suparto menceritakan bahwa kesenian diantara pelajar berkembang pesat pada saat itu. Dia mencontohkan, alat musik kulintang, pertama kali masuk ke Kecamatan Pedan juga adalah karena IPPI. Bahkan Rajiyo menjelaskan bahwa IPPI juga membantu meringankan beban ekonomi bagi pelajar yang tidak mampu dengan memfasilitasi mereka untuk dialog dengan pihak sekolah.

Selain kegiatan yang ditujukan untuk pelajar, IPPI juga terlibat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dengan ikut mendukung kegiatan organisasi afiliasi PKI lainnya, seperti terlibat pada kegiatan PR, BTI dan Gerwani. Keterlibatan pada gerakan kemasyarakatan itu tidak membawa bendera IPPI, tetapi dilakukan secara individu, sehingga identitas pemilik kegiatan adalah di luar IPPI.

Selain IPPI, organisasi yang berkembang pesat di Kabupaten Klaten adalah Pemuda Rakyat (PR). Fokus gerakan PR adalah sosial politik. Pada bidang sosial, PR melakukan berbagai kegiatan untuk membantu pengembangan masyarakat, seperti memelopori kerja bakti di kampung, penjagaan keamanan dan sejenisnya. Pada tingkat Kelurahan, PR menjadi pelopor kegiatan kepemudaan, seperti olahraga. Sebagai contoh, Jadi Mulyono menceritakan bahwa di Kelurahan Tlogowatu, meski tidak menggunakan bendera PR, tetapi motor penggerak sepakbola di kelurahan itu adalah PR. Apalagi lurahnya pada saat itu adalah aktivis partai (PKI). Kegiatan lain yang menonjol adalah di bidang politik. Setiap bulan, secara rutin PR mengadakan rapat di tingkat kelurahan. Berbagai informasi, baik dari CC sampai dengan CSS PKI, issue nasional dan lokal, serta perkembangan situasi di tingkat kecamatan dan kelurahan menjadi bahan diskusi dalam rapat. Jadi Mulyono menggambarkan PR sebagai tempat pendidikan politik, karena dalam organisasi itu berbagai issue yang berkembang di tengah masyarakat dibahas dan diambil tindakan atau aksi. Bahkan Mulyono menjelaskan bahwa pemihakan kepada masyarakat miskin sangat menonjol, karena selalu menjadi dasar dari pembahasan setiap issue dan aksi. PR menghendaki masyarakat terbebas dari penjajahan, termasuk penjajahan oleh kemiskinan struktural.

Organisasi lain yang relatif banyak anggotanya adalah Barisan Tani Indonesia (BTI). Sesuai namanya, aktivitas organisasi adalah untuk meningkatkan pengetahuan, produktivitas dan kesejahteraan petani (Sadiman Harto Suwarno). Peningkatan pengetahuan dilakukan dengan penyuluhan tentang jenis tanah dan tanaman yang cocok, cara merawat tanaman, cara membuat pupuk kandang atau kompos serta berbagai pengetahuan tentang pertanian. Bahkan Jemakir Kahono menjelaskan, di BTI juga diberi pengetahuan tentang kesehatan dan tanaman obat. Melalui pengembangan wawasan mereka, petani akan terdorong untuk meningkatkan produktivitasnya.

Peningkatan pengetahuan dan produktivitas ternyata tidak otomatis menambah tingkat kemakmuran petani. Salah satunya adalah sistem penyewaan tanah kepada pabrik gula. Sesuai dengan Surat Keputusan No. 863 tertanggal 31 Juli 1948, Kelurahan menjadi pihak

yang bernegosiasi dan menentukan harga sewa tanah kepada pabrik gula. Permainan antara pabrik gula dan Kelurahan sering merugikan petani secara ekonomi. Sebaliknya para pejabat Kelurahan menikmati berbagai keuntungan finansial. Melihat situasi itu, BTI bergerak untuk membela petani.

Tidak jarang perjuangan membela nasib petani mengharuskan BTI harus berhadapan dengan pemerintah, baik tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kabupaten. Dalam situasi seperti itu, aksi tidak hanya dilakukan oleh BTI, tetapi juga melibatkan PR, Gerwani dan bahkan IPPI. Ditinjau dari tujuan, aksi kelompok gerakan kiri itu adalah untuk mempengaruhi kebijakan publik, sehingga masuk kategori kegiatan politik. Secara garis besar, dalam bidang politik, kegiatan aktivis gerakan kiri diarahkan pada usaha mengkritisi dan mempengaruhi kebijakan pemerintah di tingkat Kabupaten. Keterlibatan itu bertujuan terutama untuk menjaga agar kebijakan publik menguntungkan rakyat kecil. Memperjuangkan semua yang menjadi masalah rakyat. Peraturan-peraturan yang menjadikan rakyat rugi, kita lawan” tegas Suto Sudi.

IV. GERAKAN KIRI KLATEN 1960AN

Pada periode ini aktivitas gerakan kiri di Klaten meningkat, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Ditinjau dari sasarannya, aktivitas gerakan kiri dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu perusahaan perkebunan, kelompok masyarakat yang oleh Aidit disebut sebagai “setan desa”, serta pimpinan pemerintahan, khususnya Bupati Klaten, M. Pratikto. Kepada perusahaan perkebunan, aktivis gerakan kiri menuntut dilibatkannya petani pemilik lahan dalam musyawarah sewa tanah, sehingga memperoleh harga yang adil. Permasalahan utama dalam persewaan lahan pertanian oleh pabrik atau perusahaan perkebunan adalah kurang dilibatkannya petani pemilik sawah. Seperti zaman penjajahan, perjanjian sewa menyewa dilakukan antara pabrik dengan pamong desa. Perbedaannya, kalau dahulu dengan sistem *glebagan*, sekarang menggunakan sistem *walik lubang*. Dalam sistem yang baru, perusahaan perkebunan menyewa tanah di suatu areal secara tetap dan hanya mengolahnya lagi setelah panen dilakukan. Problem lain yang diangkat oleh aktivis gerakan kiri adalah murahnya harga sewa apabila dibandingkan dengan hasil panen saat ditanami sendiri oleh petani. Suto Sandi sebagai salah satu eksponen BTI bersikeras menentang sewah tanah untuk tanaman tebu ditentukan oleh Kelurahan:

Saya bilang ketika itu, *pokoke carane nyewo* tebu harus atas dasar musyawarah dan mufakat. Jangan sampai membuat petani rugi. Umur tebu itu tiga kali panen padi. Jadi, kalau mau nyewa itu harganya harus hasil tiga kali padi. Saya sampai diancam, dimasukkan tahanan supaya saya tunduk. Tetapi saya tidak takut. Yang ngusut itu menginterogasi saya, misalnya, “*njenengan lahane mboten angsal disewo?*” setelah itu saya menjawab: boleh disewa, tapi tidak boleh merugikan petani, berdasarkan harga tiga kali panen padi. Lalu saya dibawakan mandor tebu, lalu dia bilang, saya minta berapa? Lalu saya bilang padanya, saya tidak mau kalau tidak semua orang dengan harga segitu. Saya tidak mau.

Kekerasan pendapat yang diungkapkan oleh Suto Sandi merupakan manifestasi dari keteguhan memperjuangkan nasib petani, meskipun resikonya tidak lah kecil. Akibatnya aktivis gerakan kiri harus berhadapan dengan pemerintah, baik tingkat kelurahan maupun kecamatan yang bertanggung jawab terhadap penyediaan lahan bagi perusahaan perkebunan. Perbedaan dan konflik kepentingan antara aktivis gerakan kiri dengan penguasa tidak jarang diwarnai kekerasan. Padmo (2000: 111-114) mencatat berbagai kekerasan yang muncul, antara lain sebagai berikut:

1. Kekerasan terhadap Perusahaan Tembakau, yaitu berupa pembakaran tempat penyimpanan tembakau (los) yang terletak di sebelah utara dukuh Prayan, kalurahan

Menden, kecamatan Kebonarum itu terjadi pada tanggal 4 Oktober 1963. Gudang kedua yang dibakar terletak di sebelah selatan dukuh Prayan, kalurahan Menden pada tanggal 4 November 1963. Pembakaran juga menimpa los tembakau milik PPN Wedi-Birit tersebut dan los tembakau milik PPN Baru Gayamprit.

2. Kekerasan terhadap Perusahaan Gula/Tebu, antara lain berupa perusakan sebagian besar tanaman tebu yang terletak di kalurahan Sentono kecamatan Karangdowo pada bulan April 1964. Selain itu, juga terjadi pembakaran kebun tebu di desa Ngawonggo kalurahan Ngawonggo kecamatan Ceper. Menurut laporan Angkatan Kepolisiani Resort Klaten, peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juli 1964 pukul 11.30.
3. Kekerasan terhadap Perusahaan Karung/Rosella terjadi dalam bentuk penolakan untuk menyerahkan lahan. Untuk tahun tanam 1964/1965 tanah areal yang ditetapkan untuk tanaman rosella di kecamatan Tulung tersebar di 11 kalurahan. Dari 11 kalurahan itu, petani yang mau menyerahkan tanahnya baru lima kalurahan, sedangkan sebanyak 360 orang petani dari enam kalurahan tidak bersedia menyerahkan tanahnya untuk kepentingan perusahaan perkebunan.

Selain perusahaan perkebunan, gerakan kiri juga menyasar kelompok “setan desa”, khususnya petani kaya. Langkah yang paling terkenal adalah aksi sepihak. Paling tidak ada permasalahan yang menjadi sasaran aksi sepihak para aktivis gerakan kiri, yaitu tanah absentee atau tanah yang pemiliknya berada di luar kecamatan setempat, pengolahan sawah dengan sistem bagi hasil dan penggadaian tanah. Padmo (2000: 121-122) mencoba menyusun pola Aksi sepihak yang terjadi di Klaten, yaitu diawali pada kecamatan di wilayah perbatasan: Prambanan di bagian barat dan Wonosari di bagian timur. Kedua kecamatan itu terletak relatif jauh dari kota Klaten, tetapi dari segi komunikasi mudah untuk dijangkau. Dari kecamatan perbatasan, gerakan Aksi sepihak meluas ke Kecamatan Jogonalan, Wedi dan Gantiwarno.

Aktivitas gerakan kirin Klaten pada tahun 1960-an yang terlihat semakin keras bukan tanpa alasan. Dari perspektif para aktivis gerakan kiri, kekerasan itu muncul karena musyawarah mengalami kebuntuan, terutama terkait dengan pelaksanaan berbagai UU dan peraturan pemerintah yang telah diundangkan pada tahun 1960. Para aktivis gerakan kiri menuntut berbagai peraturan itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen, tetapi berbagai pihak di Klaten dipandang justru menghambat.

Salah satu Undang-Undang yang dituntutkan oleh gerakan kiri adalah UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (UU PBH) yang disusun dengan tujuan a) agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil dan b) dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedang jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar; c) dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada a dan b diatas, maka akan bertambahlah kegembiraan bekerja pada para petani - penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pada caranya memelihara kesuburan dan mengusahakan tanahnya. Hal itu tentu akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi "sandang-pangan" rakyat (Penjelasan Umum point 3 UU No. 2 1960).

Pada Bab IV, Pasal 4, ayat 1 UU PBH dengan tegas diatur bahwa “Perjanjian bagi-hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah-kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun”. Akan tetapi di Klaten terjadi distorsi dan

deviasi yang dilakukan oleh Bupati M. Pratikto. Pada tanggal 10 Oktober 1960, Bupati mengeluarkan surat keputusan Nomor. 8/SK/4/60 yang isinya antara lain, (1) besar angka imbalan bagi hasil antara penggarap dan pemilik tanah untuk tanaman padi adalah satu dibanding satu dari hasil bersih, (2) untuk hasil polowijo perbandingan penerimaan hasil antara penggarap dan pemilik tanah adalah dua dibanding satu dari hasil bersih. Dengan keluarnya surat keputusan tersebut, Bupati Klaten mempertahankan sistem perjanjian bagi hasil yang berlaku secara turun temurun di daerah itu dan tidak bersedia melakukan perubahan untuk membela nasib petani penggarap.

Penyimpangan oleh Bupati juga terjadi pada pelaksanaan Undang Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA). Pada pasal 10 ayat 1 diatur prinsip dasar pemilikan tanah, yaitu: "Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan". Pengaturan lebih lanjut tentang kewajiban "mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif" dilakukan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961. Pada pasal 3 ayat 1 PP No. 224 dengan jelas diatur bahwa: "Pemilik tanah yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut". Bahkan pemerintah pusat juga telah mengatur pihak mana saja yang berhak memperoleh pelimpahan hak milik tersebut. Pada pasal 8 ayat 1 PP No. 224 tahun 1961 dengan jelas dituliskan tanah-tanah itu dibagi-bagikan dengan hak milik kepada para petani oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut prioritas: (a) Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; (b) Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; (c) Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan; (d) Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan; (e) Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik; (f) Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3; (g) Penggarap yang tanahnya garapannya kurang dari 0,5 hektar; (h) Petani atau buruh tani lainnya;

Bupati Klaten, M. Pratikto tidak menggunakan skala prioritas seperti tercantum pada PP No. 224 Tahun 1961. Dia memindahkan hak milik atas tanah pertanian dengan mengutamakan kepada saudara dari pemilik lama:

Panitia Landreform Daerah Klaten memprioritaskan petani yang mempunyai hubungan keluarga dengan bekas pemilik daripada urutan prioritas sebagai yang disebut oleh undang-undang. Alasan yang mendasari kebijaksanaan Panitia Landreform Kabupaten Klaten di dalam melaksanakan redistribusi tanah kelebihan karena berstatus tanah *absentee*, adalah bahwa pemegang hak atas garapan atau tanah *sanggan* di masa lampau mempunyai beban berat. Petani pemegang hak atas tanah pada masa penjajahan selain mempunyai hak untuk memetik hasil dari tanah yang digarapnya, juga mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap perusahaan perkebunan atau terhadap desa. Kewajiban dari pemegang hak atas tanah garapan terhadap perkebunan antara lain ialah berupa bekerja beberapa hari di dalam satu minggu tanpa dibayar (Padmo, 2000, hlm. 89).

Tindakan Bupati M. Pratikto yang membuat kebijakan berbeda dari, untuk tidak mengatakan bertentangan dengan, pemerintah pusat mengakibatkan keresahan di tengah masyarakat, terutama para aktivis gerakan kiri yang berusaha menegakkan pelaksanaan UU PBH dan UUPA. Dari sudut pandang ini, aksi sepihak yang dilakukan oleh para aktivis gerakan kiri dapat dipahami, karena hampir mustahil mengharapkan pemerintah daerah akan bersedia melaksanakan UU yang ditetapkan pemerintah pusat. Dengan kata lain, aksi sepihak merupakan perlawanan para aktivis gerakan kiri terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten yang menolak melaksanakan kebijakan pemerintah pusat.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Klaten menjadi basis gerakan kiri, salah satunya dikarenakan nasib petani yang memprihatinkan, terutama terkait dengan status kepemilikan tanah sejak zaman kolonial. Ketika Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan para pemimpin Kasunanan dipandang ingin mempertahankan feodalisme, sehingga mendorong terjadinya gerakan anti swapraja yang dipelopori oleh salah satu tokoh kiri Indonesia, yaitu Tan Malaka. Di Kabupaten Klaten, gerakan anti swapraja mencuat dalam bentuk pembunuhan bupati RT Pringgonegoro. Gerakan itu semakin meluas dan memuncak dengan berakhirnya Daerah Istimewa Surakarta dan kekuasaan politik Kasunanan.

Pengaruh gerakan kiri di Karesidenan Surakarta pada umumnya dan Kabupaten Klaten khususnya semakin kuat ketika ibukota RI pindah ke Yogyakarta. Daerah Surakarta menjadi basis kelompok oposisi, terutama kaum kiri. Pemogokan buruh di Badan Tekstil Negara (BTN) yang berkedudukan di Delanggu pada tanggal 19 Mei 1948 menjadi bukti kuatnya pengaruh aktivis gerakan kiri di Klaten. Pemogokan tidak hanya dilakukan oleh Sarikat Buruh Perkebunan RI (Sarbupri), tetapi juga oleh Barisan Tani Indonesia (BTI). Bahkan keduanya kemudian menggabungkan diri menjadi Lembaga Buruh dan Tani (LBT) untuk menghadapi BTN beserta Kementrian Kemakmuran.

Pengaruh golongan kiri pada tahun 1950-an semakin kuat. Hal itu terlihat antara lain dari kemenangan telak Partai Komunis Indonesia (PKI) pada PEMILU tahun 1955, yaitu memperoleh 204.869 suara. Jumlah itu lebih besar dari PNI dan Masyumi. Kuatnya pengaruh terhadap masyarakat tidak terlepas dari banyaknya aktivitas dan prestasi gerakan kiri di Klaten yang secara langsung dapat dirasakan oleh warga, terutama dari golongan rakyat miskin. Komitmen yang tinggi dalam membela rakyat miskin, menjadikan mereka bersimpati dan secara sukarela bergabung dalam berbagai kegiatan yang diadakan gerakan kiri, baik sebagai simpatisan maupun anggota. Simpati tidak hanya diperoleh dari petani dan buruh. Para pelajar dan generasi muda desa pun banyak yang bergabung dengan organisasi massa kiri, seperti IPPI dan Pemuda Rakyat.

Memasuki dasawarsa ke tujuh (tahun 1960-an), aktivitas gerakan kiri di Klaten mengalami kenaikan. Hal itu terutama disebabkan oleh diundangkannya UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (UU PBH) dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Kedua undang-undang itu berpihak pada kaum miskin pedesaan, terutama petani tidak bersawah. Oleh karena itu, gerakan kiri di Klaten mengambil langkah untuk mengawal pelaksanaannya agar tidak terjadi distorsi dan deviasi di lapangan.

Bupati Klaten, M. Pratikto mengambil berbagai kebijakan yang tidak hanya bertentangan dengan semangat yang terdapat dalam kedua undang-undang, tetapi juga melanggar berbagai pasal yang terdapat di dalamnya. Di pihak lain, aktivis gerakan kiri di Klaten memilih untuk tetap membela kepentingan kaum miskin dan tertindas di desa, meskipun resikonya sangat berat. Berbagai aksi sepihak dilakukan oleh aktivis gerakan kiri dengan tujuan agar petani tanpa sawah dapat memiliki sawah sendiri dan para penggarap dapat memperoleh bagian yang adil. Tidak sedikit aksi sepihak yang memperoleh keberhasilan, tetapi banyak pula yang berakhir dengan kegagalan.

B. Saran

Gerakan Kiri di Klaten pada tahun 1960-an memang kontroversial. Di satu sisi, berbagai pihak yang berkuasa, baik secara politik maupun ekonomi, merasa terusik dan terganggu oleh aksi para aktivis gerakan kiri yang tidak hanya melanggar berbagai peraturan daerah, tetapi

juga merugikan kepentingan mereka. Di sisi lain, kelompok petani miskin yang secara struktural tertindas dan terabaikan memandang aksi gerakan kiri sebagai kebaikan dan penyelamatan terhadap kehidupan mereka. Kontroversi itu menjadi bagian dari ingatan sejarah yang tak akan mampu dihapus dengan pembantaian besar-besaran yang terjadi pada tahun 1965.

Penelitian ini merupakan sebuah langkah awal, sehingga perlu dilakukan berbagai penelitian lain untuk dapat menemukan gambaran gerakan kiri secara lebih komprehensif. Salah satu saran terpenting dari penelitian ini adalah dilakukannya penelitian lanjut. Paling tidak ada kecamatan yang perlu secara intensif dilakukan penelitian, yaitu Wonosari di sebelah timur dan Prambanan di sebelah barat. Pada kedua kecamatan tersebut, gerakan kiri berlangsung cukup tinggi frekuensinya, bahkan dapat dikatakan sebagai paling tinggi.

Penelitian tentang gerakan kiri di Klaten sangat penting artinya, karena tidak sedikit dari aktivis yang telah meninggal dunia. Apabila tidak segera diteliti dan didokumentasikan, dikhawatirkan salah satu episode sejarah Indonesia akan hilang dan menjadikan periode 1950-1965 sejarah nasional menjadi semakin gelap.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidit, D. N., 1964. *Kaum Tani Mengganyang Setan-Setan Desa*. Jakarta: Yayasan Pembaruan.
- Cribb, R., 2001. "How Many Death?" dalam Ingrid Wessel and Georgia Wimhofer, ed, *Violence in Indonesia*. Hamburg: Ahera-Verl., 2001.
- Kasemin, K., 2004. *Mendamaikan Sejarah: Analisis Wacana Pencabutan TAP MPRS/XXV/1966*. Yogyakarta: LKIS.
- Kuntowijoyo, 2008. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Editor A. E. Priyono. Bandung: Mizan.
- Malaka, T., 2000. *Aksi Massa*. Jakarta: Teplok Press.
- Politiek en Cultuur*, Jurnal bulanan edisi Desember 1955. Amsterdam: Pegasus.
- Setiawan, H., 2003. *Kamus Gestok*. Yogyakarta: Galang Press.
- Soebandrio, 2006. *Yang Saya Alami Peristiwa G 30 S*. Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera.
- Padmo, S., 2002. *Landreform dan Gerakan Protes Petani Klaten: 1959-1965*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Tauchid, M., 2009. *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Yogyakarta: STPN Press.
- Vickers, A., 2005. *A History of Modern Indonesia*. New York: Cambridge University Press.
- Wardaya, B. T., 2006. *Bung Karno Menggugat!: Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal '65 hingga G30S*. Yogyakarta: Galang Press.

Surat Kabar dan Peraturan Pemerintah

- Arsip Kementrian Penerangan No. 242
- Kedaulatan Rakyat, 16 Januari 1946
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 56 Tahun 1960
- Surat keputusan Bupati KDH Tingkat II Klaten Nomor. 8/SK/4/60
- Undang Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

DAFTAR INFORMAN

| No. | Nama | Alamat |
|-----|-----------------------|---|
| 1. | Agustinus Mulyono | Tegal Mawen, RT 07, RW 04, Kedu, Klaten |
| 2. | Jadi Mulyono Kadilan | Sumberejo, RT 013 / 006, Tlogowatu, Kemalang, Klaten. |
| 3. | Jemakir Kahono | Sumberejo, RT 013 / 006, Tlogowatu, Kemalang, Klaten. |
| 4. | Marjino | Pedan, Klaten. |
| 5. | Sadiman Harto Suwarno | Sembung, Wedi, Klaten. |
| 6. | Slamet Setyo Raharjo | Jadilor, Kedungan, Pedan, Klaten |
| 7. | Suto Sandi | Pacing Wedi Klaten. |
| 8. | Tukiman Jarwo Widodo | Padon , Japanan, Cawas, Klaten |

KEDAULATAN RAKYAT DAN SOLOPOS: PILAR KEHIDUPAN BAHASA JAWA DAN KEBUDAYAAN LOKAL MASYARAKAT YOGYAKARTA DAN SURAKARTA¹

Heri Priyatmoko

Anggota Tim Kota Pusaka Surakarta (2014-)

e-mail: heripri_puspari@yahoo.co.id

Abstrak

Yogyakarta dan Surakarta dikenal sebagai pusat kebudayaan Jawa, terutama karena adanya Keraton Kasultanan dan Kasunanan Hadiningrat. Berbagai elemen budaya Jawa yang adiluhung bersumber dari keraton tersalurkan ke masyarakat salah satunya melalui pers berbahasa Jawa. Pada masa silam di Yogyakarta terdapat Sedyo Tomo, sementara di Surakarta ada Bromartani, Jurumartani, Retnodumilah, Dharmo Kondho, dan lainnya. Koran ini di masa lalu berperan penting dalam upaya pelestarian budaya Jawa sekaligus memberi ruang bagi pecinta budaya lokal yang sarat dengan pitutur luhur sebagai pondasi kepribadian. Kenyataannya sekarang, di kota bekas kerajaan ini terdapat media cetak Kedaulatan Rakyat yang beroplah 125.000 eksemplar, dan Solopos mencapai 35.000 eksemplar. Kedua koran tersebut menyediakan halaman berbahasa Jawa, yang hadir seminggu sekali. Di Kedaulatan Rakyat namanya Mekar Sari, dan Solopos ada Jagad Jawa. Adapun jenis kolomnya meliputi artikel, cerkak, macapatan, geguritan, kawruh Jawa, dongeng, dhudah buku, dan jagad pewayangan. Penelitian ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana kerja jurnalistik dan peran media dalam upaya memelihara dan menyebarkan budaya Jawa di wilayah perkotaan. Dari penelitian ini diketahui bahwa Kedaulatan Rakyat dan Solopos melalui suplemennya turut membantu meningkatkan peran bahasa dan sastra Jawa dalam menguatkan identitas lokal masyarakat pembaca. Suplemen bahasa Jawa mempunyai penggemar tetap terutama kalangan yang berumur tua dan para pendidik yang bersinggungan dengan materi kebudayaan Jawa. Media tersebut memberdayakan kebudayaan lokal, termasuk merawat sastra Jawa di tengah ancaman arus modernisasi. Materi yang disajikan ternyata sering digunakan untuk bahan mengajar pada guru di sekolah-sekolah.

Kata Kunci: Yogyakarta, Surakarta, koran, budaya Jawa

KEDAULATAN RAKYAT AND SOLOPOS : JAVANESE LIFE PILLAR AND LOCAL CULTURE OF YOGYAKARTA AND SURAKARTA SOCIETY

Abstract

Yogyakarta and Surakarta are well known as the Javanese cultural center, mainly because of the Sultanate Palace and Kasunanan Hadiningrat. The various elements of Javanese culture that derive from the palace are channeled to the society, one of them through Javanese press. In the past there was Sedyo Tomo in Yogyakarta, while in Surakarta there were Bromartani, Jurumartani, Retnodumilah, Dharmo Kondho, and others. These newspapers in the past played important role in the preservation of Javanese culture and to give space for local culture lovers which loaded with well spoken (pitutur luhur) as the foundation of personality. In fact now, in the ex-city kingdom contains printed media of the Kedaulatan Rakyat which prints 125,000 copies, and Solopos reaches 35,000 copies. Both newspapers provide Javanese pages, which present once a week. In Kedaulatan Rakyat is Mekar Sari, and Solopos is Jagad Jawa. The type of column includes articles, cerkak (Javanese short story), macapatan, geguritan (Javanese poem), kawruh Jawa, fairy tales, dhudah buku (book review) and jagad pewayangan (puppet world). This research is important to be done in looking at the extent the work of journalism and the role of the media in an effort to preserve and spread the Javanese culture in urban areas. From this research, it is known that Kedaulatan and Solopos through its supplements help improving the role of the Javanese and literature in strengthening local identity of public readers. The supplements of Javanese have many fans especially old people and teachers which contact with the Javanese cultural materials. Those media empower local culture, include looking after of Javanese literature in the threat of modernization. The materials which presented often used for teaching materials to the teachers at schools.

Keywords : Yogyakarta, Surakarta, newspapers, Javanese culture

Naskah masuk : 4 Juli 2014, revisi I : 22 Juli 2014, revisi II : 18 Agustus 2014 revisi akhir : 10 September 2014

¹ Tulisan ini dibuat tahun 2012. Data oplah koran dan jenis rubriknya mengacu pada tahun itu juga.

I. PENDAHULUAN

Kelestarian bahasa Jawa dan budaya lokal dewasa ini tidak bisa dilepaskan dari peran media. Ada pendapat bahwa keberadaan media berbahasa Jawa belum menjadi mainstream, melainkan hanya laksana klangen atau nostalgia. Sesuatu yang dipelihara karena terkait sejarah, harapan serta keyakinan. Pendapat tadi ada benarnya juga, karena saat kemakmuran tengah menghampiri perusahaan media di Indonesia, media berbahasa Jawa justru semakin terseok. Sebagai representasi pers berbahasa Jawa yakni, Djaka Lodhang (Yogyakarta), Panjekar Semangat dan Jayabaya (Surabaya), jumlah oplahnya menurun disebabkan merosotnya jumlah pembaca. Ketiga ini contoh media berbahasa Jawa kelas media cetak yang dikelola teratur, dengan misi-visi yang jelas. Perusahaan yang hendak mendirikan media berbahasa Jawa banyak yang berpikir ulang.

Atas pertimbangan bisnis, perusahaan menjadikan media berbahasa Jawa sebagai sisipan atau suplemen di dalam media berbahasa Indonesia alias tidak berdiri secara otonom. Begitu juga dengan model media elektronik yang menyisipkan siaran berbahasa Jawa, seperti di RRI Solo dan RRI Yogyakarta, Jogja TV, J-TV (Surabaya) dan TATV (Solo). Realitas ini sebagai wujud partisipasi pihak media yang berani mengeluarkan anggaran atau “merugi” (waktu dan uang) demi terpeliharanya bahasa Jawa. Kedaulatan Rakyat dan Solopos ialah koran yang menaruh simpati terhadap upaya pengembangan kebudayaan Jawa. KR melalui Mekar Sari dan Solopos bersama Jagad Jawa, terpanggil mengangkat, mendokumentasi, dan mengakrabkan bahasa Jawa sebagai aset penting warga Yogyakarta dan Surakarta agar tidak kian tereduksi oleh derasnya arus informasi dan modernisasi.

Tampaknya ada kesadaran historis dan ikatan kultural yang kuat dalam diri KR dan Solopos, karena kedua koran ini lahir dan besar di wilayah Keraton Kasultanan dan Keraton Kasunanan yang dulu merupakan sumber kebudayaan Jawa yang adiluhung. Bahasa Jawa, etika, dan nilai-nilai lokal berasal dari keraton mestinya dilestarikan dan diterapkan dalam kehidupan sosial. Didera rasa ketakutan bahwa bahasa Jawa dan kearifan lokal akan tersisih di kala Kota Yogyakarta dan Surakarta menjelma menjadi kota yang semakin modern, maka memasyarakatkan kembali khasanah kebudayaan Jawa melalui suplemen berbahasa Jawa merupakan salah satu solusi. Pokok permasalahannya adalah bagaimana daya juang dan kerja kebudayaan Mekar Sari dan Jagad Jawa yang mewadahi nilai-nilai luhur Jawa sebagai sumber kearifan dalam kehidupan bermasyarakat di tengah menonjolnya kepentingan bisnis perusahaan dan terpaan arus modernisasi. Penelitian ini untuk mencari jawaban dari persoalan tersebut.

II. PEMBAHASAN

A. Mekar Sari: Penjaga Jawa Dari Yogyakarta²

Mengagumkan, ialah kata yang tepat untuk mengekspresikan tindakan mulia Sri Sultan Hamengku Buwono X yang rela mengeluarkan uang demi membeli 3.000 *eksemplar* koran Kedaulatan Rakyat (KR) khususnya setiap hari Minggu. Karena, di hari itulah KR mengeluarkan rubrik Mekar Sari, sebuah suplemen berbahasa Jawa yang berisikan seputar kebudayaan Jawa. Raja Keraton Kasultanan yang sekaligus menjabat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ini memerintahkan, koran sebanyak 3.000 *eksemplar* itu dikirimkan kepada warga transmigran di Lampung yang berasal dari daerah Kulonprogo, Bantul, Gunung Kidul, dan Sleman.

² Terimakasih penulis haturkan kepada redaktur Mekar Sari, Bapak Sutopo Sugihartono yang telah meluangkan waktunya untuk bersedia diwawancarai di sela-sela kesibukannya. Atas budi baik beliau, bab ini bisa tersaji.

Transmigrasi yang didefinisikan sebagai gerakan memindahkan sekelompok orang dari wilayah padat penduduk ke tempat yang masih memerlukan ini, menurut Sri Sultan bukan berarti membuat para transmigran harus tercerabut dari akar budayanya, yakni Jawa. Dengan upaya yang telah dilakukan sejak tahun 2002 itu, Sultan berharap agar *kawula Ngayogyakarta* yang bermukim di tanah rantau tidak *kepaten obor* alias lupa pada keluarga besar manusia Jawa yang punya peradaban sendiri. Setelah menyimak kiriman Mekar Sari, ikatan historis dan ikatan emosional transmigran terhadap kampung halaman dan kebudayaannya setidaknya terpelihara meski dipisahkan lautan luas. Kehadiran Mekar Sari dianggap mampu mengingatkan siapa sebenarnya mereka (jati diri).³

Fakta di atas adalah sebuah meminjam istilah sastrawan Kuntowijoyo fenomena sensibilitas Jawa (Kuntowijoyo, 1994:227). Dalam banyak kamus, sensibilitas disamakan dengan sentimen, yang kurang lebih diartikan sebagai situasi emosional dan rasa. Juga perasaan tentang kesedihan, kegembiraan, dan cinta. Sensibilitas diperoleh dengan belajar, sebab orang Jawa yang berdiam di luar pulau Jawa tidak sanggup menangkap sensibilitas kejawaannya tanpa ada aspek belajar. Bahkan, *wong Jawa* tidak akan menjadi Jawa tanpa mempelajari atau mewarisi khazanah sensibilitas Jawa yang termuat dalam karya sastra, dongeng rakyat, kebajikan, dan ungkapan. Sekalipun yang pantas mengantongi sensibilitas Jawa ialah orang Jawa, bukan tidak mungkin orang luar Jawa bisa memiliki kualitas kejawaan. Jadi, sensibilitas Jawa merupakan kualitas terbuka, yang tidak terbatas pada orang Jawa saja.

Dengan kasus diterbangkannya 3.000 *eksemplar* Mekar Sari ke Lampung yang telah berlangsung selama sewindu lebih ini, dimaksudkan masyarakat transmigran asal Yogyakarta bisa tetap belajar demi menemukan sensibilitas kejawaannya, dan seolah masih tinggal di kampung halaman yang dekat dengan bahasa Jawa. Dipilihnya Mekar Sari untuk membentengi budaya Jawa supaya tidak luntur karena selain perhitungan praktis, juga menilik hubungan yang mengakar antara Mekar Sari dengan warga Yogyakarta. Relasi itu terbangun sejak lahirnya majalah Mekar Sari pada 1 Maret 1957 (Amanat Sejarah: Dari Pekik Merdeka Hingga Nurani Rakyat, 1996:47) dan terus berlanjut hingga “mati” menjelang reformasi dan berreinkarnasi menjadi rubrik khusus di KR.

Dari kacamata bisnis, suplemen ini sulit dibilang sebagai rubrik unggulan perusahaan. Betapa tidak, jika mendatangkan profit besar, pastinya perusahaan tidak perlu menyulap menjadikannya satu halaman meski diterpa krisis moneter. Namun, dilandasi semangat kultural, rubrik ini boleh dimaknai sebagai bukti kedaulatan kultural dan kepedulian KR terhadap nasib budaya lokal. Di satu pihak, ini strategi media memelihara kesetiaan pembaca yang *memetri* budayanya. Secara tidak langsung, juga menjaga citra Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa. Menurut pengampu halaman ini, dengan Mekar Sari menjadi suplemen, pembaca diibaratkan memasuki supermarket, malah diuntungkan dapat berbelanja (informasi) apapun. Jauh lebih komplrit dengan harga yang tidak terlalu mahal.⁴

Walau eksistensi Mekar Sari berupa sisipan, namun patut diacungi jempol. Kualitas isi maupun pengaruhnya sukar dipandang sebelah mata. Menurut redaktur, langkah Mekar Sari ditiru oleh media cetak lain. Contohnya, Suara Merdeka dengan “Pamomong” terbit hari Minggu, Joglosemar membikin “Serat” yang disodorkan hari Minggu, dan Solopos dengan lembaran “Jagad Jawa” muncul tiap Kamis. Suplemen berbahasa Jawa di atas terbit seminggu sekali, dan umumnya hari Minggu. Mengapa dipilih Minggu, pertimbangannya ialah hari libur dan waktu untuk *nglaras*. Dengan membaca koran berbahasa Jawa dan menengok

³ Sedangkan aksi lokal Gubernur DIY yang pro-kebudayaan ialah mengeluarkan SK yang mewajibkan Pemkab dan Pemkot tiap hari Sabtu menggunakan bahasa Jawa. Langkah ini merupakan sumber pendukung berkembang dan lestari suplemen Mekar Sari.

⁴ Ada penulis setia yaitu Gatot Marsono, menginginkan KR kembali menerbitkan Kala Warti Mekarsari dalam bentuk majalah seperti dulu. Baginya, memang ada kerinduan dan harapan. Gatot Marsono, “KR Tetap Konsisten Memimpin Kehendak Rakyat”, KR 27 September 2008.

kembali budaya lokal, kaum tua bisa *ngenggar-enggar penggalih*, sementara kaum muda lebih leluasa belajar bahasa Jawa.

Saat berbentuk majalah, Mekar Sari digawangi satu redaktur dan sembilan wartawan mengingat rubriknya begitu banyak dan variatif. Setelah susut diganti suplemen, hanya ditangani satu redaktur yang merangkap wartawan. Kolom yang sekarang disuguhkan Mekar Sari yaitu, *Cerkak*, *Macapatan*, *Geguritan*, *Pedhalangan*, *Kawruh Tembung*, *Petung Jawa lan Pawukon*, dan *Adiluhung*. Tak semua kolom versi majalah dapat terakomodasi dalam suplemen. Yang dihilangkan antara lain, *Njajah Milang Kori*, *Kapling Esem*, *Sedhut Kenyut*, *Oncek-oncek*, *Jamu Jawa*, *Percaya Ora*, *Cerbung*, *Cernak*, *Tokoh Wayang*, dan *Roman Sejarah*. Jajaran redaktur memilih tetap *ngopeni* rubrik *Cerkak*, karena diakui paling kaya peminat, baik dari kalangan penulis sastra Jawa maupun pembaca. Lagipula, itu iso diwaca kalaning nganggur (bisa dibaca saat senggang) layaknya novel panglipur wuyung. Sungguh, ini bukanlah sekadar misi romantisme, melainkan menyediakan tempat bagi peminat sastra Jawa untuk mengasah pena agar nadi sastra Jawa terus berdenyut, walau kemudian disebut sastra koran.

Dihadirkannya *Kawruh Tembung* (kamus kecil) dan *Petung Jawa lan Pawukon*, dilatarbelakangi oleh masyarakat Jawa dalam kehidupannya sulit terlepas dari ilmu hitung, misalnya mendirikan rumah, memulai usaha bisnis, *pranata mangsa*, dan pernikahan. Terkisah, suatu kali redaktur sengaja menghilangkan rubrik ini beberapa minggu, ternyata ada pembaca yang mengeluh lewat telepon. Mereka bertanya, apakah rubrik tersebut akan dihilangkan selamanya. Mereka tidak mau kehilangan, karena kamus bahasa Jawa sangat dibutuhkan untuk belajar anaknya, sedangkan *pawukon* untuk mengetahui baik-buruknya hari. Mekar Sari hidup di bawah naungan KR mengusung slogan “suara hati nurani rakyat” dan motto “*migunani tumrape liyan*”. Keluhan tadi murni suara rakyat dan sedapat mungkin koran ini hadir berfaedah bagi pembaca, maka kedua rubrik ini disajikan kembali.⁵

Rubrik *Pedhalangan* perlu disuguhkan lantaran berisi segudang tuntunan hidup. Dari segi kualitas cerita yang dikisahkan dengan bahasa Jawa krama dan ngoko sesuai derajat tokoh-tokoh wayang, maka pembaca dapat meresapi nilai-nilai kearifan yang tersirat karena itu sangat bermanfaat untuk pedoman hidup di dunia. Anak muda yang membaca rubrik itupun, entah karena orangtuanya berlangganan atau menemukannya di perpustakaan sekolah, minimal tahu akan kesopanan, sebab bahasa Jawa itu memiliki spiritualitas dengan mengajarkan etika dalam kehidupan sehari-hari lewat ungkapan *krama inggil*. Selanjutnya kolom *Adiluhung*, diisi para penulis yang biasanya sudah diminta redaktur untuk menuliskan pandangannya. Mereka antara lain, Dhanu Priyo Prabowo, Gatot Marsono, Moelyono, Mulyantara, Budiono Herusatoto, dan Suwardi Endraswara.⁶

Informasi dari redaktur, rubrik *Adiluhung* tidak membuka polemik antar penulis untuk saling menanggapi suatu persoalan lewat tulisan. Alasannya, meski Mekar Sari merupakan media yang mestinya memberi ruang terbuka untuk berwacana, namun redaktur menilai bahwa polemik dalam pemahaman orang Jawa dianggap kurang baik. Tidak setuju kalau

⁵ Motto lainnya, *Urip Agawe Urip*. Ketiga kata berbahasa Jawa itu bermakna, seluruh hidup kita harus selalu bernyala. Nyala tidak sekedar membuat hidup, tapi dari nyala itu akan selalu menghidupkan. Dalam keadaan lampu mati atau di dalam gua, sepercik nyala api sungguh sangat berarti. Sebaiknya, *urip ora mung sagebyaran nanging kudu tansah murub lan mubyar*. KR ingin selalu hidup dan menghidupkan seluruh elemen masyarakat. Juga motto *Bebarengan Mrantasi Gawe*, terpampang di billboard iklan KR di perempatan Kenthungan. Iklan bergambar tokoh wayang orang membantu *simbok-simbok* sebagai figur wong cilik, menunjukkan KR mempertahankan budaya lokal. Apalagi di era modern ini banyak orang memasang iklan dengan gaya yang menantang dan bombastis. Y Siyamta, “KR Penjaga Kearifan Lokal”, *KR* 04 Oktober 2008.

⁶ Menurut redaktur, penulis Mekar Sari yang aktif dengan latar sosial yang beragam, seperti Triman Laksana (wirasaha), Rita Nuryati (guru), Bambang Nugroho (PNS), Eko Nuryono (penulis), Projo Suwasono (abdi dalem), Sumarno (pensiunan), Misni (guru), Budi Wahyono (guru), Eni MS (ibu rumah tangga), Y Siyamta (pegawai swasta), Buyono (pensiunan), AY Untung Rusbintarto (pensiunan), Suyatno, Suwigyo Adi, Sri N Yani, dan lainnya. Sayangnya, Mekar Sari belum mewadahi organisasi pengarang sastra Jawa dan mengadakan pertemuan membahas nasib bahasa dan sastra Jawa. Juga belum menggelar lomba pemilihan karya terbaik Mekar Sari. Padahal, ini sesungguhnya langkah bagus untuk generasi muda agar menggeluti dunia sastra Jawa.

“pertengkaran” (*udreg-udrekan*) dipertontonkan kepada publik luas. Alangkah baiknya dirembug di luar media atau kedua pihak bertemu mendiskusikan tulisan yang dianggap kurang *sreg* menurut pemahamannya masing-masing. Para pengarang itu juga diposisikan sebagai pengontrol Mekar Sari. Melalui surat pembaca, pesan pendek, atau tatap muka secara personal, mereka dipersilahkan menyodorkan saran bila ada kesalahan penulisan bahasa maupun kurang tepat menguraikan ungkapan Jawa.⁷

Di mata pengelola Mekar Sari, *Macapatan* dan *geguritan* adalah rubrik primer. Terlebih adanya beberapa kelompok pendukung seperti Pamulangan Sekar Kraton Ngayogyakarta, Paheman Pametri Budaya Jawa Aji Natonagoro (Pura Pakualaman), dan paguyuban macapatan di hampir setiap kecamatan di Bantul yang sebagian diisi generasi muda. Mekar Sari diuntungkan pula oleh kantong budaya Tembi yang rutin menggelar acara *klangenan* nembang macapat oleh kaum sepuh. Dalam kaitan ini, kolom macapatan jelas bisa dipakai untuk bahan nembang, selain pipa penyaluran karya. Kemudian, tidak sedikit penulis SMP-SMA mulai rajin mengirim karya. Lahirnya penulis muda serta tumbuhnya kepercayaan diri mengirimkan tulisan berbahasa Jawa di media cetak umum, merupakan langkah berani yang patut diapresiasi. Bahkan, sekadar ingin tahu caranya mengirimkan naskah, mereka tidak segan bertanya ke kantor.

Belum lagi dari kalangan guru bahasa yang terbilang *anyar* sudah mulai berlomba memasukkan tulisan untuk meluweskan ketrampilan berbahasa Jawa dan mengasah talenta, terlepas kepentingan meraih poin sertifikasi. Juga bagi penulis pemula yang masih keliru menulis bahasa Jawa tidak merasa takut dan patah arang. Naskahnya akan dikembalikan disertai catatan redaktur dan diberi contoh. Redaktur berusaha tidak mematikan semangat penulis baru, tapi sebaliknya memompa mereka agar bersedia mengirimkan buah penanya lagi. Di sinilah, Mekar Sari boleh disebut rahimnya penulis sastra Jawa dan memegang peran pokok dalam menjaga kelestarian bahasa Jawa.

Belum lama ini Mekar Sari menggandeng Dinas Pendidikan DIY menerbitkan kumpulan cerkak. Sasarannya adalah siswa dan guru-guru bahasa Jawa SD, SMP, dan SMA sesuai dengan kurikulum pendidikan. Dalam kata pengantarnya, pihak penerbit mengatakan:

“KR minangka salah sijine benteng budaya Jawa ing Ngayogyakarta, lumantar terbite buku Kumpulan Cerkak Basa Jawa iki kepingin melu cawe-cawe murih lestarine sarta nguri-uri mekare sastra Jawa kang adiluhung... lan bisa keno kanggo tamba kangen para pendemen sastra Jawa, kang sa suwene iki ngelak lan ngorong wacan basa Jawa” (Sutopo, 2009).⁸

Tidak menutup kemungkinan penyebarluasan karya sastra Jawa ini mendorong kegairahan para penulis yang aktif berkarya di jalur sastra Jawa.

Kegiatan lainnya, KR radio setahun sekali menggelar lomba pembacaan cerkak yang dimuat di Mekar Sari. Peminatnya relatif banyak, dari segala umur. Dengan iming-iming hadiah, remaja terpancing mengikuti lomba, sehingga secara tak sadar mereka bersentuhan dengan bahasa Jawa. Mengingat fakta bahwa generasi muda kini banyak yang enggan menekuni bahasa ibu dan justru bangga mempelajari bahasa Inggris, dengan alasan lebih prospektif. Kegiatan lomba semacam ini sesungguhnya berfungsi menepis anggapan bahwa bahasa Jawa itu *ndeso*, bukan modal penting untuk berburu pekerjaan, tidak modern dan kurang gaul yang pada intinya menyisihkan bahasa Jawa.

⁷ Dokumen program kerja rubrik Mekar Sari tahun 2011, menjelaskan KR menggandeng perguruan tinggi seperti Fakultas Ilmu Budaya UGM dan Fakultas Bahasa dan Seni (prodi) Bahasa Jawa UNY sebagai narasumber budaya Jawa. Selain itu, juga merangkul komunitas Paheman Memetri Tosan/ Wesi Aji Yogyakarta sebagai narasumber rutin karena keris adalah warisan budaya nasional yang adiluhung dan telah mendapatkan pengakuan dari dunia.

⁸ Buku ini berisikan limabelas cerkak, dan duabelas othak-athik gathuk. Penulis cerkak antara lain, Arie Sudibyo, Budi Wahyono, Fadmi Sustiwi, Suwardi Endraswara, Sutopo SGH, Paija Sih SP, Triwahyono, Sugiarti Lestari W, Parjan Sudarmo, Magaze Hary, Soegiyono MS, M Haryadi Hadipranoto, Joko Budhiarto, Eko Nuryono, Warisman, dan Trimman Laksana.

Ditinjau dari segi bahasa, keistimewaan Mekar Sari menjauhi kata-kata bahasa Indonesia dalam tulisan, kendati banyak kosakata bahasa Indonesia yang terserap dalam bahasa Jawa dan menjadi bahasa obrolan sehari-hari. Untuk menggapai pembaca semua lapisan, bahasa yang dipakai Mekar Sari dominan bahasa Jawa *ngoko alus*. Tetapi, di satu pihak tetap memperhatikan unggah-ungguh bahasa. Uniknyanya, kosakata bahasa Jawa malah kerap dipakai dalam rubrik halaman umum, lantaran dianggap lebih tepat dan sesuai “rasa”. Tidak sedikit orang yang mengatakan KR lebih komunikatif. Berani menggunakan istilah-istilah Jawa yang lumrah di Yogyakarta seperti kata-kata: Sri Sultan *rawuh*, *Ngarsa dalem*, *garwa dalem*, *kagungan dalem*, *paugeran*, *sungkeman* dan sebagainya. Dengan bahasa yang komunikatif itu, KR berhasil mencapai keakraban dengan masyarakat pembaca. Hubungan antara KR dan pembaca terjalin mesra, sehingga KR terkesan populis.

Dalam aspek pemilihan tema, Mekar Sari juga enggan terpengaruh (terjebak) dengan isu nasional. Ulasan yang ditampilkan menyentuh masyarakat pembaca berpendidikan menengah ke bawah. Yang diangkat adalah isu lokal yang berkaitan dengan kebudayaan Jawa secara umum. Lagipula, Yogyakarta sebagai kota budaya banyak menampilkan kegiatan kebudayaan baik berupa pentas kesenian, pameran, diskusi, penelitian, pelatihan, pengerjaan kerajinan, dan pemeliharaan benda kesenian. Dengan berjubelnya aktivitas kebudayaan tersebut, Mekar Sari termudahkan dan jarang sekali kehabisan tema yang bersifat lokal. Sering pula redaktur mengupas hajatan keraton (potret tradisi besar) dan siklus hidup manusia Jawa. Sementara tradisi Jawa yang tumbuh di kawasan pedesaan, bersih desa misalnya, sudah tergarap dalam halaman daerah.

Bagaimanapun, Mekar Sari yang berolaplah 125.000 eksemplar laksana alarm peringatan bagi generasi muda yang telah “melupakan” bahasa Jawa dan budayanya sendiri, sekaligus memberi ruang bagi pemerhati dan pecinta budaya Jawa untuk semakin menggeluti ragam budaya miliknya. Manakala KR tumbuh dan kian berkembang menjadi koran bisnis yang kokoh, timbullah antara idealisme dan realisme. Idealisme menuntut supaya pers sebagai pilar kehidupan bahasa Jawa dan penjaga kebudayaan lokal tetap dijalankan oleh KR, buktinya ialah adanya suplemen Mekar Sari. Mekar Sari berkomitmen menunjukkan bahwa nilai-nilai dan budaya lokal tidak kalah bersaing di tengah perubahan masyarakat yang makin maju dan modern.

Teringat cerita Prof Mubyarto yang dikisahkan kepada wartawan tiga zaman, Rosihan Anwar bahwa KR adalah koran untuk “Yogyanees”. “Yogyanees” tidak bisa diterangkan, hanya bisa dirasakan. Ia terdapat dalam seluruh strata, mulai dari lapisan atas sampai *wong cilik*. “Yogyanees” tidak perlu harus orang Jawa, melainkan dari etnik lainpun bisa menjadi “Yogyanees” (Anwar, 1996:354).⁹ Buktinya ialah seorang Tionghoa yang rajin menulis di Mekar Sari bernama Koh Wat. Dia juga menerbitkan karya kumpulan geguritan. Dengan demikian, melalui Mekar Sari kuasa kata (pinjam istilah Ben Anderson) dan kebudayaan Jawa berhasil mencairkan identitas *liyan*. Kekuatan Jawa di Yogyakarta, selain bahasa Jawa *ngoko* ramai digunakan masyarakat non-Jawa yang tinggal di Kota Pendidikan ini, kekuatan “rasa” Jawa juga tidak jarang menempel dalam sukma mereka.

B. Jagad Jawa: Potret Idealisme Solopos¹⁰

Dalam kasus ini, koran Solopos jangan dipandang telah bertindak konyol, melainkan justru kita angkat topik setinggi mungkin. Betapa tidak, Solopos bersusah payah *ngopeni* Jagad Jawa dengan setiap bulannya harus merogoh kas perusahaan sebesar 40 juta. Itulah yang

⁹ Rosihan Anwar, “KR Sebagai Community Paper Sambung Rasa dengan Yogyanees”, dalam *Amanat Sejarah: Dari Pekik Merdeka Hingga Suara Hati Nurani Rakyat* (Yogyakarta: KR, 1996), hlm 354.

¹⁰ Terimakasih banyak penulis sampaikan kepada wartawan Jagad Jawa, Ichwan Prasetyo dan Damar Sri Prakoso yang rela diganggu waktunya untuk diwawancarai. Bab ini dapat diselesaikan atas bantuan mereka.

dilakukan media cetak beroplah terbesar di Kota Surakarta selama beberapa tahun terakhir. Dalam perspektif bisnis, rubrik berjumlah empat halaman ini belum bisa menjadi unggulan alias sulit mendatangkan laba. Namun, harap dimengerti bahwa mereka memaknai tindakan ini sebagai tanggungjawab sosial terhadap kota dan budaya masyarakat pembacanya.

Jagad Jawa lahir atas tawaran kerjasama Gubernur Jawa Tengah, Mardiyanto tahun 2007 yang berkeinginan membikin koran berbahasa Jawa. Gayung bersambut, Solopos dikucuri dana 250 juta dari alokasi APBD. Sebetulnya, di tahun 2002 Solopos juga menyimpan gagasan serupa. Hal ini dilatarbelakangi oleh permintaan masyarakat melalui *Kring Solopos* (di halaman umum) untuk menerbitkan media cetak berbahasa Jawa layaknya di Solo *tempo doeloe*.¹¹ Suplemen ini tampil di meja pembaca kali pertama tanggal 13 Maret 2007 (Tim Sutopo, 2007 : 57-58). Sayangnya, kerjasama Provinsi Jawa Tengah dengan Solopos hanya berjalan selama satu tahun (2008). Mau tak mau pihak Solopos harus menentukan sikap, yakni pilih menghentikan atau tetap memelihara Jagad Jawa dengan resiko menanggung biaya sendiri dan siap merugi. Setelah dibahas oleh jajaran redaksi, terutama mempertimbangkan soal peran media sebagai penopang hidup budaya lokal, maka Solopos berani memilih mempertahankan Jagad Jawa.

Rasa optimis makin tebal setelah menengok di Surakarta hidup beberapa lembaga resmi maupun nonformal sebagai pendukung Jagad Jawa secara substansi dan peminat. Mereka antara lain, Jurusan Sastra Daerah UNS, Prodi Bahasa dan Sastra Jawa Univet Sukoharjo, Akademi Kesenian Mangkunegaran, Taman Budaya Jawa Tengah, Pusat Lembaga Kabudayaan Jawa Surakarta, pasinaon dalang, kalangan Gereja Kristen Jawa, dan komunitas pamiworo yang tersebar di penjuru Surakarta. Dikatakan bahwa Jagad Jawa semula cuma membidik pembaca dari kalangan tua atau 50 tahun ke atas. Lantas suplemen ini diperkenalkan lewat brosur, iklan, dan jaringan radio. Dibagikanlah secara gratis kepada kalangan pensiunan di Bank Tabungan Negara dan Bank Rakyat Indonesia, karena di dua bank ini banyak nasabah golongan sepuh yang mengambil uang pensiun.

Secara teknis, suplemen ini ditangani oleh satu redaktur dan satu wartawan. Jagad Jawa menyediakan varian kolom. Halaman pertama *Purwaka*, berupa artikel dari pihak yang dirasa kompeten mengulas tema yang diangkat edisi itu. Bahasa yang dipakai ialah bahasa Jawa krama dan *ngoko alus*. Karakter tulisannya memberi perspektif tema yang dibahas. Penulis biasanya diminta oleh wartawan,¹² atau kadang-kadang diisi oleh wartawannya sendiri. Di lembar paling depan ini, tampilan gambar sengaja dipilih semenarik mungkin, merepresentasikan fenomena yang diangkat dan diharapkan mencuri perhatian pembaca agar mau menyimak suplemen. *Kawruh* berisi pengetahuan yang berkaitan dengan budaya Jawa, seperti keris (pamor), gamelan (instrumen), batik (motif dan maknanya). Rubrik ini laksana jendela memahami dunia Jawa yang diambil dari sumber pustaka. Berikutnya *Kring Jagad Jawa* menyediakan wadah bagi pembaca untuk mengirimkan kritik dan informasi dengan memakai bahasa Jawa. Namun, rubrik ini sepi peminat, belum tentu sebulan sekali terisi. Solusinya, wartawan memindahkan pesan dari *Kring Solopos* yang menyinggung budaya lalu dialihbahasakan.

¹¹ Secara historis, Solo basis perkembangan pers berbahasa Jawa. Masa kolonial hingga menjelang kemerdekaan, media berbahasa Jawa yang terbit di Solo antara lain Bromartani, Jurumartani, Retnodumilah, Dharmo Kondho, Pustaka Wartu, Penggugah, Budi Utomo, Islam Bergerak, Mawa, Jawi Kondho, Jawi Hisworo, Pustaka Jawi, Sasadara, dan Kejawen. Pasca kemerdekaan, koran berbahasa Jawa di Solo tinggal Dharmo Kondho, Dharma Nyata (menjadi tabloid Nyata), serta Parikesit. Menjelang paruh kedua dekade 1980-an, tiada lagi media berbahasa Jawa di Surakarta. K Sumarsih, "Menimbang Peluang Pers Berbahasa Jawa", *KR* 16 Februari 2010.

¹² Pengisi *Purwaka* adalah Imam Sutardjo (dosen dan dalang), Heri Priyatmoko (mahasiswa S2 UGM), Tunjung W Sutirta (dosen), Yan Tohari (penulis), Adi Deswijaya (dosen), Yunanto Sutyastomo (penggiat budaya), dan lainnya. Penulis yang rajin mengisi di rubrik lain: Dyah Saptorini, Indah Kurniawati, Sudiyah Artana, Y Siyamta, Masdi MSD, Dina SP, Al Aris Purnama, Alfons Sutarno, Abednego Alfriadi, Kunardi Hardjoprawiro, Endang Sulisyowati, Bambang Haryanto, Sumedi, Susanto Sagipah, P Dasihanyo FD, Wandyo Supriyatno, Harno Suparmin, Budi Wahyono, Sunarto, Domas Suryo Sri Prabowo dan lainnya. Mereka tidak hanya dari Surakarta saja, ada juga dari Yogyakarta, Semarang, Kediri, Ngawi, Pacitan, Magelang, dan Surabaya.

Halaman kedua, terdapat rubrik *Jagad Pamulangan* menyodorkan ulasan mendalam perihal kebudayaan Jawa disertai foto memikat. Selanjutnya *Cecala*, pemberitahuan tema yang hendak diangkat edisi depan. *Pawarta* memuat kabar peristiwa yang terjadi selama sepekan. Rata-rata mengenai seni pertunjukan yang sering digelar di Kota Solo. *Botheakan*, berisi aneka ungkapan Jawa yang dilengkapi penjelasannya. Berikutnya, *memetri basa Jawa* kolom aksara Jawa yang sangat membantu pembaca untuk mempelajari aksara Jawa. Dalam penggarapannya, Solopos menggandeng orang yang dinilai kompeten di bidang ini. *Cernak* adalah kolom cerita dunia anak-anak kiriman dari penulis. Bagi pengelola, rubrik yang dibumbui ilustrasi khas seperti *wacan bocah* ini dianggap penting. Selain menghibur pembaca, juga untuk menarik kalangan muda, serta menumbuhkan semangat penulis menggeluti dunia sastra Jawa. *Jagad Pewayangan* berisi tokoh wayang lengkap dengan karakternya.

Halaman tiga, ada rubrik *Jagad Sastra* merupakan artikel dari pembaca perihal bahasa Jawa dan budaya Jawa pada umumnya. Di sini, redaktur memberi kebebasan kepada penulis untuk berpolemik, sesuatu yang justru tidak dijalankan Mekar Sari. Pernah ada lima tulisan muncul secara berurutan memperdebatkan ihwal sastra Jawa. *Cerkak* ialah kolom cerita pendek yang dihiasi ilustrasi memikat. Ini merupakan ujung tombak suplemen atau magnet bagi pembaca. Wartawan tidak khawatir kekurangan stok tulisan, karena banyak penulis mengirimkan cerpen. Itu sebagai bukti bahwa sastra Jawa di ruang Jagad Jawa masih menggeliat. *Macapat* berisi tembang Jawa yang diambil dari *serat-serat*. *Geguritan* adalah puisi Jawa kiriman dari penulis. Rubrik tersebut diminati penulis luar Surakarta, seperti kelompok penulis dari Jepara yang mengirim secara kolektif lewat pos. *Dhudah buku* menyodorkan resensi buku yang ditulis wartawan dengan bahasa Jawa krama, misalnya *Babad Tanah Jawi* dan *Serat Damarwulan*.

Di halaman terakhir, rubrik *Krida* memuat hasil liputan wartawan mengenai aktivitas budaya seperti pameran, pentas seni, dan dilengkapi foto pendukung. *Kabare* adalah tulisan tentang tokoh yang mendedikasikan hidupnya untuk kebudayaan. *Gayeng kiyi* ialah kolom cerita lucu yang ditulis wartawan dari kisah sehari-hari maupun menyadur dari media online, kemudian alihbahasakan. *Othak-athik Gathuk* adalah teka-teki silang berhadiah, untuk mengasah ketrampilan pembaca terkait pemahaman kebudayaan Jawa. Di halaman ini, di pojok kanan bawah memuat kuliner tradisional Jawa seperti *rengginan*, gudeg, *oseng-oseng tempe*, *jangan tempe lombok ijo*, wedang ronde, dan kunir asem.

Dibandingkan Mekar Sari, dengan modal empat halaman sebenarnya Jagad Jawa leluasa bongkar-pasang kolom yang dinilai kurang bagus. Redaktur tidak mau memasukkan rubrik dunia lembut atau klenik yang *ora tinemu nalar* (tidak masuk akal), meski masyarakat menyukai hal itu. Redaktur ingin menyuguhkan yang ilmiah, yakni Jawa sebagai ilmu pengetahuan yang logis sehingga memberi sumbangsih pada publik. Perlu diketahui, suplemen ini dijadikan bahan diskusi kelompok mahasiswa Jurusan Sastra Jawa UNS. Dosen-dosen mendorong mahasiswa menulis di Jagad Jawa dengan iming-iming dapat nilai A. Juga dipakai sebagai bahan ajar anak SMP di daerah Sarangan, dan untuk bahan pembuatan Lembar Kerja Siswa (LKS). Seorang guru SMP Wonogiri bercerita, bahwa dirinya membeli Solopos hanya hari Kamis saja karena *gandrung* dengan Jagad Jawa. Dan, ia harus menempuh jarak setengah jam demi bisa menyentuh Jagad Jawa.

Memang, sekolah merupakan lahan potensial untuk diajak bekerjasama mengembangkan bahasa Jawa, seperti menggelar lomba nembang macapat dan membaca cernak yang dimuat di Jagad Jawa. Hanya saja, program semacam ini belum dikerjakan Solopos secara rutin. Tahun 2008, Solopos menggelar kegiatan membaca berjamaah Jagad Jawa di SD Colomadu, Karanganyar. Sang guru menyodorkan pertanyaan kepada siswanya

menggunakan bahasa Jawa. Jawaban murid diseleksi, dan yang menang memperoleh hadiah. Para peserta terlihat antusias dengan kegiatan tersebut. Guru sekolah di Klaten juga menugasi muridnya mencari materi di Jagad Jawa, dan mengirimkan geguritan yang dilombakan di sekolah ke Jagad Jawa. Semua ini serpihan bukti aksi pelestarian bahasa Jawa yang dilakukan pihak sekolah dengan Solopos.

Disoroti dari aspek bahasa, Jagad Jawa condong memakai bahasa Jawa ngoko alus lantaran dirasa lebih komunikatif, dan itu merupakan bahasa sehari-hari. Dalam surat pembaca, seorang perempuan Manado yang tinggal di Salatiga menulis, “*Solopos itu berbeda dengan media lainnya. Banyak suplemen ada di Solopos, seperti Jagad Jawa. Meskipun orang Manado, saya tertarik dengan bahasa Jawa di Solopos. Mau tidak mau, saya harus berhubungan dengan orang Jawa, sehingga harus bisa bahasa Jawa*”, (Tim Sutopo, 2007 : 107).¹⁶ Ditambah gagasan merangkul kaum muda sebagai pembaca tetap, maka bahasa Jawa ngoko adalah pilihan yang tepat. Argumentasinya, bila memakai bahasa Jawa krama, mereka ditakutkan melakukan resistensi. Mencampakkan suplemen yang memuat bahasa ibu dan kekayaan budaya Jawa, sehingga kita semua akan rugi. Karena dengan menyimak Jagad Jawa secara rutin, mereka setidaknya mengantongi pengetahuan mengenai Jawa.

Pengamat Jagad Jawa sering mengoreksi kesalahan penggunaan bahasa, misalnya kata “ketoprak”, seharusnya ditulis “kethoprak”. Tujuannya, mengevaluasi koran sebagai sarana pemeliharaan bahasa Jawa yang benar. Pengamatan penulis, banyak kosakata bahasa Indonesia yang mewarnai tulisan. Wartawan kurang berusaha keras mencari padanannya. Sebagai contoh: globalisasi, paling ayu (seharusnya *ayu dewe*), modernisasi, struktur, feodalisme, status, hierarki, ekologi, hedonis, folklor, vertikal, horisontal, kolektif, dan filosofi. Realitas ini rupanya berbeda dengan apa yang dilakukan redaktur Mekar Sari, yang semaksimal mungkin menghindari kosakata bahasa Indonesia. Wartawan Jagad Jawa berpandangan bahwa bahasa Jawa itu dinamis dan berkembang.

Dari segi tema yang diangkat, Jagad Jawa bertolak belakang dengan Mekar Sari. Tema yang digarap Jagad Jawa selain topik yang mengacu pada kalender nasional dan ritus tradisi, juga tertarik pada isu nasional seperti korupsi pejabat, kematian tokoh nasional, dan bisnis. Sesekali tema diusulkan oleh pemerhati budaya Jawa, baik melalui tatap muka, telepon, atau pesan pendek. Beberapa tahun silam, Solopos pernah mengumpulkan pengarang dan peminat Jagad Jawa yang fanatik untuk memberi masukan Jagad Jawa dan *ngrembuk* nasib budaya Jawa. Jumlahnya mencapai sekitar 30-50 orang. Namun, sayang agenda itu kini berhenti.

Solopos berolah 35.000/hari, dimana 70% pelanggan dan 30% eceran (Yulianti, 2009 : 69). Selain itu penggemar Jagad Jawa dari luar Solo bisa mengaksesnya via internet. Dengan suplemen Jagad Jawa, Solopos optimis menjadi pilar penyangga kehidupan bahasa Jawa dan budaya lokal di Surakarta. Harus diakui bahwa dari segi ekonomi perusahaan, pengaruh Jagad Jawa memang tidak signifikan. Malah sebaliknya, perusahaan merugi puluhan juta untuk *ngopeni* rubrik berjumlah empat halaman itu. Namun, dari segi kepuasan konsumen, Jagad Jawa merupakan bentuk *service* terhadap pembaca, sekaligus berpartisipasi mengajak pembaca untuk melestarikan budaya Jawa dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam kegiatan bermasyarakat.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Disimpulkan bahwa kedua suplemen ini merupakan bentuk “kerja kebudayaan”. Mekar Sari dan Jagad Jawa adalah penampung sumber kearifan dalam kehidupan bermasyarakat, dan

bukan sebatas ruang ekspresi bagi peminat sastra Jawa dan menguatkan citra kota sebagai pusat kebudayaan Jawa. Dengan membaca berbagai rubrik yang tersaji, masyarakat secara langsung dapat belajar kebudayaan Jawa sekaligus mempraktekan bahasa Jawa krama dan Jawa ngoko alus. Kemudian, terjalannya kerjasama antara koran dengan berbagai lembaga terkait yang mengangkat bahasa Jawa dan mempertahankan kearifan lokal Jawa menjadi nilai plus bagi Kedaulatan Rakyat dan Solopos. Karena, untuk melestarikan bahasa Jawa bukan hanya omong belaka, melainkan perlu kerja konkret. Apa yang telah diperbuat Kedaulatan Rakyat dan Solopos merupakan kerja kongkret, apalagi bukan semata-mata pamrih uang. Fungsi sosial-kultural yang dilakukannya mengantarkan kedua koran tersebut menjadi salah satu pilar kehidupan bahasa Jawa dan kebudayaan lokal masyarakat Yogyakarta dan Surakarta.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Daerah dan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa perlu memberi penghargaan kepada KR dan Solopos (termasuk koran lain yang menyediakan suplemen berbahasa Jawa), agar kian bulat tekadnya mengusung misi pelestarian bahasa Jawa dan kebudayaan Jawa. Penghargaan tersebut bisa diberikan saat acara kongres Bahasa Jawa, perayaan bulan bahasa, atau hari pers nasional. Dengan begitu, pihak media akan merasakan kepedulian (kemauan politik) dari pemerintah untuk bertekad dan saling bahu-membahu pengembangan bahasa Jawa agar tetap eksis.

Tidak bisa dipungkiri, eksistensi Keraton Kasultanan dan Kasunanan yang diakui sebagai *punjering kabudayaan Jawi* memerlukan bantuan media massa untuk menyalurkan nilai-nilai kearifan dan *kawruh Jawa* yang tersimpan di dalam tembok istana (termasuk yang tersirat dalam *serat-serat* yang dikoleksi perpustakaan keraton) agar sampai ke tengah masyarakat, dan diamalkan dalam kehidupan sosial. Begitu juga sebaliknya, pihak media membutuhkan *kawruh* yang berasal dari kedua kerajaan warisan Mataram Islam itu untuk bahan yang akan disajikan kepada pembaca. Maka, realitas ini dimaknai sebagai sebuah hubungan simbiosis mutualisme antara Keraton Kasultanan dan Kasunanan dengan Kedaulatan Rakyat dan Solopos.

B. Saran

Saran untuk perusahaan koran yaitu, para redaktur merupakan penjaga gawang yang semestinya teliti dan berani menolak kosakata bahasa Indonesia dan menggantinya dengan bahasa Jawa. Jangan sampai setelah tulisan diturunkan banyak bahasa Indonesia yang ditemukan karena semangat kita adalah melestarikan bahasa daerah. Kemudian tema yang diangkat sedapat mungkin merupakan isu lokal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Jawa dan keraton karena untuk kian mendekatkan ikatan kultural dan ikatan emosional pembaca, tidak perlu terjebak isu nasional meski digarap dari sudut pandang Jawa. Sekali lagi, Mekar Sari dan Jagad Jawa adalah bukti nyata idealisme koran untuk *nguri-uri* bahasa Jawa di negeri ini, pantas diapresiasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, R., 1996. "KR Sebagai Community Paper Sambung Rasa dengan Yogyanees", dalam *Amanat Sejarah: Dari Pekik Merdeka Hingga Suara Hati Nurani Rakyat* (Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat).
- Kedaulatan Rakyat, 1996. *Amanat Sejarah: Dari Pekik Merdeka Hingga Suara Hati Nurani Rakyat* (Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat).
- Kuntowijoyo, 1994. *Demokrasi dan Budaya Birokrasi*, (Yogyakarta: Bentang).
- Marsono, G., 2008. "KR Tetap Konsisten Memimpin Kehendak Rakyat", *Kedaulatan Rakyat* 27 September.

- Sumarsih, K., 2010. “Menimbang Peluang Pers Berbahasa Jawa”, *Kedaulatan Rakyat* 16 Februari.
- Sutopo SGH (editor), 2009. *Kumpulan Cerkak Basa Jawa*, (Yogyakarta: *Kedaulatan Rakyat*).
- Siyamta, Y., 2008. “KR Penjaga Kearifan Lokal”, *Kedaulatan Rakyat* 04 Oktober.
- Tim Solopos, 2007. *Solopos: Satu Dasawarsa Meningkatkan Dinamika Masyarakat*, (Surakarta: HU Solopos).
- Yulianti, E., 2009. “Media Cetak Berbahasa Jawa dan Pelestarian Budaya Jawa”, *skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi, UNS*.

MENJADI MELAYU: PEREMPUAN JAWA SEBAGAI AGEN TRANSFORMASI SOSIAL DALAM MASYARAKAT JAWA DI SEMENANJUNG MALAYA TAHUN 1900-2000

Lucia Juningsih

Program Studi Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
Jalan Affandi, Mrican, Yogyakarta. Kontak 0816684441
e-mail:luciayuning@yahoo.com

Abstrak

Pada tahun 1900-an, sejumlah etnis Jawa bermigrasi ke Semenanjung Malaya, untuk bekerja di perkebunan karet dan kemudian juga di kebun karet milik etnis Melayu. Di perkebunan karet, buruh Jawa bekerja bersama-sama dengan buruh Cina dan India. Mereka dapat berinteraksi namun sulit melakukan adaptasi budaya karena perbedaan tradisi dan budaya. Sementara itu, buruh Jawa yang bekerja di kebun karet milik etnis Melayu dapat berinteraksi dengan etnis Melayu karena kesamaan budaya, bahasa dan agama. Di perkebunan karet, mereka bekerja selama dua tahun. Selesai bekerja sebagian di antara mereka pulang ke Jawa, sebagian memutuskan menetap di Semenanjung Malaya. Mereka yang menetap melakukan berbagai strategi dalam upaya membangun masa depan salah satunya menjadi etnis Melayu. Studi ini hendak membahas persoalan mengapa dan bagaimana perempuan Jawa mengambil bagian dalam transformasi sosial dari etnis Jawa menjadi etnis Melayu?

Kata kunci: orang Jawa, orang Melayu, adaptasi, transformasi

BECOMING A MALAY : JAVANESE WOMAN AS SOCIAL TRANSFORMATION AGENTS ON JAVANESE SOCIETY IN MALAY PENINSULA 1900 - 2000

Abstract

In the 1900s, there were a number of Javanese ethnic migrated to the Malay Peninsula. They worked in the rubber plantations and then they also worked in the rubber smallholding owned by the ethnic of Malays. In the rubber plantations, the Javanese laborers worked together with the laborers from Chinese and Indian. They could establish social interaction, but it was difficult for them to adapt because of the differences in cultural and traditions. Meanwhile, the Javanese laborers who worked in the rubber smallholding that belongs to the Malays could interact with the ethnic of Malays because of the similarities in culture, language and religion. In the rubber plantations, they worked for two years. After their work contract finished, most of them went back to Java, some decided to settle in the Malay Peninsula. Those who settled there created some different strategies to build their future; one of the strategies was to be Malay. This study to discuss the problems how and why Javanese women took part in social transformation from ethnic Java to Malays

Keywords: Javanese, Malaynese, adaptation, transformation

I. PENDAHULUAN

Menurut sensus penduduk tahun 1891, jumlah penduduk Hindia Belanda di *Federated Malay States* (meliputi wilayah Perak, Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan) dan di *Straits Settlements* (meliputi wilayah Malaka, Singapore, Penang, Labuan di pantai utara Borneo, Pulau Christmas dan Pulau Cocos-Keeling di selatan Sumatera) diperkirakan sebanyak 20.307 orang. Di antara penduduk Hindia Belanda, etnis Jawa yang paling banyak jumlahnya yakni 14.239 orang, diikuti oleh etnis Boyan sebanyak 3.161 orang, etnis Bugis sebanyak 2.168 orang, etnis Aceh sebanyak 621 orang dan etnis Batak sebanyak 228 orang (Dun Jen, 1982: 1; Bahrin, 1967: 272) Jumlah perempuan Jawa diperkirakan sebanyak 20%-30% dari etnis Jawa, yakni antara 2.848-4.272 orang, dan jumlah laki-laki sebanyak 11.391-9.967 orang. Sebagian besar etnis Jawa tersebut bekerja sebagai buruh di sejumlah kebun seperti kebun kopi, ketela pohon dan kelapa (*Report of the Commissioners appointed to Enquire into*

the State of Labour in the Straits Settlements and Protected Native States, 1891: evid. 30, 111).

Pada dekade pertama abad ke-20, jumlah etnis Jawa menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 1901, jumlah etnis Jawa sebanyak 17.578 orang, terdiri dari perempuan sebanyak 5.025 orang dan laki-laki sebanyak 12.557 orang (Bahrin, 1967: 272). Etnis Jawa tersebut bukan *smallholders* (pekebun-pekebun kecil) melainkan sebagai buruh perkebunan (Bahrin, 1967: 272). Menurut sensus penduduk tahun 1947, etnis Jawa di Malaya (*Federated Malay States*, *Unfederated Malay States* dan *Straits Settlements*) sebanyak 187.755 orang (Del Tufo : 74) atau sekitar 60% dari jumlah penduduk Hindia Belanda di Malaya, lebih dari separonya adalah perempuan. Rasio antara perempuan dan laki-laki Jawa adalah 792 perempuan per 1000 laki-laki (Del Tufo : 74) Jumlah perempuan Jawa itu lebih kecil dibandingkan jumlah perempuan dari etnis lainnya yakni Boyan (864 perempuan per 1000 laki-laki), Banjar (989 perempuan per 1000 laki-laki) dan Bugis (876 perempuan per 1000 laki-laki) (Del Tufo : 74).

Jumlah penduduk Hindia Belanda di Malaya (wilayah yang meliputi *Federated Malay States*, *Unfederated Malay States* dan *Straits Settlements*) pada tahun 1911, sebanyak 117.800 orang, tahun 1921 sebanyak 170.200 orang, tahun 1931 sebanyak 280.600 orang, dan tahun 1947 sebanyak 309.100 orang (Bahrin, 1967: 275) Pada tahun 1957, jumlah penduduk Hindia Belanda di Malaya sebanyak 342.600 orang (Bahrin, 1967: 272) Pasca proklamasi kemerdekaan Malaysia tahun 1957, sejumlah laki-laki dan perempuan Jawa memutuskan menetap di Malaysia, menjadi penduduk bumiputera (Juningsih, 2014: 17) Berdasarkan angka tersebut dapat dikatakan, jumlah penduduk Hindia Belanda di Malaya menunjukkan kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan ini karena bertambahnya etnis Jawa yang datang ke Malaya dan lahirnya anak-anak keturunan Jawa. Sehubungan dengan hal ini, menurut dokumen pemerintah kolonial Inggris, pada dekade pertama abad ke-20 terdapat sejumlah anak keturunan Jawa lahir di perkebunan karet (*Proceedings of the Federal Council of the Federated Malay States for the Year 1909-10*, 1911: appendix c).

Setidaknya hingga akhir abad ke-20, terdapat sejumlah perempuan keturunan Jawa di Malaysia, namun demikian aktivitas mereka belum banyak dibahas. Ada sejumlah kajian mengenai etnis Jawa di Semenanjung Malaya, namun tidak membahas perempuan. Kajian itu antara lain yang dilakukan oleh Khazin Mohd. Tamrin dan T. Shamsul Bahrin. Dalam studinya mengenai Orang Jawa di Selangor (1984), Khazin membahas latar belakang migrasi, penempatan dan asimilasi orang Jawa di Teluk Pulai, Selangor (Tamrin, 1984) Sementara itu, Bahrin dalam beberapa kajiannya yakni *the Pattern of Indonesian Migration and Settlement in Malaya* (Bahrin, August 1967), *Indonesian Labour in Malaya* (Bahrin, June 1965), *the Growth and Distribution on the Indonesia Population in Malaya* (Bahrin, 1967) *the Indonesian Immigrants and the Malays of West Malaysia: a Study in Assimilation and Integration* (Bahrin, 1970) membahas aktivitas orang Indonesia. Dalam berbagai kajian itu, etnis Jawa dibicarakan dalam kaitannya dengan orang Indonesia lainnya. Selain itu, etnis Jawa yang dibahas adalah laki-laki, sedangkan perempuan tidak dibahas. Seolah-olah perempuan Jawa itu pasif, apatis, tidak kreatif dan tidak memiliki peran dalam sejarah maupun dalam transformasi sosial. Oleh karena itu, perlu dikaji peran perempuan Jawa sebagai agen transformasi sosial dalam keluarga dan komunitasnya.

II. MENJADI MELAYU

A. Di Perkebunan Karet

Pada dekade pertama abad ke-20, sejumlah pengusaha asing seperti orang Eropa (Inggris, Perancis), Amerika Serikat, dan sejumlah orang Cina dan India membuka usaha

perkebunan karet di Semenanjung Malaya (Dun Jen, 1982: 85-86). Kebanyakan perkebunan karet itu dibuka di daerah yang jauh dari pemukiman penduduk. Padahal dalam penyelenggaraannya, perkebunan karet memerlukan tenaga kerja dalam jumlah yang besar, selain lahan yang luas dan modal yang juga besar. Kebutuhan tanah dapat dipenuhi dengan cara membuka hutan belantara. Sementara itu, kebutuhan tenaga kerja sulit dipenuhi karena penduduk setempat jumlahnya kecil dan kebanyakan dari mereka tidak mau bekerja sebagai buruh kasar upahan, karena alasan ekonomi dan kultural yakni malu dan gengsi (Juningsih, 2014: 4) Dalam upaya memperoleh tenaga kerja, perkebunan karet mendatangkan buruh dari berbagai wilayah yang padat penduduknya yakni dari India, Cina dan Jawa. Dalam prosesnya, mendatangkan buruh dari Jawa tidak mudah karena beberapa alasan. Pertama, harus melibatkan dua pemerintah yang berbeda yakni pemerintah Hindia Belanda dan pemerintah kolonial Inggris, yang masing-masing mempunyai kepentingan ekonomi dan politik. Kedua, pemerintah Hindia Belanda melalui Ordonansi No. 8 Tahun 1887 melarang pengiriman buruh pribumi ke luar wilayah Hindia Belanda. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, untuk menjamin ketersediaan buruh bagi perkebunan-perkebunan yang sedang berkembang pesat, baik di Jawa maupun Sumatera. Oleh karena larangan itu, kemudian dilakukan serangkaian lobi-lobi dan pembicaraan antar dua pemerintah tersebut. Pembicaraan dua pemerintah itu menghasilkan kesepakatan berupa dua peraturan yakni *Netherlands Indian Labourer's Protection Ordinance 1908 (NILPO)* yang berlaku untuk wilayah *Straits Settlements* dan *Netherlands Indian Labourer's Protection Enactments 1909 (NILPE)* yang berlaku untuk wilayah *Federated Malay States*. Berdasarkan *NILPE* itu perkebunan karet melakukan rekrutmen buruh Jawa secara langsung (Juningsih, 2014: 95-98).

Pada awal kedatangan, kebanyakan etnis Jawa bekerja sebagai buruh kontrak di perkebunan karet (*Proceedings of the Federal Council of the Federated Malay States for the Year 1909-10*, 1911: appendix c) Selain buruh Jawa, perkebunan karet juga menggunakan buruh India dan buruh Cina (Del Tufo : 76-79) Pada masa awal penanaman karet, perkebunan memperoleh buruh Jawa dan India yang sebelumnya bekerja di lahan pertanian ekspor, dan buruh Cina yang sebelumnya bekerja di pertambangan timah. Buruh Cina itu tidak lagi bekerja di pertambangan timah, karena ada pengurangan tenaga kerja sebagai akibat dari mekanisasi dalam penambangan timah (*Report of the Commissioners appointed to Enquire into the State of Labour in the Straits Settlements and Protected Native States*, 1891; Jackson, 1961: 141-146 dalam Juningsih, 2014: 96) Jumlah buruh Cina dan India yang bekerja di perkebunan karet lebih besar dibandingkan jumlah buruh Jawa, walaupun demikian buruh Jawa tetap diminati karena dapat diupah murah.

Berdasarkan sejumlah etnis yang bekerja itu, dapat dikatakan masyarakat perkebunan karet bersifat multietnis. Setiap etnis memiliki tradisi dan budayanya sendiri yang berbeda dengan etnis lainnya. Persoalannya adalah apakah di perkebunan karet terjalin interaksi sosial antar buruh dari berbagai etnis yang berbeda? Di perkebunan karet terjalin interaksi sosial antara buruh Jawa dengan buruh India dan buruh Cina. Akan tetap dalam proses interaksi sosial itu tidak terjadi adaptasi budaya, sebab perbedaan yang begitu tajam antara buruh Jawa dengan buruh India dan buruh Cina, seperti perbedaan agama, bahasa, tradisi, budaya, bahkan fisik dan warna kulit (*Labor condition in British Malaya*”, dalam Juningsih, 2014: 197) Oleh karena tidak terjadi adaptasi budaya, transformasi sosial juga sulit terjadi. Hal ini karena adaptasi merupakan prasyarat bagi terjadinya transformasi sosial. Dengan demikian dapat dikatakan, di kalangan buruh Jawa di perkebunan karet sulit terjadi transformasi sosial (Juningsih, 2014: 201) Lalu apa peran buruh perempuan Jawa dalam keluarga di perkebunan karet?

Sebelum menjelaskan persoalan ini, perlu dipahami status buruh perempuan Jawa dalam keluarga, sebab status menentukan peran mereka. Status buruh perempuan Jawa di

perkebunan karet di Semenanjung Malaya dalam keluarga sama dengan status perempuan Jawa dalam komunitas aslinya yakni Jawa (Wawancara dengan Bunyamin Ramlan) Status dan peran perempuan Jawa tersebut sangat ditentukan oleh budaya yang dianut masyarakatnya yakni budaya patriarkat. Sejumlah etnis Jawa melakukan migrasi ke Semenanjung Malaya bukan dengan tangan kosong, melainkan membawa serta seluruh sistem sosial dan budaya termasuk budaya patriarkat. Dalam budaya patriarkat, perempuan berstatus menikah berperan sebagai ibu rumah tangga, pendamping suami, mendidik anak dan mencari nafkah, sedangkan perempuan lajang membantu keluarga dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dan mencari nafkah (*Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera. IXb²*, 1914): 1) Dalam budaya ini, perempuan dipandang memiliki fisik yang lemah, emosional, irasional, pasif dan apatis. Sementara itu, laki-laki dipandang kuat, perkasa dan rasional. Pandangan ini membawa implikasi yang luas pada status dan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Perempuan mendapat bagian pekerjaan yang sifatnya domestik atau kerumahtanggaan, sedangkan laki-laki mendapat bagian pekerjaan yang sifatnya publik. Dalam masyarakat patriarkat status perempuan dipandang lebih rendah dari laki-laki, karena itu laki-laki dibenarkan menguasai atau mendominasi perempuan.

Salah satu peran perempuan berstatus menikah dalam keluarga yakni sebagai ibu. Tugas sebagai ibu yakni mengasuh dan mendidik anaknya. Akan tetapi bagaimana peran sebagai ibu dapat dijalankan, karena sepanjang hari mereka bekerja di lahan karet? Perempuan tidak membawa anaknya yang baru lahir atau yang berusia di bawah 7 tahun bekerja di lahan, melainkan menitipkan anaknya di tempat penitipan yang disediakan oleh perkebunan karet. Hal ini mereka lakukan supaya anaknya ada yang mengurus sehingga mereka dapat bekerja, sebab jika tidak bekerja mereka dianggap melanggar kontrak dan mendapat sanksi seperti pemotongan upah atau upah tidak dibayarkan (Juningsih, 2014: 207; Ahearne, 1932: 17) Dapat dikatakan, selama bekerja buruh perempuan Jawa menyerahkan pengasuhan dan pendidikan anaknya pada pengasuh, yang disediakan oleh perkebunan karet. Setelah selesai bekerja, buruh perempuan Jawa mengambil anaknya kembali untuk diasuh dan dididik sendiri (Juningsih, 2014: 207) Sementara itu, anak-anak yang berusia di atas 7 tahun dikirim ke sekolah yang juga disediakan oleh perkebunan karet. Penyelenggaraan sekolah ini berdasarkan kebijakan wajib sekolah bagi anak-anak usia 7-14 tahun, yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Inggris (Ahearne, 1932:17) Berdasarkan data, tidak banyak anak yang masuk sekolah karena mereka lebih senang bekerja di lahan sebab mendapat upah, yang sekaligus membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari (Salleh, 1985: 142; Thompson, 1947: 84).

Di perkebunan karet yang bersifat multietnis, secara sosial dan budaya buruh Jawa tetap sebagai orang Jawa, sama seperti dalam komunitas aslinya. Hal ini terjadi karena jumlah buruh Jawa di perkebunan karet relatif banyak, sehingga memungkinkan mereka menyelenggarakan tradisi dan budayanya sendiri. Selain itu, mereka tinggal di perkebunan karet yang bersifat multietnis yang masing-masing etnis menjaga dan memelihara tradisi dan budayanya sendiri. Buruh Jawa merasa tradisi dan budayanya lebih unggul dibandingkan tradisi dan budaya dari etnis lain. Oleh karena itu, mereka menutup diri terhadap budaya luar. Bahkan untuk menjaga kemurnian darah Jawa, mereka menolak perkawinan campur. Berdasarkan catatan pemerintah kolonial Inggris, di perkebunan karet terjadi perkawinan antar buruh Jawa (*Proceedings of the Federal Council of the Federated Malay States for the Year 1909-10*, 1911: c72) Dapat dikatakan buruh Jawa di perkebunan karet hidup secara eksklusif. Hal ini dapat dilihat dari perilaku, sikap dan simbol-simbol Jawa yang digunakan, seperti menggunakan nama Jawa, berbahasa Jawa halus (*Jawa krama*) dan Jawa kasar (*Jawa ngoko*), menikmati makanan bercita rasa Jawa dan berbusana Jawa. Buruh perempuan Jawa

memakai kebaya dan *jarik* (kain panjang) dan laki-laki memakai *jarik* dan *surjan*. Laki-laki yang berasal dari daerah Ponorogo misalnya biasa memakai celana panjang komprang, baju tanpa kerah dan dipadu dengan ikat pinggang besar.

Apa peran buruh perempuan Jawa dalam keluarga dan komunitasnya di perkebunan karet? Peran buruh perempuan Jawa yakni menjaga etnis, memelihara tradisi dan budaya Jawa. Dalam konteks ini, buruh perempuan Jawa berperan sebagai “penjaga gawang” tradisi dan budaya Jawa. Selain peran itu, buruh perempuan Jawa berperan sebagai pewaris tradisi dan budaya Jawa. Buruh perempuan Jawa mewariskan nilai-nilai budaya Jawa pada generasi penerus, baik nilai-nilai yang membentuk sikap dan watak sosial seperti *rewang*, *nyumbang* dan gotong royong (Juningsih, 2014: 209).

Pada dekade kedua abad ke-20, banyak etnis Melayu, orang Cina dan sejumlah kecil orang India menanam pohon karet, karena melihat tanaman karet memiliki masa depan yang cerah. Kebanyakan etnis Melayu menanam pohon karet di kebun yang menyatu dengan pemukimannya dalam skala kecil, karena tidak memiliki banyak modal (Salleh, 1985: 101 dalam Juningsih, 2014: 86) Sementara itu, orang Cina menanam pohon karet di atas lahan yang disewa dari penduduk Melayu, kebanyakan juga dalam skala kecil, namun terdapat sejumlah kecil orang Cina menanam karet dalam skala besar (Dun Jen, 1982: 85-86) Dalam penyelenggaraannya, kebun karet milik etnis Melayu memerlukan tenaga kerja, meskipun tidak sebanyak perkebunan karet.

Kebanyakan kebun karet milik etnis Melayu menggunakan buruh Jawa, karena alasan kesamaan agama, bahasa, budaya, fisik dan warna kulit, dan yang paling penting dapat diupah murah. Berbagai kesamaan ini menyebabkan interaksi sosial antara buruh Jawa dengan etnis Melayu dapat terjalin cukup akrab dan harmonis. Oleh karena itu, dalam proses interaksi sosial terjadi pula proses adaptasi budaya. Buruh Jawa mengadaptasi sejumlah budaya Melayu seperti, nama, bahasa, makanan dan busana (Juningsih, 2014: 201). Demikian pula, etnis Melayu juga mengadaptasi budaya Jawa seperti kesenian dan makanan Jawa yakni *tempe* (Juningsih, 2014: 284) Setidaknya ada tiga alasan buruh Jawa melakukan adaptasi budaya. Pertama, mereka melakukan adaptasi agar diterima sebagai bagian dari masyarakat Melayu. Kedua, dari segi kuantitas buruh Jawa jumlahnya relatif kecil, sehingga tidak memungkinkan dapat memenuhi kebutuhan sendiri secara merdeka. Ketiga, mereka membutuhkan teman di tempat yang baru, apalagi hubungan dengan daerah asal sudah putus (Bahrin, 1970: 5; Miyazaki, 2000: 79-83; Graham, 1977: 19) Dalam upaya itu, mereka membuka diri terhadap budaya Melayu dan mau melakukan perkawinan campur dengan etnis Melayu.

Sehubungan dengan hal itu, apa peran buruh perempuan Jawa dalam proses menjadi Melayu di lingkungan kebun karet? Buruh perempuan Jawa berstatus menikah berperan sebagai agen transformasi sosial dalam keluarga, selain peran sebagai pendamping suami, mengurus rumah tangga, memelihara anak dan mencari nafkah. Demikian pula, perempuan Jawa berstatus lajang juga berperan sebagai agen transformasi sosial, selain membantu orang tua mencari nafkah dan mengurus rumah. Dalam proses menjadi Melayu, sejumlah perempuan Jawa itu baik berstatus menikah maupun lajang, melakukan adaptasi dan mempraktekkan budaya Melayu dalam keluarga. Budaya Melayu yang diadaptasi antara lain bahasa, nama, busana dan makanan Melayu.

Selain sebagai agen transformasi sosial, paling tidak hingga pertengahan abad ke-20, buruh perempuan Jawa yang bekerja di kebun karet milik etnis Melayu juga berperan sebagai pewaris tradisi dan budaya Jawa. Buruh perempuan Jawa tersebut berperan memelihara sekaligus mentransfer tradisi dan budaya Jawa pada generasi penerus. Sejumlah tradisi dan budaya Jawa yang dipelihara dan diwariskan pada generasi penerus antara lain *kenduri*, *sesaji*,

gotong royong, *rewang*, *nyumbang*, etika, bahasa, makanan dan busana. Setidaknya sampai pertengahan abad ke-20, buruh Jawa di kebun karet milik etnis Melayu cenderung bertransformasi menjadi etnis Jawa Melayu, belum menjadi etnis Melayu dalam arti sesungguhnya (Juningsih, 2014: 201-202, 209-210) Mereka memerlukan waktu yang cukup panjang untuk menjadi etnis Melayu.

B. Di Pemukiman Baru

Buruh Jawa di perkebunan karet, berdasarkan kontrak kerja bekerja selama dua tahun. Setelah kontrak kerja berakhir, sebagian dari mereka kembali ke Pulau Jawa, karena ingin berkumpul lagi dengan keluarga dan teman. Selain itu, uang yang mereka kumpulkan dianggap cukup untuk modal usaha atau membeli tanah di Jawa. Sebagian dari mereka memutuskan menetap di Semenanjung Malaya, karena di Jawa mereka tidak memiliki tanah, dan upah bekerja sebagai buruh cukup rendah, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, sejumlah keluarga migrasi dan menetap tinggal di Semenanjung Malaya. Mereka kemudian mendirikan pemukiman dengan cara membuka hutan yang dianggap tidak bertuan atau membeli sebidang lahan dari penduduk Melayu (Bahrin, August 1967: 239-240; Tamrin, 1984: 88-89 dalam Juningsih, 2014: 229-230).

Di pemukiman baru, etnis Jawa yang sebelumnya bekerja di perkebunan karet dapat dibedakan dalam dua kelompok yakni etnis Jawa yang fanatik dan etnis Jawa yang tidak fanatik terhadap budaya sendiri. Etnis Jawa yang bersifat fanatik cenderung menutup diri dari budaya luar, memelihara tradisi dan budaya Jawa, serta mempertahankan kemurnian darah Jawa. Mereka menganggap etnis dan budaya Jawa lebih unggul dari etnis dan budaya etnis lain. Oleh karena itu, mereka merasa terpenggil untuk menjaga kemurnian darah Jawa. Dalam upaya itu, mereka hanya menikah dengan sesama etnis Jawa (Juningsih, 2014: 199; wawancara dengan Bunyamin Ramlan; dengan Ahmad Sidiq dan Mohammad Zim Yunus bin Ahmad Sidiq) Sikap fanatik itu nampak pada perilaku dan penggunaan simbol-simbol budaya Jawa dalam kehidupan sehari-hari, seperti menggunakan nama, bahasa dan busana Jawa, mengolah makanan Jawa, menyelenggarakan upacara tradisional dan berkesenian Jawa (Juningsih, 2014: 198; Tamrin, 1984: 106; wawancara dengan Ahmad Sidiq dan Mohammad Zim Yunus bin Ahmad Sidiq) Kelompok Jawa fanatik ini kebanyakan tinggal di sekitar perkebunan karet tempat mereka dahulu bekerja antara lain, di Kampong Jawa, Perak; Kampong Selabak, Perak; Kampong Sabak Bernam, Selangor; Kampong Tampak Semenang, Perak; pemukiman Jawa di Kuala Selangor, Selangor; Kuala Lumpur, Selangor; Kelang, Serendah, Kalumpang di Selangor; sekitar Telok Anson, Perak (Juningsih, 2014: 275; Tamrin, 1984: 106; wawancara dengan Mursid; wawancara dengan Aziz bin Mat Iza).

Bagaimana peran perempuan kelompok etnis Jawa yang fanatik dalam keluarga sehubungan dengan transformasi sosial? Pada saat itu, perempuan Jawa tidak memainkan perannya sebagai agen transformasi sosial karena sikap fanatik komunitasnya. Dalam kelompok ini, perempuan Jawa berstatus menikah dan lajang berperan sebagai pemelihara dan pewaris budaya Jawa (Juningsih, 2014: 320) Sejumlah budaya Jawa yang dipelihara dan diwariskan pada generasi penerus antara lain, makanan, kenduri, sesaji, *rewang*, *nyumbang*, gotong royong, etika, bahasa, busana, tembang Jawa, menumbuk padi dengan menggunakan lesung yang dilakukan secara berkelompok, dan menuai padi dengan menggunakan ani-ani (Wawancara dengan Aziz bin Mat Iza).

Dalam perkembangannya, sikap fanatik itu tidak dapat dipertahankan lagi. Etnis Jawa dari kelompok fanatik itu secara perlahan-lahan mulai membuka diri terhadap budaya Melayu. Hal serupa juga dilakukan oleh para perempuan Jawa, mereka juga membuka diri terhadap budaya Melayu. Mengapa mereka mau membuka diri terhadap budaya Melayu? Pertama, mereka memutuskan untuk tinggal menetap di Semenanjung Malaya. Lebih-lebih

pada tahun 1957, secara politik terbentuk pemerintahan baru yakni Malaysia. Negara baru ini memasukkan etnis Jawa ke dalam kelompok etnis Melayu, untuk mengimbangi jumlah penduduk India dan Cina yang jumlahnya sangat besar. Kedua, etnis Jawa harus memilih menjadi warga bumiputra atau kembali ke Jawa. Jika menjadi warga negara seluruh harta bendanya tetap menjadi miliknya, namun jika menolak menjadi warga negara mereka harus pulang ke Jawa, dengan meninggalkan seluruh harta bendanya yang diperoleh dengan susah payah. Kebanyakan mereka memilih menetap dan menjadi warga negara Malaysia karena alasan ekonomi (Juningsih, 2014: 17) Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya etnis Jawa harus melakukan adaptasi dengan lingkungannya yang baru. Ketiga, mereka harus mengikuti perkembangan jaman agar tetap eksis di tempat yang baru. Perubahan sikap dari fanatik ke tidak fanatik, membawa perubahan pada peran perempuan Jawa. Semula peran perempuan Jawa sebagai pemelihara dan pewaris tradisi dan budaya Jawa, kemudian sebagai agen transformasi sosial.

Telah disebutkan di pemukiman Jawa terdapat kelompok etnis Jawa yang tidak fanatik terhadap budaya Jawa. Kelompok ini sangat berbeda dengan kelompok etnis Jawa yang fanatik terhadap budayanya sendiri. Kelompok etnis Jawa yang tidak fanatik, mau membuka diri terhadap budaya luar, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya dan melakukan perkawinan campur (Juningsih, 2014: 319) Kebanyakan mereka mau membuka diri, karena tidak banyak memiliki pendukung, tidak memiliki teman, ikatan dengan daerah asal terputus dan merasa tidak dapat hidup sendiri di luar komunitas aslinya. Mereka memerlukan teman agar eksis dan dapat membangun masa depannya (Bahrin, 1970: 5). Mereka kemudian bertransformasi menjadi Jawa Melayu. Kelompok Jawa Melayu ini terdiri dari mereka yang pernah bekerja sebagai buruh di kebun karet. Kebanyakan dari mereka tinggal di sekitar kebun karet seperti Kampong Culik, Gopeng, Kinta, di Perak (Bakar, 1976/1977: 52-53) Kampong Jawa di Teluk Pulau, Selangor (Tamrin, 1984: 106) Parit Jawa, Parit Sulong, Parit lapis, Parit Tegak, Parit Gantong dan Parit Pulau di Johor (Jahis, 2001: 125-126).

Kelompok etnis Jawa Melayu menjalani hidup dengan dua budaya yakni budaya Jawa dan budaya Melayu. Dalam berbagai kesempatan seperti misalnya dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh etnis Melayu, etnis Jawa Melayu menggunakan simbol-simbol Melayu. Sementara itu, dalam berbagai acara yang diselenggarakan oleh etnis Jawa, etnis Jawa Melayu menggunakan simbol-simbol Jawa. Bagaimana peran perempuan Jawa dalam kelompok etnis Jawa yang tidak fanatik? Perempuan Jawa Melayu berstatus menikah dan lajang berperan sebagai agen transformasi sosial. Dalam menjalankan perannya itu, perempuan mengadaptasi budaya Melayu, mengenalkan dan mempraktekkan budaya Melayu dalam keluarga. Mereka juga memelopori, memberi tauladan dan memonitor keluarga dalam penggunaan simbol-simbol Melayu (Juningsih, 2014: 310-311) Selain itu, mereka juga masih mencari nafkah dan mengurus rumah. Etnis Jawa Melayu meskipun mengadaptasi budaya Melayu, namun tetap memelihara budaya Jawa. Dalam konteks ini, perempuan Jawa Melayu berperan sebagai pemelihara dan pewaris budaya Jawa. Paling tidak sampai pertengahan abad ke-20, etnis Jawa tersebut bertransformasi menjadi Jawa Melayu.

Apa saja budaya Melayu yang diadaptasi perempuan Jawa Melayu dalam kaitannya dengan transformasi sosial? Telah disebutkan setidaknya sampai pertengahan abad ke-20, perempuan bersama laki-laki Jawa Melayu mengadaptasi bahasa Melayu, karena bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar dalam pergaulan sehari-hari (Bahrin, 1970: 2) Mereka tidak mengalami kesulitan dalam mengadaptasi bahasa Melayu, karena bahasa Melayu memiliki kesamaan dengan bahasa Jawa terutama dari segi vokal, diftong dan konsonan (Tamrin, 1984: 102-103) Sejumlah kata-kata yang memiliki arti yang sama antara lain *bali* dalam kata Jawa dan balik dalam kata Melayu, *areng* dalam kata Jawa dan arang dalam kata Melayu, *bayem* dalam kata Jawa dan bayam dalam kata Melayu, *ciloko* dalam kata Jawa,

celaka dalam kata Melayu (“Kamus Bahasa Jawa ini Wakjaman” <http://wakjaman.com/kamusjawa2.html> dalam Juningsih, 2014: 278) Etnis Jawa Melayu meskipun mengadaptasi bahasa Melayu, namun tidak meninggalkan bahasa Jawa. Setidaknya sampai akhir abad ke-20, ada kata-kata Jawa yang masih digunakan untuk ruang publik. Seperti di daerah Batu Dua, Kampong Sepintas, Sabak Bernam, Selangor, ada sebuah kedai milik keturunan Jawa diberi nama Jawa yakni *réné médang*. *Réné* atau *mréné* artinya kemari, *médang* artinya minum (Wawancara dengan Mohammad Akhiyar) Nama *réné médang* dimaksudkan mengundang orang untuk datang minum di kedai itu. Dalam percakapan sehari-hari generasi tua yang jumlahnya semakin kecil masih berbahasa *Jowo ngoko*. Sementara itu, generasi muda banyak yang tidak dapat berbahasa *Jowo ngoko*, mereka fasih berbahasa Melayu dan Inggris (Wawancara dengan Bunyamin Ramlan).

Selain bahasa, perempuan Jawa Melayu mengadaptasi nama Melayu. Biasanya nama Melayu yang diadaptasi etnis Jawa adalah nama yang bernaftaskan Islam (Tamrin, 1984: 105; N.J. Ryan, 1962 and 1971: 49; Miyazaki, 2000: 82) Lebih-lebih setelah mereka menunaikan ibadah haji. Etnis Jawa Melayu meskipun menggunakan nama Melayu namun masih menyertakan nama Jawa, baik itu nama sendiri atau nama orang tua (Miyazaki, 2000: 82) Seperti yang dilakukan oleh Zawiyah, ia mengubah namanya menjadi Hajjah Asiah binti Mertawi, Soprah menjadi Hajjah Supiah binti Haji Abdul Rashid. Demikian pula laki-laki Jawa, mereka juga mengubah namanya seperti yang dilakukan Kertodromo, ia mengubah namanya menjadi Haji Dahlan bin Kassan Duriat, Sadio menjadi Haji Abdul Razak bin Ngadiwongso, Mathod menjadi Haji Talib bin Parto (Tamrin, 1984: 157-200 dalam Juningsih, 2014: 280-281).

Perempuan Jawa Melayu juga mengadaptasi busana Melayu untuk keluarga, baik busana harian maupun busana pesta. Paling tidak hingga akhir abad ke-20, perempuan Jawa Melayu mengadaptasi busana Melayu untuk anak-anak yang dikhitan dan khatam Al Quran. Busana anak yang diadaptasi yakni kain pelikat, baju kurung dan songkok (Samuri, 1982/83: 104; Mahali bin Alias, 1980/81: 39) Perempuan Jawa Melayu juga mengadaptasi busana pengantin Melayu (Samuri, 1982/83: 113) Di Johor, perempuan Jawa Melayu mengadaptasi baju kurung teluk belanga tanpa dua kantung di depan, sarung dan selendang, baju kebaya labuh (kebaya yang dipadu dengan kain batik sarung), baju kurung dan baju cekak musang. Perempuan Jawa Melayu mengadaptasi kebaya Melayu, karena memiliki kesamaan dengan kebaya Jawa (Wawancara dengan Bunyamin Ramlan, dengan Haji Usuf, dengan Aziz bin Mat Iza) Perempuan Jawa Melayu juga mengadaptasi busana Melayu untuk suami dan anak laki-laki yakni baju kurung teluk belanga dengan dua kantung di depan, celana panjang, sarung dan songkok (Pachuri, 1992: 26).

Di pemukiman baru, perempuan Jawa Melayu juga mengadaptasi makanan yang bercita rasa Melayu. Selain mengadaptasi sejumlah budaya Melayu, perempuan Jawa Melayu juga memberi sumbangan pada penduduk Melayu antara lain tempe yakni makanan yang dibuat dari kedelai. Perempuan Jawa Melayu mengajarkan bagaimana membuat tempe dan mengolahnya menjadi hidangan yang lezat (Wawancara dengan Bunyamin Ramlan) Perempuan Jawa Melayu juga memperkaya khazanah cita rasa makanan tradisional Melayu dengan makanan tradisional Jawa. Seperti di Johor, cita rasa makanan tradisional Melayu mendapat pengaruh cita rasa makanan tradisional Jawa seperti urap, sayur lodeh, lontong sayur, *rempeyek*, *serondeng*, rujak, telur pindang, *pisang sale*, tapai ketela dan keripik pisang (Pachuri, 1992: 27).

Telah disebutkan, perempuan Jawa Melayu juga berperan sebagai pewaris budaya Jawa sekaligus menstransfer budaya Jawa pada generasi penerus. Budaya Jawa yang diwariskan antara lain, nilai-nilai yang membentuk watak dan kepribadian seperti, kerja keras, tidak

mudah menyerah, optimis menghadapi hidup, sopan santun, sikap budi luhur, *tepo sliro* atau tenggang rasa, *nrimo* atau menerima apa adanya, *temen* atau jujur, tidak membedakan derajat dan pangkat, *oyo dumeu* atau jangan tinggi hati ketika sedang berada di puncak, *oyo aji mumpung* atau jangan menggunakan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi. Selain itu, budaya yang membentuk watak sosial generasi penerus seperti, *rewang*, *nyumbang*, gotong royong, mufakat dan peduli pada orang lain (Juningsih, 2014: 311-312; Herusatoto, 2008: 129-134; wawancara dengan Mohammad Zim Yunus bin Ahmad Sidiq).

Nilai-nilai budaya Jawa tersebut diwariskan melalui pendidikan dalam keluarga. Dalam konteks ini, perempuan Jawa Melayu mengajarkan nilai-nilai budaya Jawa melalui bahasa tutur dan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali materi yang disampaikan berupa pepatah Jawa seperti *sepi ing pamrih rame ing gawe* atau giat bekerja tetapi jauh dari keinginan yang terselubung, *sugih tanpo bondo lan menang tanpo ngasorake* atau kaya tanpa harta dan menang tanpa merendahkan harga diri lawan-lawannya, *sopo gawe ngganggo sopo nandur ngunduh* atau siapa membuat maka akan memakai, siapa menanam maka akan menuai, yang dapat diartikan siapa menanam kebaikan maka akan menuai kebaikan pula, sebaliknya siapa menanam keburukan maka akan menuai keburukan, *rawe-rawe rantas*, *malang-malang putung holopis kuntul baris* atau kerja keras bersama-sama untuk mencapai tujuan (Juningsih, 2014: 312; Herusatoto, 2008: 129-134).

Budaya Jawa lainnya yang diwariskan pada generasi penerus adalah bahasa *Jowo kromo* dan bahasa *Jowo ngoko*, busana, tradisi menanam dan menuai padi dengan menggunakan ani-ani (Jahis, 2001: 125-126; Tamrin, 1984: 132; wawancara dengan Aziz bin Mat Iza) *nembang* atau menyanyi lagu Jawa dan mendongeng untuk menidurkan anak seperti dongeng sang kancil (Winstedt, January 1940: 6-16; wawancara dengan Aziz bin Mat Iza) juga kenduri, serta kesenian tradisional.

Perempuan Jawa Melayu juga mewariskan busana Jawa pada generasi penerusnya yakni *jarik*, kebaya dan *surjan*. *Jarik* adalah kain panjang batik. Perempuan Jawa Melayu juga mewariskan tradisi menuai padi dengan menggunakan ani-ani (Wawancara dengan Haji Usuf) Peran perempuan yang lain yakni mewariskan tradisi *rewang* dan *nyumbang* (Alias, 1980/1981: 58-63; Samuri, 1982/1983: 74-89) Orang Jawa di Kampong Selabak, Selangor, secara rutin mengadakan kegiatan gotong royong yang mereka sebut “*segoro*”, yang artinya semua pekerjaan dilakukan secara gotong royong (Wawancara dengan Ahmad Sidiq bin Mohammad Azzif dan Mohammad Zim Yunus bin Ahmad Sidiq).

Etnis Jawa Melayu masih mengadakan kenduri (Samuri, 1982/1983: 21-25) dan membuat sesaji. Menurut Clifford Geertz, kenduri adalah ritual keagamaan etnis Jawa yang berupa perjamuan makan. Ritual itu mengandung aspek sosial karena melibatkan sejumlah orang dan aspek religius yakni kepercayaan pada Allah, pada makhluk gaib dan roh leluhur, yang mempengaruhi kehidupan manusia. Tujuan mengadakan kenduri yakni agar manusia selamat dan selalu mendapat perlindungan dari Allah (Geertz, 1960: 11) Dalam konteks ini, perempuan Jawa Melayu berperan dalam menyiapkan makanan untuk kenduri dan sesaji.

Dalam perkembangannya, secara perlahan-lahan setidaknya pada pertengahan hingga akhir abad ke-20, kebanyakan etnis Jawa Melayu itu telah bertransformasi menjadi etnis Melayu. Sebagian besar dari mereka telah meninggalkan tradisi dan budaya Jawa. Mereka tidak dapat berbahasa Jawa meskipun bahasa *Jawa ngoko*. Mereka berbahasa, berbusana Melayu dan mengolah makanan Melayu. Bahkan sebagian di antara mereka tidak mengetahui kalau dirinya keturunan etnis Jawa (Wawancara dengan Aziz bin Mat Iza) Mereka juga menjalankan tradisi dan budaya Melayu, walaupun terdapat sejumlah etnis Jawa Melayu terutama generasi tua yang jumlahnya semakin kecil, masih memelihara dan menyelenggarakan tradisi dan budaya Jawa, termasuk seni tradisional Jawa seperti jaran

kepong, barongan, reog dan wayang kulit. Mereka masih dapat berbahasa *Jowo ngoko*. Perempuan juga masih mengolah masakan yang bercita rasa Jawa (Wawancara dengan Saidan; Ahmad bin Ruslan; Jamal dan dengan Mohammad Zim Yunus bin Ahmad Sidiq).

Tradisi dan budaya Jawa semakin hilang dalam masyarakat Melayu yang multikultur. Hal ini terjadi karena “kesalahan” generasi tua yang tidak mau menceritakan sejarahnya. Mereka malu menceritakan sejarahnya yang dianggap suram, yakni sebagai buruh kontrak atau orang kontrak yang identik dengan kemiskinan dan status sosial yang rendah. Perempuan Jawa Melayu sebagai pewaris dan pemelihara budaya perannya mulai pudar tergerus oleh budaya Melayu. Generasi penerus tidak lagi mendapat ajaran mengenai bahasa, busana dan makanan Jawa dari perempuan. Selain itu, perkumpulan orang Jawa yang ada kurang maksimal dalam memelihara tradisi dan budaya Jawa. Perkumpulan ini kurang mempunyai kemampuan dalam mentransfer tradisi dan budaya Jawa pada generasi penerus. Sejumlah keturunan etnis Jawa merasa bangga sebagai warga Negara Malaysia dengan melupakan asal etnisnya yakni Jawa.

Apa peran perempuan Jawa Melayu dalam proses transformasi sosial dari etnis Jawa Melayu menjadi etnis Melayu? Dalam proses ini, perempuan berperan sebagai agen transformasi sosial. Setidaknya sejak pasca proklamasi kemerdekaan Malaysia, mereka semakin intensif dalam mengadaptasi tradisi dan budaya Melayu, lebih-lebih mereka telah dimasukkan dalam kategori penduduk Melayu. Kebanyakan perempuan Jawa Melayu lajang memfasilitasi perubahan dalam keluarga dengan cara membawa masuk budaya luar seperti, nama, makanan, bahasa, busana, barang-barang dan gaya hidup (lihat Wolf dalam Bemmelen, 1992: 89) Perempuan Jawa Melayu lebih berperan dalam mengadaptasi bahasa, busana, dan makanan dari pada laki-laki, karena bidang itu merupakan bagian dari tugas domestik perempuan. Bukan berarti laki-laki Jawa Melayu tidak mempunyai perhatian dalam bahasa, busana dan makanan. Dalam keluarga Jawa, tugas perempuan mendidik anak-anaknya dalam hal berbahasa dan berbusana. Perempuan pula yang berperan dalam mengajari anak perempuannya memasak. Dengan kata lain, perempuan yang bertugas menyediakan busana dan makanan bagi keluarga.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran sebagai agen transformasi sosial tidak hanya dilakukan oleh laki-laki atau “orang besar” dalam pengertian dari golongan kelas menengah ke atas, memiliki kekayaan, atau golongan terpelajar, melainkan juga dilakukan oleh perempuan yang dipandang sebagai kaum “kecil” atau dari golongan kelas bawah. Kaum perempuan tidak pernah dipandang, tidak diperhitungkan dan dianggap tidak dapat melakukan transformasi sosial. Akan tetapi dalam kenyataannya mereka mempunyai peran sebagai agen transformasi sosial.

Perempuan dan laki-laki sebagai agen transformasi sosial memiliki pekerjaan yang berbeda. Perempuan melakukan transformasi sosial berkaitan dengan perannya sebagai pekerja domestik. Laki-laki melakukan transformasi sosial berkaitan dengan perannya sebagai pekerja publik.

Peran perempuan sebagai agen transformasi sosial bukan merupakan penyimpangan atau bentuk perlawanan perempuan terhadap adat, tradisi dan budaya. Bukan pula untuk mendapat kesetaraan gender, seperti yang diperjuangkan kaum feminis moderat, atau mengalahkan laki-laki seperti yang diperjuangkan oleh kaum feminis radikal. Melainkan upaya perempuan untuk meraih hidup sejahtera bagi diri sendiri dan keluarga.

Paling tidak sampai pertengahan abad ke-20, menunjuk pada kategori sosial, etnis Jawa bertransformasi menjadi etnis Jawa Melayu. Budaya Melayu belum merasuk dalam “darah” atau baru menyentuh “kulit luar” etnis Jawa Melayu. Dalam perkembangannya sampai akhir abad ke-20 semakin banyak etnis Jawa Melayu bertransformasi menjadi etnis Melayu.

B. Saran

1. Perempuan keturunan Jawa mempunyai peran sebagai agen transformasi sosial bagi keluarga dan komunitasnya. Perempuan keturunan Jawa berperan dalam melakukan alih rupa dari etnis Jawa menjadi etnis Melayu. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian-kajian mengenai peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan baik di dalam maupun di luar komunitas aslinya.
2. Kajian mengenai peran perempuan Jawa dalam berbagai aspek kehidupan perlu dilakukan. Perempuan bukan aktor pembantu melainkan aktor utama dalam transformasi sosial dan perjalanan sejarah bangsanya. Perempuan bukan sosok yang pasif, apatis dan emosional, melainkan perempuan yang aktif, kreatif dan rasional.
3. Negara dan pihak-pihak yang terkait harus menyertakan perempuan dalam pembangunan bangsa, bukan sebagai penonton apalagi sebagai pelengkap penderita.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahearne, C.D., Controller of Labour, Malaya, 1932. *Annual Report of the Labour Department, Malaya, for the Year 1931*. Kuala Lumpur, Federated Malay States Government Press.
- Alias, bin Mahali, 1980/81. *Adat Istiadat Orang Jawa di Daerah Batu Pahat, Johor*. Bangi, Selangor, Jabatan Persuratan Melayu, Fakulti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Bahrin, S. T., 1967. “The Growth and Distribution on the Indonesia Population in Malaya”, *Bijdragen Tot de Taal-, Land-en Volkenkunde*. Deel 123. 'S-Gravenhage-Martinus Nijhoff.
- Bakar, A. R. A., 1976/1977. “Perkembangan Penduduk Melayu di Daerah Kinta (Perak) 1880-1930an”, *Satu Latihan Ilmiah Bagi Memenuhi Syarat Pereksaan Akhir Ijazah Sarjana Muda Sastera*. Kuala Lumpur, Jabatan Sejarah Universiti Malaya.
- Del Tuvo, M.V., M.A., Cantab. Malayan Civil Service. *A Report of the 1947 Census of Population*. Published on Behalf of the Governments of the Federation of Malaya and the Colony of Singapore by the Crow Agents for Colonies, 4, Millbank, London, S.W.1.
- Dun Jen, Li, 1982. *British Malaya an Economic Analysis*. Kuala Lumpu, INSAN.
- Geertz, C., 1960. *The Religion of Java*. United States of America, The Free press of Glencoe.
- Herusatoto, B., *Simbolisme Jawa*. Yogyakarta, Ombak, 2008.
- Jahis, M. R., 2001. “Parit Sulong: Asal-Usul dan Perkembangannya”, Kassim Thukiman, *et al. Menelusuri Sejarah Tempatan Johor*. Johor, Yayasan Warisan Johor.
- Juningsih, L., 2014. “Orang Jawa Migran dan Jawa Melayu: Transformasi dan Adaptasi Pada Masyarakat Jawa di Pantai Barat Semenanjung Malaya Tahun 1900-1957”. *Disertasi*, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.
- “Kamus Bahasa Jawa ini wakjaman”, <http://wakjaman.com/kamusjawa2.html>, download 13-03-2013
- “Labor Conditions in British Malaya”. August 1944. *Monthly Labor Review*.
- Miyazaki, K., 2000. “Javanese-Malay: Between Adaptation and Alienation”, *SOJOURN* Vol. 15, No. 1.

- Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera. IXb², 1914. Verheffing van de Inlandsche Vrouw. Deel VI, van't Overzicht van enz. De Economie van de Desa.* Batavia, Drukkerij, "Papyrus".
- Pachuri bte, R., 1992. *Masyarakat Jawa di Johor, Sejarah Migrasi, Pemukiman dan Peranan Imigran Dalam Pembangunan Negara Tahun 1884-1944.* Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Proceedings of the Federal Council of the Federated Malay States for the year 1909-10, 1911.* Kuala Lumpur, F.M.S. Government Printing Office.
- Report of Commissioners Appointed to Enquire into the State of labour in the Straits Settlements and Protected Native States, 1891.* Singapore, Printed at the Government Printing Office.
- Ryan, N. J., 1962&1971. *The Cultural Heritage of Malaya.* Kuala Lumpur, Longman Malaysia.
- Salleh, H. B., 1984. *Kampung Haji Salleh dan Madrasah Saadiah-Salihiah 1914-1959.* Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.
- , 1985. "Malay Rubber Smallholding and British Policy A Case Study of the Batang Padang District in Perak (1876-1952)". *Submitted in partial fulfillment of the requirement for degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences.* Columbia University.
- Samuri, bin A., 1982/83. *Adat Kenduri Di Dalam Masyarakat Keturunan Jawa: Satu Kajian Kes di Kampung Parit Selangor, Pontian, Johor.* Bangi, Selangor, Jabatan Persuratan Melayu, Fakuliti Sains Kemasyarakatan dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Saunders, G., 1977. *The Development of a Plural Society in Malaya.* Kuala Lumpur, LONGMAN.
- , 1970. "The Indonesian Immigrants and the Malays of West Malaysia: A Study in Assimilation and Integration", *Geographica.* Vol. 6.
- , June 1965. "Indonesian Labour in Malaya". *Kajian Ekonomi Malaysia*, Vol.II, No.1.
- , August 1967. "The Pattern of Indonesian Migration and Settlement in Malaya", *Asian Studies.* Volume V, No. 2.
- Tamrin, M. K., 1984. *Orang Jawa di Selangor Penghijrahan dan Penempatan 1880-1940.* Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia.
- Thompson, V., 1947. *Labor Problems in Southeast Asia.* New Haven, Yale University Press.
- Winstedt, R. O., January 1940. "A History of Malay Literature". Terj. *Malayan Branch Royal Asiatic Society*, Vol. XVII, Part III.
- Wolf, D. L., 1992. "Industrialization and Family Women workers as mediators of family change and economic change in Java", Bemmelen, van Sita, et al., ed., *Women and Mediation in Indonesia.* Leiden, KITLV.

DAFTAR INFORMAN

| Nama | Usia | Alamat |
|------------------------------------|----------|---|
| Ahmad bin Ruslan | 74 tahun | Yayasan warisan Johor, Johor Bahru. |
| Ahmad Sidiq bin Mohammad Azzif | 93 tahun | Kampong Selabak, Selangor. |
| Aziz Bin Mat Iza | 60 tahun | Kampong Jawa, Perak. |
| Bunyamin Ramlan | 80 tahun | Parit Jawa, Mukim 8, Batu Pahat |
| Haji Usuf | 68 tahun | Kampong Parit Tengah, Mukim 12, Batu Pahat. |
| Haji Salman B. Hj. Bakri | 63 tahun | Jalan Besi, Kg. Kenangan Dato Oon, 83000, Batu Pahat. |
| Jamal | 45 tahun | Batu Pahat. |
| Mohammad Akhiyar | 61 tahun | Batu Dua, Kampong Sepintas, Sabak Bernam, Selangor. |
| Mohammad Zim Yunus bin Ahmad Sidiq | 70 tahun | di Kampong Selabak, Selangor. |
| Mursid | 57 tahun | Teluk Sekudang, Tampak Semenang, Perak. |
| Saidan | 65 tahun | Pontian, Johor Bahru. |
| Slamet | 62 tahun | Batu Dua, Sabak Bernam, Selangor. |

....Selanjutnya Kami Memilih Pergi ...
KISAH-KISAH ETNIS TIONGHOA ASAL INDONESIA YANG
KEMBALI KE TAIWAN 1950-1960AN

Devi Riskianingrum

Pusat Studi Sumber Daya Regional (PSDR)
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Gg. Widya Graha, Jl. Gaotot Subroto Kav. 10 Jakarta Selatan
e-mail:devichudori@gmail.com

Abstrak

Periode transisi dari pemerintahan kolonial Belanda kepada pemerintahan Indonesia di tahun 1945-1949, dilanjutkan dengan periode demokrasi terpimpin oleh Ir. Soekarno di tahun 1950an sampai pada periode 1965, telah memberikan pengaruh yang sangat besar kepada etnis Tionghoa di Indonesia. Perasaan tidak aman, tertindas serta masa depan yang suram menyebabkan mereka mempertimbangkan kembali keberadaan mereka di Indonesia. Saat itu mereka harus mengambil posisi, apakah menjadi seutuhnya Indonesia, menjadi orang Tiongkok dengan memilih kewarganegaraan Tiongkok, atau memilih kewarganegaraan Belanda yang beretnis Tionghoa? Setelah kemerdekaan, pemerintah mengaplikasikan kebijakan yang cenderung menciptakan ketidakstabilan, dimana pemerintah tidak mendukung baik kebijakan asimilasi maupun integrasi etnis Tionghoa di Indonesia. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan terjadinya kekerasan, baik fisik maupun properti yang mereka miliki. Hasilnya, banyak diantara mereka memilih meninggalkan Indonesia demi keamanan jiwa, kembali ke Tiongkok, negara-negara di Eropa, atau Taiwan. Kondisi ini berlanjut sampai di akhir periode 1960an. Fokus pada etnis Tionghoa yang kembali ke Taiwan, makalah ini mencoba menganalisis alasan meninggalkan Indonesia, strategi bertahan, serta formasi identitas mereka.

Kata Kunci: Etnis Tionghoa, migrasi, motivasi, strategi bertahan, identitas

....THEN WE SHALL MOVE...
INDONESIAN CHINESE RETURNING TO TAIWAN 1950s-1960s

Abstract

The violent period of transition from the Dutch colonial government to indigenous rule in 1945-1949, the period of democratic trialsthe so-called guided democracy of president Soekarno in 1950sand the following period after failed coup in 1965, made great impact on the Chinese population group in Indonesia. The Chinese minority felt insecure as their future position in the new republic was unclear: were they Chinese nationals, or Indonesian Chinese or Chinese with a Dutch passport? After independence, the Indonesian government, natives and the Chinese minority were not quite ready to face one another. The policies were developed stood on the shaky ground of nationalism and actually created instability. The regulation indicated that neither assimilation and nor integration was the real objective of the government. Numerous suffered the destruction of property, if not physical violence. These unhappy situations encouraged them to seek refuge outside Indonesia. As a result of this, the Chinese exodus occurred to Mainland, Taiwan, European countries and elsewhere. The situation continued until the late 1960s. Focus to those who returned to Taiwan, the paper tries to delve into the motives for leaving Indonesia, the survival strategy, and the form of identity among these people.

Keywords: Indonesian Chinese, migration, survival strategy, and identity

I. INTRODUCTION: INDONESIAN CHINESE IN TURBULENCE PERIOD

The violent period of transition from the Dutch colonial government to indigenous rule in 1945-1949, the period of democratic trialsthe so called guided democracy of president Soekarno in 1950sand the following period after the failed coup in 1965, made a great impact on the Chinese population group in Indonesia. The Chinese minority felt insecure as their future position in the new republic was unclear: were they Chinese nationals, or Indonesian Chinese or Chinese with a Dutch passport? Because the reality of a plural society constituted

the population of Indonesian archipelago, the colonial government had cultivated a consciousness of different identities among its population, and thus the Dutch colonial administration had maintained its power. A colonial caste structure was applied with Europeans at the top, other Asians, including the Chinese, in the middle; and the native population at the bottom. At the same time a strong Chinese nationalist sentiment also emerged among many members of the Chinese minority group. This contributed to segregation between the Chinese and the indigenous people (Anderson, 2000 : 122).

The success of the Indonesian nationalist movement was evident at the announcement of Indonesian Independence in August 1945. However, as Furnivall remarks 'Nationalism in a plural society is a disruptive force, tending to fragmentize and not to consolidate its social order', (Kahin, 2003 : 59-61) thus at that moment, Indonesian Nationalism failed to transcend the boundaries of ethnicity and religion, hence, ethno-nationalism and cultural nationalism strongly allured the people (Kartodirdjo, 1997 : 76-78). Nevertheless the emergence of Indonesia into a national state from a colonial state agitated the Chinese minority, because owing to this change of regime, many became vulnerable to all kind of anti-Chinese movements and even persecution. For that reason the central political question remained what course of action should Indonesia's ethnic Chinese pursue to protect their safety (Coppel, 1957: 57 - 63).

After independence, the Indonesian government, the native population and the Chinese minority were not quite ready to face one another. The policies that were developed stood on the shaky ground of nationalism and actually created instability (OngHokHam, 1984 : XI-XII). During his presidency, Ir. Soekarno launched the policies of integration and assimilation as a means of accommodating the Chinese. Nevertheless, increasing discrimination and ethnic turmoil was on the rise. The signing of the agreement of single citizenship in 1955 and furthermore the introduction of presidential decree No. 10 of 1959, prohibiting the alien Chinese from engaging in retail business in the villages and rural areas led to riots that culminated on 16 November 1959. The regulation indicated that neither assimilation and nor integration was the real objective of the government. As a result of this, a Chinese exodus occurred and continued until the late 1960s (Coppel, 2002 : 15 -18). This associated with the political transition that took place in Indonesia in October 1966 when many Chinese fell victim to murders and massacres. Numerous suffered the destruction of property, if not physical violence. This unhappy situation encouraged them to seek refuge outside Indonesia (Coppel, 2002 : 15 -18).

As a consequence of prejudice and ethnic unrest, accompanied by Peking propaganda promising a bright future for returning overseas Chinese, many Indonesian Chinese were attracted to leave the country by the end of 1950s and after the coup in 1966. They returned to the mother country out of idealism in search of a stable life. The majority who left consisted of young students. In reality, many returnees found themselves in serious problem in adjusting socio-cultural differences, and the political turmoil of the Cultural Revolution in China during the 1960s. They were labeled bourgeois elements and reactionaries with foreign connections (Suprajitno, 2011). This condition led to another exodus of Indonesian Chinese to Hongkong, Europe, and elsewhere.

During this period, Indonesian Chinese also settled down in Taiwan (Republic of China), which at that time ran into diplomatic problems with Indonesia, instead of returning to China. Their presence was explained by the initiative of the Indonesian Overseas Chinese Association (IOCA) in Taiwan as well as other social networks among Indonesian Chinese. Many of them arrived in Taiwan with the help of their relatives and business connections, but some arrived without any relatives and knowledge of what life in Taiwan look like. Additionally, the

government of Republic of China welcomed them as they were offered to change their citizenship and were facilitated with housing and to learn the Mandarin language.¹

Being Chinese in Indonesia during the period of political turbulence in many ways created a crisis in peaceful living. As a result, some people sought further stability by returning to Mainland China or Taiwan. The reality that some of the Indonesian Chinese opted for Taiwan rather than China as their destination leads me to conduct this research project to examine the motives, identities formation, and the way in which those who moved adjusted to their new and very different socio-cultural situation. The term “Indonesian Chinese” is used in this study as a shorthand label to refer to those Chinese people who were born in Indonesia, migrated to Taiwan during the 1958-60s, or for those who first migrated to elsewhere, then re-migrated to Taiwan. This study focuses on the Indonesian Chinese who now live in Taiwan through the organization of the so-called Indonesian Chinese Overseas Association (OICA) in Taiwan.

In this paper, I intend to examine the motives of these individuals, the decision process they underwent, and their identity formation. It aims to understand the context and forces that shaped the decision to leave Indonesia for Taiwan, the complex tension and fusion in adjusting to a more or less new socio-cultural Taiwan society, and the marked shift of identity after living in Taiwan. Coming from different parts of Indonesia, different family backgrounds, and economical status, these people had to deal in all sorts of manners with political change and its impact. This is a social history from below, which will complement us both studies on political scene of 1950s to 1960s and studies on Indonesian Chinese. Thus may help us to obtain a better picture of the Indonesian Chinese Diaspora and social changes in the crucial early decades of the Republik Indonesia.

In tracing social history of Indonesian Chinese in Taiwan, I am using memories of IOCA members and making use of their network. In view of the lack of published literature on the Indonesian Chinese in Taiwan, I relied heavily on life narratives and semi-structured interviews to provide situated history elaborate and reconstruct an outline of their collective experiences. The questionnaires were from 50 distributed to IOCA members during several occasions, only 48 of them returned and were also applied to collect initial data, surface profiles of the respondents, and create a general picture of Indonesian Chinese returning to Taiwan. The interviews were conducted in *Bahasa Indonesia* since my lack ability in Mandarin, while questionnaire were translated into Mandarin with the help of Indonesian student who is now studying Mandarin in Chengchi University. In total, I recorded three life-narratives and conducted over fifteen in-depth interviews with IOCA members of different background, additionally had countless informal conversations. What these life-narratives, interviews and conversations reveal are a series of motives, social adjustment, and reinterpretation of identity.

Literature Review on Return Migration and Indonesian Chinese Migration

In his study on Indonesian Chinese who seeks refugees and now lives in China, Setefanus Suprajitno addresses that Indonesian Chinese who returned to China during this period facing serious problem in adjusting in a new different socio-cultural environment. Indonesian overseas Chinese brought Indonesian social and cultural influences when they returned to China. Although already living for more than 40 years in China, many of these Indonesian Chinese still see themselves as different from local people (Suprajitno, 2005). Meanwhile focusing on Indonesian Chinese in Hong Kong, Elisabeth Sinn and Wang Cang Bai in *Moving Continuum: Migration, Remigration and Layering Identities* explains due to increasing mobility and globalization, ethnicity is fluid and amorphous and constantly being reinvented.

¹ Basic information about OICA on the interview with Mr. Paulus Yuniarto who conducted research on Indonesian Entrepreneurships in Taiwan during January-April 2011 on August 5th 2011. Additionally this also vindicated by several informants of IOCA members during field research in Taipei on March-June 2012.

Hence migration processes are viewed as a continuum with each place of the continuum as a site for identity formation, so that layers of migration experiences appear that contribute to shaping ethnic/sub-ethnic identity. After twenty years in China, many Indonesian Chinese left for Hong Kong and reconstructed a new identity, where they are now labeled by local people as backward and ignorant. Unlike migrant from China who mostly have networks in Hong Kong, many Indonesian Chinese have no option for that, thus, Indonesian Chinese have never identified themselves other than “Chinese” (Sinn, 2003).

Again in Home as a Circular Process: A Study of the Indonesian Chinese in Hong Kong, Wang Cang Bai and Wong Siu-Lun explain how Hong Kong became a home for Indonesian Chinese after they had undergone the reintegration process of the Indonesian Chinese upon returning to mainland China. Re-adaptation conflict and impossible homecoming of this group in their homeland were revealed. As a result, a notion of divided home was developed among the Indonesian Chinese after they exited to Hong Kong, which further perplexed their conception of home. Finally, as they settled in Hong Kong, the Indonesian Chinese formed alumni associations and mobilizing collective memories to heal nostalgia (Wang Cang Bai, 2003).

Thus, this study is innovative since it focuses on what happened to the Indonesian Chinese returning to Taiwan. It is intended to be a micro history of the Indonesian Chinese settlers and their adaptation to a new socio-cultural society. In addition, this paper divide into four part namely introduction where it discuss the concept and importance of the study; the overview of Indonesian Chinese position in Indonesia; the micro history of several IOCA members which describe the motives of these individuals, the decision process they underwent, and the issue of their identity formation. On the last part of the paper, I will discuss the history and development of IOCA and its function of nostalgic home for their members. Subsequently, a conclusion from the research will be drawn at the end of the paper.

II. THE CHINESE POSITIONS IN INDONESIA: AN OVERVIEW

Leo Suryadinata, in connection with the Chinese in Indonesia, points out that state has major role in shaping gap between the Chinese and majority. The policies applies by the central government strongly influence by a majority ethnic group and tends to neglect aspiration from other minority groups (Suryadinata, 2002 : 69). In order to depict general development of the Chinese in Indonesia, this part will discuss socio-political condition of Indonesia that directly or indirectly led to the Chinese position. The term *Indonesian Chinese* here use to explain the Chinese with Indonesian citizenship, meanwhile the *alien Chinese* are those who owned Chinese citizenship living in Indonesia. In Parallel, the pre-independent Indonesia, shifting power to nationalist movements and the guided democracy will also be discussed.

A. The Chinese Under The Dutch Colonial Regime

The practices, prejudices, and political power of the Dutch colonial administration in the Archipelago influenced its population, both natives and non natives, such as Chinese. During its heyday, the Dutch Indies Company applied appointed officer system (*Kapitain* system), settlement and passed system (*wijkenstelsel* and *passenstelsel*) to the Chinese settlement that were flourished and grew.² Furthermore, the Dutch government also positioning the Chinese within economic circles as an intermediary who created and maintained an internal and inter

² The Officer system was a system appointed individual to responsible as a leader for its groups, so called as *mayor*. Settlement system was in connection with this system where the Chinese only allowed living in certain location under guidance of Chinese officer. The *wijkenstelsel* encouraged the establishment of Chinese residential areas or Chinatowns in big cities in Netherland Indies. The passed system was a policy which obligates the Chinese to have licenses to travel outside their home area. All these three policies applied by the Dutch in 18th and 19th century. The purpose of this system was to simplify administration and advantageous in economy and politics in order to avoid cooperation and interaction between the Chinese and the Pribumi, which might harm their position, see Leo Suryadinata, *ibid*:72-80.

island retail trade and engaged in small scale traders and plantations. This was actually benefited them as they became most prepared and specialized community in Netherland Indies, when the world economy became industrialized (Lasker, 1946 : 162 - 171).

In the beginning of the 20th century the colonial governments shifted their previous policy due to the revival of Pan-China movement. The movement mainly promoted by common dissatisfaction of policies upon the Chinese by the Dutch and newly Chinese immigrant influxes with nationalist and modernist influence from China, so called *totok* or *singkeh*.³ This latter immigrant was different from their local-born Chinese, so called *peranakan*, who in certain degree acculturated with the society and lost their Chinese dialect. Therefore the Dutch implemented a new policy called legislative act in 1907, where the society divided into three different group based on race, namely European; Foreign Orientals or *Vreemde Oosterlingen* consist of Indian, Chinese, and Arabs; and lastly Pribumi.

Furthermore, the consciousness of China nationalism represented by the establishment of the first well-organized Chinese social movement in Batavia namely Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) in 17 March 1900. This organization established Chinese speaking school, which swayed the Chinese locals to converse their orientation to China. In response to this, the Dutch opened Dutch speaking school called Hollandse Chinezen Scholen in 1908 with regard to counter the growing number of Chinese school. It was in these manners, the Chinese began connected to the Dutch society and culture.

The Dutch colonial government became aware as Sun Yat Sen proclaimed the Republic of China in January 1912. Chinese organizations which had initially active on social-cultural framework began to involve in politics with its aim to eradicate discrimination against Chinese in the East Indies in the field of education, law and justice, civil status, taxation, and restrictions on mobility and residence. As a result, great deals of freedom were also granted to the Chinese by further loosely policies on segregation and pass system in 1914, 1915, and completely abolished in 1916.

Entering 1920s, a number of Chinese who received a Dutch education increased. As a result, they became more aware of western outlook and further aloof from their fellow Chinese nationalist. Subsequently, the Chinese communities, which pro to the Dutch government, were flourished in Netherland Indies. They initiated organization called Chung Hua Hui in 1927 with the prime objectives to promote accepting Dutch citizenship, to work for the interests of the Chinese community by actively participating in government's council and refuse any reliance from Chinese government. However, in cultural matters, they still bounded themselves to China (Willmott, 1961 : 7 - 11).

Only after 1930s, the relation of the Chinese with indigenous in politics to some degree strengthen. It was noticeable by the establishment of Partai Tionghoa Indonesia (PTI) in 1932. This organization was promoted by the Chinese who believed that Indonesia as a country was more important for the Chinese in Indies than that of China. Subsequently, the Chinese movement before World War II was divided into three mainstreams namely the pro-China, pro Dutch, and lastly the Pro Indonesia (Suryadinata, 2002 : 28 - 44).

The economic gap, superiority attitude, and social exclusiveness were still existed as boundaries among the Chinese and indigenous, and sharpening the differences in their interests. Although the policy of segregation was abolished, but it soon replaced by

³ China changes its policy toward her people in foreign states by increasing sense of unity and nationalism among Chinese everywhere by sending governmental mission, including the Netherland Indies in 1887 and 1906. This had helped renew loyalties in the Chinese émigré to their mother country and resulted on the revival of pan-china movement. In dealing with this situation, the Dutch milder their policies on Chinese in order to maintain the loyalty of its Chinese pupils by removing pass system in 1904 and improving the conditions and the status of the Chinese. Detail information see Amri Vandenbosch, 'A Problem in Java: The Chinese in the Dutch East Indies,' in *Pacific Affairs*, Vol. 3, No. 11, (Nov., 1930): 1001-1017, where she also discusses the position of the Chinese in 18th and 19th century Dutch Indies.

educational segregation. Furthermore in politics, most of the representatives of the Chinese often voted for Dutch interest and against Indonesian nationalist representatives. As a consequence, they were naturally considered to be a pro Dutch and anti nationalist. Therefore, as characterized by Donald Willmott, it was Indonesian educated, professionals, religious leaders and businessmen who felt bitter resentful because of unequal treatment from the colonial government than that of their fellow Chinese.⁴

B. The Chinese Under Soekarno's Era 1945-1966

Under Japanese occupation, anti-Japanese activities, including all Chinese organizations in Indonesia were banned. In this period the Japanese merged all Chinese into one consideration as 'overseas Chinese', disregard whether they were *peranakan* or *totok*. Japan was defeated in mid-1945 and followed by Indonesian independency were proclaimed on 17 August 1945, thus Indonesia as an independent country came into being. The Dutch was disregarding the independency; as a result, the conflict occurred between the Republican and the Dutch along 1946 to 1949, so called the revolution period. Only after Round Table Agreement on December 27, 1949, the peace between the Dutch and the Republican were achieved and resulted on the establishment of *Republik Indonesia Serikat (RIS)* or Republic of United Indonesia.

Along the revolution period, ethnic unrest correlated with the Chinese occurred within few months after the proclamation of independence in various part of Java, moreover in most big cities in Indonesia. The conflict became more frequent especially after September 1946, as the political conflict between the Dutch and the Republican heated. Conversely, the Chinese, which far more numerous and lived scattered around the country was ignored by the Dutch authority. Inevitably the Chinese, as considered to be rich, became soft target. They were forced to contribute money and goods for the revolution by groups of people who formed militia groups. Various names were given to these militia groups such as *gangs*, and *lasykar*.⁵ Revolution often used as an argument for these gangs to legalized their criminal actions. The violence formed as means of robbery of shops and houses of rich people, and then spread into 'large scale *rampokan*' by the masses.

With regard to their safeties, The Chinese attempted maintaining their behaviors as neutral as possible. However, the attacked on Chinese tended to increase as the Dutch intensified its invasion to the Republican, particularly on the eve of the Dutch military aggression in July 1947. In accordance, the Chinese initiated army known as *Po An Tui* in 1947, with the main reason was the protection for the Chinese community. The establishment of *Po An Tui* lured controversy among the Chinese community itself. Because of this militia, the Chinese was considered as pro-Dutch.⁶

The Round Table Conference was signed by both parties in 1949, the Dutch leaved most part of Indonesian and the Republican government took control over the state by maintained security and dissolved militia such as gangs, lasykar, including *Po An Tui*. The agreement also determined the fate of the Chinese in Indonesia that those who at that time residing and were born in Indonesia reputed as Indonesian citizen, except for individual who rejected this

⁴ Willmott, 1961: 12. Constituting only 2% of the people, the Chinese have 4 seats of 60 available seats, or about 6.67%, meanwhile the native which populated almost 97,4 % was represented only 30 seats. Furthermore, three of the Chinese were elected, but only 19 seats natives were elected, while the rest were appointed government officials. Thus, the senses of imbalance were in the air, which created dissatisfaction among nationalist movements. For further explanation see George Mc. T Kahin, 2003: 327.

⁵ Gangs and lasykar were term to explain groups of people regarding as supporters of the republic and acted violently to community that considered anti-revolution. Accordingly the gangs invited masses thus created mobs and riots. They came from various backgrounds, either ethnic or religious, including from fanatically Islamic groups, such as the case in Tangerang 1947 was led by Islamic groups from Banten. See details in Remco Raben, 'Anti-Chinese Violence in the Indonesian Revolution' paper presented on Konferensi "Dekolonisasi dan Posisi Etnis Tionghoa Indonesia 1930 s/d 1960-an" in Padang 18-21 June 2006.

⁶ Ibid.

citizenship, they should reported to government offices before 27 December 1951. It was noted that almost 390.000 Chinese refused Indonesian citizenship. They preferred Chinese citizenship instead of Indonesian citizenship (Suryadinata, 1983 : 83).

The government under Soekarno in certain level tolerated ethnic-based socio-politic organization. During this period the Chinese had its own socio-politic organization. Nevertheless, the citizenship status among the Chinese in Indonesia still questioned and became prime concerned. China adopted *ius sanguinis* principle, where the citizenship based on their parent's citizenship, regardless birth place. Hence the Chinese in Indonesia also regarded as Chinese citizenship. By contrast, Indonesia followed the Dutch system of citizenship 1910 which applying *ius soli*, where a person born in Indonesia from parents who lived in the region considered as Indonesian citizenship. Thus, any Chinese who had been Dutch subject and reject Indonesian citizenship by December 1951, regarded as dual nationality of China and Indonesia (Coppel, 1986 : 26 - 27). As a result of ineffective governance, there was no citizenship law yet been passed by the parliament concerning the Chinese. As a consequence, they were in dilemma of dual nationality throughout these years.

Broadly speaking, it was difficult time for the Chinese, especially those with dual citizenship. They were afraid that their citizenship status would deny their political status. Subsequently because of citizenship doubtful, they were obligated to register only in Chinese schools. At that time even Indonesian Chinese could not easily enter national schools since the government regulated limitation for Chinese pupils in national school, including higher education and universities.

With regard to this, the Chinese community established *Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia* or *Baperki* (Consultative Body for Indonesian Citizenship) on 13 March 1954. The main objective of this organization was to help end confusion over citizenship. This organization promoted integration among the Chinese. They actively advised the Chinese integrating into the social, political and economic life, by maintaining their own identity as Chinese. In providing education to great numbers of Chinese children, *Baperki* initiated schools and universities where accepted any Chinese, either Indonesian citizenship or alien Chinese with dual citizenship. In short, *Baperki* has been obliged to leave open political work. In addition, the government also promulgated law to forbid Indonesian citizenship to study in Chinese school. This resulted to the change of 1.100 Chinese schools into national schools. Due to this condition, many parents decided to send their children to China or Taiwan for further education (Suryadinata, 1983 : 71 - 85).

A solution toward dual citizenship was taken by both China and Indonesian foreign ministers by signing Dual Citizenship Treaty in April 1955 in Bandung. Nevertheless the treaty became effective only after 20 January 1960. The Chinese with dual nationality in Indonesia within 2 years period, or maximum on 20 January 1962, should choose their nationality, either People's Republic of China or Indonesian. However, the problem occurred for pro-Kuomintang (hereinafter pro-KMT), since neither Dual Citizenship Treaty nor Citizenship Act did clarifying the status of pro-KMT Chinese aliens. They were considered to be stateless whom the government was treating as stateless. Since Indonesian government did not recognize the Taiwan government, hence no opportunity was given to them in favor for nationalist Chinese citizenship. One alternative was to being considered as citizens of The PRC (Purcell, 1966 : 483 - 486). In his work, Mozinga pointed that it was estimated about one third of 2,5% Chinese in Indonesia possessed dual nationality, thus it was comprise 1.5 million Chinese which 1.1 million born abroad, and more or less 400,000 local-born who previously rejected Indonesian nationality in an earlier option period (1949-51). Naturally those who voted in the elections of 1955 implicitly claimed to be Indonesian nationals (Mozingo, 1961 :

25 - 31).

In dealing with the economic deterioration, Soekarno supported by Indonesian communist party (PKI), blamed bureaucratic capitalist, colonialist and imperialist as a scapegoats which responsible to this situation. Nevertheless, popular discontent of the people owing to mounting prices of goods and food shortages would be subjected to the Chinese businessmen. Subsequently, the series of anti-Chinese riots in serious stage re-occurred in West Java, namely in Cirebon, Bandung, and Sukabumi in late March and early May 1963 in a course of the enactment of PP 10/1959 and Dual citizenship which put into effect 1962 (Coppel, 2002 : 40).

In general, the period of Soekarno, especially in Guided Democracy period, the Indonesian Chinese participation in politics were developed as they actively join in political party, became a member of parliament, particularly the occurrence of Baperki which played greater role than any other organizations. In this sense, Coppel explains that to some level there was a tendency approaching to political assimilation as Baperki exceptionally mobilized Indonesian Chinese into political life. In contrast, since Baperki associated with leftist orientation, it helped correlated the Chinese with communism (Coppel, 2002 : 50).

The tension of communist and Army reached it peaks by movement named after the date, 30th September Movement, that they kidnapped and murdered six senior general, declared the formation of newly council named Revolutionary Council, and took over took over national radio station, presidential palace, and telecommunication centre. It was by this failed coup the reign of Soekarno ended up, as people abhorrence toward him and communism, which later manipulated by the army, and again the Chinese faith in Indonesia have to deal with uncertainty (Zurbuchen, 2002 : 564 - 581; <http://www.jstor.org/stable/3038873>).

C. Indonesian Chinese in between the Two Chinas: 1949-1965

In 1949, dramatic changes occurred in Mainland China. The communists succeeded in gaining victory over the mainland and forced the nationalists, or the KMT, to flee to the island of Taiwan. China was torn into two parts, and both claimed custody over China's cultural legacy and recognition as the representative of China in the international arena. These conditions affected the Chinese in Indonesia. The rupture of the nationalist and the communist parties that occurred first in 1927 had triggered similar splits among Indonesian Chinese leaders. The war between the two Chinas again culminated in rivalries among Indonesian Chinese during the 1950s period.

Traditionally, imperial China had recognized all Chinese descendants through male lineage as its subjects, regardless of where they were born or whether they had acquired the citizenship of a foreign country. From the beginning of its initiation, the nationalists applied this traditional attitude as foreign policy and claimed Chinese subject abroad, 95% of whom were domiciled in Southeast Asia. As well as in other Southeast Asian countries, most Indonesian Chinese were economically successful. During most of the twentieth century they had sent remittances worth millions of dollars to mainland China. The funds from the overseas Chinese had played a significant role in China's economic and political position (Mozinga, 1976 : 86 - 92).

In general, both the PRC and the ROC governments created the conditions to initiate linkages with the overseas Chinese in Indonesia during the 1950s. Shortly after its initiation, the Beijing government desired to replace the KMT by ensuring continued flows of remittances from overseas to the mainland. Accordingly, they tried to open diplomatic ties with the new Indonesian government in order to extend the PRC's influence in Indonesia, crush the KMT organizations, and extract remittances. The PRC finally had its permission to

open consulates following an agreement in March 1951.

The embassy developed a massive campaign to lure Indonesian Chinese support for the Beijing policies and program. The embassy invited Chinese families disregarding their citizenship to request funds for various embassy-sponsored activities. Providing pro-Beijing instructors and teaching materials in Chinese schools, they set up a new system of PRC-oriented community associations to compete with the long-established KMT organizations; these were just a few of their activities in Indonesia (Mozinga, 1976 : 94 - 96).

On the other hand, after fleeing to Taiwan, the nationalists emphasized cultural integrity as a means to make the island seem ancestral. However, this approach mostly attracted the older generation who were less progressive. Accordingly, the nationalists offered other ways to attract the young and modernized overseas Chinese by opening its educational doors with aid from the US.⁷ Thousands of overseas youth from abroad including youth from Indonesia responded to the invitation and applied for further education and training in scientific fields that were difficult to acquire in Southeast Asia (Williams, 1966 : 51 - 58).

Kuomintang influences in the Indonesian Chinese community had been paramount for twenty years, and the retreat of the nationalist government to Taipei in 1949 did not decisively weaken it. After 1949, the KMT devoted all efforts to organizing and mobilizing its supporters abroad, mainly in Indonesia, where its Kuomintang membership was the largest outside Taiwan. In 1950, there were approximately 41,584 KMT members in Indonesia, and more than one-fifth of them were newly recruited. It is not surprising that as many as 30% of Indonesian Chinese were reportedly pro-KMT (Hong Liu, 2011 : 156 - 157).

Due to the growing influence of the Communist Party and the help of the Indonesian government in establishing diplomatic ties with the PRC, the pro-Taipei atmosphere changed into a pro-Beijing attitude that developed in the Chinese communities after 1950. This contributed to the loss of KMT power in Indonesia. Having lost substantial support, both political and financial, from Indonesian Chinese, the KMT leaned on their natural ally in Indonesia, the American Embassy. Accordingly, with the help of the US embassy, various KMT activities continued to occur in Indonesia, such as *Keng Poa* pro-Taipei newspaper and the nationalist Chinese school system (Mozinga, 1976 : 96).

The collapse of KMT power in Indonesia occurred in 1958 when they were accused of activities detrimental to the state. Rumor has it that the PRRI rebellion in Sumatra in February 1958 was equipped with weapons from Taiwan through Singapore. In response to this, the Indonesian government asked all pro-KMT sympathizers to register themselves to facilitate their deportation, and they asked for Red Cross and UN assistance in implementing this. Additionally, banks, business establishments such as schools, the Chinese Chamber of Commerce, social clubs, anti-communist publications, theatres, and others, and estates owned by pro-KMT Chinese were confiscated and closed down by Indonesian authorities (Ramanathan, 1994 : 90). Since then, the influence of the KMT ceased in Indonesia and those who departed to Taiwan were not allowed to return.

III. THE LIFE OF THREE INDONESIAN CHINESE IN ILHA FORMOSA

In every moment of life, a person must decide how to live, how to perform, and what

⁷ The help from the US came after the visit of Vice President Nixon during November 1953. The contract lasted from 1954-1965 with the total sum reaching NT 300,000,000 (or equivalent to US \$1 million). The form of aid included dormitory construction, employing foreign professors, expanding upper secondary facilities, and creating preparatory schools and departments in existing universities to serve as make-up schools for *huaqiao* (returned overseas students). See more details in Marilyn T. Tinsman, *China and the Returned Overseas Chinese Students*. Unpublished Dissertation, (Columbia University, 1983), pp. 167-170.

activities and aims to achieve. However, what also motivates decisions is influence from one's surroundings. Wendy Di Rodio concludes that motivation can be conceptualized as "a part of a process, a series of movements that directs and structures life itself". The motivation itself consists of two distinct parts, as motives that involve internal movements, and the actions that result from motivation, which tends to involve external movement. The internal movement involves thoughts and emotions focused on the desire for a certain object or result, whereas the external movement involves actions that are geared toward creating or obtaining the object or result (Di Rodio, 2002 : 55 - 62).

Indonesia was established as a nation through nationalistic struggle. The nation is constituted on democracy and is characterized as a pluralistic society. In his work, Horowitz states that nationalism is not compatible with democracy in most developing nations where the notion of nationalism and ethnic-based society occur, including in Indonesia. He assumes that pluralistic society, which consists of various ethnic identities, provides clear distinctions to help decide who can and who cannot participate in politics. Furthermore, he states that historical factors play an important role in ethnic relationships, where the contest among ethnic groups is considered won by those who first arrived in a certain place. These people may usually claim more political rights and power.⁸

Sovereignty granted Indonesians certain freedoms in developing and expressing the country's basic necessities. However, the question of who was a real Indonesian emerged. An Indonesian is a personage who feels and regards himself as a part of the nation and is accepted by surrounding fellow members as its constituent. Additionally, as explained by Benedict Anderson, Indonesia is depicted as *an imagined community* where "the nation is always conceived as a deep, horizontal comradeship" (Anderson, 2006 : 5 - 7) . Nevertheless, when the presence of one ethnic group in a community is not acknowledged and accepted by its fellow members, then it will be difficult for that group to identify itself as part of a joined community. As a result of this, the group would fail to preserve its identity and might seek another imagined community, one where its members are accepted.

The Chinese in Indonesia experienced a turbulent period after independence. Considered non-natives and discriminated against in terms of citizenship, some Chinese felt that the native population disregarded their presence. This happened to three Indonesian Chinese, namely Chang Chung-Chun, P.T. Hu, and Amy Liao and her whole family, on whom I will focus in this paper. The conditions, the people, and the regulations implemented by the Indonesian government, in their opinion, had alienated them from the imagined Indonesia and their homeland. Hence, they felt motivated to decide to leave the country. Instead of mainland China, they opted for Taiwan to become their new homeland due to various motives.

A. In Search of a Better Education:

Indonesian Chinese Students in Taiwan during 1950s-1960s

“...*kamu pergi dari sini jangan kembali lagi ya..
Kalau kembali, jangan bawa senjata...*”⁹
(...you, go and don't ever come back again,
if you return, don't bring any weapon....free translation).

⁸ A. Dahana, 'Pri and Non-Pri Relations in The Reform Era: A Pribumi's Perspective' in *Ethnic Relations and Nation-Building in Southeast Asia The Case of The Ethnic Chinese*, Leo Suryadinata(Eds.), (Singapore: Nias Press, 2004), pp. 56-57. Also in Donald A. Horowitz, 'Structure and Strategy in Ethnic Conflict' Paper prepared for the Annual World Bank Conference on Development Economics, Washington, D.C., April 2021, 1998.

⁹ Quoted from the interview with Mr. Chang Chung-Chun during field research in March-June 2012. He received this humiliation and irritating joke as he was applying for study in Taiwan and during his departure to Taiwan, as if he had been evicted from the country. Hence, Mr. Chang decided to leave Indonesia for good.

Gmelch in 1980 examined the reasons for return, the adaptation of returnees, and the impact of return migration on the home society. According to Gmelch's approach, studies of return migration examine the level of adjustment and adaptation by the returnees. The success or failure in adaptation depends on who has found work and housing, who has become an active member of a community, and who has developed personal relationships (Gmelch, 1980: 135-159). The interviews reveal that many IOCA members were motivated to move to Taiwan in search of a better education, and few of them came on behalf of political reasons, PP No. 10/1959, exclusion, or for a better future. Meanwhile, the questionnaire shows that 15 respondents (31.25%) out of 48 persons went to Taiwan for further study.

As mentioned earlier, the education in Indonesia was split into pro-nationalist and pro-communist schools. During 1951-1953, it was estimated that there were 1,371 Chinese primary and secondary schools with 254,730 students registered in the Ministry of Education. Nationalist supporters operated many well-established Chinese schools at that time. In order to maintain its orientation toward Taipei, the pro-KMT leaders felt obliged to keep Beijing's influence out of their schools. However, many young teachers were found to be pro-Beijing, and thus they were dismissed from the schools. As a result of this, many of these fired teachers were responded by establishing a new school to confront the old one (Suryadinata, 1997 : 91 - 93). Eventually, many schools fell into the hands of pro-Beijing groups since most Chinese teachers were young, China-born, and pro-Beijing. In 1957, of 45 schools operated in Jakarta, only 20 of them were pro-Taipei. Furthermore, it was reported that the Chinese schools in Indonesia were approximately 1600, of which 700 were pro-Taipei, 56 were run by churches, and the rest were pro-Beijing (Suryadinata, 1997 : 93 - 95).

Since all schools in Indonesia were of middling quality, soon after finishing secondary school education, many Chinese pupils who were educated in Chinese schools went elsewhere to continue their studies and pursue higher education either in mainland China, Taiwan or in the Netherlands especially for those who had a Dutch educational background. Unfortunately, there are no statistics available on how many of them went to specific countries. According to his experience, Leo Suryadinata explained that less than half went to China, and few went to Taiwan and Western countries. It was estimated that 60 pupils went to Taiwan in 1951, 280 in 1952, 632 in 1953, 1200 in 1954, and 1500 during 1955 and 1956, which in total reaches 5172 persons. During these periods, some students from Taiwan returned to Indonesia upon their completion of school. Only after the ban on the Kuomintang in 1958, the majority of students never returned to Indonesia. Furthermore, approximately 20% of overseas Chinese studying in Taiwan during the period of 1957-1966 were from Indonesia (Suryadinata, 1997 : 94 - 95).

Chang Chung-Chun and P.T. Hu were just a few of these students. They came to Taiwan in search of a better education. Soon after his completion of senior high school in Bogor in 1957, Chang decided to continue his study in Taiwan due to his personal political views and family background. Coming from *totok* family and raised within a strong Chinese culture, he was born in Bogor in 1935 with eight siblings. For their livelihood, his parents ran a shop in Bogor. His father was a nationalist who disagreed with communism; hence he was enrolled in a pro-KMT school. Apart from family, he also received a lot of information about Taiwan from his school teacher and friends.

Chang had never been to China or Taiwan, but he was assured by his teacher's indoctrinations and the observance of family rituals and practices. During this period, the Beijing government supported every Chinese student who wanted to continue their studies in China by providing them with free transportation and accommodations. Since he did not like the idea of communism, hence he inclined toward Taiwan with the idea of returning to Taiwan as an opportunity to immerse himself in Chinese culture. As an open-minded boy, he sought

out other sources of information, mainly from English-language news on the radio since his English ability was excellent. Although those who left for Taiwan had to take care of their own expenses on transportation and accommodations, and apart from incessant propaganda from Beijing, he was still determined that his destination for study be Taiwan.

At first his intention was only to study and return upon completion of school. However, in 1958 conditions in Indonesia for KMT supporters were worsening. People destined for Taiwan were forbidden to return to Indonesia. Owing to this situation, his family was initially against his will since he may not be able to return to Indonesia, and because of the absence of relatives in Taiwan. This did not discourage him from moving to Taiwan to live up to his dream of a better education. Furthermore, the insult he received from the immigration officer upon his departure made him decide to leave Indonesia for good. He departed in 1958 by Japanese vessel to Hong Kong and continued to Taiwan by a smaller ship and arrived at Keelung harbour where he began his new life as a fellow Chinese man in Taiwan.¹⁰

Upon his arrival, one thing that Chang believed was that he would have a better future and would no longer have to feel discriminated against since he was now among the same race in their fatherland. However, his life in Taiwan was a series of struggles in which he had to live alone and had to adapt to a relatively new situation. In terms of language, he had no difficulty since his Chinese was already fluent, but he still had to adjust to the culture and weather. At first, he encountered dietary problems when the food tasted different, however he managed to get used to it and began to enjoy it. Additionally, the coming of winter also shocked him. Although Bogor was a quite cool city, he still suffered from coldness since he had never dealt with such cold weather in Bogor. Besides, the condition of Taipei seemed peculiar to him due to the war period and the fact that the industrial sector was not yet advanced, so that everything looked dark and gloomy compared to Bogor at the time he left.

As a strong-willed student, the gloomy situation did not affect him. Consequently, he put all his effort into studying harder and finished school. His English ability encouraged him to apply to an English department, and he was accepted at National Taiwan Normal University. He then began his life as a university student where he lived in dormitories with other overseas students, including students from Thailand and Vietnam. Conversely, he maintained his relationships with other Indonesian students by setting up gatherings whenever they had spare time. Since overseas students were living in the same dorms, it was not difficult for them to mingle with fellow returnees from Indonesia.

As an overseas university student, he received a scholarship from the Taiwanese government with a total amount per month of NT\$80, and he additionally received uniforms, books, and meals. He enjoyed his life as a university student in which the only obligation was to finish his studies. He did not have to think about tuition and other costs since the government was very generous to overseas students like him. He never received any discrimination from the University or local students even though he was an overseas student. This continued after he entered work life and to the present, so he feels grateful for this. He could easily mingle with other Taiwanese, and he felt accepted by Taiwanese society. Since he speaks fluent Mandarin and acts like a Chinese man, Taiwanese people did not consider him an “other” he was considered a fellow Chinese man.

As soon as he finished his studies, he managed to become a school teacher and then a headmaster in a senior high school and an English broadcaster at a national radio program in Taipei. Initially he had planned to move again to a better place, and he chose the United States. However, he changed his mind when he met the love of his life on campus, who is also an Indonesian Chinese from Cianjur. They are now happily married with two beautiful daughters

¹⁰ Interview with Mr. Chang, Chung-Chun in IOCA office during field research in March June 2012.

who now live in the United States.

As a social entity, every individual requires an identity; it gives a sense of belonging and of social existence. Yet, identity is a process of adopting self-identification. Since it is a process, "Identity is always mobile and procedural, partly a self-construction, partly a categorization by others."¹¹ Furthermore, identity should be seen as a construction across different discourses, practices, and positions (Hall, 1996 : 1 - 10). Chang sums up his life as a beautiful journey. Knowing how the faith of those who returned to Mainland turned into despair, he feels blessed and relieved. He is grateful to have chosen to move to Taiwan. After 54 years of living in Taiwan, Chang underwent a series of processes for adopting self-identification. He now identifies himself as a citizen of Taiwan, mainly because he holds a Taiwanese passport. He has spent most of his sadness and happiness of life, as well as gained his dreams and successes, in Taiwan. Never experiencing any discrimination or alienation among Taiwan society, he feels welcomed and accepted in Taiwan. He was perceived as a part of the imagined community of Taiwan. For this reason he owes a sense of belonging to Taiwan country, while Indonesia failed to invoke the same. Since he was born and brought up in Indonesia, he considers Indonesia his past experience. He could never forget Indonesia, where few siblings still live and where memories of home and childhood remain. Though Indonesia places only in his heart, his first and foremost allegiance goes to Taiwan.

After Chang, P.T. Hu returned to Taiwan in 1960. He came along with his two brothers in late September 1960. They came with the Japanese Vessel "KoanMaru" and arrived in Keelung after nine days of travel. Upon their arrival, P.T. Hu and his brothers headed to the overseas Chinese middle school prepared by the Taiwanese Government.

Hu was born in Cilacap in 1944. As a boy of Hokkien descent, Hu was brought up within *totok* culture. He later moved to the Menteng area in Jakarta to continue his studies in Chung Sen Middle School, a pro-KMT school. Hu was in the last year of his senior high school when the Indonesian government banned all pro-KMT schools in 1958. Before his school closed down by Indonesian government, he received information from a schoolmaster and friend on how to register for school in Taiwan. He was forced to quit the school and continued in a pro-Beijing school. This did not satisfy him since it was against his political preferences. Due to the worsening conditions in Jakarta, he decided to leave school and move to Taiwan. He did not want to go to China because he received news from his friends who were already in Taiwan that the condition in Mainland was not certain compared to Taiwan, which is relatively more peaceful and progressive. Based on this information, he applied for school in Taiwan and departed for Taiwan.

Since he had not finished his middle school, he had to repeat his middle school again, and he was accepted at Panchiao Middle School a special overseas student preparatory school for admission to colleges and universities.¹² At that time, his Mandarin was not that fluent so he had to work harder to learn the language. During his years in middle school, he admits that he mainly spent his time with fellow Indonesian returnees due to his lack of Mandarin. In order to speed up his learning of Mandarin, he diligently pursued a part time job as long as he had spare time after school, even though he received an allowance of NT\$180 per month from the government. Hu cleaned the windows and school courtyard as his part time job. He managed

¹¹ Dibyesh Anand, 'Re-imagining nationalism: identity and representation in the Tibetan Diaspora of South Asia', Paper presented to British Association of South Asian Studies (BASAS) Conference in London, and British International Studies Association (BISA) Conference in Manchester, :273 in <http://staff.bath.ac.uk/ecsda/DAnand-Reimagining%20nationalism.pdf> published in 2000.

¹² Based on the interview with Mr. P.T. Hu in Taipei during field research on March-June 2012. The school was opened on October 21, 1955 in Taipei County. A special normal class was also added to this overseas Chinese high school. In 1959, the school was turned over to the provincial Department of Education, and after graduating existing students the school was converted into an ordinary school. Additionally, they did not accept any new admission until 1960. See detail on *China Yearbook 1959-1960*, (Taipei: China Publishing Co., 1959), pp. 378-381; *China Yearbook 1960-1961*, pp. 492.

to improve his language ability excellently and started to mingle with Taiwanese friends and other overseas Chinese friends from other countries.

His hard work was fruitful and Hu finished his studies satisfactorily and succeeded in continuing to Provincial Cheng Kung University in Tainan. He applied for the mining department due to his dream of becoming an engineer. He hoped to return to Indonesia for mining work after his graduation because he knew that Indonesia is rich in mining material that has not been explored. However, after several years in Taiwan as a student, his intention to return faded as he began to grow attached to Taiwan society.

Different from Chang, who did not feel any discrimination or alienation from his fellow Chinese in Taiwan, Hu once felt discomfort during his studies in university in the late 1960s. He noticed that every overseas student would be placed in the same class. Additionally, their identity cards were also encoded with a specific code to mark them as overseas Chinese. Some protests started during his study period, and the government finally discontinued its policy on marking the overseas students in 1970.¹³ Since then, he never felt different or endured other inequities from the government and other fellow Taiwanese. Furthermore, he met a Taiwanese girl with whom he fell in love, and he proposed to her to be his wife. They have been happily married ever since.

Upon his completion of university, he was accepted to work at a prestigious oil company in Taiwan, the Chinese Petroleum Company. During his career in the company, he gained achievements in petroleum engineering due to his ability and interpersonal skills. His knowledge of Bahasa and his reputation with returnees from Indonesia has helped him to achieve a chief representative position for the company in Indonesia. He was stationed in Jakarta from 1975 to 1981. During this period, he felt like reliving memories as he paid visits to all his classmates in Indonesia, ate all the food he missed, and adventured through whole Indonesian territories and succeeded in building up harmonious relations with high-ranking Indonesian officials.

P.T. Hu has been living in Taiwan for 52 years, and he is now a holder of a Taiwan passport. For him, the passport shows his citizenship and a status of identity. However, he has had to experience tumultuous events during his life to reach this level of identity. He is sure that as his land of birth, Indonesia will be kept in his mind till his death, but Taiwan soil has helped him to achieve his wonderful life. His attachment to Indonesia is surely visible as he keeps maintaining his relationship with his alma mater. Up to now, he is still responsible for publishing a reunion bulletin of Chung Sen Middle School, with its alumni spread out in Indonesia and all over the world.

Both Chang and Hu and many other returnees had to deal with hardship and unfavourable moments after they first arrived. "Adaptation" refers to the capacity to adjust to surrounding environmental conditions (Zathrow, 1994 : 13). The different socio-cultural life of Taiwanese society, dietary changes, and weather are the foremost problems that need to be adjusted to. Due to their decision to move, returnees must change or adapt to new conditions and circumstances in order to continue functioning effectively, hence they maximize their effort to adjust to society and be just like their fellow Chinese in Taiwan. During these periods, a more open and democratic atmosphere in which Western influence on free China was immense made the returnees fit easily with these circumstances and helped them adapt to Taiwan's culture and society. Additionally, Taiwan's assimilation policies applied toward all returnees made them feel welcomed and received by the host society, hence they eventually fully absorbed into Taiwan's weather, diet, culture, and society.

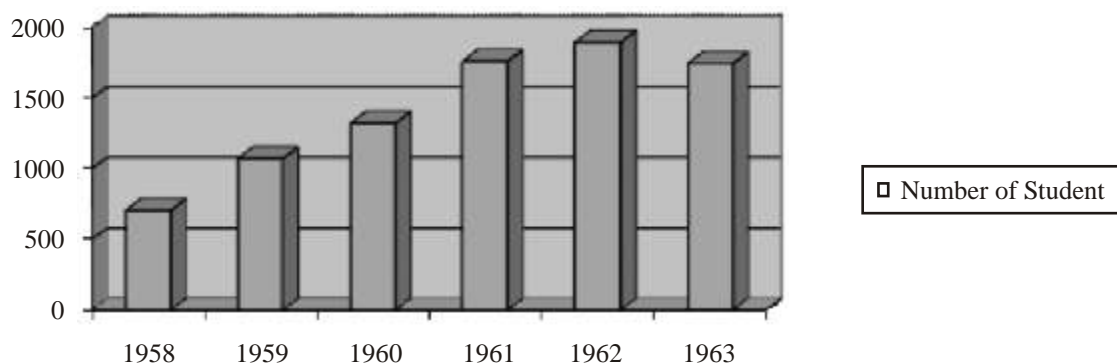
¹³ Based on the interview with Mr. P.T. Hu in Taipei during field research on March-June 2012. The writer could not find any further written information about this either in newspapers or other sources.

In Taiwan's case, the local society, which played an important role in accepting or alienating their guests, succeeded in comforting and compromising with the returnees since the government and its society opened their hands to their returnees. Although they are alone in Taiwan, under the care of the government of the Republic of China, and after the gradual establishment of interpersonal relationships and social networks, they can fully integrate into Taiwan's society. Hereafter, due to their higher levels of education, they are able to hold senior positions in all sectors such as education, health care, engineering, and others. They develop, contribute to, as well as achieve as high a standard of living as much of the local Taiwanese people.

From their appearance and style, the way they dress up and the way they talk, we cannot distinguish them from other Taiwanese. Nonetheless, once they gather among their fellow Indonesian returnees, the environment of Indonesia is in the air. My involvement with various gatherings and occasions for four months in Taipei during my field research reveals their attachment to Indonesia. Initially, they spoke Mandarin among themselves, but my presence among them stimulated their memory and they soon changed to *bahasa*, even with the dialects from where they came from such as *Sundanese*, *Javanese*, and others. Additionally, various Indonesian traditional foods such as *gado-gado*, *nasi goreng*, *mie goreng* and *kerupuk* were never absent, filling the lists of the menu on every occasion. Again, these facts strengthen the idea that to a certain extent these people's bond to Indonesia still exists.



Photo 1. The condition of pro-KMT school, Chi yu High School in Jatinegara area in Jakarta in 1955
Source :courtesy of Mr. Koo Chi Yung, a retired journalist of Central Daily News.



Graphic 1. The Number of Indonesia Students enrolled in Taiwan Schools and Universities 1958-1962
Source: compiled from *Free China Review* 1958-1963; *China Yearbook* 1958-1959, 1960-1961, 1962-1963, 1964-1965.

B. In Search of a Better Tomorrow: The Reason for Leaving Indonesia

Besides education, the search for a better life (25%) and political reasons (25%) were popular reasons among IOCA members to return to Taiwan during the 1960s. Many of them

returned with their whole family, bringing along their capital, and leaving their property behind in the hands of friends or natives without any compensation. This was a response to heightening hatred and discrimination against them.

During these periods, economic conditions in Indonesia collapsed due to ineffective governance. Regarding the economy, the government adopted various regulations to strengthen the indigenous economy such as Benteng policy and Ali-Baba.¹⁴ In addition, the government also imposed a head tax on alien Chinese in 1957, regardless of their birthplace. Nevertheless, the strongest policy was enacted in 1959 when President Soekarno approved PP 10/1959, a directive that forced alien Chinese to close their businesses in rural areas and relocate to urban areas. Although the Chinese strongly opposed this regulation, their protests failed and they were ignored due to a lack of representation in parliament. Despite the fact that the regulations specified only property confiscation, fines, and forced relocation, in practice many Chinese were brutally executed and their businesses were confiscated. Even though the regulations applied to alien Chinese, it also affected the Indonesian Chinese, owing to the unclear position of these Chinese who were continually acknowledged as foreign. This resulted in the huge exodus of Chinese to their mother country, where the number reached about 100,000 people (Coppel, 2002 : 15 - 18). It caused turmoil in the Indonesian economy because most national businessmen were ill-equipped to take over the place of these foreign retailers. Moreover, this condition also triggered strained relations between the two countries, although it managed to recover since Soekarno deeply occupied the Jakarta-PnomPhen-Hanoi-Peking-Pyongyang axis, which further withdrew Indonesia from Western countries (Coppel, 2002 : 35).

Compared to Mainland, only a small number of Indonesian Chinese returned to Taiwan. During 1959 to 1962, several waves of Indonesian Chinese returned; they mainly came within small groups consisting of several hundred people. The Free China Relief Association in cooperation with Taiwan's Overseas Chinese Affairs Commission (hereinafter abbreviated as OCAC) were two main government institutions that took care of overseas returnees, including those from Indonesia. According to their records, the numbers of Indonesians overseas returning to Taiwan during the period of 1958-1962 were approximately 17,000 persons. The Taiwanese government issued entry permits for Indonesian Chinese thusly: 6000 in March 1960, 1322 in July 1960, and 9400 in September 1960. As many as 2000 persons arrived in Taiwan either individually or in small groups from 1958 through mid-1960. The largest waves came in 1960, in which 1000 persons arrived in the end of August, and in the end of September over 1500 Indonesians arrived in Keelung.¹⁵

¹⁴ These two regulations privileged Indonesian businessman in doing business with lower taxes, free license in exporting goods, etc. For further explanation, see Thee Kian Wie, "Indonesia's First Affirmative Policy: The 'Benteng' Program in the 1950s" in <http://www.indie-indonesie.nl/content/documents/papers-economic%20side/Makalah%2013-Thee%20Kian%20Wie.pdf>

¹⁵ Compiled from Free China Review, volume 7-13, (Taipei: 1957-1965); *The Free China Relief Association* (Taipei: 1957;1962)

Table 1. The Number of Indonesian Overseas Chinese Returning to Taiwan 1958-1962(Estimated)

| Year | Total arrived |
|-----------|---------------|
| 1959 | 2000 |
| June 1960 | 2051 |
| July 1960 | 1000 |
| Sept 1960 | 1500 |
| Dec 1960 | 305 |
| Sep 1961 | 100 |
| Dec 1961 | 205 |
| Total* | 7161 |

Source: compiled and processed of *Free China Review* from vol. 8-13, (1957-1965) and *China Yearbook 1960-1961*.

*The total numbers were perhaps greater; as one issue states that it may have reached up to 17,000 (1962). Hence, the newspaper did not record the breakdown of their coming regularly.

Amy Tan was one among the returnees. Along with her parents, her only sister, the families of uncle and aunt, a total of 20 people, she went to Taiwan on the Japanese vessel *Koanmaru*, which mainly transported Indonesian returnees, on September 9, 1960. She actually did not know much about why they had to move because she was only four years old when they returned to Taiwan. One thing she remembered was that her parents always told her that this was mainly for their safety. During this period, many Chinese properties were attacked and confiscated, and thus they were living in fear and despair. Along with their relatives, the Tan's family decided to leave their shop behind and apply for a visa to Taiwan. Tan's family did not have any relatives on the island, and yet they decided that Taiwan was better than Beijing due to their political perspectives. Many of Tan's relatives and friends were pro-nationalist, hence they preferred the nationalists' island.

After arriving in Keelung on the 18th of September 1960, Amy and other passengers were greeted by a crowd of people, either relatives of these people or people who welcome their fellow Chinese in free China. She remembers how everybody was very joyful at that time. Although she could not really understand what was going on, she remembers her mother hugging her and crying and whispering a prayer that they are safe now. As a four-year-old girl, all she could understand was that there were so many people and so many flags were hoisted along the harbour, as if they were holding a ceremony. As they landed on Free China soil, several officers greeted them and asked for their travel documents. Her parents were told by the officers in Jakarta to bring all their education certificates and other valuable certificates explaining their previous skills and occupation. This was useful for the Taiwanese government to provide further assistance to the returnees, mainly by providing an occupation that fit with their background and ability. Soon after their documents were checked, they were transferred to a temporary shelter in Taipei.¹⁶

Since the numbers of Indonesian Chinese returning to Taiwan were increasing in the year 1960, the government responded by setting up an ad-hoc committee under the Executive Yuan to handle the reception and resettlement. The plans for these returnees included financial aid from the arrival of the returnees; every family received NT\$1000, vocational training, and calls for their participation in cultivating the less-developed land in South Taiwan (*Free China Review*, 1961 : 35).

Housing is the priority that matters most for the Taiwanese government; hence they set up

¹⁶ Interview with Mrs. Amy Tan in ShiDa, 24 April, 16 May, 30 May 2012.

resettlement for the returnees based on their country of origin. In addition, the government provided a loan available to those in need of help for housing. It was reported that the government prepared for NT\$5,000,000 for Indonesian returnees, and each family could borrow a maximum of NT\$50,000. Plans were afoot to build an overseas Chinese village in Shilin area by granting low interest loans and to construct low-cost housing for the returnees in Kaohsiung.¹⁷ However, after spending several weeks in shelters, the government transported the Tan family along with relatives to their resettlement in Tao Kung Tan area in Taiyuan, where they received soft loans for housing. Shortly after living in the new area, Amy's father was accepted in a factory and they began their life of normalcy in Taiwan society.



Photo 2. The typical condition of housing condition for returnees, including Indonesian returnees, located just outside Taipei
Source: *Free China Review*, Vol. 13 No. 1, p. 25.

on, they managed to adapt to their new condition. They began to mingle with returnees from other countries in surrounding neighbourhoods, and finally with Taiwanese people. The journey began to be fruitful as they lived prosperously in Taiwan and welcomed the coming of Amy's four little sisters and brother as new members of the Tan family.

As a second-generation Indonesian Chinese in Taiwan, Amy faced difficulties in the initial stages. The language barrier became the main problem since her first language was *bahasa* and she knew nothing about Mandarin. She was brought up with Indonesian Chinese culture from her parents and Taiwanese culture from school and society. At home, her parents sometimes spoke in *bahasa*, *hokkien*, and Mandarin, hence she knows only a little of each language. However, during her school period, joining with other children made her Mandarin progressively advanced. She remembered that during her first years of elementary school she was considered a Taiwanese Indigenous person since she could speak a similar language to theirs when she mentioned *lima* in *bahasa* (five in English, which also has the same meaning in the Taiwanese aboriginal language).¹⁸ Eventually she managed to speak Mandarin fluently, while her *bahasa* and *hokkien* began to fade away after a while. Regarding diet, her mother still cooked Indo-Chinese style dishes, but sometimes mixed with Taiwanese food. Her mother even taught her how to make Indonesian cakes and dessert such as *kue lapis* (layer cake).

As well as the Tan family, Chou also returned to Taiwan in this latter period in mid-December 1961. Chou left for Indonesia in the early 1940s to work as a labourer in Jakarta. Since he carefully maintained his salary, he amassed a fortune of Rp. 7,000,000, which he planned to bring home. However, the Indonesian government arrested him after he was

¹⁷ During the interviews, several members of IOCA mentioned that many Indonesian Chinese returnees can be found in several locations, mainly in Kaohsiung, Pingtung, Taiyuan, and in Yong He area, the current location of IOCA Office. The information confirmed the Taiwanese government's plan to resettle Indonesian returnees in these two cities. See for detail in *Free China Review*, Vol. X (May 1960), No. 5, pp.31-32.

¹⁸ Mr Chang informed me that currently Academia Sinica is conducting a research concerning the similarity of Bahasa with Taiwan aboriginal language as he become one of the informant in the discussion that held on June 27, 2012.

accused of being a KMT supporter and confiscated his savings up to Rp. 4,000,000. He was lucky enough to manage to sneak out the rest of his rupiah and returned to Taiwan soon after he was released by the Indonesian government (Free China Review, 1961 : 35).

The story of returning was not always a sad experience, as it was with Mrs. Nuo Huang. She came from Kwangtung to Jakarta in early 20th century, after leaving her son in the hands of relatives. She planned to return to China in the 1940s, but the war condition made it impossible to return. Since the conditions in Jakarta were unfavourable, she and her husband decided to leave Indonesia. They did not want to head to China because they received information from relatives about the uncertain situation there due to communist empowerment. They decided on Taiwan, where they hoped that free land would make them prosperous. As the crowd greeted her in Keelung harbour, she saw the figure of a young officer who looked like her missing child. To fulfil her curiosity, she politely asked the officer about his background. To her surprise, the officer was indeed her missing boy who leaves Mainland during the turbulence period in 1949. They cried and hugged each other in happiness for their reunification after so many years of separation. Mrs. Nuo was very happy about her decision to return to Taiwan since she gained both her better future and her missing boy (Free China Review, 1961 : 35-37).

The discourse of identity emerged as returnees amalgamated into Taiwanese society after a series of social adjustments and survival strategies. Identities must be negotiated, as they are not simply a matter of choice but also a process of formation in individuals and groups, derived from their interaction with the social and cultural context in which they live. In other words, identities are socially constructed and negotiated through everyday experience and social interactions (Brown, 2004 : 3-10). Likewise in the case of Amy Tan, she identified herself as Taiwanese more than *Tionghoa* or Indonesian Chinese due to the fact that most of her life was spent in Taiwan. She hardly knows Indonesia although she was born there, yet she does not know much about China except its role as the land of her ancestors. She considers herself a Taiwan citizen, not only because she holds a Taiwanese passport, but also because she has experienced and interacted with Taiwan's society and culture and that formed and constructed her identity. She analogizes herself as a flower in a garden more than a migratory bird as her parents did. Being a flower would beautify the garden, while a migratory bird would exhaust her with the process of readjustment. Hence up until now, she would rather stay and beautify Taiwan, as her garden of life, rather than move to a foreign country.

IV. IOCA: A NOSTALGIC HOME FOR INDONESIAN CHINESE IN TAIWAN

Home is traditionally termed as a safe and still place to leave and return to, and it is very often correlated with pleasant memories and intimate situations, a place of warmth and protective security amongst parents, brothers, sisters, and loved people. Hence home is synonymous with consistency, stability, certainty and permanence. In connection with Chinese migrants, the expression of home became divergent. In the past, Chinese sojourners defined home as their native village, where one's ancestors were buried and where they were supposed to return to, either physically or spiritually. Nevertheless, contemporary Chinese migrants tend to keep multiple residences in various places, since their place of birth is home but not home? They are unsure in their mind of where they should call home, as in the case of returned Hong Kongnese from Canada and Taiwanese from the Silicon Valley, USA who developed a transnational home identity ?

across the Pacific Ocean (Wang Canghai and Wong Siu Lun, 2003 : 1-2).

For Indonesian Chinese in Taiwan, home would be a complicated theme. There was no way to go back home since they had been away from China for generations. Additionally, there were no ways to return once they were expelled from Indonesia. These returnees had virtually no connections to their home villages in mainland China, but they reveal a certain degree of bond with Indonesia. Nonetheless, they regard Taiwan as their current home in that they have settled down in Taiwan as permanent residents for more than three decades. They admit that they are now more familiar with Taiwan than with China or Indonesia. Obviously, home for them is just a dwelling house? the fixed residence of their families or households, as several of my interviewees said:

".....I just visited my father's homeland in China once. I know a little about my ancestral land. Although I was born in Indonesia, I hardly know it. Taiwan is the place that I know most...."¹⁹

".....I am fifth-generation Chinese from Bogor; I even have foster parents who have performed a hajj. I have been to China several times just for a short visit. I feel at home when I visit Indonesia, which I visit one to two times in a year because I still have my mother and relatives there. Too bad the government and some of its people went wrong and treated us badly....."²⁰

".....I feel like a tourist if I am in Mainland or in Indonesia, but can your government give us a longer period of visa so that we can have more time in Indonesia? [This question was addressed to me by the respondent]. Because I want to stay longer in Indonesia; it is not enough to visit Indonesia for one month because we have so many friends there to visit"²¹

"..... I visited China several times for business trips and leisure. However, since I was stationed in Jakarta for four years, my childhood memory of Jatinegara has returned and I feel like it binds me again with the country, old-friends, and relatives. But still, my home is in Taiwan because my wife, children, and friends are here. And, you know, I just came back from Indonesia....."²²

The interviews expose the contradiction of home among the Indonesian Chinese, in which they no longer distinguish home as solely the ancestor's land. The discourse of home among these returnees splits into three spaces where Taiwan is their unctinal home? Indonesia is their motional home? and China is their incestral home? This confirms the study of Wang Cangbai and Wong Siu-Lun in 2003 regarding what happened to Indonesian Chinese returnees in Hong Kong. Nevertheless, different from the returnees in Hong Kong who experienced bitterness and discrimination in their homeland in China and developed a strong sense of insecurity and a deep sub-consciousness need for self-protection, the returnees in Taiwan are far more trusting of the Taiwanese government since they are treated equally to Taiwanese citizens.

However, the feeling of being emotionally home is important. Hence, in search of remedies to feel at their emotional home, the returnees undertook two major strategies by establishing an association where they manipulated their collective memory namely the Indonesian Overseas Chinese Association in Taiwan, or IOCA. It was in the summer of 1958 when several returnees executed the idea of initiating an association of Indonesian returnees in Taiwan. These initiators were Indonesian Chinese who were economically established and came to Taiwan along with their capital. At first, the organization was informal. According to

¹⁹ Interview with Mrs. Amy Liao in Shi Da, April 2012.

²⁰ Interview with Dr. Hoang in IOCA base in Yong He on 25 March 2012

²¹ Interview with Mr. Kuo Chi Yung in IOCA base in Yong He, Taipei in March 2012.

²² Interview with Mr. Chang Hua-Hsing in IOCA base during March-May 2012.

its charter of establishment II returnees from Indonesia are qualified to join this association.²³ Their aim in establishing the association was to help their fellow returnees economically, and it served as a place to share information about business opportunities and as a place to get together with the returnees; hence they built an economic-social network of Indonesian Chinese returnees in Taiwan.²³

Although established in 1958, the association formally registered in New Taipei City Municipal Government in 1988 and subsequently registered in the Ministry of the Interior of Taiwan in 1989. Initially, IOCA did not have any fixed office, so the office moved as many as five to six times during its first ten years. Only after its registration in municipal government did IOCA own a permanent office in Yong He district, where it is tax-exempt owing to its function as a non-profit association.

During its first 10 years, the activities of IOCA were not as active and regular as nowadays with the bustle of its members. Only after 1989, under the leadership of Mr. Chiu who also served as a member of the Legislative Yuan, the activities of IOCA began to range from promoting Indonesian culture, birthday gatherings, inviting painters from Indonesia to perform in Taipei, and more. Since then, the reverberations and existence of IOCA became widely known among Indonesians in Taiwan.²⁴

Unlike other associations that have regulations and articles, the establishment of IOCA was without any formal regulations and articles, except the Charter of Establishment as their main foundation of the organization. Because of the absence of articles, the executive board and the caretakers of IOCA are based on the volunteerism of its members. Furthermore, the membership is open widely to any people who have connections with Indonesia and their family members, not merely those who are returnees during the 1950s-1960s. There are two types of membership in IOCA, the formal members who pay admission for NT\$1200 per year. Second, informal members are those who only come temporarily and irregularly donate time. Currently, there are about 1000 members registered in IOCA, and 400 of them are formal members.²⁵

During its establishment, IOCA had 13 chairmen and each of them administered IOCA for three years. Currently, there are two kinds of IOCA administrations, namely IOCA New Taipei City and IOCA Taiwan. Basically these two associations are the same, however due to the regulation of New Taipei City government concerning the tax exemption of IOCA office, the committee of IOCA dismisses the idea of unifying these two IOCA. The regulation states that as long as the organization exists and is active, the office will remain in the hands of IOCA members; if it ceases to exist, the government will acquire the office. As a consequence, since 1989 IOCA has always had two chairmen one for IOCA New Taipei City and the other for IOCA Taiwan and both chairmen cooperate together for the development of the organization. Structurally, IOCA consists of two levels: an executive council and the full session of association members. The full session members are the highest body of power in IOCA, and they will gather every once a year to review the financial and administrative reports as well as to make resolutions concerning all association affairs. Additionally, they are also responsible for the election of executive council members. On the other hand, the executive council of IOCA consists of 36 people who deal with various tasks. They will hold a meeting twice a month to settle a range of predicaments, while several people come regularly to IOCA headquarters to control the office.²⁶

²³ Interview with Mr. Chang, Chung-Chun, a chairman of IOCA for period of 2012-2014, in IOCA headquarters in Yong He, March-April-June 2012.

²⁴ Interview with Mr. Chiu, ex-Chairman of IOCA for the period of 1989-1992, in IOCA headquarters on 25 March 2012.

²⁵ Based on information from Mr. Chang during the interviews in March-April 2012.

²⁶ Interview with Mr. Chang Chung-Chun, IOCA present Chairman, on 25 April 2012.

Currently, IOCA has various activities to celebrate with their members. The Chinese New Year dinner and celebration, birthday gatherings, vacations, visiting orphanages and other communities are just a few of their diverse activities. They sometimes just flock to the base every weekend to have a chat, dance together, and karaoke. IOCA is also concerned with the cultural aspect, so they are forming a group of angklung players a Sundanese instrument made from bamboo as well as a traditional and modern dance team and a chorus group. These teams are often invited to perform at IOCA activities or in various other events. The presence of cultural teams in IOCA symbolizes their concern with promoting and introducing a mix of Indonesian culture into Taiwanese society. IOCA also has deep concern for the education of the children of returnees. In response to this, they have a scholarship program for the youth generation. Every year, IOCA distributes a scholarship for the children of its members and to an Indonesian student in Taiwan. There are 15 to 20 children of junior and senior high school age that receive a sum of NT\$5,000 every year, and university students receive a sum of NT\$8,000.

Publishing is another activity maintained by IOCA; it has its own journal entitled *The Voice of Overseas Chinese from Indonesia* that in April 2012 has reached 138 volumes. The journal is one of the most powerful ways of expressing, creating and circulating collective memory, and it is distributed to a wide range of localities including Indonesia, Singapore, Australia, the United States, France and many big cities in China besides Taiwan. The contents are written either by association members or respondents from other countries. The works in the journal are mainly written in Mandarin, except for only a small number written in Bahasa or English. The journal consists of the reports of association business, such as executive committee reports, financial reports, election results and so forth. Moreover, the major part of the journal is made up of IOCA activities and festivities, and materials essays, poems, or letters that perform the memories and desires of the community through such things as folklore, food and recipes, and the scenery of Indonesia. This is best reflected in one of its editions: *Semur Jengkol* and *Empal Gentong* recipes; *The Indonesian Chinese figures involved in Indonesian struggle for Independence*; etc. Furthermore, the journal also reports the current situation in Indonesia and promotes worthy places to visit in Indonesia.

The works published in the journal in many ways contribute to the recapture of a history of Indonesian Chinese. They depict and create collective memory among the members of the community in the course of long, broad and sentimental descriptions and fond recollections of the people and events in the past in various places in Indonesia, deliberately highlighting the strength of friendship and the profound bond with Indonesia while seeming to ignoring the unpleasant events they have been through. In celebrating its 50th anniversary in 2008, IOCA even published a special edition of its journal in which it described its celebration and the history of IOCA. The journal is distributed not only to its members but also to Indonesian representatives in Taiwan and Taiwanese government institutions to represent the role and position of the Indonesian Chinese returnees in Taiwan.

IOCA along with its activities are devised to construct a collective memory of Indonesian Chinese returnees in Taiwan. The members of IOCA are the bearers of memories, and the activities they conduct angklung players, traditional and modern dance groups, birthday gatherings, etc. are the work of collective agencies in performing the act of recall. At every opportunity, the association has held parties, with the 50 anniversary celebrations of the IOCA being the grandest. At each party, all the leaders, consultants, and community members turn up. Sumptuous feasts are prepared, various traditional Indonesian foods are present, and colorful performances are put on. These community gatherings are emotional occasions to remind the Indonesian Chinese of the spirit of comradeship and cohesion in this community, and thus strengthen their shared identity.



Photo

tuals

Photo 5. Some of the publication and my informal talk with IOCA former Chairman, Mr. Chiu (in the middle holding walking stick) and Dr. Hoang
Source: The Voice of Overseas Chinese from Indonesia, Vol. 139, p.12



Photo 6. The Charter of esta

appointment as Chairman of



Photo 7. Pose with the head Chairman of IOCA and the officer from Indonesian representatives in Taiwan (KDEI) Source: Private collection

V.CONCLUSION AND RECOMMANDATION

This study examines the historical background of Indonesian Chinese returnees in Taiwan, mainly the motives and adaptation process that shape their new identities. Most of these returnees have formed Indonesian social-cultural patterns since they spent their formative years in Indonesia, which influences their point of view about their new life in Taiwan. This creates layers of cultural and social adaptation that interact with their new host society. Their background and life experiences in Taiwan affect the development of their personal identity and socio-cultural roles. This confirms Hall (1996) in that identity is seen as a construction across different discourses, practices, and positions; it is socially constructedformed and negotiated through everyday experience and social interactions (Brown, 2004).

In terms of adjustment, returnees must change or adapt to new conditions and circumstances in order to continue functioning effectively by maximizing their effort to adjust to society. Besides, social networks also play a vital role in social adjustment problems. Social networks are often defined as the relationship of interpersonal interactions in the form of kinship, friendship, or other associations that are represented by means of social and economic activities as a vehicle for the exchange of information. Each member of a social network is linked by a common vision and obligations established in the course of personal contacts

(Goss and Lindquist, 1995 : 318). To a certain degree, the presence and companionship among fellow returnees has helped them to adjust to their new host society. Learning language together among the Tan families, and student gatherings in the case of Chung and P.T. Hu, were just a few survival strategies that utilized their social resources. In addition, the initiation of IOCA signifies the importance of social networks as a means to mobilize and utilize their social resources such as material, technological, and cultural knowledge in the process of settlement and adaptation in the social and economic life of the returnees. Later, as a representation of nostalgic home, this association also strengthens the unique identity of Taiwanese citizens with Indonesian background.

On the other hand, conditions in the surrounding environment also affect the process of adaptation. Taiwan's assimilation policies, applied toward all returnees, facilitate the returnees to adapt to Taiwan's culture and society. In addition, a democratic atmosphere and immense Western influence advanced them to feel welcomed and received by the host society; hence, eventually they were fully absorbed into Taiwan's weather, diet, culture, and society. In Taiwan's case, the local society that plays an important role in accepting or alienating their guests succeeded in comforting and compromising with their returnees, since the government and its society opened their hands for their returnees.

Chang, P.T. Hu, and Amy Tan, as well as other Indonesian Chinese returnees in Taiwan, have a different viewpoint regarding the membership of a nation. They believe that to be part of the Indonesian nation does not necessarily mean that they have to disregard their personal identity in culture, traditions, and heritage the identity that was always attached to them and was created through continuous interaction with their family and neighborhood and through education. The feeling of being unaccepted by their fellow citizens made them fail to imagine and to maintain their Indonesian identity. They opted to seek another imagined community where they would be accepted as an entity with an identity. The conditions and regulations applied by the Indonesian government, in their opinion, had alienated them from the imagined Indonesia. Along with their fellow Chinese in Taiwan, they are able to maintain their *Chineseness*, as when Chang, P.T. Hu, and Amy Tan regard themselves as Taiwanese with Chinese descent although their memory of Indonesia is still kept in their hearts because they were once Indonesian.

Their decision to leave also impacted Indonesia. Their returning from 1958 to 1966 mainly consisted of young educated people from upper-class society and those who owned capital. Most of them were students who later became professionals ranging from doctors, scientists, technicians, architects, administrators, and expert in their fields. Thanks to their skills, they are able to adapt and find a job in their new adopted countries. Some of them were even able to become a famous expert and very successful in their new home. Thus, for Indonesia the departure of the Chinese signified a brain drain process since many talented professionals who left supposedly could have contributed to the development of Indonesia with their knowledge and ability. It also meant the loss of capital, since the Chinese who chose to leave took their capital with them.

The motives of these three persons were mainly based on pursuing higher and better education, and foremost for personal security. They considered that in Indonesia they could no longer be certain of their personal safety in social, political, and economic terms. The absence of college and university level, and further, the ban on pro-KMT schools in 1958 followed by restrictions on foreign schools compelled Chang and P.T. Hu to return to the fatherland that at that time offered scholarship opportunities for overseas returnees. A series of anti-Chinese riots had directly endangered their life. Furthermore, the feeling of being discriminated against by policies regulated by the government painfully disrupted their lives. . In addition,

the implementation of PP 10-1959 encouraged the Tan family to leave Indonesia in 1960, as their main concern was to provide a certain future for their children, liberated from any means of discrimination.

They had not mainly left Indonesia for economic reasons, and in fact their economic ability facilitated their migration. They were able to migrate because they had funding and further access to destined countries. Also, their education had shaped them into professionals and assisted them with surviving in their new country. The skills, financial ability, and connections formed their main economic capital and this strengthened their decision to leave Indonesia. From an economic point of view, leaving the country was a difficult decision since they had invested lots of capital. Nonetheless, it did not prevent them from going, as security and a better future were their foremost objectives. Their choice for the countries of destination was in essence based on their personal culture, educational experiences, and political view. The decision to move to Taiwan was simply because it was the country where they were rooted which was free from communism.

Their decision to leave also impacted Indonesia. Their returning from 1958 to 1966 mainly consisted of young educated people from upper-class society and those who owned capital. Most of them were students who later became professionals ranging from doctors, scientists, technicians, architects, administrators, and expert in their fields. Thanks to their skills, they are able to adapt and find a job in their new adopted countries. Some of them were even able to become a famous expert and very successful in their new home. Thus, for Indonesia the departure of the Chinese signified a brain drain process since many talented professionals who left supposedly could have contributed to the development of Indonesia with their knowledge and ability. It also meant the loss of capital, since the Chinese who chose to leave took their capital with them.

Only in the era of *Gusdur*, the Indonesian government began to give its permission for Chinese culture to publicly perform. This step was highly appreciated by most Chinese in Indonesia, including these Indonesian Chinese in Taiwan. This is actually what they hoped from the government, which indicated a recognition as part of Indonesian and to be regarded as one of the many ethnic groups in Indonesia. To ensure the security and accommodate the existence of various ethnic in Indonesia, including the Chinese, is an important task for the ruling government in order to preserve a sense of belonging towards Indonesia. By doing so, this would maintain the integrity of the Indonesian state. Thus, this would avoid the repetition of brain drain from Indonesia to other parts of the world.

BIBLIOGRAPHY

- Anand, Dibyesh. 1999. '(Re)imagining Nationalism: Identity and Representation in the Tibetan Diaspora of South Asia' in <http://staff.bath.ac.uk/ecsd/DAanand-Reimagining%20nationalism.pdf> accessed on February 20, 2008.
- Anderson, Benedict. 2006. *Imagined Community Revised Edition*. London: Verso.
- Brown, Melissa J. 2004. *Is Taiwan Chinese? The Impact of Culture, Power, and Migration on Changing Identities*. Berkeley: University of California Press.
- China Yearbook 1958-1959*. 1958. Taipei: China Publishing Co.
- China Yearbook 1959-1960*. 1959. Taipei: China Publishing Co.
- China Yearbook 1961-1962*. 1961. Taipei: China Publishing Co.
- China Yearbook 1963-1964*. 1963. Taipei: China Publishing Co.
- China Yearbook 1965-1966*. 1965. Taipei: China Publishing Co.
- Coppel, Charles A. 1957. *The Indonesian Chinese in 1960's: A Study of Ethnic Minority in a*

- Period of Turbulent Political Changes*. Unpublished Doctoral Dissertation, Australia: Monash University.
- _____. 1986. *Indonesian Chinese in Crisis*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- _____. 2002. *Studying Ethnic Chinese in Indonesia*, Singapore: Singapore Society of Asian.
- Dahana, A., 2004. 'Pri and Non-Pri Relations in The Reform Era: A Pribumi's Perspective' in Suryadinata, Leo (Ed.). *Ethnic Relations and Nation-Building in Southeast Asia The Case of The Ethnic Chinese*, Singapore: Nias Press.
- Di Rodio, W., 2002. 'An Exploration of the Concept 'Motivation' as a Tool for Psychotherapeutic Assessment' in Practical Philosophy Autumn Volume 5.2, on <http://www.practical-philosophy.org.uk/Volume5Articles/Motivation.htm> accessed on March 15, 2008.
- Gmelch, G., 1980. "Return Migration" in *Annual Review of Anthropology*. Vol 9: 135-159.
- Goss, J. and Lindquist, B., 1995. "Conceptualizing International Labour Migration: A Structuration Perspective" in *International Migration Review*, Volume 29, No. 2, (Summer: The Centre For Migration Studies Inc.)
- Hall, S., 1996. 'Introduction: Who Needs "Identity"?', in Hall, Stuart and Paul Du Gay (eds.). *Questions of Cultural Identity*, London: Sage.
- Hong Liu, 2011. *China and the Shaping of Indonesia 1949-1965*. Singapore: NUS Press.
- Horowitz, D. A., 1998. 'Structure and Strategy in Ethnic Conflict' Paper prepared for the Annual World Bank Conference on Development Economics, Washington, D.C., April 2021, 1998.
- Kahin, M. G., 2003. *Nationalism and Revolution in Indonesia*, New York: Southeast Asia Program Publication.
- Kartodirdjo, S., 1997. 'From Ethno-Nationalism to the "Indonesia Merdeka" Movement 1908-1925' in Sri Kuhnt-Saptodewo et.al (eds.). *Nationalism and Cultural Revival in Southeast Asia: Perspectives from the Centre and the Region*. Germany: Hubert & Co.
- Lasker, B., 1946. 'The Role of the Chinese in the Netherland Indies,' *The Far Eastern Quarterly*, Vol. 5, No. 2, (Feb.):162-171.
- Mozinga, D., 1976. *Chinese Policy toward Indonesia 1949-1967*. Ithaca: Cornel University Press.
- _____. 1961. 'Sino-Indonesian Dual Nationality Treaty' in *Asian Survey*, Vol. 1, No. 10, (Dec.).
- Purcell, V., 1966. *The Chinese in Southeast Asia*. Oxford: Oxford University Press
- Raben, R., 2006. 'Anti-Chinese Violence in the Indonesian Revolution' paper presented on Konferensi "Dekolonisasi dan Posisi Etnis Tionghoa Indonesia 1930 s/d 1960-an" in Padang 18-21 June 2006.
- Ramanathan, 1994. *China and the Ethnic Chinese in Malaysia and Indonesia 1949-1992*. London: Sangam Books.
- Sinn, E., and Wang Cang Bai. 2003. *Moving Continuum: Migration, Remigration, and the Layering of Identities*. Paper presented on "Sub ethnicity in the Chinese Diaspora Conference, University of Toronto, 12-13 September 2003.
- Skinner, W., 1961. 'Java's Chinese Minority: Continuity and Change', *Journal of Asian Studies*, Vol. 20, No. 3, May.
- Suryadinata, L., 2002. *Negara dan Etnis Tionghoa Kasus Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- _____. 1997. *The Culture of The Chinese Minority in Indonesia*. Singapore: Time Book International.
- _____. 1994. *Dilema Minoritas Tionghoa*. Jakarta: Grafiti Press
- _____. 1993. 'The State and Chinese Minority in Indonesia' in Suryadinata, Leo (Eds.) *Chinese Adaptation and Diversity*. Singapore: Singapore University Press.

- _____. 1983. 'Liem Koen Hian Peranakan yang Mencari Identitas' in *Prisma* No.3 March, year XII.
- _____. 1976. 'Indonesian Policies toward the Chinese Minority under the New Order' in *Asian Survey*, Vol. 16, No. 8, (Aug.) on <http://www.jstor.org/stable/2643578> accessed on April 3, 2008.
- Suprajitno, S., No year. *Defining New Domains: The Identities of Indonesian Returned Overseas Chinese*, in [www.asianscholarship.org/asf/ejournal/articles/ setefanus_s.pdf](http://www.asianscholarship.org/asf/ejournal/articles/setefanus_s.pdf) accessed on August 1, 2011.
- Thee, K. W., No year. 'Indonesia First Affirmative Policy: The "Benteng" Program in the 1950s' in <http://www.indie-indonesie.nl/content/documents/papers-economic%20side/Makalah%2013-Thee%20Kian%20Wie.pdf> accessed on April 10, 2008
- Thiesse, A. M., 1999. *Inventing National Identity* in <http://mondediplo.com/1999/06/05thiesse> accessed on June 12, 2008.
- Tinsman, M. T., 1983. *China and the Returned Overseas Chinese Students*. Unpublished Dissertation at Columbia University.
- Vandenbosch, A., 1930. 'A Problem in Java: The Chinese in the Dutch East Indies,' in *Pacific Affairs*, Vol. 3, No. 11, (Nov.): 1001-1017.
- Wang Cangbai and Wong Siu-Lun, 2003. Home as a Circular Process: A Study of the Indonesia Chinese in Hong Kong, Unpublished paper, Hongkong University
- Williams, L. E., 1966. *The Future of the Overseas Chinese in Southeast Asia*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Willmott, D. E., 1961. *The National Status of The Chinese in Indonesia 1900-1958*. New York: Ithaca.
- Zathrow, C. et. al., 1994. *Understanding Human Behaviour and The Social Environment 3rd edition*. Chicago: Nelson Hall.
- Zurbuchen, S. M., 2002. 'History, Memory, and the "1965 Incident" in Indonesia' in *Asian Survey*, Vol. 42, No. 4, *The Legacy of Violence in Indonesia*, (Jul. - Aug., 2002): 564-581 in <http://www.jstor.org/stable/3038873> accessed on June 7, 2008.

Newspaper:

Free China Review, Vol .VII-XII, No. 1-12, 1958-1963
Free China Weekly, vol. 7-8, 1967

Websites:

www.ocac.gov.tw/english/public/
<http://inhuaca.myweb.hinet.net>

| | | |
|---------------------------|---|------------------------------|
| | | |
| | | |
| Oral Source: | | |
| Mr. Chang, Chung-Chun | current Chairman of IOCA | March-April 2012 |
| Mrs. Amy Tan | Master degree Student at NTNU | April 2012 |
| Mr. P.T. Hu | IOCA member | March 2012 |
| Mr. Chiu | ex-Chairman of IOCA (1989-1992), | 25 March 2012 |
| Mrs. Yvonne | IOCA member | March-April 2012 |
| Dr. Hoang | IOCA member | 25 March 2012 |
| Mr. Chang, Hua-Hsing | IOCA member | March-April 2012 |
| Mr. Kuo Chi Yung | IOCA member | March 2012 |
| Mr. Tsu Chang Tuan | IOCA member IOCA members during | April 2012 March-Mei 2012 |
| Dr. Edwin Yang | Associate Professor at History Department of NTNU | March-April 2012 |
| Professor Ching Lung Tsay | Professor at Southeast Asian Studies of Tamkang University | March 2012 |

STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN MELALUI BUDIDAYA RUMPUT LAUT

Di Kecamatan Talango, Pulau Poteran, Sumenep

Emiliana Sadilah

Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta
Jalan Brigjen Katamso 139 Yogyakarta
e-mail:esadilah@gmail.com

Abstrak

Di Kecamatan Talango, Pulau Poteran, Sumenep, masyarakatnya sedang giat-giatnya membudidayakan rumput laut. Aktivitas budidaya rumput laut ini dimulai sejak terjadi krisis moneter tahun 1998 lalu. Bagi masyarakat Pulau Poteran budidaya rumput laut merupakan hal baru, namun kini sudah merupakan bagian dari aktivitas ekonomi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk melihat potret masyarakat pembudidaya rumput laut, mendeskripsi budidaya rumput laut, dan ingin melihat sumbangan dari hasil aktivitas tersebut terhadap pendapatan keluarga. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan analisa deskriptif kualitatif yang disajikan dalam bentuk uraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil budidaya rumput laut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di Pulau Poteran. Selain menggeluti rumput laut, masyarakat di Pulau Poteran telah memiliki pekerjaan lain sebagai petani lahan kering, nelayan dan beternak. Budidaya rumput laut telah menjadikan kehidupan mereka semakin baik

Kata Kunci: strategi peningkatan pendapatan, Pulau Poteran, budidaya rumput laut

STRATEGY OF INCOME IMPROVEMENT THROUGH SEAWEED CULTIVATION IN TALANGO SUBDISTRICT, POTERAN ISLAND, SUMENEP

Abstract

In Talango sub-district, Poteran Island, Sumenep, the society is in full swing in cultivating seaweed. This seaweed cultivation activities has been started since the financial crisis began in 1998. For the people of Poteran Island, seaweed cultivation is a novelty, but now it is a part of their economic activities. This study aims to look at the portrait of the seaweed farmers society, describe the seaweed cultivation activities, and to see the contribution of those activities towards the families income. In this study, qualitative method is used and descriptive analysis is presented in narrative form. The results of this study showed that the cultivation of seaweed can increase the income of the people living in Poteran island. Besides seaweed cultivation, the people of the Poteran island have other additional jobs such as dryland farmers, fishermen and livestock. The seaweed cultivation activities has made their lives much better.

Keywords : strategy to increase income , Poteran Island, cultivation seaword

I. PENDAHULUAN

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu berusaha untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungannya (Bintarto, 1983:72). Seperti pada masyarakat yang tinggal di daerah pantai, mereka akan melakukan aktivitas sebagai nelayan, masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman melakukan aktivitas menjadi petani yang akan mengolah apa saja yang ada di lingkungan alam sekitarnya Apabila lingkungannya sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tinggal di sekitarnya, maka manusia akan berusaha dengan berbagai cara (strategi) agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Salah satu cara pada masyarakat yang tinggal di daerah pantai adalah dengan membudidaya rumput laut.

Indonesia sangat potensial untuk membudidaya rumput laut, berkaitan dengan sifat sebagai negara kepulauan (jumlahnya 17.480 pulau), dan luas wilayah laut 5,8 juta kilometer

persegi, terdiri dari 3,1 juta kilometer persegi luas laut Nusantara dan 2,7 juta kilometer persegi wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Sementara itu, luas garis pantai diperkirakan 95,181 kilometer. Dilihat secara keseluruhan, luas laut Indonesia adalah 75,3% dari total wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (Rizald, dkk; 2008:1).

Wilayah Indonesia terletak di daerah tropis sehingga memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi tetapi jumlah populasi dalam jenis relatif sedikit. Berbeda dengan daerah subtropis yang memiliki jenis ragam hayati relatif sedikit tetapi jumlah populasi setiap jenis sangat banyak. Potensi laut yang dihuni oleh berbagai macam biota laut menunjuk bahwa Indonesia kaya akan anekaragam sumberdaya kelautan. Terdapat kurang lebih 354 jenis karang yang termasuk kedalam 75 marga. Bahkan sedikitnya terdapat 14.000 jenis terumbu karang di 243 lokasi yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Potensi laut wilayah pesisir diperkirakan hidup sekitar 12 jenis lamun dan 38 jenis mangrove. Untuk kekayaan hayati laut, ada sekitar 2.500 jenis spesies ikan dan dari jumlah tersebut ada 253 jenis termasuk dalam jenis ikan hias dan 132 jenis ikan yang bernilai ekonomis penting (Rizald, dkk; 2008: 32-34).

Salah satu sumberdaya hayati yang dewasa ini baru marak dibudidayakan oleh kalangan masyarakat pantai adalah rumput laut. Tanaman ini merupakan sejenis ganggang yang dapat hidup di wilayah perairan (pesisir dan laut.) dan dapat berasosiasi dengan keberadaan ekosistem terumbu karang. Di Indonesia, gulma laut atau rumput laut hidup di karang-karang terjal yang melindungi pantai dari deburan ombak. Rumput laut dapat dibudidaya di sepanjang pantai pesisir/laut dangkal. Aini (2009) mengatakan bahwa kondisi pantai seperti ini merupakan aset yang cukup besar untuk pengembangan budidaya rumput laut. Lahan untuk budidaya rumput laut seluas 11.500 ha di Indonesia, dan baru 1.500 ha yang dimanfaatkan, sehingga masih tersedia banyak lahan yang dapat dikembangkan untuk budidaya rumput laut (Aini, 2009).

Di Sumenep budidaya rumput laut telah dimulai setelah terjadi krisis moneter tahun 1998, dan merupakan salah satu program untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Salah satu sasaran realisasi program budidaya rumput laut ini adalah di wilayah Kecamatan Talango, Pulau Poteran, Kabupaten Sumenep. Wilayah ini merupakan binaan pertama kali dalam budidaya rumput laut. Pada tahun 2007, camat Talango dalam pidatonya pada acara sambung rasa pemerintah dengan masyarakat Talango, memberikan pernyataan bahwa wilayah pesisir pantai Poteran (merupakan wilayah administrasi Kec. Talango) memiliki potensi rumput laut yang besar dan sangat layak untuk dikembangkan. Tampaknya pernyataan itu ditanggapi positif dan masyarakat diberi pinjaman modal untuk usaha budidaya rumput laut. Pada tahun 2011 tercatat 610 orang yang berstatus sebagai kepala keluarga (KK) (yang terbagi dalam 34 kelompok dan 5 kelompok pengolah) telah membudidaya rumput laut. Sistem budidaya menggunakan metode rakit, dengan jumlah 7.150 unit. Berdasarkan data sekunder (Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumenep, 2010) hasil produksi budidaya rumput laut mencapai 53.670,98 ton dengan nilai 80.506.470.000,-. Sementara hasil penangkapan ikan hanya mencapai 1.361,86 ton dengan nilai 13.618.450.000,-. Dari data tersebut terlihat hasil budidaya rumput laut lebih menguntungkan daripada hasil tangkapan ikan.

Kondisi ini terjadi karena pada saat kegiatan budidaya rumput laut, potensi ikan di laut menurun dapat dikatakan tidak ada ikan. Saat itu terjadi pada musim kemarau terutama pada bulan Mei hingga September. Pada bulan April hasil ikan teri putih /ikan *kenduy* jarang diperoleh karena tidak musim lagi. Padahal di Pulau Poteran ini dikenal sebagai pulau penghasil ikan teri putih, dan dikenal sebagai nelayan *jurung*. *Jurung* adalah alat untuk menangkap ikan teri putih/ikan *kenduy*. Pada saat tidak ada ikan teri dan sulit memperoleh

ikan (terjadi sekitar 6- 7 bulan), pada kesempatan itu digunakan untuk budidaya rumput laut. Hanya dalam waktu 40 45 hari membudidaya rumput laut, hasilnya sudah dapat dinikmati. Ternyata dari budidaya rumput laut ini memberikan hasil dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karenanya, budidaya rumput laut menjadi alternatif dalam meningkatkan pendapatan keluarga.

Tentunya dengan adanya penambahan aktivitas /matapencaharian baru, secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Budidaya rumput laut menuntut seseorang bekerja dengan serius, disiplin dan rajin. Hal ini disebabkan karena dalam membudidaya rumput laut harus selalu diperhatikan supaya tidak ada gangguan-gangguan. Ada penyakit tertentu dan gangguan binatang/hewan laut yang dapat mengganggu pertumbuhan gulma rumput laut ini. Oleh karenanya dalam pertumbuhannya, rumput laut harus terhindar dari ancaman binatang laut agar perolehan hasil baik. Cara yang dilakukan masyarakat untuk mengatasi hal tersebut dengan selalu menengok rumput laut yang dibudidaya itu setiap hari. Dalam satu hari paling tidak 2 kali ditengok (pagi dan sore). Kalau terjadi angin besar, gelombang, dan hujan deras; harus ditengok beberapa kali. Dengan demikian, jika ada kerusakan bibit rumput laut ini dapat segera diganti.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka pertanyaannya adalah 1) Bagaimana budidaya rumput laut itu dilakukan, dan 2) Seberapa besar kontribusi budidaya rumput laut terhadap pendapatan keluarga. Penelitian ini bermaksud untuk mengungkap aktivitas budidaya rumput laut yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Talango, Pulau Poteran, Sumenep dengan tujuan: 1. menyajikan potret masyarakat pembudidaya rumput laut, 2. mendeskripsi aktivitas budidaya rumput laut, dan 3. mengkaji sumbangan dari hasil budidaya rumput laut terhadap pendapatan keluarga.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk memperkaya khasanah budaya, khususnya yang terkait dengan upaya sekelompok manusia dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, diharapkan upaya ini dapat digunakan oleh kelompok masyarakat lain yang memiliki karakter geografis serupa.

Ada beberapa hasil penelitian yang menunjukkan upaya masyarakat dalam meningkatkan pendapatan keluarga, akibat kondisi geografis. Seperti yang terjadi pada masyarakat nelayan di Cilacap. Akibat perubahan ekosistem, masyarakat yang awalnya sebagai nelayan saja dan tidak memiliki ketrampilan lain, kini harus menekuni pekerjaan baru sebagai petani, berdagang, dan bekerja di bidang yang lain. Pekerjaan sebagai nelayan tidak memperoleh hasil lagi karena lingkungan geografisnya telah berubah. Awalnya masyarakat hanya menekuni satu jenis pekerjaan saja (sebagai nelayan), kini meninggalkan pekerjaan itu dan menekuni lebih dari satu jenis pekerjaan. Itu semua merupakan strategi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan (Sadilah, 2008:363-374) Upaya untuk meningkatkan pendapatan juga dilakukan oleh masyarakat petani di Magelang, Jawa Tengah, dan masyarakat nelayan *jurung* di Pulau Poteran (Sadilah, 2010:336-342; 2011:50-60).

Sementara itu, dalam selang pandang (WWW Jawapos.co.id-2010-06-28) dituliskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup warga Sumenep yang berdomisili di pesisir pantai tidak hanya menangkap ikan tetapi juga bertumpu pada hasil budidaya rumput laut. Hal ini seperti yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan pinggir pantai Pulau Poteran.

Dalam Topik Berita Nusantara (Berita Surabaya net, Sumenep, 30-09-2010) dikatakan bahwa usaha budidaya rumput laut di daerah yang lingkungan geografisnya cocok, dirasa cukup menjanjikan karena mampu mendatangkan keuntungan besar bila hasil yang diperoleh berkualitas. Dalam berita itu juga disampaikan mengenai masalah permodalan dan keterlibatan tenaga kerja wanita dalam budidaya rumput laut tersebut.

Di Kabupaten Sumenep (meliputi Kecamatan Giliginting, Bluto, Dongkek, Talango, Gapura, Raas, dan Sapeken), budidaya rumput laut hasilnya menjanjikan dan dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Terlihat dari tahun ke tahun hasilnya mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2003 ada 4.503 orang yang mampu memproduksi rumput laut dengan hasil 31.704, 692 ton per tahun. Ternyata peningkatan pembudidayaan rumput laut ini juga diikuti oleh daerah-daerah lain, seperti Gorontalo, NTT, Bali, dan daerah pesisir lainnya yang kondisi pantainya memenuhi persyaratan tumbuhnya gulma rumput laut. Daerah yang paling berhasil dalam pengembangan budidaya rumput laut adalah Sulawesi dan kawasan Indonesia bagian timur, seperti: Maluku dan NTT (Kompas, 2010: 22).

Modal budidaya rumput laut hanya menyediakan bibit pada awal budidaya, setelah berumur antara 40 - 45 hari rumput laut dapat dipanen dan sebagian diambil untuk bibit lagi, begitu seterusnya. Agar panen tidak serempak, maka dibuat secara berjenjang. Penjualan rumput laut sangat mudah bahkan sudah masuk ranah ekspor ke China, Jepang, Eropa, dan sejumlah negara lainnya. Hasil perolehan dari penjualan rumput laut dapat meningkatkan pendapatan keluarga (Isni, 2010:800).

Budidaya rumput laut di Pulau Poteran kini semakin semarak. Di saat-saat tertentu banyak masyarakat pantai (juga merupakan masyarakat nelayan) beramai-ramai membudidayakan rumput laut. Awalnya bibit rumput laut harus diusahakan baik secara individu maupun kelompok. Modal untuk membeli bibit ada yang menggunakan uang sendiri tetapi juga pinjaman, dan modal ini dapat diusahakan dengan mudah. Untuk tenaga kerja, ada tenaga kerja wanita dan laki-laki. Tenaga kerja wanita adalah tenaga kerja yang tugasnya diantaranya adalah mempersiapkan bibit yang mau ditanam dan mengikat bibit ke tali-tali. Sementara tenaga kerja laki-laki yang mengikat bibit ke rakit yang sudah disediakan, kemudian diangkut ke laut dengan menggunakan perahu, dan mengawasi pertumbuhan dari rumput laut tersebut. Kondisi air laut (kedalam air, kejernihan air) dan gelombang harus diperhatikan supaya rakit tidak bergeser kesana kemari.

Untuk memperoleh kerangka pikir, mengacu pada pendapatnya Rappaport (1971, dalam Ritohardoyo, 2000:7) bahwa manusia dalam beradaptasi dengan lingkungannya dituntut untuk selalu berperilaku responsif, kreatif, dan luwes untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang ada di lingkungannya. Jadi jika kondisi lingkungan berubah (laut tidak ada ikan), mereka akan berusaha mencari alternatif lain dengan melakukan berbagai strategi. Menurut Bennet (1970, dalam Ritohardoyo, 2000:8) konsep-konsep kunci adaptasi adalah perilaku adaptif, dan tindakan strategis. Sehubungan dengan itu, maka strategi adaptif adalah komponen dari kegiatan strategis dan tindakan khusus yang didasarkan pada kecakapan dan kemampuan seseorang untuk menerima informasi, menghayati dan melakukan, serta bertindak dalam lingkungannya, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara konseptual, jenis dan derajat adaptasi dipahami secara berbeda-beda oleh masyarakat (Ritohardoyo, 2000:8).

Menurut Heddy Sri Ahimsa Putra (1985 dalam Ritohardoyo, 2000:8) strategi memiliki pengertian yang sangat luas; mencakup aspek produksi, konsumsi, dan sosialisasi keluarga. Menurut Scott (1976 dalam Ritohardoyo, 2000: 9) pada umumnya strategi yang dilakukan oleh rumah tangga petani atau keluarga miskin, dapat menggunakan 3 cara, yaitu: 1. mengencangkan ikat pinggang, 2. menggunakan alternatif subsistensi, dan 3. meminta bantuan kepada sanak saudara, kawan sedesa, atau memanfaatkan hubungan. Sementara itu menurut Clark (1986 dalam Su Ritohardoyo, 2000:9) terdapat 3 bentuk strategi kelangsungan hidup, yaitu: 1. strategi berbentuk dukungan jaringan informal (yakni berupa pertukaran timbal balik atas uang, barang dan jasa, perilaku meminjam, yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup), 2. strategi berbentuk pemanfaatan anggota rumah tangga

(memungkinkan pendapatan rumah tangga bertambah), dan 3. strategi berbentuk diversifikasi sumber pendapatan untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang dihadapi rumah tangga.

Baiquni (1995:14) menyatakan bahwa pilihan strategi berbeda-beda, disebabkan karena terdapat perbedaan variasi dalam penguasaan sumberdaya yang ada. Baiquni (2007:221) juga mengatakan bahwa aset sumberdaya lahan yang relatif sempit dan kurang menguntungkan serta keterbatasan modal, orang berupaya survival dengan memaksimalkan sumberdaya yang ada di sekitarnya. Bagi masyarakat pesisir /pantai., laut merupakan aset sumberdaya alam yang bisa diberdayakan. Sementara menurut Kukuh Widodo (2009) manusia berusaha meningkatkan pendapatan (agar hidupnya tercukupi) dengan melakukan berbagai strategi yang diantaranya adalah diversifikasi pekerjaan.

Masyarakat pantai pesisir Pulau Sapeken, Sumenep, Madura; upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga, salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan usaha budidaya rumput laut. Usaha budidaya rumput laut ini telah berhasil meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat bahkan pergerakan ekonomi lokal. Adanya dukungan lahan dengan sistem *longline*, dari 25 line dengan produksi rata-rata pada puncak produksi minimal hasilnya 5 ton basah/musim panen, total produksi dengan pendapatan minimal 5 juta rupiah (harga basah /kg 1000 rupiah).(DJPB, 2011).

Dalam penelitian ini mencoba mengkaitkan antara kondisi geografis (perubahan musim, kedalaman air, kejernihan air, dan gelombang kecil) dengan program pemerintah dan aktivitas masyarakat Talango di Pulau Poteran. Logikanya: hasil tangkapan ikan berkurang pada musim tertentu, mengakibatkan penghasilan berkurang. Sementara itu, tersedia lahan (di pantai) dan kondisi geografis yang cocok untuk hidup rumput laut. Di sisi lain, pemerintah telah menjadikan Kecamatan Talango di Pulau Poteran sebagai daerah pembudidaya rumput laut. Dari sisi masyarakat yang awalnya sebagai nelayan dan bertani, mau melakukan aktivitas membudidaya rumput laut karena ternyata hasilnya dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan keluarga dan adanya kemudahan kemudahan terkait dengan modal, tenaga kerja, dan pemasaran.

Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk mendeskripsi data yang telah diperoleh baik melalui data sekunder maupun data primer yang kemudian dianalisis dalam bentuk uraian. Lokasi penelitian pantai pesisir Pulau Poteran dengan mengambil sampel pantai yang paling banyak digunakan nelayan untuk budidaya rumput laut, yaitu di pesisir timur Pulau Poteran mengambil Desa Palasa, sedang di pantai barat Pulau Poteran mengambil Desa Padike, Kecamatan Talango.

Informan yang diwawancarai adalah masyarakat yang masih aktif membudidayakan rumput laut. Informan pembudidaya rumput laut ini meliputi mereka yang membudidaya rumput laut (kaum laki-laki) dan mereka yang terlibat dalam persiapan bibit dan yang mengurus hasil panen dan penjualannya (ini dilakukan oleh kaum perempuan). Informan diambil secara acak dengan mewawancarai beberapa orang sebagai informan kunci yaitu pejabat terkait, dan pedagang rumput laut.

Data yang dikumpulkan berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara terhadap sejumlah informan yang telah ditentukan dan diambil secara acak. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari data monografi desa setempat, kecamatan setempat, dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumenep.

Data yang telah terkumpul, baik dari data sekunder maupun data primer (hasil wawancara dengan sejumlah informan), dianalisa secara deskriptif kualitatif yang disajikan dalam bentuk uraian-uraian. Agar datanya valid, digunakan metode triangulasi, yaitu

melakukan pengecekan antarsubyek (antarinforman) yang diwawancarai, dan antara obyek (dari hasil pengamatan di lapangan) dengan subyek (informan yang diwawancarai).

II. GAMBARAN MASYARAKAT PULAU POTERAN

Pulau Poteran adalah salah satu pulau yang berada dalam Daerah Kabupaten Sumenep. Secara administrasi, Pulau Poteran menjadi daerah administrasi dari Kecamatan Talango, yang merupakan satu dari 27 kecamatan yang berada di Daerah Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Pulau Poteran merupakan sebuah pulau kecil yang memiliki luas 5.026,71 hektar, berada di bagian tenggara Pulau Madura. Di wilayah Pulau Madura ini banyak pulau-pulau kecil, yang perairan pantainya ada yang dapat diberdayakan untuk membudidaya rumput laut. Pulau-pulau kecil tersebut berada dalam daerah administrasi lingkup kecamatan.

Berdasarkan data dari Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Sumenep tahun 2011, dari 27 kecamatan di Daerah Kabupaten Sumenep, di Pulau Madura, terdapat 14 kecamatan dengan potensi rumput laut seluas 243.254 ha (lihat tabel 1) yang dianggap memiliki potensi untuk pembudidayaan rumput laut. Dari 14 kecamatan yang berpotensi untuk budidaya rumput laut, Kecamatan Saronggi menjadi minapolis, sedang 13 kecamatan yang lainnya menjadi hinterland. Kecamatan Talango (salah satu hinterland) di Pulau Poteran merupakan salah satu dari 14 kecamatan yang menjadi daerah budidaya rumput laut.



Foto 1. Rumput Laut Jenis "*Eucheuma Cottonii* (Bulung).

Dari hasil wawancara dengan pejabat setempat (Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan) Sumenep merupakan daerah penghasil rumput laut terbesar. Bahkan dalam sebuah buku yang berjudul "Desa Pelopor Budidaya Rumput Laut" yang penyusunnya adalah Tim Selasar Ilmu` (2010:24) dituliskan bahwa Sumenep menjadi daerah pemasok terbesar kebutuhan ekspor rumput laut Indonesia. Dari 5 ton kebutuhan ekspor rumput laut, Sumenep mampu menyediakan 3 ton rumput laut. Adapun faktor pendukungnya adalah: (1) tempat yang cocok untuk budidaya rumput laut, dan (2) banyak masyarakat petani yang tertarik untuk

membudidaya rumput laut. Sementara itu, jenis rumput laut yang dibudidaya adalah *Eucheuma cottonii* (lihat gambar). Daerah-daerah yang cocok untuk budidaya rumput laut di wilayah Kabupaten Sumenep, dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Penyebaran, Luas Lahan dan Produksi Budidaya Rumput Laut di Sumenep, Tahun 2011.

| No. | Penyebaran di kecamatan | Luas Lahan(ha) | Produksi basah(ton) | Produktivitas |
|-------------|-------------------------|----------------|---------------------|---------------|
| 1. | Kecamatan Giligenting | 12.927 | 45.224,43 | 3,498 ton/ha |
| 2. | Kecamatan Bluto | 8.917 | 98.839,83 | 11,084 ton/ha |
| 3. | Kecamatan Saronggi | 6.728 | 112.573,52 | 16,732 ton/ha |
| 4. | Kecamatan Talango | 17.167 | 57.056,51 | 3,324 ton/ha |
| 5. | Kecamatan Masalembu | 3.409 | 12.913,15 | 3,788 ton/ha |
| 6. | Kecamatan Gapura | 3.307 | 32.848,19 | 9,933 ton/ha |
| 7. | Kecamatan Dongkek | 11.690 | 45.401,05 | 3,884 ton/ha |
| 8. | Kecamatan Ra as | 8.492 | 8.492,66 | 1,000 ton/ha |
| 9. | Kecamatan Sapeken | 137.387 | 103.204,12 | 0,751 ton/ha |
| 10. | Kecamatan Kangayan | 17.100 | 18.162,59 | 1,062 ton/ha |
| 11. | Kecamata Arjasa | 15.080 | --- | ---- |
| 12. | Kecamatan Pasongsongan | 280 | 286,96 | 1,025 ton/ha |
| 13. | Kecamatan Ambunten | 520 | 1.258,81 | 2,421 ton/ha |
| 14. | Kecamatan Batuputih | 250 | 663,54 | 2,654 ton/ha |
| J u m l a h | | 243.254 | 533.925,36 | 2,194 ton/ha |

Sumber: Dinas Perikanan dan kelautan, Tahun 2011.

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat tingkat produktivitas pada masing-masing kecamatan yang membudidaya rumput laut. Untuk Kecamatan Talango di Pulau Poteran, produktivitasnya mencapai 3,324 ton per ha. Produktivitas tertinggi terdapat di Kecamatan Saronggi dengan nilai 16,732 ton per ha. Namun kalau dilihat secara keseluruhan, rata-rata tingkat produktivitas 2,194 ton per ha.

Secara keseluruhan produksi budidaya rumput laut di Sumenep dari tahun ke tahun mengalami perkembangan, baik terkait dengan hasil produksinya, pembudidayanya (orangnya) maupun jumlah rakit/longline yang digunakan. Tercatat pada tahun 2009 hasil produksi mencapai 328.100,70 ton rumput laut basah dengan jumlah pembudidaya 6.415 orang dan jumlah rakit 52.346 unit. Pada tahun 2010 tercatat hasil produksi rumput laut = 500.775,10 ton basah dengan jumlah pembudidaya 6.591 orang dan jumlah rakit/longline= 56.226 unit. Tahun 2011 tercatat sebanyak 533.706,37 ton basah dengan jumlah pembudidaya 6.610 orang dan jumlah rakit= 56.401 unit. Khusus untuk Kecamatan Talango di Pulau Poteran pada tahun 2011 potensi lahan budidaya rumput laut seluas 17.167,0 ha, dengan produksi 53.670,98 ton, dengan nilai Rp 80.506.470.000,00. Jumlah petani rumput laut 610 orang, jumlah kelompok 24 kelompok. Sementara itu, jumlah rakit atau ancak sebanyak 7.150 unit (Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumenep, 2011).

Berdasar pada uraian di atas terlihat bahwa Sumenep memang sangat berpotensi sebagai daerah pembudidaya rumput laut karena kondisi geografisnya memenuhi syarat, disamping masyarakatnya antusias untuk membudidaya rumput laut tersebut.

Demikian pula di daerah penelitian, yang merupakan bagian dari wilayah Sumenep; terlihat hasil produksi rumput laut cukup bagus dan sudah banyak petani rumput laut yang memiliki rakit/ancak. Tentunya hal ini karena dukungan kondisi geografis yang sangat memungkinkan untuk persyaratan tumbuhan rumput laut ini. Untuk penjelasannya dapat dilihat pada uraian berikut.

A. Gambaran Pulau Poteran.

1. Lokasi

Telah disebutkan bahwa Pulau Poteran memiliki letak lokasi di sebelah tenggara Pulau Madura. Mengingat letaknya di sebuah pulau tersendiri, maka untuk menuju ke Pulau Poteran harus menggunakan jasa angkutan laut. Jumlah angkutan laut kapal penumpang hanya dua buah, sementara perahu-perahu kecil cukup banyak jumlahnya. Oleh keterbatasan kapal penumpang, kadang terjadi antrean panjang dan makan waktu berjam-jam. Bagi mereka yang tidak sabar menunggu, mereka bisa naik perahu motor.

Untuk menuju ke Pulau Poteran harus menggunakan jalan darat dari Sumenep ke Kalianget sekitar 1 jam kemudian antre naik kapal penumpang kalau lancar sekitar setengah jam, kemudian ke transportasi laut (naik kapal) yang lamanya sekitar 15 menit. Dari kapal laut menuju ke daratan Pulau Poteran menuju ke ibukota kecamatan membutuhkan waktu sekitar 30 menit.

2. Kondisi Perairan Pesisir Pantai Poteran

Pulau Poteran luasnya 5.026,71 ha dikelilingi oleh laut dengan batas wilayah: sebelah utara dibatasi oleh Pulau Madura dan Laut Jawa; sebelah timur oleh Laut Jawa; sebelah selatan dibatasi oleh Laut Jawa, dan sebelah barat oleh Selat Madura. Melihat dari batas-batasnya ini tampak jelas kalau Pulau Poteran dikelilingi oleh perairan. Kondisi perairan terbilang cocok untuk persyaratan tumbuhan rumput laut karena airnya jernih (walau kadang-kadang keruh), tidak terlalu dalam, dan gelombang dan angin tidak besar.

Kondisi perairan khususnya perairan Pantai Poteran yang digunakan untuk membudidaya rumput laut, memiliki kedalaman air tidak sama antara pantai yang berada di sebelah timur dengan pantai yang berada di sebelah barat. Kalau melihat bentuk pulau Poteran yang memanjang utara selatan, terlihat pantai yang berada di sebelah timur pulau ini lebih dangkal (hanya sekitar 2-3 meter) bila dibandingkan dengan pantai yang berada di sebelah barat (kedalamannya sekitar 5-7 meter). Kondisi perairan yang kedalamannya berbeda ini berpengaruh terhadap budidaya rumput laut.

Selain kedalaman air, gelombang air laut dan angin juga mempengaruhi budidaya rumput laut. Gelombang air laut yang relatif kecil dengan angin yang tidak kencang, sangat baik untuk kelangsungan kehidupan budidaya rumput laut. Jika gelombang besar disertai dengan angin kencang, rumput laut yang dibudidaya bisa hancur berserakan, lepas dari rakit. Untuk menghindari hal itu, maka petani rumput laut telah memiliki strategi tertentu untuk mengatasinya.

3. Keadaan Tanah dan Iklim

Tanah di daratan Pulau Poteran tergolong kurang subur. Warna tanahnya agak kuning kecoklatan, merupakan tanah lempung dan kalau terkena air hujan licin. Tidak ada tanah sawah, semua merupakan lahan kering. Lahan ini dimanfaatkan untuk pemukiman dan pertanian lahan kering. Jadi lahan untuk pemukiman dengan lahan untuk pertanian berada dalam lokasi yang sama. Maksudnya, lahan untuk aktivitas pertanian menjadi satu dengan lahan untuk tempat tinggal dan tidak ada pagar pembatas. Jadi lahan untuk tempat tinggal satu kesatuan dengan lahan untuk pertanian. Gambar berikut, kondisi lahan di daratan Pulau Poteran.

Keadaan iklim di Pulau Poteran, sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia, yaitu beriklim tropis dengan dua musim (musim penghujan dan musim kemarau). Di musim penghujan, masyarakat Poteran bisa menanam palawija di lahan kosong miliknya. Jenis

tanaman hanyalah ubi kayu, kacang tanah, jagung, lombok, dan sayuran (kacang panjang, sawi hijau). Mengingat di Poteran ini tidak ada irigasi untuk lahan pertaniannya, maka kebutuhan air hanya menggantungkan air di musim penghujan. Di musim kemarau kalau masih ada air, lahan pertaniannya bisa ditanami sayur mayur. Namun kalau tidak ada hujan, lahan menjadi kering kerontang tidak bisa ditanami apa-apa. Bahkan ada lahan bebatuan yang dibiarkan begitu saja sehingga hanya tanaman liar dan semak-semak yang tumbuh di situ. Kondisi lahan pertanian yang kurang menjanjikan ini membuat masyarakat petani harus mencari alternatif lain. Lahan pertanian tetap menjadi andalan, namun hasil yang lain seperti mencari ikan di laut juga menjadi andalan. Namun, inipun juga tidak bisa dipastikan hasilnya. Kadang kalau banyak ikan, hasilnya lumayan. Namun kalau tidak mendapat ikan (karena tidak musim ikan) maka tidak mendapatkan penghasilan. Alternatif lain adalah membudidaya rumput laut, dengan harapan dapat meningkatkan penghasilan petani sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

Terkait dengan iklim, juga berpengaruh terhadap budidaya rumput laut. Di musim kemarau, kondisi air di pantai sebelah timur Pulau Poteran surut hingga ratusan meter dari daratan. Untuk membudidaya rumput laut, petani harus menempuh jarak sekitar 200 meter dari daratan ke laut. Bahkan kalau musim kemaraunya panjang, air semakin surut sehingga budidaya rumput laut harus ke tengah lagi. Di musim penghujan, kondisi airnya mencapai tepi pantai sehingga bisa langsung digunakan untuk budidaya rumput laut. Sementara untuk pantai disebelah barat Pulau Poteran kondisinya tidak demikian. Di musim kemarau, air tidak surut dan masih dalam airnya (sekitar 5 meter). Di musim penghujan, air laut menjadi dalam sehingga kurang baik untuk budidaya rumput laut.

4. Permukiman Penduduk

Penduduk yang tinggal di Pulau Poteran tersebar di delapan desa. Batas antara desa satu dengan desa yang lain tidak tampak karena hanya dibatasi oleh jalan desa yang relatif sempit. Walau penduduknya tinggal di desa yang berbeda-beda, namun mereka saling kenal dan akrab. Untuk jalan desa yang menjadi pemisah desa satu dengan desa yang lain masih berupa jalan tanah, dengan tanaman pagar hidup di kiri kanan jalan tersebut.

Jumlah penduduk di pulau ini sekitar 41.592 jiwa, terdiri penduduk laki-laki sebanyak 18.722 jiwa, dan perempuan 22.871 jiwa, dan jumlah kepala keluarga 12.807 KK. Dari jumlah penduduk dan KK tersebut tersebar di 8 desa, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Persebaran Jumlah Penduduk dan KK di Kecamatan Talango, P. Poteran, Tahun 2011

| No. | Nama Desa | Jumlah Penduduk (jiwa) | Jumlah KK | Rata2 per KK |
|--------|---------------|------------------------|-----------|--------------|
| 1. | Desa Padike | 4.774 | 1.546 | 3 |
| 2. | Desa Cabbiya | 3.553 | 964 | 4 |
| 3. | Desa Essang | 5.053 | 1.544 | 3 |
| 4. | Desa Kombang | 4.062 | 1.104 | 4 |
| 5. | Desa Poteran | 4.951 | 1.572 | 3 |
| 6. | Desa Palasa | 4.778 | 1.519 | 3 |
| 7. | Desa Gapurana | 8.289 | 2.797 | 3 |
| 8. | Desa Talango | 6.132 | 1.761 | 3 |
| Jumlah | | 41.592 | 12.807 | 3 |

Sumber: Kecamatan Talango, Tahun 2011

Berdasarkan tabel 2 rata-rata jumlah anggota keluarga per KK 3 orang. Tampaknya KB di daerah ini dapat dikatakan berhasil. Padahal biasanya di daerah perkampungan nelayan, jumlah anggota keluarga relatif besar. Berdasarkan pengamatan di lapangan, masing-masing KK memiliki rumah sendiri-sendiri.

Rumah tempat tinggal penduduk tidak memiliki pembatas sehingga hubungan ke tetangga sangat dekat. Ciri khas pemukiman penduduk di Pulau Poteran ini adalah bahwa masing-masing rumah tempat tinggal menyatu dengan aktivitas lahan pertaniannya. Ciri yang lain, dapat dilihat adanya "para" (tempat untuk menjemur ikan dan rumput laut) dan adanya perahu yang ditambatkan ditepi pantai dekat permukiman mereka.

B. Gambaran Sekilas Masyarakat Pembudidaya Rumput Laut.

Masyarakat pembudidaya rumput laut adalah masyarakat yang memiliki pekerjaan lebih dari satu jenis. Maksudnya masyarakat budidaya rumput laut ini memiliki beberapa pekerjaan, yaitu sebagai nelayan, sebagai petani, dan budidaya rumput laut. Bahkan diantara mereka ada yang beternak, dan berdagang. Tentunya hal ini berkaitan erat dengan potensi sumberdaya yang tersedia.

Mengingat pemukiman penduduk berada dalam sebuah pulau kecil (luas 5.026,71 ha) yang dikelilingi oleh laut, maka aktivitas penduduk sebagai nelayan merupakan sumber penghasilan pokoknya. Sementara hasil pertanian lahan kering sebagai penghasilan tambahan karena hasilnya tidak menentu (kadang bisa ditanami, kadang tidak; tergantung ada tidaknya air hujan). Untuk budidaya rumput laut merupakan bagian dari kegiatan pertanian yang diharapkan hasilnya dapat menambah penghasilan keluarga.

Dari jenis pekerjaan yang penduduk lakukan menunjukkan bahwa potensi sumber daya alam (tanah/lahan, laut) menjadi ajang aktivitas penduduk. Sewaktu musim ikan tiba, penduduk beramai-ramai menangkap ikan di laut. Di Pulau Poteran ini dikenal dengan nelayan jurung (menangkap ikan teri putih/kendui, dan teri hitam/paron). Musim ikan kenduy berada pada bulan Nopember hingga April, sedang teri hitam/paron sekitar bulan Agustus hingga awal Nopember).

Sejalan dengan itu dalam waktu yang bersamaan (musim hujan), penduduk beraktivitas mengolah lahan kering untuk ditanami palawija (biasanya jagung). Jagung menjadi makanan pokok sebagian besar masyarakat di Pulau Poteran. Pengolahan lahan kering hingga panen, dikerjakan oleh kaum wanita dibantu oleh anak-anak mereka. Jadi pengolahan lahan pertanian, tanggung jawab para kaum wanita sehabis mengurus pekerjaan rumah (memasak, mencuci, bersih-bersih/menyapu).

C. Kehidupan Sosial Ekonomi, dan Budaya

Menurut informasi dari pejabat setempat, sebagian besar masyarakat di Pulau Poteran telah mengalami hidup layak/sejahtera. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kepala keluarga sebanyak 12.807 KK terdapat lebih dari separo (6.997 KK atau 54,63%) tergolong mampu (sejahtera II). Dengan kata lain, kondisi sosial ekonomi mereka tergolong baik. Sementara itu, mereka yang tergolong sejahtera I (kelas menengah) sebanyak 3.136 KK (24,49%), sedang sisanya yang sebanyak 2.674 KK (20,88%) tergolong tidak mampu (pra sejahtera).

Kondisi sosial ekonomi yang terbilang baik ini juga dapat dilihat dari kondisi rumah tempat tinggal penduduk, yang kebanyakan telah memiliki rumah permanen. Selain itu, dapat dilihat dari kepemilikan barang-barang berharga, seperti kepemilikan sepeda motor hampir dimiliki setiap rumah, bahkan ada yang lebih dari satu sepeda motor dalam satu rumah. Namun demikian, ada juga yang belum memiliki sepeda motor tetapi jumlahnya sedikit. Menurut data sekunder (Kecamatan Talango, 2011) tercatat ada 1.062 buah sepeda motor.

Penduduk yang status sosial ekonominya tinggi juga diukur dari kepemilikan kendaraan roda empat, terdapat mobil pick up sebanyak 61 buah, truk 10 buah, minibus 18 buah. Selain itu, ada pula yang memiliki caktor (becak motor) sebanyak 342 buah. Caktor ini digunakan sebagai sarana transportasi darat untuk mengantar penumpang. Jadi oleh pemiliknya, caktor dipergunakan untuk mencari tambahan penghasilan. Tindakan serupa dilakukan oleh penduduk yang memiliki perahu bermotor. Penduduk yang memiliki perahu bermotor cukup banyak yakni ada 129 buah. Perahu bermotor ini digunakan untuk mengangkut penumpang yang akan menyeberang dari Pula Poteran ke Sumenep, atau sebaliknya. Selain itu, ada juga yang memiliki dokar (ada 9 buah) yang mereka gunakan sebagai angkutan antar desa di Pulau Potern.

Selain itu semua, kehidupan sosial ekonomi dapat dilihat dari kepemilikan ternak. Mungkin karena di daerah ini banyak rerumputan sehingga minat untuk beternak (sapi, kambing) muncul. Ternak yang mereka pelihara terlihat bagus dan sehat tidak kekurangan makanan.. Biasanya ibu-ibu dan anak-anak terlibat dalam pemeliharaan ternak ini. Hasilnya juga lumayan, dapat untuk membantu mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

Kehidupan sosial budaya, dapat dilihat adanya kebersamaan, saling membantu, dan gotong royong. Kebersamaan, saling membantu, dan gotong royong tampak dalam berbagai kegiatan, seperti: pengajian, menengok orang sakit, menghadiri orang meninggal (layat), menyumbang, bahkan dalam kegiatan memanen rumput laut.



Foto 2. Kegiatan Sosial Budaya Para Ibu-Ibu di P. Poteran

Pada foto 2. tampak para ibu-ibu duduk bersama, baik dalam kegiatan ekonomi (memilih bibit rumput laut) maupun dalam kegiatan sosial. Mereka ada yang sedang asyik berbicara satu dengan yang lain sambil menunggu teman-temannya yang belum datang dan juga menunggu angkutan yang telah disewa untuk pergi kondangan. Mereka ada yang duduk di tempat pos peronda dan ada yang jongkok dan duduk dibawah. Bagi mereka tidak menjadi masalah walaupun mungkin kotor terkena tanah, dan juga tidak merasa tersinggung harus duduk di bawah. Mereka malahan asyik ngobrol hingga alat angkutnya datang menjemput mereka.

Keadaan hampir serupa dapat dilihat pada kegiatan memanen rumput laut, para ibu-ibu bahkan juga laki-laki asyik mengobrol sambil mengerjakan pekerjaannya. Mereka tanpa diminta bantuan, datang secara bersama-sama untuk membantu. Walaupun diberi semacam upah namun tidak menuntut besarnya upah. Bahkan ada yang sudah beberapa hari baru diberi upah. Bagi mereka yang penting kebersamaan, saling membantu, dan bisa ngobrol bersama. Dalam kondisi seperti ini, mereka (para ibu-ibu) merasa satu nasib sebagai isteri seorang petani dan merasa bahagia karena dapat saling berbagi pengalaman dalam hidup berumah tangga.

III. STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN MELALUI BUDIDAYA RUMPUT LAUT

Masyarakat Talango di Pulau Poteran dikenal sebagai masyarakat nelayan yang hidupnya menggantungkan diri dari hasil ikan di laut. Namun sejak krisis moneter tahun 1998, masyarakat di Pulau Poteran mulai dikenalkan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep untuk membudidaya rumput laut. Tujuan dari budidaya rumput laut ini adalah untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Kecamatan Talango yang merupakan salah satu kecamatan yang wilayahnya berada di Pulau Poteran, menjadi daerah budidaya rumput laut dari 13 kecamatan lainnya yang berada di Kabupaten Sunemep.

Bagi masyarakat Talango di Pulau Poteran, membudidaya rumput laut merupakan jenis pekerjaan baru yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Menurut Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, pantai Pulau Poteran cocok/memenuhi syarat untuk tumbuh berkembangnya rumput laut. Sehubungan dengan itu, maka Kecamatan Talango yang wilayah administrasinya di Pulau Poteran dijadikan areal pembudidayaan rumput laut.

A. Budidaya Rumput Laut

Masyarakat Talango dalam membudidaya rumput laut mengikuti petunjuk Dinas Perikanan dan Kelautan dari Kabupaten Sumenep. Dari penjelasan informan, dikatakan bahwa rumput laut hidup pada laut dangkal sekitar 2 meter, di atas substrat pasir dan terumbu karang yang telah mati. Rumput laut hidup di daerah yang kedalaman airnya masih bisa terjangkau oleh sinar matahari. Rumput laut sebagai tumbuhan di daratan, memiliki klorofil dan membutuhkan sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Rumput laut ini merupakan sumberdaya hayati yang bisa dibudidaya di wilayah pesisir dan laut, seperti di pesisir Pulau Poteran.

1. Sejarah Budidaya Rumput Laut

Berdasarkan informasi dari Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Sumenep dan keterangan dari informan, dikatakan bahwa budidaya rumput laut dimulai ketika terjadi krisis moneter, tahun 1998. Saat itu pemerintah Kabupaten Sumenep menginstruksikan kepada masyarakat pesisir untuk menanam rumput laut. Satu dari sekian kecamatan yang menjadi daerah budidaya rumput laut adalah Kecamatan Talango. Semenjak itu hingga sekarang budidaya rumput laut masih dilakukan oleh masyarakat di Pulau Poteran ini. Dalam membudidaya rumput laut adakalanya memperoleh hasil yang baik dan adakalanya hasilnya tidak baik.

Awalnya belum banyak petani yang mencoba membudidaya rumput laut ini. Namun setelah melihat hasilnya yang cukup bagus, lama kelamaan banyak petani yang tertarik bahkan sekarang hampir semua petani yang tinggal di daerah pesisir Pulau Poteran membudidaya rumput laut tersebut. Bahkan budidaya rumput laut ini dipandang sebagai suatu bentuk strategi untuk meningkatkan pendapatan petani. Berdasarkan data tahun 2011, tercatat 610 orang yang telah membudidaya rumput laut. Mengingat biaya untuk membudidaya rumput laut ini cukup besar, minimal dua juta rupiah, maka ada di antara petani rumput laut yang pembiayaannya dengan sistem utang. Maksudnya, uang untuk membeli bibit rumput laut hutang kemudian dibayar setelah panen. Masa panen hanya sekitar 40 hari, dan hutangnya mulai dikembalikan namun tidak langsung lunas.

2. Jenis Rumput Laut

Dari pengakuan informan, jenis rumput laut yang dibudidaya oleh masyarakat Talango di Pulau Poteran adalah *Eucheuma Cottoni*. Masyarakat setempat menyebut jenis rumput laut ini dengan nama “*bulung*” dan ada juga yang menyebut “*cotoni*”. Ciri - cirinya: thallus silindris,

permukaan licin, warna hijau, hijau kuning, abu-abu atau merah. Menurut Tim Selasar Ilmu (2010 : 15), thallus adalah bagian rumput laut yang menyerupai batang. Rumput laut tidak merupakan tumbuhan yang tidak jelas mana akar, batang, dan daunnya. Rumput laut merupakan tumbuhan thallus yaitu tumbuhan yang antara akar, batang, dan daunnya sama atau tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Oleh para ilmuwan, rumput laut ini disebut “alga”, yaitu jenis tumbuhan yang di perairan, baik bersel satu maupun banyak dan dapat berdiri sendiri (merupakan tumbuhan yang menghasilkan makanannya sendiri tanpa bergantung pada makluk lain).

Struktur rumput laut dibagi dua, yaitu: holdfast dan thallus. Holdfast adalah bagian dari dasar rumput laut yang berfungsi sebagai alat penempel pada substrat, sedang thallus adalah bagian rumput laut yang menyerupai batang. Adapun jenis rumput laut yang dibudidaya di Poteran adalah alga merah yang merupakan rumput laut yang bernilai ekomoni, yaitu “cotoni/bulung”. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Foto 3. *Thallus*, bagian Rumput laut yang Menyerupai Batang.

Pada foto 3, rumput lautnya tergolong alga merah, merupakan rumput laut jenis cotoni yang berwarna hijau, dan ada yang hijau kekuningan. Ada juga yang berwarna abu-abu. Pada foto 7 itu juga. terlihat seorang petani rumput laut menunjukkan alga merah ditangannya.

Rumput laut jenis cotoni termasuk alga merah (walau warnanya ada yang hijau, abu-abu) yang paling banyak ditemukan manfaatnya untuk kebutuhan hidup manusia dibandingkan dengan jenis alga yang lain. Salah satu hasil pengolahan dari alga merah ini adalah agar-agar atau “guder” (dalam bahasa lokalnya).

3. Lahan dan .Tenaga Kerja

Dilihat dari kondisi geografis, daerah pesisir Pulau Poteran memang cocok untuk membudidaya rumput laut. Lahan pesisir dengan kedalaman air minimal 2 meter cocok untuk persyaratan hidup dan berkembang biaknya rumput laut. Di Pulau Poteran, lokasi lahan budidaya rumput laut ini berada di pesisir timur dan pesisir barat dari pulau . Lahan budidaya rumput laut yang berada di sebelah timur pesisir Pulau Poteran kondisinya kurang baik bila dibandingkan dengan areal yang berada di sebelah barat pesisir Pulau Poteran. Tanahnya banyak batu, banyak lumpur, dan tumbuhan mangrow sehingga perahu pengangkut rumput laut tidak bisa ditanggalkan dekat pesisir. Berbeda dengan kondisi lahan yang berada di sebelah barat pesisir Pulau Poteran, perahu pengangkut rumput laut langsung bisa ditanggalkan ditepi pantai.

Mengingat lahan budidaya rumput laut ini berada di perairan (laut), maka tidak ada pembatas lokasi dan luas area dari masing-masing petani. Penentuan areal berdasarkan kesepakatan bersama sehingga tidak terjadi perebutan areal. Biasanya ada pembagian setiap petani diperbolehkan untuk menempatkan ancaknya dua buah. Bila sampai ada petani yang

menempatkan lebih dari kesepakatan bersama, mereka itu menggunakan milik orang lain dengan persetujuan tertentu.

Pada dasarnya, lahan yang digunakan sebagai lokasi untuk pembudidayaan rumput laut harus menggunakan berbagai pertimbangan, yaitu: a. sebaiknya lokasi mudah dijangkau, b. lokasinya harus dekat dengan sumber tenaga kerja, c. lokasi perairan harus bebas dari pencemaran limbah industri maupun limbah rumah tangga, d. lokasi budidaya harus bebas dari bahaya angin topan, e. lokasi budidaya harus banyak mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh rumput laut, f. lokasi yang dipilih harus berkondisi mudah untuk menerapkan sistem atau metode budidaya, dan g. lokasi atau area budidaya sebaiknya tidak mengalami fluktuasi salinitas yang besar (Tim Selasar Ilmu, 2010:41).

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, lahan atau lokasi untuk tempat budidaya rumput laut yang berada di sebelah timur pesisir Pulau Poteran, tempat lokasinya agak jauh dengan tenaga kerja, sering terkena angin kencang, dan sering mengalami fluktuasi salinitas. Sementara untuk lokasi di sebelah barat pesisir Pulau Poteran, lokasi mudah dijangkau, dekat dengan tenaga kerja, mudah untuk menerapkan metode budidaya, namun airnya terlau dalam jika musim hujan.

Selain itu, pencahayaan juga sangat menentukan pertumbuhan dari rumput laut ini. Menurut pengakuan informan, pencahayaan yang ada di pesisir timur Pulau Poteran berbeda dengan yang ada di pesisir barat, sehingga perolehan hasilpun berbeda. Demikian juga terkait dengan kejernihan air, di pesisir timur airnya tidak jernih (agak keruh) sedang di pesisir barat airnya jernih. Menurut ketentuan minimal 5 meter dengan jarak pandang horisontal; karena ternyata pada air yang terlalu keruh terdapat banyak partikel halus yang dapat menghambat pertumbuhan rumput laut. Air keruh dapat menghalang-halangi untuk melakukan proses fotosintesis, yang akibatnya pertumbuhan rumput laut kurang bagus.

Sementara itu, dalam ketenagakerjaan melibatkan kaum laki-laki dan kaum perempuan terutama ibu-ibu rumah tangga. Tenaga laki-laki menangani penempatan rakit di laut, dan menarik rakit ke darat, serta mengawasi pertumbuhan rumput laut di laut. Untuk kaum perempuan terutama menangani pemilihan bibit rumput laut dan mengikat bibit rumput laut tersebut kedalam tali plastik (tali rafia) yang sudah disiapkan. Selain itu, kaum perempuan/para ibu-ibu ini juga dilibatkan dalam proses pengeringan rumput laut dan penjualan rumput laut. Biasanya rumput laut yang telah diseleksi untuk bibit kemudian dijemur dan setelah kering baru dijual. Namun ada juga yang setelah dilakukan seleksi untuk bibit rumput laut, sisanya langsung dijual masih dalam keadaan rumput laut basah.

Untuk jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan budidaya rumput laut, tergantung dari jenis aktivitas yang dilakukan. Maksudnya, jika aktivitas yang dilakukan adalah pada saat memanen dan menanam bibit rumput laut, cukup 2 orang tenaga kerja laki-laki yang dibutuhkan. Namun, untuk pembibitan rumput laut dibutuhkan beberapa (4 sampai 7 orang) tenaga perempuan. Lebih-lebih kalau pembibitannya sampai 7 anak, membutuhkan banyak orang. Hal ini dilakukan mengingat untuk pembibitan rumput laut harus menggunakan rumput laut yang segar dan basah (habis ditarik dari laut) dan memilih rumput laut yang tallusnya terdiri 2 sampai 3 batang saja. Jadi para ibu-ibu yang menjadi tenaga kerja, awalnya harus menyeleksi dulu rumput laut yang akan dijadikan bibit, kemudian baru mengikatnya satu persatu pada tali rafia (dari plastik) yang telah disediakan oleh pemilik anak. Pekerjaan ini harus selesai dengan cepat dan segera di tarik, dipasang lagi di laut. Jadi pekerjaan ini tidak boleh lama-lama dan harus selesai pada hari yang sama.

Untuk melihat seberapa jauh kaum laki-laki dan kaum perempuan terlibat sebagai tenaga kerja dalam budidaya rumput laut, dapat dilihat pada foto 4 berikut ini.



Foto 4. Tenaga Kerja Budidaya Rumput Laut

4. Cara Membudidayakan Rumput Laut

Budidaya rumput laut dapat dilakukan dengan cara /sistem rakit apung dan tali.. Sistem rakit apung adalah cara membudidayakan rumput laut dengan menggunakan rakit yang terbuat dari bambu atau kayu; sedang sistem tali atau *long line* adalah metode budidaya rumput laut dengan menggunakan tali panjang yang dibentangkan.

Di Pulau Poteran budidaya rumput laut dilakukan dengan cara sistem rakit apung. Maksudnya, cara membudidayakan rumput laut menggunakan rakit yang terbuat dari bambu. Metode rakit apung ini digunakan oleh masyarakat Poteran karena sistem ini dianggap cocok untuk diterapkan di perairan pantai Poteran yang banyak bebatuan dan angin dimana pergerakan airnya didominasi oleh ombak. Rakit apung yang terbuat dari bambu ini memiliki ukuran yang berbeda-beda, tergantung dari keinginan si pembudidaya dan rumput laut dan ketersediaan material. Berikut foto kondisi rakit apung yang sedang diistirahatkan di tepi pantai dengan perahu penggereknya.



Foto 5. Rakit Apung dan Perahu Penggereknya

Foto 5 terlihat rakit apung yang diistirahatkan di tepi pantai. Rakit ini habis digunakan untuk budidaya rumput laut. Untuk sementara waktu rakit ini ditarik ke tepi pantai karena habis panen. Ukuran setiap rakit apung sangat bervariasi tergantung pada ketersediaan material dan keinginan pembudidaya rumput laut. Selain itu, ukuran rakit dapat disesuaikan dengan kondisi perairan. Namun, pada prinsipnya ukuran rakit yang dibuat tidak terlalu besar dengan alasan untuk mempermudah perawatan rumput laut yang ditanam.

Dari pengakuan informan, rakit atau "*ancak*" (istilah lokal) ukurannya berbeda-beda, ada yang ukurannya panjang = 12 meter, lebar = 12 meter; ada yang panjang 12 meter, lebar 10 meter; ada juga yang membuat ukuran panjang 10 meter dan lebar 10 meter, dan ada yang panjangnya 10 meter lebar 8 meter. Untuk kepemilikan rakit juga berbeda-beda, ada yang hanya memiliki satu rakit/*ancak*, ada yang memiliki dua *ancak*, ada yang 3 *ancak*, 4 *ancak*, 5

ancak , 6 anak, dan 7 anak. Biasanya petani budidaya rumput yang memiliki anak banyak, ukuran anaknya relatif kecil

Untuk membuat satu anak yang panjangnya 10 meter dan lebar 8 meter dibutuhkan bambu sebanyak 7 buah, dengan harga per satu buah bambu sekitar Rp 20.000,00 hingga Rp 25.000,00. Untuk anak dengan ukuran panjang 12 meter dan lebar 12 meter membutuhkan bambu sekitar 10 buah. Jenis bambu yang digunakan adalah bambu duri (bambu ori), bambu ini tahan air laut. Untuk memperoleh bambu duri harus membeli di tempat lain, yaitu dari Bintaro, Kecamatan Gapura, jurusan Kecamatan Dongkek.

Selain bambu yang digunakan sebagai rakit/anak tempat untuk membudidaya rumput laut, juga menggunakan tali plastik (tali rafia) yang digunakan untuk mengikat bibit rumput laut. Untuk anak ukuran panjang 12 meter dengan lebar 12 meter membutuhkan tali rafia (tali plastik) sekitar 6 gulung, dengan harga per satu gulung Rp 75.000,00 hingga Rp 80.000,00

Peralatan lain yang dibutuhkan untuk membudidaya rumput laut adalah jangkar, atau pemberat. Fungsi dari pemberat ini adalah supaya rakit yang telah ditebar di laut tidak terbawa air jika ada gelombang besar atau angin kencang. Jangkar ini terbuat dari bambu dengan alat pemberatnya batu seberat 10 kg yang diikatkan di bambu tersebut. Pengikatnya menggunakan tali plastik (tali rafia) sepanjang 15 meter, dan jangkar ini dibuat sendiri. Jangkar yang digunakan untuk satu anak sebanyak 2 sampai 3 buah jangkar.

Setelah anak dipersiapkan kemudian diisi dengan rumput laut yang sebelumnya sudah diikat tali temali . Rumput laut yang digunakan untuk bibit adalah rumput laut yang cabangnya 2 sampai 3, dalam kondisi basah dan segar (habis dipetik dari laut), tidak boleh layu bahkan disimpan, dan dipilih rumput laut yang tallusnya besar dengan 2 3 cabang saja. Tujuannya supaya menghasilkan rumput laut yang gemuk, sehingga tambah beratnya Sementara itu, cara pengikatan bibit rumput laut ada aturannya, yaitu jarak ikatan rumput laut satu dengan yang lain antara 8 cm sampai 10 cm. Satu anak yang ukuran kecil bisa mengikat sekitar 30 sampai 60 tali, sedang untuk anak yang besar bisa mengikat 65 sampai 150 tali. Jadi dalam satu anak ada yang memuat 60 ret, ada juga yang 100 ret, dan 150 ret, tergantung dari besar kecilnya ukuran anak tersebut. Foto berikut bibit rumput laut yang baik untuk dibudidaya.

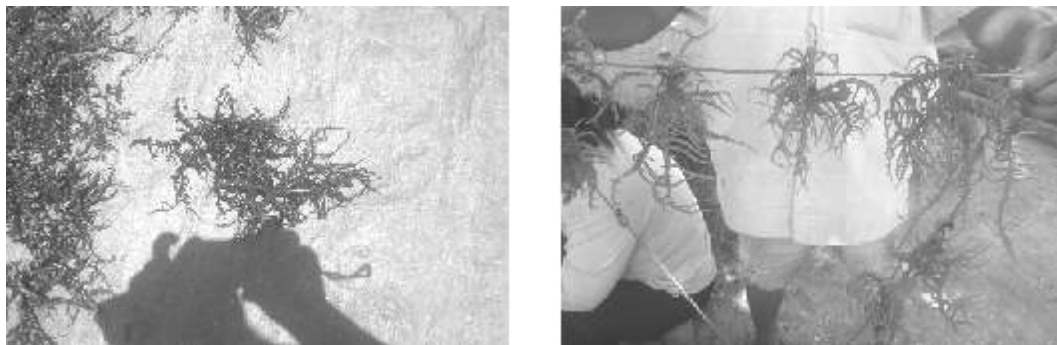


Foto 6. Bibit Rumput Laut.dan Cara Pengikatan untuk Dibudidaya

Pada foto 6. tampak jelas bibit rumput laut diikat pada sebuah tali plastik (warna biru) dengan jarak ikatan satu dengan yang lain 10 cm. Dalam satu hari setiap orang (ibu-ibu) bisa mengikat sekitar 50 ret/tali dengan banyaknya satu ikatan/ret sekitar 40 sampai 50 ikatan. Adapun ongkosnya satu ret Rp 500,00 sehingga sehari dapat memperoleh ongkos sekitar Rp 20.000,00 sampai Rp 25.000,00. Pekerjaan ini dilakukan oleh ibu- ibu sambil mengawasi anaknya yang kebetulan bermain.

Hasil ikatan bibit rumput laut dikumpulkan terlebih dahulu dan setelah dirasa cukup kemudian mulai dibawa ke tempat rakit/anak yang telah terparkir di tepi pantai.

Kondisi ini berada di perairan sebelah barat Pulau Poteran yang terbilang lautnya cukup tenang dan dalam. Sementara untuk di sebelah timur pantai Poteran kondisinya berbeda, laut dangkal dan untuk membawa rakit ke laut cukup menggunakan tenaga manusia (jalan saja).

Di pantai timur Poteran ini disamping lautnya dangkal, banyak lumpur dan tanaman mangrow sehingga untuk membudidaya rumput laut harus berjalan ketengah laut yang jaraknya cukup jauh. Mengingat kondisi perairannya kurang bagus, maka hasilnya pun juga kurang bagus.

Tumbuhan bakau yang menjorok kelaut sehingga untuk lokasi budidaya rumput laut jauh ketengah dan tidak dapat ditempuh dengan perahu karena lautnya dangkal. Bibit rumput laut yang telah diikatkan di ancak kemudian ditarik oleh empat orang menuju ke tengah perairan yang kedalamannya mencukupi untuk tumbuhnya rumput laut. Di dalam foto 16 tersebut juga tampak seorang ibu tua yang sedang membawa rumput laut.

Rumput laut yang sudah diikat dalam ancak/rakit apung kemudian ditarik ke dalam perairan yang memadai tumbuhnya rumput laut, kemudian dibiarkan tumbuh hingga umur sekitar 40 sampai 45 hari sudah bisa dipanen. Mengingat pertumbuhan rumput laut ini rentan terhadap angin kencang, gelombang, dan penyakit, maka perlu mendapat pengawasan. Menurut informan (pak Rivai) jika terjadi angin kencang, ancak bisa patah sehingga mengakibatkan rusak ikatan tali rumput laut dan dapat berserakan kemana-mana terbawa air. Demikian juga kalau terjadi gelombang besar, rumput lautnya rusak/ patah-patah dan terbawa air. Jika terkena penyakit yang namanya bulu merah semacam kutu air, itu disebabkan karena airnya kotor sehingga tidak berkembang dengan baik malah kadang lanas kemudian membusuk. Bahkan ada binatang (ikan kecil-kecil warna merah kekuningan) yang suka makan tumbuhan rumput laut ini, sehingga rumput laut ludes sebelum berkembang biak akibatnya tidak ada hasil sama sekali. Kalau kondisinya seperti ini perlu perawatan dengan cara tiap 5 hari sekali dibersihkan kotorannya dengan menggunakan sapu lidi dan dilakukan dengan cara hati-hati agar tumbuhan tersebut tidak patah.

5. Perolehan Hasil

Dalam waktu sekitar 40 hingga 45 hari rumput laut dapat dipanen. Cara memanen rumput laut: rakit/ancak ditarik ke darat dengan menggunakan 2 orang tenaga kerja laki-laki. Jika lautnya dalam (seperti yang ada di barat pantai Poteran), menariknya ancak dengan menggunakan perahu. Jadi perahu mendekati ancak, lalu 1 orang turun ke laut menarik jangkar dan mengikatkan ancak ke perahu, lalu perahu didayung ke darat. Jika air lautnya dangkal (seperti yang ada di sebelah timur pantai Poteran), cukup jalan kaki menuju ke ancak tersebut lantas ancak ditarik ke darat oleh 2 orang tenaga laki-laki. Cara menarik ancak, 1 orang pegang ancak sebelah kanan, dan 1 orang lainnya memegang ancak sebelah kiri, kemudian jalan kepinggir/pantai bersama-sama. Sesampai di darat tali rafia yang diikat di ancak itu satu persatu dilepas, dikeluarkan rumput lautnya kemudian dikumpulkan menjadi satu. Pada saat itu pula, ibu-ibu sudah siap memilih dan memilah, mana rumput laut yang untuk bibit dan mana yang untuk dijual. Penjualan ada 2 cara: 1) dijual langsung dalam keadaan basah, dan 2) dijual dalam keadaan kering.

Penjualan rumput laut sangatlah mudah, ada pedagang yang langsung membeli ditempat, dalam kondisi rumput laut yang masih basah (habis petik). Ada juga yang membeli dalam bentuk rumput laut sudah kering. Namun ada pula yang menyertorkan rumput laut tersebut (masih dalam keadaan basah, habis petik) ke juragan, mengingat modal untuk membudidaya rumput laut tersebut dipinjam dari juragan tersebut. Di Poteran, ada beberapa juragan yang melakukan cara seperti ini. Seorang informan (juragan/pedagang, juga membudidaya rumput laut) mengatakan bahwa orang-orang atau petani rumput laut yang meminjam uang untuk

membudidaya rumput laut, hasilnya harus dijual ke juragan, tidak boleh dijual ke orang lain. Tentunya dalam hal ini ada kesepakatan bersama yang telah disetujui. Untuk sistem “ijon” tidak ada karena hasil budidaya rumput laut sulit dipredeksi sehingga para pedagang atau tengkulak tidak berani mengambil risiko.

Untuk perolehana hasil, dari pengakuan informan dikatakan bahwa setiap ancak/rakit dengan ukuran panjang 10 meter dan lebar 10 meter membutuhkan bibit 2 kuintal a Rp 200.000,00 sehingga untuk keperluan bibit menghabiskan dana Rp 400.000,00. Untuk peralatan bambu untuk ancak, tali plastik rafia, dan jangkar serta upah tenaga menghabiskan sekitar Rp1.600.000,00. Jadi satu ancak menghabiskan dana sekitar dua juta rupiah.

Dari bibit dua kuintal bisa panen menjadi 6 kuintal rumput laut basah. Harga 1 kg rumput laut basah Rp1.500,00 sehingga hasil panen pertama mendapatkan uang sekitar Rp 900.000,00. Setelah panen pertama kemudian untuk bibit kedua sampai ke enam tidak membeli tetapi mengambil dari hasil panen sebelumnya. Biasanya dalam satu tahun dapat memanen hingga 5 kali. Jika rata-rata sekali panen mendapatkan uang Rp 900.000,00 maka selama 5 kali panen mendapatkan uang sekitar 4,5 juta rupiah, biaya yang dikeluarkan sekitar 2- 2,5 juta sehingga dalam satu tahun bisa mendapatkan keuntungan sekitar 2 juta rupiah.

B. Strategi Meningkatkan Hasil Budidaya Rumput Laut.

Dalam membudidaya rumput laut, para petani berusaha untuk memperoleh hasil yang baik dengan harapan nantinya memperoleh pendapatan yang banyak. Untuk itu, maka dilakukan berbagai cara untuk meningkatkan pendapatan dari budidaya rumput laut ini. Beberapa cara yang mereka lakukan adalah:

1. Memilih Bibit yang Baik

Menurut pengakuan informan, agar hasil budidaya rumput laut bagus, maka perlu dilakukan seleksi terhadap bibit rumput laut yang akan ditanam. Bibit rumput laut yang baik adalah: warna cerah dan segar, thallus besar dan cabang tidak banyak (2-3 cabang saja). Jika thallus nya kecil, pertumbuhannya lamban bahkan menjadi kerdil. Sementara itu, kalau bibitnya tidak segar; banyak yang mati setelah ditanam. Bibit yang cerah dan segar diambil sewaktu panen rumput laut, lantas dipilih bibit yang baik lantas langsung diikat pada tali dan kemudian dibawa ke perairan/ke laut pada kedalaman tertentu (sekitar 2 meter) untuk dibudidaya. Jika bibit diperoleh beberapa hari setelah memanen, sudah terlihat tidak segar dan warna sudah berubah, dan jika ditanam banyak yang mati. Sehubungan dengan itu, maka waktu memanen rumput laut selalu dilakukan pagi hari, kemudian diseleksi bibit yang baik kemudian dilakukan proses penanaman, biasanya sore hari.

Jika terjadi gagal panen, hasil jelek/kerdil, mereka pergi ke tempat lain ke Pulau Saprodi untuk membeli bibit. Pergi pagi- pagi sekali, perjalanan sekitar satu jam menggunakan perahu motor, kemudian begitu sampai di tempat pembudidayaan rumput laut langsung dilakukan penanaman. Pada dasarnya, bibit rumput laut tidak boleh layu harus segar. Selain itu, bibit yang bagus adalah thallusnya besar dan cabangnya tidak banyak. Dengan pemilihan bibit seperti ini diharapkan hasilnya akan baik.

2. Menjaga kualitas Rumput Laut

Menjaga kualitas rumput laut itu sangat penting karena ini terkait dengan tinggi rendahnya harga. Rumput laut yang kualitasnya rendah, harga jualnya juga rendah. Sebaliknya, rumput laut yang kualitasnya baik harga jualnya tinggi. Untuk menjaga kualitas rumput laut perlu pengawasan semasa pertumbuhannya. Harus sering ditengok, dan jika ada lumpur harus segera dibersihkan. Jika terkena penyakit, juga harus segera dibersihkan sehingga dengan demikian pertumbuhannya menjadi subur dan sehat.

Rumput laut yang berkualitas baik adalah rumput laut yang ukuran besar, tidak banyak kandungan garam, dan tidak cacat/lubang pada thallus (karena terkena penyakit). Rumput laut yang kandungan garamnya tinggi, mudah membusuk sehingga tidak tahan lama. Pernah terjadi, petani rumput laut menjemur rumput laut dengan tidak dicuci lebih dulu, bahkan malah dicampuri garam. Alasannya, agar berat/bobot timbangan menjadi semakin banyak. Ternyata setelah ditawarkan ke pedagang, malah ditolak tidak mau membelinya. Akibatnya, petani malah rugi dan membiarkan rumput lautnya membusuk.

Setelah ada penjelasan dari pemerintah terkait, petani mulai sadar dan berusaha untuk menjaga kualitas rumput lautnya agar memperoleh harga yang tinggi dan laku dijual. Upaya tersebut sempat tidak terwujud karena saat itu kondisi perairan di pantai timur Poteran kurang baik. Air keruh karena banyak lumpur, akibatnya sinar matahari tidak dapat menembus air dan ini sangat mempengaruhi pertumbuhan rumput laut tersebut. Kondisi seperti ini terjadi di musim kemarau panjang dimana air laut mulai surut.

Untuk mengantisipasi kondisi seperti itu, maka pada musim kemarau budidaya rumput laut dikurangi. Misal biasanya menanam 4 ancak, hanya dua ancak saja. Dengan mengurangi jumlah ancak yang ditanam kelaut, petani dapat lebih memperhatikan dan tidak capai jika harus membersihkan lumpur yang terdapat pada rumput laut tersebut. Sementara itu, di pesisir barat Poteran hasil rumput laut justru bagus di musim kemarau. Kalau musim penghujan terlalu banyak air dan gelombang besar sehingga banyak bibitnya yang rusak dan hasilnya berkurang. Untuk mengantisipasi hal itu, di musim penghujan petani di pesisir barat Poteran mengurangi jumlah ancak yang ditebar kelaut.

3. Mengatur Masa Panen

Petani rumput laut mulai sadar bahwa kalau panennya bersamaan banyak orang yang menjual sehingga harga turun. Untuk mengantisipasi hal itu, ada sebagian petani rumput laut yang mulai mengatur masa panennya. Caranya: pada saat petani beramai-ramai membudidaya rumput laut, mereka hanya menanam sedikit satu atau dua ancak saja., bahkan tidak menanam. Selang dua atau tiga minggu kemudian, mereka baru mulai tanam rumput laut, sehingga sewaktu terjadi panen raya, mereka belum panen. Sewaktu panen raya berhenti, mereka baru panen. Karena yang panen tidak banyak, maka harga rumput laut bisa tinggi.

Panen rumput laut dapat dilakukan berkali-kali, selama kurang lebih 8 bulan bahkan ada yang sepanjang tahun. Petani yang melakukan budidaya sepanjang tahun adalah para petani yang lokasi perairannya berada di pantai barat Pulau Poteran. Untuk Para petani yang berada di sebelah timur pantai Poteran tidak berani melakukan budidaya rumput laut sepanjang tahun. Petani hanya melakukan budidaya rumput laut ini di musim penghujan dan menjelang musim kemarau saja. Masalahnya, air laut turun drastis dan keruh sehingga lokasi nya sulit dijangkau, harus lama berjalan kaki dan tidak bisa ditempuh dengan perahu karena air di pantai kering dan berbatu.

4. Menunda Waktu Jual

Biasanya mereka yang melakukan strategi dengan cara menunda waktu jual dilakukan oleh para pedagang rumput laut Strategi inipun tidak boleh terlalu lama disimpan karena rumput laut ini tidak tahan berada di tempat yang lembab., Rumput laut yang waktu menjualnya ditunda biasanya dijual dalam bentuk kering. Rumput laut yang dijual dalam bentuk kering, tempat untuk menjemurnya disebut "para- para". Para - para ini terbuat dari bambu dengan ukuran yang berbeda- beda pula, ada yang ukurannya lebarnya 6 meter dan panjang 12 meter.

Petani rumput laut tidak selalu menggunakan "para- para" untuk menjemur hasil rumput



Foto 7. Para- para tempat Menjemur Rumpit Laut.

lautnya. Biasanya pedagang rumput laut yang menggunakan para- para, karena disamping menjemur hasil produksinya sendiri juga untuk menjemur rumput laut yang dibeli dari petani setempat. Sementara itu, petani rumput laut yang akan menjual produksi rumput laut dalam bentuk kering, tidak menggunakan para-para ini untuk menjemurnya tetapi dijemur di atas tanah dengan dialasi "kebang" (terbuat dari bambu), atau di atas lembaran plastik. Kebang tersebut dapat diperoleh dengan membeli, bahkan ada yang membuat sendiri, kalau plastik dapat diperoleh dengan cara membeli di toko-toko terdekat.

Setelah beberapa hari rumput laut tersebut kering kemudian disimpan dalam gudang yang ukurannya tidak begitu luas. Rumput laut yang dikeringkan ini, sebelumnya dibersihkan lebih dulu agar kotorannya (lumpur) keluar sehingga rumput laut tidak mudah busuk.



Foto 8. Penjemuran Rumput Laut di atas Plastik.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Budidaya Rumput Laut

Dari berbagai uraian terkait dengan budidaya rumput laut di atas, tampak jelas bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas budidaya tersebut. Faktor pendukung tampak pada kondisi geografis yang memungkinkan untuk dilakukan budidaya rumput laut. Kondisi lahan (kedalaman air, kejernihan air, dan pencahayaan), mutlak dibutuhkan sebagai persyaratan bertumbuhkembangnya rumput laut. Selain itu, agar rumput laut berkembang dengan baik, gelombang tidak boleh besar dan harus bebas dari angin topan. Di pesisir Pantai Pulau Poteran, kondisi geografisnya memenuhi persyaratan tumbuh kembangnya budidaya rumput laut. Dengan kata lain, dilihat dari kondisi geografisnya sangat mendukung aktivitas budidaya rumput laut tersebut.

Selain faktor geografis, modal juga menjadi faktor pendukung kegiatan ini, sebab tanpa modal kegiatan ini tidak bisa dilakukan. Hal ini terbukti adanya sistem utang kepada seseorang yang diangsur setelah panen. Bahkan ada sebagian pembudidaya rumput laut yang memperoleh modal pinjaman dari pemerintah terkait. Modal dipandang sangat penting disaat kegiatan ini akan dimulai. Maksudnya, bahwa diawal budidaya rumput laut ini dibutuhkan modal/uang untuk membeli bibit rumput laut, membeli bambu untuk membuat rakit, dan untuk membayar tenaga kerja. Setelah panen pertama, hanya dibutuhkan uang membayar tenaga kerja saja, dan itupun dapat diambil dari hasil penjualan rumput laut.

Faktor pendukung lainnya adalah ketersediaan tenaga kerja. Terlihat banyak melibatkan tenaga kerja perempuan dalam kegiatan budidaya rumput laut ini. Sementara untuk tenaga kerja laki-laki dilibatkan dalam penempatan rakit ke laut dengan menggeret pakai perahu

disaat mulai tanam dan panen, serta mengawasi dan merawat pertumbuhan rumput laut. Untuk pembibitan dan pemasaran, banyak ditangani oleh tenaga kerja perempuan.

Faktor pendukung lain yang dirasa sangat penting adalah terkait dengan pemasaran. Menurut pengakuan beberapa informan, pemasaran rumput laut sangat mudah dan cepat mendapatkan uang. Dalam tempo waktu sekitar 40 hari, rumput laut sudah bisa panen dan langsung dijual. Saat panen, banyak pedagang yang datang membelinya. Disamping itu, harga rumput laut stabil tidak naik turun seperti harga ikan, sehingga bisa diprediksi besarnya uang hasil penjualan.

Sementara itu, ada beberapa faktor yang bisa menghambat aktivitas budidaya rumput laut ini. Dari pengakuan informan, ada beberapa faktor penghambat yaitu: masalah bibit, penyakit, gangguan binatang, dan gangguan alam. Diantara faktor-faktor penghambat tersebut, yang sering terjadi disebabkan karena penyakit yang mengakibatkan tumbuhan rumput laut mati.

Biasanya jika terjadi hujan deras, angin kencang yang mengakibatkan air laut menjadi keruh. Disaat itu rumput laut yang ditebaran dilaut terkena kotoran yang mengandung bakteri. Akibatnya, dalam sekejap rumput laut menjadi layu bahkan lanas lalu mati. Oleh karenanya jika kondisinya seperti itu, harus segera dibersihkan supaya debu-debu yang menempel pada bibit rumput laut tersebut hilang dan tidak mengganggu perkembangbiakan rumput laut tersebut.

Selain gangguan penyakit, juga ada gangguan binatang laut. Menurut informan jika ada sekelompok ikan kecil-kecil warna merah kekuningan datang ke area budidaya rumput laut, tanaman itu langsung habis seketika dengan waktu yang sangat singkat. Pernah suatu ketika pagi-pagi waktu menengok rumput laut, tumbuhan tersebut sudah tidak ada tinggal tali-talnya dan rakitnya. Semua rumput laut habis dimakan ikan-ikan tersebut. Dalam kondisi seperti ini terpaksa petani rumput laut harus segera meminggirkan ancak/rakitnya ketepi pantai untuk diisi bibit rumput laut yang baru.

Faktor penghambat lain yang kadang terjadi adalah terkait dengan bibit rumput laut. Kadang-kadang untuk memperoleh bibit ini sulit dan harus mencari tempat lain yang jaraknya cukup jauh karena lintas pulau. Kondisi seperti ini terjadi pada saat di Poteran tidak ada bibit rumput laut lagi karena kegiatan ini istirahat beberapa bulan. Kondisi alam yang tidak memenuhi syarat untuk pertumbuhan rumput laut menjadikan kegiatan budidaya rumput laut berhenti untuk sementara waktu. Setelah akan mulai membudidaya lagi terjadilah kesulitan untuk mencari bibit

Dari uraian terkait dengan faktor pendukung dan penghambat bertumbuhkembangnya rumput laut, ini semua sangat berpengaruh terhadap perolehan hasil. Kadang hasil dari budidaya rumput laut besar, kadang berkurang. Namun kalau digeneralisasi secara keseluruhan, hasil dari budidaya rumput laut dianggap lumayan.

D. Kontribusi terhadap Pendapatan Keluarga

Dengan adanya budidaya rumput laut, pendapatan keluarga menjadi bertambah. Awalnya pendapatan dari laut hanya diperoleh dari hasil tangkapan ikan, kemudian menjadi bertambah setelah membudidaya rumput laut. Pada umumnya, petani yang membudidaya rumput laut adalah para nelayan. Mereka sudah sangat paham mengenai kondisi perairan di laut karena hampir setiap hari bergulat dengan laut. Oleh sebab itu, budidaya rumput laut yang mereka lakukan kebanyakan berhasil. Maksudnya, hasil budidaya rumput laut bisa mendapatkan keuntungan, walau kadang banyak kadang sedikit.

Pendapatan bersih dari penghasilan budidaya rumput laut sekitar 2 juta rupiah per ancak pertahun dengan 4-5 kali panen. Jika rata-rata per informan membudidaya rumput laut

sebanyak 2-3 anak, berarti mendapatkan tambahan penghasilan sekitar 4 juta sampai 6 juta rupiah. Bagi masyarakat nelayan, tambahan penghasilan dari rumput laut memberikan kontribusi cukup baik dalam pendapatan keluarga.

Sementara itu, dari hasil penangkapan ikan tidak dapat dipastikan, kadang dapat banyak kadang tidak mendapatkan apa-apa. Di waktu musim ikan khususnya ikan teri putih/ikan nasi/ikan kendui; nelayan merasa gembira karena mendapatkan hasil yang lumayan. Ini terjadi sekitar bulan November hingga bulan April, dalam setiap tahunnya. Pada bulan-bulan ini nelayan sibuk mencari ikan kelaut karena saat itu baru musim ikan teri. Nelayan antusias mencari ikan teri ini karena di samping mudah didapat, harganya pun relatif tinggi (per kg teri kering mencapai 30 ribu rupiah). Pada bulan-bulan yang lain, hasil tangkapan ikan tidak pasti kadang dapat ikan kadang tidak.

Mengingat hasil kenelayanan tidak pasti, mereka juga bertani dan berternak. Kedua kegiatan ini banyak melibatkan kaum wanita, terutama ibu-ibu rumah tangga. Dari hasil bertani juga tidak dapat dipastikan karena sangat bergantung pada musim. Jika musim penghujan, para ibu-ibu disibukkan untuk mengolah lahan pertanian, sementara suaminya pergi melaut atau mengurus rumput laut. Hasil pertanian paling tidak dalam satu tahun bisa memanen satu kali panen jagung, hasilnya lumayan bisa untuk mencukupi kebutuhan makan sehari-hari. Oleh masyarakat Poteran, jagung menjadi makan pokok pengganti nasi.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, para petani melakukan berbagai cara yaitu: mencari ikan di laut, bertani, beternak, dan membudidayakan rumput laut. Dari hasil budidaya rumput laut bisa menambah penghasilan mereka. Sumber penghasilan yang awalnya hanya bersumber pada hasil tangkapan ikan, hasil pertanian dan hasil ternak; kini bertambah dari hasil budidaya rumput laut. Tentunya secara riil besaran dari masing-masing sumber penghasilan tidak bisa dihitung secara konkrit. Namun bisa dirasakan oleh mereka, bahwa dengan semakin banyak sumber penghasilan, tingkat hidup mereka semakin baik. Satu hal yang perlu dicungki jempol, yaitu masyarakat (baik laki-laki maupun perempuan) di Kecamatan Talango (P. Poteran) sangat giat bekerja, tidak pemalas. Sifat senang bekerja keras tampaknya yang membuat tingkat hidup sebagian besar masyarakat Poteran berada pada tingkat hidup sejahtera.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pulau Poteran adalah sebuah pulau kecil, merupakan wilayah Kecamatan Talango yang sejak puluhan tahun lalu (tepatnya setelah krisis moneter tahun 1998) menjadi salah satu daerah budidaya rumput laut. Penerapan kebijakan dari Kabupaten Sumenep menjadikan Pulau Poteran sebagai daerah budidaya rumput laut. Kondisi geografis pesisir Pulau Poteran cocok untuk budidaya rumput laut.

Mengingat misi dan visinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani, maka jenis rumput laut yang dibudidayakan adalah yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Untuk itu, maka jenis rumput laut "*Eucheuma Cottonii*" atau oleh masyarakat setempat disebut "*cotoni* atau *bulung*", adalah jenis rumput laut yang mereka budidayakan. Rumput laut ini memiliki nilai ekonomi tinggi karena memiliki banyak manfaat (untuk membuat makanan agar-agar/doger (bahasa lokal), makanan bayi, minuman, saus, permen, untuk obat kanker, gondok, asma, demam, cacingan dll).

Masyarakat Poteran yang dikenal sebagai masyarakat nelayan jurung (nelayan tangkap ikan teri dengan alat jaring yang bernama "jurung") awalnya tidak tertarik membudidayakan

rumput laut ini. Namun setelah melihat hasil budidaya rumput laut yang terbilang baik, maka mulai banyak yang tertarik dan ikut membudidayakan rumput laut tersebut. Hingga kini tercatat 610 KK pembudidaya rumput laut, dengan potensi lahan 17.167,0 ha, dan kepemilikan rakit sebanyak 7.150 unit. Perkiraan produksi mencapai 1.361,85 ton rumput laut basah per tahun, dengan nilai Rp 13.688.450,00.

Budidaya rumput laut di Pulau Poteran dilakukan dengan sistem ancak, dapat memanen 4 sampai 5 kali dalam setahun dan melibatkan tenaga kerja laki-laki maupun perempuan dengan kesepakatan tugas masing-masing. Kegiatan pembudidayaan rumput laut hanya dilakukan pada kondisi geografis yang memungkinkan dan saat penghasilan penangkapan ikan berkurang bahkan sulit mendapatkan ikan di laut. .

Dengan adanya budidaya rumput laut ini, petani merasa hidupnya lebih baik/lebih sejahtera. Penghasilan mereka tidak hanya tergantung dari hasil pertanian, hasil menangkap ikan dan dari hasil beternak, namun tambah satu lagi dari hasil membudidayakan rumput laut. Mereka merasa beruntung karena dapat melakukan berbagai aktivitas yang hasilnya dapat untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Tentunya semua ini tidak lepas dari potensi daya dukung lingkungan (perairan yang cocok untuk budidaya rumput laut) dan minat dari masyarakat sendiri yang suka bekerja keras. Mereka baik laki-laki maupun perempuan mau bekerja keras untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya. Bagi masyarakat Poteran, bekerja merupakan bagian dari kehidupan mereka yang harus dijalani. Dengan bekerja keras, hidupnya akan lebih baik. Adanya prinsip hidup yang demikian itu, budidaya rumput laut di Poteran termasuk berhasil.

B.Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti, yaitu:

1. Masyarakat masih perlu bantuan modal untuk pengembangan budidaya rumput laut.
2. Keterlibatan kaum wanita didalam aktivitas budidaya rumput laut dirasa sangat baik dan perlu dikembangkan.
3. Perlu adanya sosialisasi tentang manfaat rumput laut, agar masyarakat juga mau memanfaatkan rumput laut sebagai bagian dari makanan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., 2009. *Optimalisasi Budidaya Rumput Laut (Studi Kasus di Kabupaten Sumenep)*. Sumenep : Dinas Kelautan dan Perikanan.
- Baiquni, 1995. *Memahami Keragaman Paradigma Pengelolaan Lingkungan*. Yogyakarta : Fakultas Geografi UGM.
- , 2007. *Strategi Penghidupan di Masa Krisis*. Yogyakarta : Penerbit Ide As Media.
- Bintarto, R., 1983. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Berita Surabaya net, Sumenep. Rumput Laut Talango, 30-09-2010
- DJPB, 2011. *Pendampingan dan Pembinaan Dalam Budidaya Rumput Laut di P. Poteran*. Sumenep : Dinas Kelautan dan Perikanan.
- Dinas Kelautan dan Perikanan, 2011. *Produksi Budidaya Rumput Laut Sumenep*. Sumenep: Dinas Kelautan dan Perikanan.
- Kecamatan Talango, 2011. *Monografi Kecamatan Talango*. Sumenep.
- Isni, H., 2010. *Pemanfaatan Rumput Laut pada Masyarakat Pesisir atau Masyarakat Pantai*. Yogyakarta : Jantra Vol.V No.9, Juni 2010.
- Kompas, 2010. *Indonesia Timur Potensial Kembangkan Industri Hilir*. Jakarta: 6 April 2010.

- Tim Selasar Ilmu, 2010. *Desa Pelopor Budidaya Rumput Laut*. Bandung : PT Sarana Ilmu Pustaka.
- Sadilah, E., 2008. *Strategi Adaptasi Masyarakat Desa Klaces, Kampunglaut Cilacap, Jawa Tengah*. Yogyakarta : BPSNT, Patrawidya Vol.9 No.2 Juni 2008.
- , 2010. *Strategi Peningkatan Pendapatan Petani di Desa Tejosari, Ngablak, Magelang, Jawa Tengah*. Yogyakarta : BPSNT, Patrawidya Vol.11 No.2 Juni 2010.
- , 2011. *Strategi Peningkatan Hasil Penangkapan Ikan pada Masyarakat Nelayan di Pulau Poteran, Madura*. Yogyakarta : Hasil Penelitian BPSNT tahun 2011.
- Ritohardoyo, S., 2000. *Strategi Peningkatan Pendapatan penduduk Perdesaan Sekitar Hutan di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta : Fakultas Geografi UGM.
- Rizald, dkk., 2008. *Pengantar Ilmu Kelautan*. Jakarta : Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia.
- Widodo, K., 2004. *Strategi Adaptasi Masyarakat Nelayan Terhadap Perubahan Lingkungan*. Bandung : FISIPOL, Universitas Pedjajaran.
- [http://www.Jawapos.co.id/Selayang Pandang Budidaya Rumput Laut di Kecamatan Talango](http://www.Jawapos.co.id/Selayang%20Pandang%20Budidaya%20Rumput%20Laut%20di%20Kecamatan%20Talango), 28 Juni 2010.

DAFTAR INFORMAN

| No. Nama | Umur (tahun) | Pendidikan | Pekerjaan | Alamat |
|-----------------------------|--------------|------------|--|---|
| 1. Bp. Sunaryanto | 36 | S2 | Camat Talango | Desa Talango, Kec. Talango, Poteran. |
| 2. Bp. Agus Hendrowiyono | 35 | S1 | Seksi Bina Usaha Perikanan dan Budidaya | Jl. Flamboyan No 1, Pakumba, Kec. Pragan, Sumenep |
| 3. Bp. Ibrahim | 45 | SD Tamat | Petani, nelayan, ternak, dan budidaya rumput laut | Desa Talango Mlati, Kec. Talango, Poteran. |
| 4. Bp. Sunaryo | 50 | SDTT | Petani, nelayan, ternak, dan budidaya rumput laut. | Desa Talango, Kec. Talango, Poteran. |
| 5. Bp. Rivai | 45 | SDT | Petani, nelayan, dan pembudidaya rumput laut | Desa Padike, Kec. Talango, Poteran |
| 6. Bp. Ali | 40 | SDT | Petani, nelayan, dan budidaya rumput laut | Desa Padike, Kec. Talango, Poteran. |
| 7. Bp. Adun | 41 | SDTT | Petani, nelayan, dan budidaya rumput laut | Desa Padike, Kec. Talango, Poteran. |
| 8. Bp. Suhrai | 45 | SDT | Petani, nelayan, dan budidaya rumput laut | Desa Padike, Kec. Talango, Poteran. |
| 9. Bp. Imam | 46 | PGA | Nelayan, guru mengaji, dan budidaya rumput laut | Desa Palasa, Kec. Talango, Poteran. |
| 10. Bp. Jumakir | 75 | SDTT | Petani, nelayan, budidaya rumput laut. | Desa Palasa, Kec. Talango, Poteran. |
| 11. Bp. Safei | 47 | SDT | Petani, nelayan, pedagang, dan pembudidaya rumput laut | Desa Palasa, Kec. Talango, Poteran. |
| 12. Bp. Bambang Eko Iswanto | 29 | SLTA | Kepala Desa Palasa | Desa Palasa, Kec. Talango, Poteran |
| 13. Bp. H. Mardjuki | 53 | SDT | Kepala Desa Padike | Desa Padike, Kec. Talango, Poteran. |
| 14. Bp. Muhamat Ridwan | 42 | SDT | Petani, nelayan, budidaya rumput laut | Desa Padike, Kec. Talango, Poteran. |
| 15. Ibu Riskiati | 50 | SDT | Ibu Rumah Tangga, membantu bertani, dan budidaya rumput laut | Desa Palasa, Kec. Talango, Poteran. |
| 16. Bp. Sinot | 45 | SDT | Petani, nelayan, pengepul, peternak, dan budidaya rumput laut. | |

USAHA GULA KELAPA: PERTUKARAN DALAM PRODUKSI DAN DISTRIBUSI

Sumintarsih

Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta
Jalan Brigjen Katamso 139 Yogyakarta
e-mail:mientarsihsetyadharma@rocketmail.com

Abstrak

Usaha gula kelapa Kecamatan Cilongok merupakan unit usaha ekonomi rumah tangga. Dalam kegiatannya nira menjadi faktor produksi yang sangat penting, di samping penderes dan pengindiel. Dalam distribusi, pengepul sebagai pelaku ekonomi yang mewarnai kehidupan usaha gula kelapa. Penelitian ini ingin melihat gambaran jalinan relasi dan pertukaran produksi dan distribusi yang terbangun antara penderes pengepul dalam usaha gula kelapa. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dan perspektif pertukaran (*social exchange*). Pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi, dan kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jalinan kerjasama dalam usaha kelapa ada pembagian tugas secara tegas, bahwa suami sebagai penderes dan istri sebagai pengindiel. Jalinan pertukaran adalah kerjasama yang tidak memperhitungkan untung rugi. Jalinan pertukaran antara penderes dengan pengepul sangat tampak terjadinya eksploitasi. Pemberian pinjaman dan perhatian lainnya yang bersifat sosial kemasyarakatan menjadi pengikat antara pengepul dengan penderes. Strategi ini memperkuat posisi pengepul dalam masyarakat di lingkungannya. Pinjaman sebagai pengikat dari pengepul dimaknai oleh penderes sebagai pertolongan. Inilah kemungkinan yang menjadikan mata-rantai "hubungan kerja" penderes dan pengepul sulit diputus.

Kata kunci: pertukaran, penderes, pengepul, produksi, distribusi

PALM SUGAR BUSINESS: IN EXCHANGE OF PRODUCTION AND DISTRIBUTION

Abstract

Palm Sugar Business in Cilongok Districts is a form of household economy business unit. In its activities, sap becomes a very valuable production factor; besides penderes and pengindiel. In Distribution, collectors act as an economic actor who coloring the life of palm sugar business. The research wants to see the description of relation's connection and the exchange of distribution and production which build between penderes-pengepul (collectors) in palm sugar business. The research is using qualitative and exchange perspective (social exchange) methods. Data collecting was done by conducting depth interview, observation, and library studies. The result of the research shows that there are a strict rules for dividing job field in cooperation system of palm sugar business, the husband will act as penderes and wife as pengindiel. Exchange connection is a form of cooperation which not considering the benefit and the loss. The exchange connections between penderes and collectors (pengepul) was susceptible of exploitation. Giving loan and other kinds of attention which have social value are what binds the collectors and penderes. This strategy strengthen the collectors position in their society. Loan from the collectors as binder was defined as help by penderes. This possibility is what makes the chain of job relation between penderes and collectors are hard to be break.

Keywords: exchange, penderes, pengepul (collectors), production, distribution

I. PENDAHULUAN

Usaha skala kecil di Indonesia merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi. Sektor ini di samping memiliki potensi tinggi dalam menyerap tenaga kerja, juga merupakan sektor handal yang tahan terhadap terjadinya goncangan krisis ekonomi. Di Indonesia sektor usaha skala kecil ini jumlahnya lebih dari 90 persen dan banyak tersebar di perdesaan. Data statistik 2000 - 2003 (BPS - *Statistical Year Book of Indonesia*), juga menunjukkan bahwa kelompok industri mikro dan kecil sangat mendominasi struktur industri di Indonesia, bahkan sekitar 91,2% merupakan kelompok industri rumah tangga (*household*) (Marijan 2005: 217-

218, Tambunan 2001). Namun, meskipun industri rumah tangga jumlahnya mendominasi, tetapi hanya memberikan nilai tambah sebesar 6 persen. Ini menunjukkan bahwa ada ketimpangan besar antara industri skala rumah tangga dengan industri skala besar (Supriyati dan Erma 2006: 95).

Peranan industri kecil dalam perluasan kesempatan kerja, maupun pemenuhan kebutuhan ekonomi, sudah banyak dibuktikan, khususnya pemberdayaan ekonomi lokal di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten. Beberapa studi menyatakan bahwa sektor industri kecil telah membantu kelangsungan hidup petani dan bahkan merupakan alat untuk mempertahankan hidup yang penting (Raharjo 1984). Termasuk di sini agroindustri, yang pada umumnya berbasis pada sumberdaya alam yang dimiliki, yang dimanfaatkan dengan teknologi sederhana. Industri kecil yang berkembang di perdesaan ini pada umumnya bersifat tradisional baik dilihat dari teknologinya, manajemen, permodalan maupun pemasarannya. Kondisi ini pada satu sisi memberi peluang besar untuk menampung tenaga kerja perdesaan yang sebagian besar memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dalam industri kecil.

Satu diantara usaha mikro dan kecil agroindustri perdesaan yang berkembang yaitu industri gula kelapa. Seperti diketahui Indonesia memiliki banyak wilayah yang dikenal melimpah dengan pohon kelapanya. Hasil kelapa Indonesia merupakan hasil pertanian yang menduduki tempat kedua setelah padi. Indonesia dengan luas areal pohon kelapa 3,7 juta hektar dikenal sebagai produsen kelapa terbesar kedua setelah Philipina (Yuharningsih dan Stiana, 1997., *Coconut Statistical Yearbook*, 2002),¹ dan lebih dari 98% - nya diusahakan oleh perkebunan rakyat, yang berada di Pulau Sumatra, Jawa, Sulawesi, Bali, NTB, dan NTT, Maluku, Papua, dan Kalimantan (Widayanti, R., A. 2011: 1).

Gula kelapa atau gula jawa berfungsi sebagai pemanis masakan, pemanis minuman, bahan pembuat kecap, dan lain sebagainya. Pasokan terbesar adalah ke perusahaan-perusahaan kecap seperti Bango, Indofood, ABC, dan perusahaan-perusahaan kecap kecil lainnya. Gula jawa yang berkualitas diekspor ke Amerika, Jepang, Korea, Belanda. Produk gula kelapa ini diproduksi oleh perajin gula kelapa yang juga sebagai penderes.

Penderes, hampir bisa dijumpai di daerah-daerah yang terdapat sentra kerajinan gula kelapa, dan biasanya berada di lingkungan yang areal lahannya banyak tanaman pohon kelapanya. Pada umumnya penderes adalah juga perajin gula kelapa. Beberapa daerah yang memiliki sentra-sentra industri kerajinan gula kelapa di antaranya Jawa, Bali, Lampung. Daerah-daerah yang mayoritas wilayahnya merupakan basis industri gula jawa, menyatakan bahwa industri kerajinan tersebut telah memberi kontribusi cukup penting dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan telah ikut menggerakkan dinamika perekonomian perdesaan. Bahkan beberapa daerah menyatakan bahwa industri gula kelapa merupakan satu dari sektor unggulan kabupaten (Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Kebumen, Kulon Progo).

Sentra produksi gula kelapa yang cukup besar di Jawa Tengah adalah Banyumas. Berdasarkan data dari Asosiasi Pengusaha dan Petani Gula Kelapa Indonesia (Appeguki), di Banyumas terdapat 32.570 orang yang bekerja sebagai penderesnira kelapa. Mereka ini tersebar di 22 kecamatan dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas. Mereka juga tertampung dalam 217 kelompok tani, dan sebanyak 90.241 warga menggantungkan hidupnya dari usaha mengolah nira. Kabupaten Banyumas memiliki areal kebun kelapa deres 4.677 hektar dan memproduksi sekitar 44.000 ton gula kelapa dari 34.317 unit pengolahan (<http://suaramerdeka.com>, 27 Juni 2008).

¹ Sekitar tahun 1969 Indonesia menjadi anggota dalam sebuah organisasi internasional komoditas kelapa yaitu *Asian and Pacific Coconut Community (APCC)*, dan sejak 1970 sekretariat APCC berkedudukan di Jakarta

Usaha ini termasuk usaha ekonomi yang melibatkan tenaga kerja di lingkungannya, atau disebut 'usaha mikro' yang menurut data BPS ada sekitar 39 juta usaha, dan sebagian besar berada di perdesaan Jawa dan Bali (Firdaus, M dan Ratih D 2004). Namun demikian, usaha gula kelapa yang termasuk dalam usaha kecil-mikro ini, dari sejak dulu sampai sekarang petani/perajinnya dilaporkan hidupnya berada dalam kelompok miskin² (lihat Supomo 2007, Kuswerdiningsih 2005; Prasodjo 2001; Rufaidah, E. 2005; Hermawati dan Pariyo 2000; Widayanti, R., A. 2011; Widyaningrum, N., dkk 2003).

Di manapun petani/perajin gula kelapa berada dikuasai oleh para pengepul. Relasi sosial-ekonomi yang terjalin antara perajin gula dengan pengepul disebutkan sebagai bentuk eksploitasi, atau penuh dengan perilaku mafia (Widyaningrum, dkk. 2003: XIV). Termasuk di sini para perajin gula kelapa yang berada di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Penghasilan mereka tidak cukup untuk hidup. Sebagian besar petani gula Jawa dililit hutang yang tidak berkesudahan. Tetapi mereka tetap bertahan dari waktu ke waktu.

Dalam hubungan kerja tersebut terjalin suatu bentuk hubungan social antara pengepul dan pengusaha kelapa/penderes yang dibangun secara terus-menerus yang dilatarbelakangi oleh kepentingan masing-masing. Hubungan tersebut terjalin karena saling membutuhkan, sehingga ada semacam ketergantungan satu sama lain. Penelitian ini ingin melihat (1) Bagaimana bentuk hubungan kerja di antara pelaku yang terlibat dalam usaha gula kelapa (produksi dan distribusi) (2) Apa yang mengikat hubungan kerjasama sehingga distribusi dan produksi itu tetap berlangsung, (3) Siasat apa saja yang dilakukan oleh para pelaku dalam produksi dan distribusi untuk kelancaran hubungan kerja tersebut.

Peran industri kecil dan kerajinan rumah tangga dalam perekonomian Indonesia telah menjadi satu dari alasan utama pemerintah untuk melakukan upaya-upaya pengembangan industri kecil dan rumah tangga. Kehidupan perajin gula kelapa dalam bergelut untuk bertahan hidup, telah menarik perhatian banyak pihak. Terbukti berbagai penelitian tentang industri kecil banyak yang menyoroti usaha kerajinan gula kelapa. Penelitian tentang perajin gula kelapa sudah tak terhitung jumlahnya, dengan kajian dari berbagai sudut pandang. Bentuk kajian tersebut di antaranya adalah bahwa perajin gula kelapa hidupnya sangat tergantung pada hasil menderes nira kelapa. Penghasilan yang diperoleh pada umumnya hanya cukup untuk kebutuhan hari itu saja atau bersifat subsisten. Hidup mereka terbelit hutang yang tidak berkesudahan dengan pengepul, yang membuat pemasaran gula kelapa sangat bergantung kepada pengepul, sehingga hidupnya dalam kondisi miskin (lihat Prasodjo 2001; Widyaningrum, dkk., 2011; Supomo 2007; Rufaidah, 2005; Mulyoutami dan Retno 2003).

Hasil penelitian lainnya ada yang menemukan sebaliknya. Penelitian yang dilakukan pada industri gula Jawa di Kabupaten Wonogiri menemukan bahwa usaha gula kelapa memberikan keuntungan kepada perajinnya (lihat Praditya 2010, digilib.uns.ac.id, diakses 4 Mei 2011). Hal yang hampir sama juga dirasakan perajin gula di Kabupaten Ciamis, tetapi lewat hubungan kemitraan dengan PT. Samudra Jaya. Walaupun, sebenarnya dalam relasi hubungan tersebut cenderung terjadi eksploitasi yang dilakukan oleh Koordinator, yang dibentuk oleh PT yang merupakan tangan kanan PT, untuk bertindak sebagai pengepul gula kelapa dari perajin (Widayanti 2011).

Penelitian yang berupa kasus dilakukan terhadap beberapa usaha kerajinan, yaitu mebel Jepara, kerajinan rotan Cirebon, industri genting di Klaten, dan industri gula kelapa di Banyumas. Penelitian yang dilakukan oleh AKATIGA ini, mengkaji relasi-relasi yang bersifat

² Kemiskinan itu antara lain ditunjukkan sedikitnya 300 ijazah siswa mulai tahun 1980-an belum diambil oleh pemiliknya karena tidak bisa membayar biaya administrasi sekolah. Ijazah tersebut akan didistribusikan melalui sistem lelang (<http://www.suamerdeka.com>, 12 Februari 2011).

eksploitatif yang terjadi pada ke empat industri kecil tersebut. Hasil penelitian di antaranya menemukan bahwa pola eksploitatif pada perajin gula jawa yang dilakukan oleh para pedagang pengepul adalah dengan penciptaan ketergantungan melalui relasi-relasi yang bersifat sosial yang dibalut dengan motif-motif ekonomi dari kedua sisi pelaku. Di samping itu terjadi penciptaan struktur pasar yang bersifat *monopolistis* (penjual tunggal) atau *monopsanistis* (pembeli tunggal), sehingga terjadi penekanan penentuan harga secara sepihak (Widyaningrum, N., dkk. 2011). Pola relasi yang eksploitasi juga ditemukan dalam kajian Widyaningrum (2003) terhadap usaha kerajinan mebel kayu jati Jepara dan rotan Cirebon. Kedua usaha mebel tersebut berkembang lewat pola pemasaran dengan hubungan subkontrak. Disebutkan bahwa di kedua usaha mebel tersebut tidak merasakan adanya manfaat sepenuhnya dari hubungan subkontrak. Para perajin ini merasa tidak tergantung dalam pemasaran dengan eksportir tertentu. Hal sebaliknya telah ditemukan oleh Sumintarsih (2003) dari hasil penelitiannya pada usaha kerajinan agel di Kulon Progo dengan perspektif pertukaran dalam hubungan subkontrak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa eksistensi kerajinan agel sangat ditentukan oleh hubungan sosial yang dibangun juragan dengan perajin buruh, perajin mandiri, dan eksportir. Juga ditegaskan bahwa pemasaran kerajinan agel sangat tergantung pada hubungan subkontrak.

Dalam aktivitas usaha gula kelapa terjalin hubungan kerjasama antara perajin gula kelapa (penderes) dengan pengepul gula kelapa. Dalam hubungan kerjasama ini masing-masing pihak mempunyai kepentingan tertentu. Menurut Ahimsa-Putra (1994, dalam Sumintarsih 2003: 153-154) kerjasama tersebut sebenarnya tidak muncul begitu saja, tetapi dasar-dasar sosial sudah ada jauh sebelum aktivitas bersama itu sendiri terwujud. Dasar-dasar sosial tersebut adalah pertukaran (*exchange*), baik pertukaran barang, tenaga, maupun jasa.

Penelitian perajin gula kelapa di Banyumas ini menggunakan perspektif pertukaran. Melalui perspektif ini diperoleh gambaran model dan isi pertukaran yang dilakukan antarpelaku dalam industri gula kelapa. Hubungan tersebut terbangun dalam relasi-relasi yang terjalin antara perajin gula kelapa dengan pengepul, pengepul dengan pengepul, pemilik pohon kelapa dengan penyewa (perajin). Dari perspektif pertukaran ini akan diperoleh gambaran kekuatan yang telah mengikat hubungan sosial antara perajin gula kelapa dengan pengepul.

Paradigma pertukaran sosial (*social exchange*) sebagaimana ditunjukkan oleh Ekeh (1974), terdiri dari dua macam, yakni individual dan kolektif. Ekeh menyebutkan ada dua bentuk pertukaran yang mendasari pola kerjasama dalam masyarakat yaitu pertukaran meluas dan pertukaran terbatas. Pertukaran meluas terdiri dari pertukaran meluas berantai (*chain generalized exchange*) dan pertukaran meluas menjala (*net generalized exchange*). Pertukaran meluas menjala terdiri dari yang memusat ke individu (*individual focused*), dan yang memusat ke kelompok (*group focused*) (Ahimsa-Putra 2003: 25-26). Pertukaran terbatas terjadi antara dua individu menghasilkan yang disebut (1) persahabatan, jika pertukaran tersebut seimbang antar dua-orang yang status sosialnya sama, (2) *patronase* jika pertukaran yang terjadi tidak sama status sosialnya (Ahimsa-Putra 1994: 17).

Jalinan hubungan kerjasama antarpelaku dalam usaha gula kelapa dapat terbentuk, karena setiap pelaku yang terlibat di dalamnya memiliki kepentingan tertentu. Hubungan tersebut dapat berlangsung karena di dalamnya ada barang, tenaga maupun jasa yang dipertukarkan. Pertukaran (*exchange*) ini memainkan peran penting dalam kehidupan sosial. Pertalian sosial tersebut terjalin karena adanya motivasi-motivasi dari para pelaku. Dalam hal ini Emerson berpendapat, bahwa relasi pertukaran berangkat dari ketergantungan dua pihak pada sumberdaya yang dimiliki oleh yang lain (Befu, dalam Sumintarsih, 2003: 155). Dalam konteks ini sarana yang dipertukarkan adalah sumberdaya yang dimiliki oleh

masing-masing yang terlibat dalam interaksi itu. Mereka yang terlibat dalam usaha gula kelapa adalah produsen gula kelapa (penderes) yang memiliki modal tenaga, bahan dasar (nira-gula kelapa), dengan para pengepul/pedagang kecil sampai besar (memiliki modal, dan wilayah pemasaran serta sarana lain yang dibutuhkan produsen gula kelapa). Pengepul adalah orang yang menampung atau membeli gula kelapa dari para produsen gula kelapa, yang keberadaannya ada di tingkat kabupaten (Bandar), kecamatan (pengepul besar), desa (pengepul kecil), dusun (bakul-bakul kecil).

Hubungan yang terbentuk antarpelaku yang terlibat dalam usaha gula kelapa karena ada hubungan transaksi di antara mereka yang berlatar pada kepentingan-kepentingan ekonomi. Dalam konteks ini, menurut Ahimsa-Putra (2003: 19-21), untuk menjelaskan pertukaran-pertukaran individual yang terjadi baik antarpelaku yang terlibat dalam proses produksi maupun distribusi diperlukan pendekatan yang disebut *transaksionalisme*. Perspektif ini menekankan pada pengamatan yang intensif atas berbagai perilaku individu yang menghasilkan proses-proses dan bentuk-bentuk sosial. Analisis dari pendekatan ini harus menjelaskan bagaimana aneka-ragam bentuk-bentuk sosial, seperti misalnya bagaimana unit-unit produksi itu muncul dan terbentuk. Dengan paradigma ini perhatian peneliti harus diarahkan terutama pada isi transaksional dari relasi-relasi antar person. Di sini peneliti berusaha untuk mengidentifikasi tipe-tipe, jenis-jenis pertukaran yang terjadi antara mereka yang terlibat dalam transaksi usaha gula kelapa dengan lingkungan sosialnya.

Perajin gula kelapa ini mayoritas berada di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas merupakan (1) daerah sentra industri gula kelapa terbesar di Jawa Tengah, 2) dan Kecamatan Cilongok merupakan satu diantara kecamatan yang memiliki sentra gula Jawa terbesar di Banyumas. Menurut data dari Asosiasi Pengusaha dan Petani Gula Kelapa Indonesia (Appeguki) di Banyumas ada sebanyak 90.241 warga yang menggantungkan hidupnya dari mengolah nira, di mana terdapat 32.570 orang penderes nira kelapa, yang tersebar di 22 kecamatan dari 27 kecamatan yang ada di Banyumas (Suara Banyumas 27 Juni 2008). Untuk mempersempit cakupan dipilih Desa Sudimara dan Desa Pageraji, Kecamatan Cilongok, dengan pertimbangan Desa Sudimara banyak pengepul kecil sampai besar, dan Desa Pageraji jumlah penderes cukup banyak dan ada koperasi kelompok tani gula kelapa.

Pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam (*in-depth interview*), pengamatan terlibat, observasi dan studi pustaka. Data yang terkumpul diklasifikasi dan disusun menjadi tulisan yang bersifat deskriptif-kualitatif. Sesuai dengan perspektif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertukaran (*sosial exchanges*), maka dalam penyajiannya digambarkan pula struktur relasi yang terbangun dari para pelaku dalam usaha kerajinan gula kelapa.

II. SKETSA WILAYAH CILONGOK

Kecamatan Cilongok terletak di bagian barat Kabupaten Banyumas. Cilongok merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak, yaitu 20 desa. Mempunyai pasar yang cukup besar yaitu Pasar Manis. Pasar ini selalu penuh sesak meluber setiap *manisan* (nama pasaran di Jawa). Kecamatan Cilongok menjadi jalur besar ke arah Tegal, Brebes, hingga Jakarta. Posisi ini menjadikan Cilongok cukup terkenal sebagai jalur distribusi produk ke berbagai pasar besar. Produk khas dari kecamatan Cilongok adalah gula kelapa (gula Jawa). Mayoritas penduduk di Kecamatan Cilongok adalah produsen gula kelapa.

Luas wilayah Kecamatan Cilongok 10.534,126 Ha, yang terbagi dalam 20 wilayah desa. Dari 20 wilayah desa tersebut Desa Sudimara dan Pageraji dikenal sebagai daerah sentra

industri gula kelapa cukup potensial di wilayah Kecamatan Cilongok. Hasil terbesar di Kecamatan Cilongok selain kelapa juga terdapat banyak tanaman ketela pohon yang berbau dengan pohon kelapa. Luas tanaman ini sekitar 600.000 hektar dengan kemampuan produksi 15.000 ton/tahun.

Sumber-sumber perekonomian penduduk mayoritas diperoleh dari sektor pertanian, kemudian sektor industri kecil dan sektor perdagangan. Penduduk yang bermukim di bagian barat-selatan Kecamatan Cilongok (Desa Cipete, Cilongok, sebagian Desa Sudimara) selain menanam padi juga menanam jagung, kacang tanah, dan ketela pohon, ketela rambat. Biasanya di sekeliling sawahnya atau kebunnya ditanami kelapa deres dan aneka tanaman produktif lainnya istilahnya kebon campur. Pohon kelapa deres ada yang dideres sendiri diambil niranya dibuat gula merah atau pohon tersebut disewakan. Di bagian timur Kecamatan Cilongok, sebagian dari Desa Sudimara, Desa Pageraji, banyak penduduk yang selain menanam padi juga melakukan usaha dari kayu albasia, menderes nira, yang ditanam bercampur dengan tanaman lainnya.



Foto 1, 2. Tegal dan pekarangan penduduk ditanami aneka tanaman produktif

Di Cilongok hampir setiap rumah tangga memproduksi gula kelapa dari pohon miliknya maupun yang disewa dengan sistem maro. Hasil dari pengolahan nira pada umumnya dijual ke pedagang desa atau pengepul yang ada di daerah setempat. Jumlah pohon kelapa di Kecamatan Cilongok ada sejumlah 1.670.57 pohon kelapa yang sekitar 92 % sedang berproduksi. Tanaman andalan lainnya adalah kopi, dan cengkeh. Selain bertani, berkebun, sebanyak 5,9% rumah tangga adalah peternak, sebagian besar peternak sapi dan kambing, kerbau, dan unggas (Monografi Kecamatan Cilongok 2010).

Usaha ekonomi lainnya yang banyak dilakukan oleh penduduk setempat adalah pengolahan kayu yang banyak ditanam oleh penduduk di daerah tersebut. Di Desa Pageraji (sebelah timur Kecamatan Cilongok) jenis kayu yang diproduksi adalah *albasia*. Di sebelah selatan Kecamatan Cilongok lebih variatif yaitu selain jenis *albasia*, juga kayu mahoni, jati, mranti. Usaha pengolahan kayu (gelondongan), yang diolah menjadi kayu siap pakai (untuk bahan bangunan, membuat mebel) ini sangat berperan membantu kelancaran perekonomian penduduk setempat. Industri kayu di samping mampu menyerap tenaga kerja, juga limbah kayu menjadi alternatif para pemasak nira untuk bahan bakar.

Sumber ekonomi lainnya di Kecamatan Cilongok adalah terdapatnya pasar desa di wilayah Cilongok maupun pasar di tingkat kecamatan, yang memperlancar jual-beli hasil pertanian, hasil kebun dan tegalan, maupun lalu-lintas perdagangan lainnya. Pasar-pasar ini menjadi sarana ekonomi yang penting untuk mendistribusikan hasil bumi, seperti Pasar Cilongok, Pasar Pernasidi, Pasar Manis, Pasar Wage, dan pasar-pasar kecil lainnya yang buka hanya setiap pasaran. Menurut data statistik Cilongok terdapat 6 buah pasar yang berada di Kasegeran, Sudimara, Cilongok, Karangtengah, Gununglurah, dan Sukawera.

Penduduk Kecamatan Cilongok tahun 2010 sekitar 10.929 jiwa, terdiri dari 5.266 jiwa penduduk laki dan 5.1414 jiwa perempuan. Desa Pageraji jumlah penduduknya 9868 jiwa, dan Sudimara 3885 jiwa. Rata-rata jumlah anggota keluarga di Kecamatan Cilongok 3,3, sedangkan Desa Pageraji 3,4 dan Sudimara 3,1.

Di Kecamatan Cilongok secara keseluruhan rumah penduduk yang ber dinding bambu persentasenya cukup tinggi. Desa yang rumahnya ber dinding bambu paling banyak terdapat di Pageraji dan Panusupan. Sebaliknya di Sudimara rumah dengan dinding setengah tembok persentasenya lebih tinggi daripada rumah ber dinding lainnya.

Tabel 1. Rumah dan Jenis Dinding

| Jenis dinding | Kec. Cilongok | | Ds. Pageraji | | Ds. Sudimara | |
|---------------|---------------|------|--------------|------|--------------|------|
| | F | % | F | % | F | % |
| Tembok | 6440 | 26,3 | 319 | 14,8 | 200 | 23,3 |
| ½ Tembok | 4598 | 18,9 | 324 | 15,1 | 266 | 31,0 |
| Kayu | 5994 | 24,6 | 672 | 31,3 | 171 | 20,0 |
| Bambu | 7376 | 30,2 | 834 | 38,8 | 220 | 25,7 |
| Jumlah | 24408 | 100 | 2149 | 100 | 857 | 100 |

Sumber: Kecamatan Cilongok Dalam Angka 2011 : diolah dari tabel 4.15

III. PROFIL USAHA GULA KELAPA CILONGOK

Kabupaten Banyumas tergabung dengan wilayah lain di Jawa Tengah yang juga sebagai sentra industri gula kelapa yang disebut *Barlingmascape*, yaitu Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen. Di Kabupaten Banyumas ada 24 dari 27 kecamatan sebagai wilayah produsen gula kelapa, atau terdapat sekitar 25.868 unit usaha gula kelapa (Diperindagkop, 2010). Di wilayah-wilayah tersebut sirkulasi, tata niaga gula berlangsung. Hampir bisa dikatakan bahwa kelancaran tataniaga gula kepala sangat didominasi oleh para pengepul gula kelapa. Di daerah-daerah penghasil gula kelapa hampir bisa dipastikan terdapat pengepul-pengepul gula kelapa skala besar, kecil, dan pedagang-pedagang lokal.

Terdapat beberapa kecamatan sebagai penghasil gula kelapa cukup besar secara berurutan yaitu Cilongok, Ajibarang, Somogede, Pakuncen, Purwojati, Lumbir, dan Wangon. Daerah penghasil gula kelapa tersebut rata-rata memiliki jumlah penderes yang jumlahnya cukup besar tercatat Cilongok jumlahnya paling banyak 6512 penderes. Daerah yang memiliki pohon kelapa dalam jumlah banyak, pada umumnya diikuti oleh jumlah penderes yang juga cukup banyak, dengan rata-rata menguasai pohon kelapa deres yang mampu dikerjakan. Bila dihitung rerata gula kelapa yang dapat dihasilkan penderes kurang lebih 6,5 kg/hari. Usaha kerajinan gula kelapa ini merupakan 74 persen dari keseluruhan unit industri kecil menengah yang ada di Kabupaten Banyumas (Deperindagkop 2010). Berikut data penderes gula kelapa Kabupaten Banyumas 2010.

Kecamatan Cilongok sebagai sentra produsen gula kelapa terbesar di Banyumas di sekeliling wilayahnya dari daerah dataran sampai perbukitan banyak ditumbuhi pohon kelapa deres yang menjadi andalan penghasilan sebagian besar penduduk Cilongok. Hasil produk gula kelapa para penderes menjadi bahan pendukung yang dibutuhkan pabrik kecap, seperti Bangau, ABC, Sedap, Indofood. Permintaan gula kelapa dari pabrik-pabrik kecap ini telah ikut menyemarakkan usaha pergulaan para perajin gula kelapa.

Tabel 2. Jumlah Penderes, Jumlah Pohon, dan Jumlah Produksi

| Kecamatan | Jum. Penderes | Jum. Phn Klpa | Jum. Prod(kg) |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Cilongok | 6.512 | 136,011 | 48.963,96 |
| Ajibarang | 2.097 | 40.677 | 14.643,72 |
| Somagede | 1.870 | 28.082 | 10.109,62 |
| Pakuncen | 1.869 | 40.420 | 14.551,20 |
| Purwojati | 1.657 | 25.704 | 9.253,44 |
| Lumbir | 1.509 | 28.476 | 10.251,36 |
| Wangon | 1.504 | 30.970 | 11.149,20 |
| Kemranjen | 1.170 | 15.601 | 5.616,36 |
| Sumpiuh | 1.110 | 16.202 | 5.832,72 |
| Kebasen | 965 | 14.647 | 5.772,92 |
| Rawalo | 747 | 11.598 | 4.175,28 |
| Banyumas | 727 | 8.592 | 3.093,12 |
| Gumelar | 673 | 11.175 | 4.023,00 |
| Sumbang | 611 | 11.555 | 4.159,80 |
| Patikraja | 603 | 10,997 | 3.958,92 |
| Jatilawang | 448 | 8.992 | 3.237,12 |
| Kedung Banteng | 302 | 5.490 | 1.976,40 |
| Tambak | 261 | 3.397 | 1.222,82 |
| Kalibagor | 205 | 3.641 | 1.310,76 |
| Baturaden | 117 | 956 | 344,16 |
| Kembaran | 10 | 251 | 90,36 |
| Purwokerto Barat | 10 | 195 | 70,20 |
| Sokaraja | 8 | 320 | 115,20 |
| Purwokerto Utara, Timur, Selatan | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 25.868 | 466309 | 168371.24 |

Sumber: Dinas Perindagkop Kabupaten Banyumas, 2010

Produksi Gula Kelapa. Usaha gula kelapa merupakan usaha rumah tangga dengan pembagian kerja yang tegas. Bahan dasar gula kelapa adalah nira yang dideres atau disadap para laki-laki dalam hal ini kepala rumah tangga atau disebut *penderes*. Nira kemudian beralih tangan ke perempuan atau isterinya untuk dimasak menjadi gula kelapa, mereka ini disebut *pengindel*. Pada saat tahap cetakan, yaitu nira kental hasil masakan dituangkan ke dalam potongan-potongan bambu, juga dikerjakan istrinya, tetapi ada juga yang kerjasama dengan suami.



Foto 3. Naik pohon kelapa



Foto 4. Sampai di atas



Foto 5. Menderes



Foto 6 & 7. Turun bawa nira

Foto 8. Pulang bawa nira

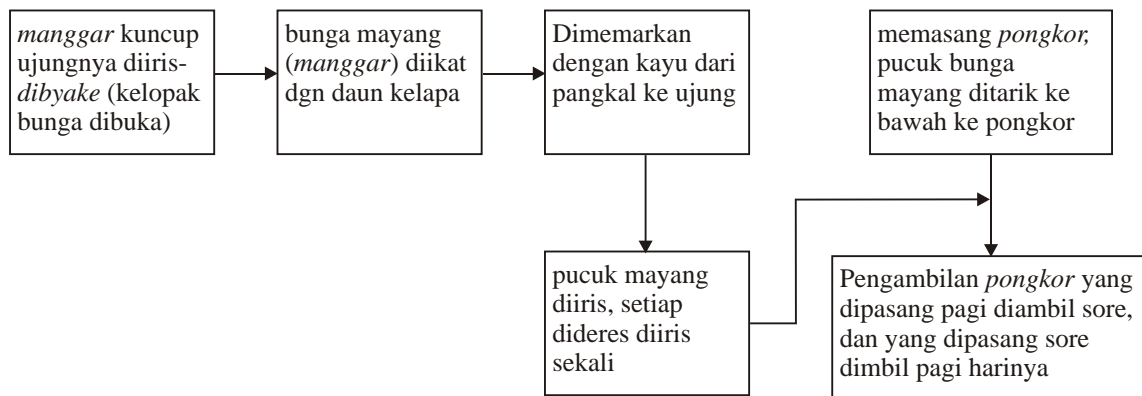
Nira disadap penderes dua kali sehari pagi dan sore. Ketika penderes memanjat pohon kelapa ia sudah membawa *pongkor* peralatan untuk menampung nira yang dibuat dari bambu. Pongkor sebelum dibawa untuk tempat nira harus bersih dan sebelumnya diberi larutan *laru* atau disebut *ipah*, untuk menghasilkan nira yang bening atau jernih dan tidak rusak (rasa asam). Laru bisa dari *injet*/kapur, kulit manggis, *klika* pohon nangka, daun *sampan* dan daun atau kulit pohon *Sulatri*. Pongkor itu kemudian diletakkan di bawah bunga mayang yang sudah diiris ujungnya. Dari ujung bunga mayang itulah keluar tetesan nira.³ Ia kemudian turun dengan membawa *pongkor-pongkor* yang ia letakkan tadi pagi. Ritme pekerjaannya sebagai penderes itu ia lakukan terus berulang setiap hari, pagi dan sore selama bertahun-tahun naik turun puluhan pohon kelapa.

Peralatan untuk mengambil nira dari pohon kelapa sampai diproses menjadi gula kelapa yaitu *pongkor* dari bambu, *sengker* untuk cetak gula, *colek* untuk membersihkan ketika gula diproses, *awal-awal* untuk mengaduk, *ketoprak* kayu tiang diberi *cantelan* untuk tempat pongkor dan sabit. Peralatan lainnya *solet* untuk mengaduk dan membersihkan wajan, wajan untuk tempat memasak, tungku, pawon tempat memasak, dan *eblek* untuk lemek cetakan.

Kuantitas dan kualitas nira sangat ditentukan oleh kondisi musim, kondisi pohon kelapa, dan teknik menderes. Pada musim penghujan kualitas nira turun atau kurang bagus, tetapi kuantitas hasil naik atau jumlahnya banyak. Sebaliknya musim kemarau kualitas nira naik atau bagus, tetapi jumlahnya turun atau hasilnya tidak banyak. Bahkan bisa tidak mendapatkan nira. Pohon kelapa yang sehat ikut mempengaruhi kualitas dan kuantitas nira, yaitu sering dipupuk, dibersihkan, dan umur pohon tidak tua. Bunga mayang (*manggar*) yang akan dipotong harus yang masih kuncup belum mekar, harus utuh, dan tidak kena hama. Bunga mayang kemudian diikat dan dimemarkan dengan kayu pelan-pelan (memakai pegangan sabit) dari pangkal ke ujung, kemudian pelan-pelan ditarik ke bawah ujungnya dipotong sekali jadi (pisau pemotong harus tajam), supaya tidak menghambat keluarnya nira, kemudian *dibyakke* kelopak bunga dibuka diiris melintang dan membujur, kemudian diikat dengan daun kelapa, dan bunga diturunkan untuk memudahkan nira masuk ke *pongkor* atau bumbung. Pengirisan bunga mayang hanya dilakukan pagi dan sore.⁴ *Pongkor* tempat wadah nira yang dipasang jumlahnya bisa 5-10.

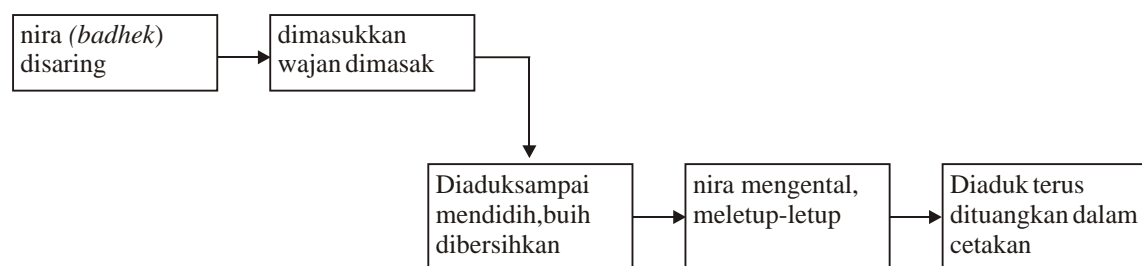
³ Setiap mayang bisa menghasilkan nira 2-4 liter/hari, atau paling sedikit 0,5-1,5 liter

⁴ Pagi hari ujung tandan diiris dengan arit penyadap ke arah bawah, sore hari ujung tandan diiris lagi sedikit. Pengirisan tersebut dilakukan setiap pagi dan sore selama 2 hari. Penyadapan pagi dilakukan antara jam 06-09, dan sore hari selama 2 hari. Penyadapan pagi dilakukan antara jam 06-09, dan sore hari antara jam 16.00-18.00. Pada awalnya tetesan nira keluar sedikit, kemudian hari berikutnya keluar banyak, setelah sekitar dua minggu hari berikutnya produksi nira menurun sampai kurang lebih hari ke 35.



Skema 1. Alur pengambilan nira pohon kelapa

Nira hasil sadapan (*badhek*) harus secepatnya dimasak, setelah disaring, kemudian dimasak dalam sebuah wajan besar, diaduk sampai mendidih dan buihnya dibersihkan, setelah nira kental dan meletup-letup dihentikan. Nira yang mengental terus diaduk dan sambil dituangkan dalam cetakan. Cetakan terbuat dari bambu yang dipotong-potong dengan diameter 15x15 cm. Setelah dicetak dalam bambu sekitar 15-20 menit dikeluarkan dari cetakan dimasukkan dalam sebuah wadah. Biasanya langsung dikemas ditata sedemikian rupa dimasukkan plastik tebal, ada juga yang dimasukkan dalam kotak kayu. Kemasan gula kelapa dari Cilongok mudah dikenali, setiap siap diberi kardus sebagai pembatas.



Skema 2. Proses produksi pembuatan gula kelapa

Petani yang memproduksi gula semut walaupun jumlahnya belum banyak, tetapi mempunyai prospek yang cerah untuk menaikkan penghasilan petani gula kelapa. Petani gula jawa memang masih banyak yang enggan mencoba membuat gula semut, walaupun harga pasarannya lebih tinggi dari pada gula kelapa. Hal ini menurut petani karena (1) waktu untuk pemrosesannya lebih panjang, (2) membutuhkan bahan bakar yang lebih banyak, (3) di samping itu kualitas nira harus betul-betul bagus, bersih, bening, dan (4) pemasarannya tidak ada di setiap tempat, sangat terbatas. Lain halnya dengan gula kelapa, cara memroduksinya sudah dikuasai turun-temurun, pemasarannya cepat, bahkan tidak usah pergi dari rumah, langsung setor ke pengepul.

Pada umumnya hasil produksi usaha gula kelapa mayoritas gula kelapa klas 1. Jenis gula ini dibutuhkan dengan jumlah maksimal oleh pabrik-pabrik kecap, dan pabrik makanan. Namun demikian gula kelapa yang disetorkan ke pabrik kecap harus memenuhi standar kualitas yang sudah ditentukan oleh pabrik kecap. Gula kelapa yang didistribusikan ke pabrik kecap harus berwarna kemerahan dan tekstur keras, tidak menggunakan *sulfit*.

Gula kelapa super dibuat dari nira jernih, banyak dipasarkan oleh para bakul maupun pengepul ke pasar, toko atau warung pengecer. Produksi gula super relatif tidak banyak, karena membutuhkan nira yang berkualitas dan pemberian laru non kimia. Nira yang berkualitas atau gula super dapat diproses menjadi gula kristal atau gula semut. Namun, produksi jenis gula ini relatif sedikit.

Tabel 3. Jenis Gula Kelapa dan Pemasarannya

| Jenis gula hasil proses | Identifikasi | Distribusi 1 lokal | Distribusi 2 |
|---|---|--|--|
| 1. Gula kelapa klas 1 | <ul style="list-style-type: none"> - tekstur kasar - warna coklat muda - mudah meleleh kalau kena panas | <ul style="list-style-type: none"> - ke pengepul sakla besar, menengah | <ul style="list-style-type: none"> - disalurkan ke pabrik-Pabrik kecap: Indofood, Sedap, Bango, ABC |
| 2. Gula kelapa super | <ul style="list-style-type: none"> - tekstur agak kasar - warna coklat tua cenderung coklat pekat - tidak mudah meleleh | <ul style="list-style-type: none"> - kepengepul, pedagang pengecer, ke pasar-pasar, swalayan | <ul style="list-style-type: none"> - ke daerah-daerah lain Jakarta, Cilacap |
| 3. Gulakelapacair (<i>gemblung, benyikan</i>) | <ul style="list-style-type: none"> - warna coklat - lembek sekali - gula gagal, gula yang tidak bisa diproses lagi atau tidak bisa dicetak | <ul style="list-style-type: none"> - dijual ke pedagang keliling, dipakai sendiri, atau diproses lagi | <ul style="list-style-type: none"> - dipakai sendiri - pedagang lokal |

Sumber: wawancara dengan Ir. Sri Gito ,Kasi Industri Pertanian dan Kehutanan Dinas Indagkop Kab. Banyumas dan pengepul, perajin gula kelapa

Usaha gula kelapa rumah tangga di Banyumas dapat diklasifikasi berdasarkan hasil produksinya dan kondisi kehidupannya. Menurut Ketua Asosiasi Penderes Kabupaten Banyumas usaha gula kelapa penderes dapat dikelompokkan dalam tiga kategori kecil, menengah dan besar. Persentase terbesar terdapat dalam kelompok usaha kelapa menengah (lihat tabel 6). Usaha gula kelapa yang termasuk kategori kecil hanya mampu memproduksi gula kelapa perharinya <5-5kg. Pada umumnya mereka ini sebagai buruh penderes karena tidak memiliki pohon kelapa deres, atau kalau memiliki hanya sedikit pohon. Usaha gula kelapa kelompok menengah jumlahnya hampir separonya, hasil gula kelapanya 6-9 kg/hari, selain itu mereka punya lahan sawah/tegalan, dan peternak. Kelompok usaha kelapa cukup besar adalah mereka yang hasil produksinya > 10 kg/hari, selain itu juga bertani dan peternak. Mereka ini termasuk golongan mampu tetapi jumlahnya kecil.

Tabel 4. Kategori Usaha Gula Kelapa, Produksi, dan Kondisi

| Usaha gula kelapa (kategori) | % | Produksi (kg)/hari | Identifikasi |
|------------------------------|----|--------------------|--|
| Kecil | 30 | < 5 - 5 | Subsisten, buruh, rumah sederhana |
| Menengah | 57 | 6 - 9 | Bertani, peternak, rumah dengan lantai semen keramik |
| Besar | 13 | > 10 | Bertani, peternak, anak sekolah, rumah bagus |

Sumber: wawancara dengan ketua Asosiasi Penderes Kab. Banyumas

Pengepul gula kelapa di Kabupaten Banyumas ada sekitar 48 yang bisa dikelompokkan menjadi empat kelompok, 6 Pengepul dengan omset 100-500 ton/bln, 4 pengepul dengan omset 50-60 ton/bln, 23 pengepul dengan omset 15-40 ton/bln, dan 34 pedagang/ bakul pengepul kecil dengan omset sangat kecil < 100 kg/bln. Pengepul beromset besar mampu menyerap tenaga kerja >10-50 orang. Tenaga kerja tersebut laki dan perempuan ada yang sebagai pengindal, mengemas/mengepak gula, menimbang, memilah gula menurut kelasnya. Pengepul ini pada umumnya usaha dagangnya memiliki nama, seperti pengepul H. Suryanto usaha dagangnya bernama UD. Hasil Manis. Sebagai pengepul skala besar ia memiliki jaringan dengan ratusan penderes yang menyeteri gula kelapa, dan puluhan pengepul kecil yang setor dagangan gula kelapa kepadanya, selain itu ia juga punya hubungan kerjasama dengan pengepul besar lainnya dalam menjalankan usahanya. Pengepul beromset menengah

40-60 ton/bln hampir sama pola kerjasamanya selain mendapat setoran gula kelapa dari para penderes langganannya juga dari pedagang/bakul kecil, dan ada kerjasama dengan pengepul lainnya.

Para pengepul gula kelapa membentuk perkumpulan, jumlah anggota 110 orang. Mereka mengadakan arisan yang tarikannya setiap lima hari sekali dengan setoran Rp.100.000/orang. Setiap 'buka arisan' pemenang menerima Rp 10 juta. Pertemuan itu selain arisan juga menjadi ajang informasi harga gula, maupun stok gula kelapa yang diminta oleh pengepul. Biasanya kemudian ada kerjasama antar pengepul untuk memenuhi kebutuhan setoran gula kelapa yang ditargetkan oleh pengepul besar, atau perusahaan kecap. Masuknya perusahaan kecap dalam tata niaga gula kelapa ini ikut menjadi pemicu naiknya omset produksi gula kelapa. Dengan kata lain ikut memperlancar pemasaran gula kelapa. Di lain pihak juga memunculkan terjadinya persaingan di antara para pengepul. Boleh jadi adanya permintaan yang tinggi terhadap gula kelapa menjadikan para pengepul memperkuat jaringannya untuk mengikat para penderes dengan limpahan pinjaman supaya gula mudah didapat.

Tabel 5. Pengepul, Omset, dan Ketenagaan

| Nama pengepul | Omset (ton)/bl | Tenaga kerja | Alamat | Keterangan |
|--------------------|----------------|--------------|------------------------|----------------------|
| 1. Suryanto | 500 | 50 orang | Sudimara, Cilongok | UD. Hasil Manis |
| 2. H.Rudin | 500 | 49 orang | Panembangan, Cilongok | UD. Berkah |
| 3. H. Musbihun | 300 | 25 orang | Cilongok, Cilongok | UD. Manis Sari |
| 4. H. Imron | 200 | 14 orang | Jatisobo, Cilongok | - |
| 5. Suyoko | 200 | 25 orang | Cikidang, Cilongok | UD. Banyumili |
| 6. Saguh | 100 | 12 orang | Krngebawang, Ajibarang | - |
| 1. H. Rudin | 60 | 11 orang | Ajibarang, Ajibarang | UD. Mahabah |
| 2. Waluyo | 50 | 9 orang | Sudimara, Cilongok | - |
| 3. H. Saefudin | 50 | 10 orang | Gn. Lurah, Cilongok | - |
| 4. H. Mastur | 50 | 10 orang | Pageraji, Cilongok | - |
| 5. Tarsidi | 50 | 8 orang | Sawangan, Patikraja | - |
| 6. Suyudiono | 40 | 6 orang | Kasegeran, Cilongok | - |
| 7. Susilo | 40 | 7 orang | Kasegeran, Cilongok | - |
| 8. Sultan/mbk Sri | 40 | 8 orang | Jatisaba, Cilongok | - |
| 9. Ridi | 40 | 8 orang | Panusupan, Cilongok | - |
| 10. H. Eceng Macin | 40 | 7 orang | Wangon, Wangon | - |
| 1. H. Mijo | 35 | 7 orang | Wangon, Wangon | UD. Putra Penghubung |
| 2. H. Mastur, N | 30 | 8 orang | Pageraji, Cilongok | - |
| 3. H. Bandi | 30 | 7 orang | Pageraji, Cilongok | - |
| 4. Slamet | 30 | 7 orang | Pageraji, Cilongok | UD. Halimi |
| 5. Supriyadi | 30 | 7 orang | Cilongok, Cilongok | - |
| 6. H. Lihun | 30 | 6 orang | Cilongok, Cilongok | - |
| 7. H. Waji | 30 | 8 orang | Cikidang, Cilongok | - |
| 8. Muh. Zaenal A | 30 | 6 orang | Karanglo, Cilongok | - |
| 9. Mugiarto | 30 | 6 orang | Krtengah, Cilongok | - |
| 10. H. Romdon | 30 | 6 orang | Cikawung, Pekuncen | - |
| 11. H. Usman | 30 | 5 orang | Ajibarang, Ajibarang | - |
| 1. H. Sudi | 28 | 4 orang | Semedo, Pekuncen | - |
| 2. H. Sahid | 25 | 5 orang | Rancamaya, Cilongok | - |
| 3. Slamet B | 25 | 6 orang | Cilongok, Cilongok | - |
| 4. H. Wasbir | 25 | 4 orang | Cikawung, Pekuncen | UD. Wisnumor |
| 5. Wahyuriono | 20 | 4 orang | Kasegeran, Cilongok | - |
| 6. H. Dirwan | 15 | 3 orang | Cibangkong, Pekuncen | - |
| 7. H. Dirwan | 15 | 3 orang | Sawangan, Ajibarang | - |

Sumber: Dinas Perindagkop Kab. Banyumas, 2010

Dilihat dari tabel ini menunjukkan bahwa pengepul gula kelapa beromset cukup besar dari 15-500 ton/ bulan yang produknya diperoleh dari para penderes/perajin gula kelapa. Secara tidak langsung pengepul adalah agen pemasar gula kelapa bagi penderes, dari mulai pengepul kecil/local sampai pengepul besar. Tetapi rantai pemasaran yang dilalui penderes hanya selangkah yaitu penderes lokal yang ada di sekitarnya. Selanjutnya gula kelapa dilempar dari pengepul lokal ke pengepul berikutnya. Pengepul-pengepul tingkat lokal jumlahnya cukup banyak omsetnya kecil hanya ratusan kilo, mereka ini yang menjadi tumpuan para penderes/usaha gula kelapa.

IV. PERTUKARAN DALAM USAHA GULA KELAPA

Usaha gula kelapa merupakan kegiatan ekonomi yang sudah berjalan lama dan turun-temurun. Usaha gula kelapa dalam produksi dan distribusinya melibatkan anggota rumah tangga dan pelaku ekonomi lainnya. Dalam proses produksi *penderes* selaku produsen (pengambil nira) bekerjasama dengan *pengindel* (pemasak gula), memroses nira tersebut menjadi produk komoditas yang sangat dibutuhkan oleh banyak pihak yakni, pabrik kecap, perusahaan makanan, para pengepul, pedagang, yang semuanya sebenarnya berfokus kepada usaha gula kelapa penderes.

Sebelum nira diproses menjadi gula kelapa sebenarnya sudah ada relasi antara penderes dengan pengepul yang pada umumnya sudah memberikan modal kepada para penderes. Penderes pemilik pohon, penderes maro, memiliki relasi yang paling dekat dan intensif dengan pengepul dan anggota keluarganya yang membantu dalam proses produksi.

Dalam distribusi ada jaringan perniagaan gula kelapa, yaitu antara produsen gula kelapa dengan pengepul, produsen gula kelapa dengan koperasi kelompok tani, dan jaringan antar pengepul. Relasi yang terjadi dalam perniagaan gula kelapa tersebut bisa berlangsung karena adanya kepentingan, kebutuhan, dan hubungan-hubungan yang sudah terjalin sebelumnya. Berikut jalinan pertukaran di antara perajin gula kelapa dengan pengepul.

1. Pertukaran Antarpelaku Dalam Produksi.

Dalam proses produksi pembuatan gula kelapa, penderes memiliki hubungan kerja dengan anggota rumah tangga, dengan pemilik pohon kelapa, bila pohon yang dideres statusnya bukan miliknya tetapi sewa. Relasi juga terjadi antara penderes yang merangkap sebagai pengepul dengan buruh pengindelnnya. Jadi proses produksi dalam usaha gula kelapa, relasi yang berlangsung adalah antara: (1) Penderes dengan pengindel, (2) Penderes dengan pemilik pohon kelapa yang disewanya atau maro

Seorang penderes memiliki pekerjaan yang spesifik, yaitu naik turun pohon kelapa pagi dan sore untuk menderes nira. Pohon yang dideres bisa puluhan, setiap pohon dinaiki dua kali yaitu untuk memasang *pongkor* atau bumbung nira (*badhek*) dan mengambil pongkor yang telah berisi nira. Dilihat dari kegiatan penderes ini, modal utama penderes adalah pohon kelapa. Atas dasar ini ada beberapa tipe penderes berdasarkan pohon kelapa yang digarap atau yang dikuasainya yaitu (a) penderes pemilik pohon, (b) penderes *mendreng*, dan (c) penderes *maro*.

Usaha gula kelapa pada umumnya adalah sebuah kegiatan ekonomi unit rumah tangga. Pengambilan nira pada pohon kelapa dikerjakan oleh suami. Pekerjaan tersebut penuh risiko. Nira hasil menderes selanjutnya diproses istrinya. Dari pongkor nira disaring kemudian langsung dimasak. Hubungan kerjasama antara suami dan istri dalam produksi gula kelapa ini memiliki peranan sangat penting untuk kelangsungan usaha gula kelapa. Seperti dalam keluarga penderes Muhsid ini. Muhsid sebagai penderes pohon kelapa milik sendiri

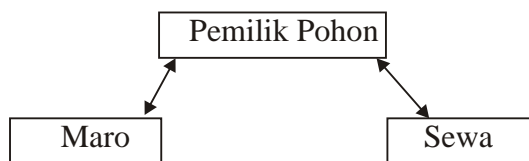
kondisinya lebih baik. Mereka yang memiliki pohon kelapa deres dalam jumlah sedikit, kurang dari 15 pohon pada umumnya ikut maro pohon kelapa di tempat lain. Lain halnya dengan penderes Muhsid.

“Penderes Muhsid (60 th) usaha gula kelapa - nya adalah hasil dari deresan pohon kelapa miliknya. Muhsid sudah sekitar 40 tahun '*menek*' pohon kelapa. Ia memiliki 100 pohon kelapa, tetapi hanya 15 pohon yang dideres, sisanya dijual '*woh*' atau buah. Menurut Muhsid "*nek sumuk badhek suda, ning nek atis badhek lumayanakeh*"(kalau panas nira/badhek berkurang hasilnya, tetapi kalau musim dingin badheknya lumayan banyak). Muhsid memasang 2-3 pongkor di setiap pohon kelapa deresnya, katanya '*nekarep pasang pongkor, pongkore dikocori banyu apu, cangkang manggis (kulit), takerane telung iris cangkang ditambah sesendhok apu*' (akan memasang pongkor sebelumnya pongkor diberi air kapur, kulit manggis, sebanyak tiga iris dan satu sendok air kapur). Muhsid memasang pongkor seharinya sekitar 30 pongkor. Begitu sampai di rumah pongkor berisi *badhek*oleh istrinya langsung dimasukkan wajan besar *digeneni* (dimasak), bila terlambat memasaknya *badhek* berbusa dan rasanya asam atau disebut *nyekul*, bila dibuat gula hasilnya tidak baik akan *blenyek* disebut gula *gemblung*. Setelah nira dimasak istrinya diperoleh gula sebanyak 18 kg. Setiap 5 hari sekali oleh istrinya gula tersebut disetorkan ke pengepul.”

Pekerjaan penderes sifatnya *maskulin* (berat penuh risiko) yaitu memanjat puluhan pohon kelapa cukup tinggi menjadi bagian laki-laki atau suami setiap hari. Dan pekerjaan perempuan sesuai nalurinya bersifat *feminin* yaitu memasak hasil yang dibawa suami, dan sampai pada penjualan untuk membiayai hidup keluarga. Secara tidak langsung manajemen dalam keluarga ada ditangan istri. Istri sebagai *pengindhel* memegang otoritas untuk mengatur penjualannya dan pemakaian hasilnya.

Pertukaran penderes (penyewa) dengan pemilik pohon. Penderes penyewa ada yang disebut *penderes maro* dan *penderes mendreng*. Berdasarkan tipe pohon kelapa yang dikuasainya akan menentukan cara kerja dan perolehan gula kelapa. Mekanisme terjadinya sewa-menyewa pohon kelapa dengan sistem mendreng, maro, pada umumnya pencari kerja (mendreng dan maro) yang mendatangi pemilik pohon kelapa. Pemilik pohon kelapa deres biasanya jumlah kelapanya cukup banyak. Pada umumnya mereka ini dikenal dan diketahui oleh masyarakat di lingkungannya, khususnya tetangganya. Seorang penderes *mendreng* yang tidak memiliki pohon, atau seorang penderes maro akan datang untuk meminta menggarap beberapa pohon kelapa untuk dideres dan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan. Pemilik pohon melepas pohon kelapanya untuk dideres orang lain dengan alasan (1) menolong supaya punya penghasilan, (2) mengurangi pohon kelapa yang dideres supaya pemilik tidak kecapean, (3) harga gula rendah, (4) usia pemilik sudah tua.

Penderes maro. Dalam usaha gula kelapa ada penderes yang memiliki pohon kelapa sendiri, ada yang sewa dengan sistem maro. Namun ada pula penderes pemilik pohon kelapa, tetapi untuk menambah penghasilannya menyewa pohon kelapa tetangganya. Dalam proses produksi, penderes membangun relasi dengan pemilik pohon kelapa sangat penting, karena pohon kelapa merupakan faktor produksi terpenting yang harus dimiliki. Dalam sistem sewa kewajiban penyewa kepada pemilik pohon tergantung kesepakatan. Ada yang setiap *separas* lima hari sekali penyewa memberikan hasilnya kepada pemilik pohon, dan lima hari berikutnya penyewa, dan seterusnya. Kesepakatan itu juga dipengaruhi oleh jauh dekatnya hubungan, yang ikut menentukan kesepakatan yang dibuat, yang tentunya meringankan penyewa atau penderes. Relasi yang terbangun antara penderes dengan pemilik pohon di sini vertikal menunjukkan bahwa posisi pemilik pohon dipentingkan oleh penderes alurnya adalah sebagai berikut.



Skema1. Relasi pemilik pohon dengan penderes maro dan penderes sawo

Pemilik pohon dalam transaksi ini posisinya vertikal. Ia sebagai pemilik pohon kelapa sangat dibutuhkan oleh penderes. Pemilik pohon tidak mampu untuk memanfaatkan sendiri pohon kelapa miliknya. Ketika ada penderes yang meminta untuk maro, maka terjadi kesepakatan bersama, bahwa hasilnya dibagi sama antara penderes dengan pemilik pohon. Jadi, transaksi itu saling menguntungkan, pemilik pohon tidak punya tenaga yang menggarap, dilain pihak penderes tidak memiliki pohon, tetapi sama-sama butuh nira untuk dibuat gula kelapa.

Dalam sistem bagi hasil (maro) ini banyak dilakukan para penderes dan pemilik pohon. Banyak penderes yang sudah memiliki pohon kelapa untuk disadap, tetapi masih mencari pohon kelapa yang bisa disewa maro. Pada umumnya pohon kelapa deres miliknya jumlahnya sedikit, mereka masih memerlukan tambahan dengan melakukan transaksi dengan pemilik pohon kelapa lain dengan sistem maro. Sistem maro ini dengan kesepakatan bagi hasil secara bergilir. Biasanya dengan kesepakatan 5 hari hasil menyadap/menderes (nira/*badhek*) untuk pemilik pohon dan 5 hari berikutnya untuk penderes.

“Amin (40 th), dalam kesehariannya menderes 25 pohon kelapa milik tetangganya dengan sistem maro, dan menderes 4 pohon kelapa miliknya. Menurut kesepakatannya kata Amin, hasil *badhek* yang pertama menjadi haknya pemilik pohon, 5 hari berikutnya menjadi milik penderes. Menurut Amin, dengan menderes 25 pohon itu setiap panen ia mendapatkan *badhek*/nira 20 liter. Apabila nira dijual (sudah dididihkan) menjadi 18 liter, harga 1 liter Rp 2.000, akan diperoleh Rp. 36.000 dikurangi pemakaian kayu Rp. 5.000, hasil bersih Rp 31.000/hari x 5 hari = Rp 155.000. Tetapi kalau dimasak gula kurang lebih mendapatkan gula sekitar 10 kg/hari, jadi selama 5 hari ia memperoleh gula 50 kg. Untuk memasak gula kelapa ia membeli serbuk kayu 1 *kandi* harganya Rp 10.000, butuh 2 *kandi* Rp 20.000/hari. Kalau harga gula saat itu Rp 11000/kg (2012), maka ia menerima Rp 550.000/5 hari. Selama *separas* ia menerima Rp 550.000-Rp 100.000 (serbuk kayu) = Rp 450.000/sepasar. Menurut Amin kalau tidak punya kayu, atau harga gula kurang bagus ia memilih menjual *badhek* “*badhek digeneni, prenthul-prenthul diwadahi jlegen 10 literan dibeta wonten Sokaraja, dingge es doger*” (nira/*badhek* direbus sampai mendidih, lalu dimasukkan ke jligen (10 literan) dijual ke Sokaraja untuk es doger)”.

“Amin memiliki kebun yang luasnya 60 *angga* (1 *angga* 70 m²) yang ada tanaman pohon kelapa deres miliknya 4 buah pohon, pisang, kopi, rambutan, durian, jengkol, dan tanaman kayu alba. Untuk menjual gula kelapanya Amin tidak terikat dengan pengepul, karena katanya : “*kula usahakke gulane dipendet mriki lih bakul regane pada jaba, kula bebas ora kontrak*” (saya berusaha gula saya diambil oleh bakul ke sini harga sama dengan di pasaran, saya bebas tidak ikut sistem kontrak dengan pengepul). Amin tinggal SMS kepada seorang pedagang gula, maka pedagang tersebut akan datang untuk membeli gula Amin. Namun, bila Amin ada kebutuhan mendesak, butuh uang dalam jumlah besar, ia menjual gulanya ke pengepul tetangganya dan pinjam modal ke pengepul tersebut: “*kula wingi melu kontrak lih Pak Muhammad kalihyuta, kalih tahun dingge ngrapetke omah, omahe bolong-bolong, gandeng kontrak saurane setor gula*” (Ia pinjam 2 juta sama Pak Muhammad (pengepul) kontrak 2 tahun untuk memperbaiki rumahnya. Konsekuensinya ia harus menyetorkan gulanya ke pengepul tersebut sampai hutangnya lunas).”

Pertukaran yang terjadi dalam sistem maro, penderes hanya memiliki modal tenaga dan mengerjakan pohon kelapa milik tetangganya dengan memperoleh nira sesuai kesepakatan. Demikian juga pemilik pohon menerima nira/*badhek* dari pohon kelapanya yang dideres oleh penderes maro. Dilihat dari sini maka pertukaran yang terjadi dalam sistem maro setara karena penderes menggunakan tenaganya dan memberikan imbalan kepada pemilik pohon.

Sebaliknya pemilik pohon dengan dilandasi rasa kepercayaan dan ketetanggaaan menyerahkan pohonnya untuk dideres dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan.

Pemilik pohon kelapa deres Muh. Surani, ia tidak menderes sendiri pohon kelapanya tetapi dikerjakan tetangganya. Pohon kelapa milik Muh. Surani ada 25 pohon, lima pohon tidak dideres, 20 pohon dideres oleh dua orang tetangganya. Kesepakatan bagi hasil lima hari untuk yang punya pohon dan lima hari untuk yang *menek* (deres). Hasil setoran nira dari bagi hasil ia masak gula dan disetorkan ke pengepul tetangganya. Alat-alat kerja juga ada kesepakatan misal sabit dan tali disiapkan oleh penderes, sedangkan pongkorbisa disediakan penderes atau pemilik pohon, kesepakatannya bila membutuhkan mengganti pembeliannya. Sebagai ketua RW ia mendapat bengkok 25 angka dan ditanami padi dua kali/tahun.

Penderes mendreng. Penderes Rus (42 th), memiliki pohon kelapa deres 20 pohon yang dideres sendiri dan 5 pohon dideres orang lain (tetangganya) dengan sistem **mendreng**. Sistem mendreng dengan kesepakatan ia disetori berupa uang oleh penyewa Rp 100.000/pohon /bulan. Menurut Rus ia mengikuti saja kesepakatan itu “ *ya kono iringkulon rada loh*” (silahkan dibagian barat itu agak subur), kata Rus “*kanca sanjan menawi betahken nggih pada entuke, nek kula butuhke ya sok jaluk tulung, le nembung rak kepenak*” (teman kumpul kalau sedang membutuhkan ya sama-sama dapat, kalau pas saya membutuhkan saya minta tolong pada dia, memintanya tidak *rikuh*). Jadi pemberian untuk menyewa pohon dengan kesepakatan itu karena ada pertimbangan Rus dan penyewa teman dekat, sering bertemu, dan ada hubungan saling menolong. Dari hasil menderes sendiri sehari dapat 8 kg gula kelapa. Setiap lima hari sekali sekitar 40-50 kg gula kelapa ia setorkan ke pengepultetangganya:

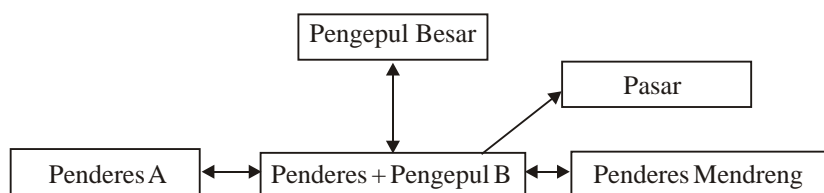
“kulasetor wetan mriku, ora sah adoh-adoh pada bae, nek kula nyambete sanes warung, kula mendet aria, diluwihi dingge modal, bayarane gula”

(saya menjualnya di sebelah timur rumah ini, tidak usah jauh-jauh sama saja, tetapi pinjaman saya bukan kebutuhan warung (sembako), saya mengambil uang, dilebihi untuk modal, membayarnya dengan setor gula)”

Rus kadang-kadang diminta membeli gula milik tetangganya, tadinya hanya satu orang, sekarang sudah empat orang penderes yang setor kepadanya. Rus kemudian juga membuka warung kecil. Tetapi menurut Rus: “*kiwa-tengen mriki setor gula dateng kula, ning boten terikat kudu adol mriki, napa blanjateng warung kula*” (tetangga kanan-kiri sini menjual gula kepada saya, tetapi mereka tidak terikat, harus jual ke sini, atau belanja diwarung saya). Menurut Rus walaupun ia berusaha seperti itu tetapi mereka juga belanja dan berhutang, katanya “*nggih pripun napa pun alame mriki ngoten*”(saya tidak tahu apa di sini memang begitu). Rusno berusaha mengambil sedikit keuntungan dari warungnya, tetapi ia membeli gula tetangganya dengan harga umumnya di lingkungannya. Termasuk penyewa *mendreng* yang setiap sepagar menjual gula kepadanya 8-10 kg. Oleh Rus gula tersebut dijual ke pedagang pasar Cilongok yang sudah jadi langganannya. Untuk menambah modal kadang-kadang Rus ikut buruh graji di perusahaan perkayuan yang ada di sekitar rumahnya mendapat upah Rp 35.000/hari, dan meminjam uang ke juragannya (pengepul) dengan sistem kontrak. Dulu pada waktu istrinya melahirkan semua kebutuhannya sampai *lapanan* anaknya dicukupi oleh juragannya ia mengembalikannya dengan setor gula. Itulah Rus yang sedang berusaha menjadi pengepul.

Pertukaran yang terjadi di sini penderes tetangganya (A) yang menjual gulanya ke Rusno setelah tahu Rusno juga buka warung (sebagai pengepul kecil) (B), walaupun Rusno 'tidak mengikat mereka untuk menjual dan belanja ke warungnya', tetapi Rusno berusaha memberikan apa yang dibutuhkan tetangganya. Ahmad tetangga Rus mengatakan “*kula biasane nedi titip nek piyambake teng pasar, bareng ono warung tiwas kebeneran tangga cedak arep nandi maneh*” (saya biasanya titip gula untuk dijual kalau dia ke pasar, setelah ada

warung malahan enak tetangga dekat mau ke mana lagi). Rus melayani penderes yang menjual gula kepadanya dan 'berhutang' di warungnya tersebut. Warungnya masih modal kecil, yang menyediakan sembako, tabung gas kecil, kayu bakar.



Skema 2. Pertukaran penderes - penderes pengepul pengepul

Pertukaran yang terjadi di sini adalah pertukaran terbatas antara penderes pengepul (Rus) dengan penderes tetangganya, antara penderes pengepul dengan penderes mendreng yang menderes pohon kelapanya, dan antara penderes pengepul dengan pengepul yang disetori gulanya, serta pedagang ecer langganannya di pasar.

Zai tidak memiliki pohon kelapa untuk dideres. Ia kemudian mengerjakan 12 pohon kelapa milik Said tetangganya. Untuk itu Zai sesuai kesepakatan harus menyetorkan gula kelapa kepada Said yang dihitung berdasarkan jumlah pohon yang diambil niranya. Setelah melihat pohon kelapa milik Said, Zai menyebutkan akan menyetorkan gula setiap satu pohon 1 kg gula kelapa/5 hari. Menurut Zai ini dilihat dari keadaan pohon kelapa yang akan dideres, ada yang cukup subur dan ada yang kurang bagus kondisinya. Maka sesuai kesepakatan setiap pasaran legi Zai menyetorkan gula kelapa kepada Said 12 kg/sepasar. Zai sendiri memperoleh kurang lebih setiap *sepasar* (5 hari) 20 kg. Sistem setoran sewa pohon seperti ini disebut *mendreng*. Sistem mendreng ini sekarang sudah jarang yang melakukan. Dalam hal ini pertukaran yang terjadi adalah Zai selaku penderes hanya memiliki modal tenaga yang ditawarkan kepada Said. Said sebagai pemilik pohon kelapa yang diambil niranya, atau sebaliknya pemilik pohon yang menawarkan kepada penderes karena Said tidak bisa menderes sendiri. Transaksi dan kesepakatan berlangsung secara verbal. Pertukaran yang terjadi di sini disebut sebagai pertukaran individual dan kedudukannya setara, karena untuk menentukan kesepakatan setoran, penderes yang menaksir kemampuan pohon kelapa, dan pemilik pohon pada umumnya menurut saja. Setelah hubungan kerja tersebut selesai maka tidak ada ikatan lagi antara pemilik pohon dengan penderes tersebut.

2. Pertukaran dan Strategi Antarpelaku Dalam Distribusi

Antarpelaku dalam distribusi gula kelapa yang dimaksud di sini adalah, penderes/ pengindiel, dan pengepul. Pengepul tersebar di perdesunan, desa, kecamatan, kabupaten. Pengepul adalah sosok yang melancarkan tata niaga gula kelapa. Para pengepul ini dalam menjalankan usahanya menjalin kerjasama yang dimulai dari pengepul dusun desa kecamatan kabupaten. Hubungan hierarki antarpengepul ini diikat oleh hubungan hutang-piutang, pinjam-meminjam uang, dan tolong-menolong benda maupun jasa.

Sebaliknya sudah bukan rahasia lagi bila sebagian besar penderes terlibat hutang-piutang dengan pengepul gula kelapa. Pengepul adalah pedagang yang membeli gula kelapa produksi penderes. Hubungan hutang piutang antara penderes dengan pengepul sudah dimulai sejak proses produksi dan turun-temurun. Pada umumnya rumah pengepul berada dekat dengan bermukimnya penderes. Jadi ada hubungan sosial yang dekat antara penderes dengan pengepul atau juragan gula kelapa. Oleh sebab itu pengepul tersebut menjadi pelanggan penderes untuk menjual gula kelapanya.

Pertukaran antarpengepul dalam tataniaga gula kelapa. Pengepul banyak bertebaran di sentra-sentra perajin gula kelapa. Pengepul besar sampai pengepul kecil

memiliki pelanggan penderes yang menyetorkan atau menjual gulanya. Ciri-ciri pada umumnya seorang pengepul adalah membuka warung di rumahnya. Kondisi warung, besar kecilnya, jumlah jualannya tergantung pada posisi pengepul apakah omsetnya besar, atau kecil. Warung milik pengepul menjadi media pelestarian hubungan antara pengepul dengan penderes pelanggannya. Ada beberapa jenis Pengepul : Pengepul kecil dan Pengepul besar.

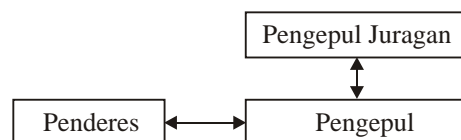
Pengepul kecil. Pengepul kecil boleh dikata jumlahnya tidak begitu banyak. Pada umumnya mereka ini menampung gula milik tetangganya yang jumlahnya kurang dari 10 penderes. Hasil setoran gula kelapa dari tetangganya itu disetorkan ke penampung yang omsetnya lebih besar. Pengepul kecil selain menunggu setoran penderes di warungnya, ada juga bakul-bakul kecil yang menyetorkan gulanya (yang gulanya diperoleh dengan mendatangi ke rumah penderes pada saat sepasaran (lima hari sekali) atau *selapanan* (35 hari) pada pasaran *legi* atau *pon*) istilahnya *mapagi*. Oleh pengepul kecil gula kelapa tersebut kemudian disetorkan kepada pengepul langganannya yang omsetnya lebih besar. Pengepul kecil dengan pengepul juragannya (yang disetori gula) juga memiliki hubungan ikatan hutang piutang, termasuk juga belanja sembako untuk kebutuhan warungnya, maupun pinjaman untuk keperluan di luar pergulaan. Salah satunya termasuk di sini pengepul Rus. Pengepul Rus menyetorkan gula ke pengepul juragannya (tetangganya) dengan pola kontrak, karena ia punya hutang kepada juragannya tersebut, sehingga ia harus menyetorkan gulanya sampai hutangnya lunas. Antarpengepul dalam satu lingkungan terdapat jalinan interaksi karena hubungan ketetanggaan dan hubungan jalinan kerjasama dalam tataniaga pergulaan maupun di luar pergulaan. Namun sistem kontrak antarpengepul perhitungan harga gulanya berbeda dengan penderes yang terikat kontrak dengan pengepul. Biasanya sistem kontrak yang berlaku antarpengepul sesuai harga kulakan atau yang berlaku di pasaran.

Pak Sobi (42 th) adalah seorang pengepul juga penderes seperti Rus. Pak Sobi mempunyai langganan penderes yang menyetori gula 15 penderes yang datang setiap *pon* dan *manis*. Pak Sobi memperlakukan penderes yang berlangganan kepadanya (penyetor tetap) berbeda dengan yang tidak langganan, tetapi semuanya dengan sistem kontrak.

“kula wong tani, deres, dados pun ngrasake rekaose kaya ngapa, mula kula ora ngetung banget-banget, nek wis langganan ya dibayar penuh apa anane, nek lagi wae isih dietung silihane, menika ya ora ngebotke, nek bade pindah setoran kedah pun lunas, nggih etungan kula sithik edhing pada butuhe”

(saya orang tani, deres, sudah merasakan bagaimana kesulitannya, makanya saya tidak menghitung rinci, kalau sudah langganan dibayar penuh apa adanya, kalau baru dihitung pinjamannya, itu juga tidak memberatkan, kalau mau pindah setornya harus sudah lunas, ya hitungan saya sama-sama dapat untuk kebutuhan).

Pak Sobi menerima setoran gula dari bakul-bakul kecil Pageraji 150 kg, ia setor ke koperasi Manggar Tuwuh 2 dacin (200 kg), tetapi pembayarannya tidak langsung (biasanya mundur 5 hari). Warung Pak Sobi juga menyediakan sembako untuk penderes yang setor gula kepadanya. Hubungan tersebut bila digambarkan sebagai berikut.



Skema3. Hubungan kerjasama penderes pengepul pengepul juragan

Pertukaran yang terjadi penderes tetangganya menyetorkan gula dan berhutang, pengepul menyediakan apa yang dibutuhkan penderes, dan penderes berkewajiban untuk menyetorkan gula kelapanya kepada pengepul, dan pengepul selanjutnya menjual gulanya kepada pengepul juragan. Jadi bentuknya pertukaran terbatas.

Hubungan dalam pemasaran gula kelapa ini sarat dengan perhitungan hubungan lainnya yang terjalin selaku tetangga dan pertolongan pada waktu saling membutuhkan, khususnya penderes sering minta pertolongan untuk keperluan hajatan, biaya pengobatan bila ada keluarganya sakit, biaya untuk membayar sekolah, memperbaiki rumah. Hubungan tersebut terjalin tali-temali tidak terputus karena ada ikatan 'pinjaman' atau 'pertolongan' tadi. Demikian juga antarpengepul, khususnya pengepul kecil dengan pengepul juragan, pinjaman lebih banyak pinjam modal.

Pengepul lainnya yaitu Pak Has. Ia memiliki 1 karyawan yang membantu usaha gula kelapanya yang pekerjaannya mengemas, dan menyortir gula hasil setoran. Pak Has mempunyai sekitar 100 penderes dan bakul kecil langganannya yang menyetorkan gula kepadanya. Jadwal penyetoran tidak seperti pada umumnya setiap *legidan wage*, tetapi *kliwon*. Pengepul Has menyetorkan gulanya ke beberapa pengepul yaitu pengepul di Sikidang 5 kuintal, di Sudimara 1 ton, ke Sendangsih 1 ton ke toko-toko 5 kuintal. Dalam menjalankan usahanya pak Hasan menjalin hubungan dengan penderes maupun bakul langganannya atas dasar “*pada percayane, sing penting ana kesanggupan, kalih sing kula setori ya pada ngono*” (saling percaya, yang penting ada kesanggupan, dengan pengepul yang disetori juga sama). Jadi menurut Pak Has kesanggupan dan kepercayaan yang melancarkan usaha gula kelapanya.

Pengepul besar. Bu Was adalah pengepul yang termasuk besar karena ia menampung setoran gula kelapa dari sekitar 200 penderes langganannya. Ia juga penyetor gula ke pengepul besar lainnya. Pengepul ini seorang perempuan (59 th), Bu Was pendidikannya SMP memiliki toko kelontong cukup lengkap isinya. Ia memulai pekerjaan sebagai pengepul sejak tahun 1969, dan memiliki jaringan perniagaan gula kelapa ke Jakarta, Cirebon, dan daerah sekitar Banyumas. Ia memiliki pembantu untuk menata gula kelapa dalam kemasan untuk disetorkan ke perusahaan 4 orang laki-laki, dua orang perempuan membantu toko, dan dua orang perempuan pengindal nira yang dihasilkan dari pohonnya sendiri sebanyak 50 pohon yang dikerjakkan dengan sistem maro, hasilnya setiap lima hari 35 kg gula

Bu Was di samping mendapat setoran gula dari penderes langganannya juga membeli dari 5 bakul kecil yang selalu setor gula setiap lima hari sekali ke bu Was. Menurutnya setelah pabrik kecap masuk ke perniagaan gula kelapa di Cilongok, kata bu Was:

“pengepul-pengepulmenika lajeng sami bersaing pados gula ingkang kathah kangge setor pabrik kecap, menawi kulo boten sambetan kaliyan pabrik kecap ning pikantuk pesenan saking pengepul Pak Suryanto sekawan ton saben sepasar Senin kaliyan Jumat”

(Pengepul-pengepul pada bersaing mencari gula kelapa sebanyak-banyaknya untuk memenuhi target yang diminta pabrik kecap, kalau saya tidak punya hubungan dengan pabrik kecap, tetapi dapat pesenan Pak Suryanto 4 ton setiap sepasar setiap Senin dan Jumat).

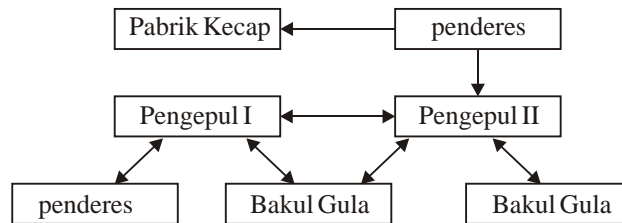
Dalam menjalankan usahanya Bu Was juga menyediakan modal untuk pengepul yang menjadi langganannya baik pengepul-pengepul kecil yang setor gula kepadanya, juga pengepul besar yang ia setori gula. Kata bu Was:

“gula mriki dipun setoraken Pak Sur piyambake setor pabrik kecap, kulo jih nyetori modal kalih dasa (juta) kangge pak Sur . . . , supados lancar . . . mrika gadah hubungan kalih pabrik kecap”

(gula bu Wasti disetorkan ke Pak Sur seorang penampung besar yang punya hubungan kerjasama dengan pabrik kecap, bu Wasti di samping menyetorkan gula ke pengepul tetapi ia juga memberikan pinjaman uang kepada pengepul tersebut supaya permintaan setoran gulanya ke pengepul tersebut terus berlangsung).

Jelas di sini bu Was memberikan bantuan modal kepada pengepul besar karena setoran

gula yang diminta kepadanya cukup besar yang disetorkan ke pabrik kecap. Ini menguntungkan usaha bu Was yang tidak punya jaringan ke pabrik kecap. Bantuan modal tersebut sebagai pengikat agar setiap setoran ke pabrik kecap Pak Sur mengambil ke bu Was (meskipun Pak Sur pengepul terbesar di Sudimoro, bahkan Cilongok). Jadi di sini pertukaran yang terjadi karena kepentingan kerjasama untuk kelancaran usaha. Pertukaran yang terjadi bila digambarkan sebagai berikut.



Skema 4. Pertukaran Antarpengepul - Penderes

Dalam jalinan pertukaran ini pabrik kecap memberi order kepada pengepul I untuk menyetorkan gula kelapa dalam jumlah besar dalam waktu yang telah ditentukan, harga dan kualitas gula juga menjadi persyaratan⁵ pabrik memberi uang panjar sebagai jaminan. Untuk memenuhi permintaan pabrik pengepul I mencari gula yang diperlukan dengan menjalin hubungan dengan pengepul langganannya, bakul/pedagang, dan penderes. Hubungan antarpengepul saling membutuhkan, saling menolong, tetapi perhitungan dalam dagang tetap berlaku. Seperti pengepul Pak Sur dan Bu Was. Pertukaran yang terjadi adalah pertukaran meluas berantai (*chain generalized exchange*), Order tersebut telah melibatkan beberapa pihak pengepul, penderes, pedagang. Tetapi di dalamnya sudah terjadi pertukaran antara pengepul dengan pabrik kecap; antara pengepul I dan II; dan antara pengepul tersebut dengan para penderes/bakul langganannya.

Seorang pengepul pak Saer. Ia di samping sebagai pengepul juga memproduksi gula kelapa sendiri atau ia menyebut 'gula toko'. Di rumah tempat usaha gula kelapanya ada 15 orang buruh, 10 orang perempuan sebagai buruh pengindiel, dan 5 orang laki-laki buruh pengemasan gula kelapa. Saer berpendidikan SMP ia juga memiliki toko sembako. Saer memproduksi gula kelapa untuk disetorkan ke pelanggan-pelanggannya diantaranya ke Jakarta setiap minggu 1 truk (8 ton), ke pabrik kecap ABC setiap lima hari sekali 5 ton. Pak Saer memiliki tenaga yang membantu 5 orang laki-laki yang bertugas mengemas, dan sortir, 10 orang lainnya adalah perempuan 10 orang.

Gula kelapa yang ia peroleh dari produksi sendiri 17 kuintal, gula setoran dari penderes 3 kw, gula dari pedagang atau pengepul lainnya 1 ton, pengepul kecil lainnya yang setor secara rutin tiap 5 hari sekali ada 10 pengepul sekitar 3 ton dari Wangon, Kawunganten, Sidorejo, Majenang. Mereka termasuk pengepul kontrak karena meminjam modal kepada Saer. Saer juga menampung jenis 'gula gagal' atau gula *gemblung*, ada yang menyebut gula *blenyik* dari para pengepul yang diproses lagi dicampur dengan gula pasir, atau disebut gula merah. Harga gula jenis ini harganya memang miring dari harga standar gula kelapa. Gula merah ini disetor ke Jakarta, diambil setiap satu minggu 1 truk berisi 8 ton. Sairi mengaku gula jenis BL (kurang bagus, gulanya kusem, prentul-prentul) dan jenis BS (gagal cetak), bisa diproses lagi menjadi gula toko.

Saer memiliki nasabah kontrak sekitar 70 orang yang hubungan itu karena mereka ada yang meminjam secara harian (belanja kebutuhan sehari-hari di warungnya), atau pinjaman setiap tahunan (lebaran), dan bila mau hajadan. Hubungan kontrak ini dicatat sebagai 'bon mati', artinya pinjaman itu harus terus dibayar dengan setoran gula sampai lunas. Saer

⁵ Standar kualitas gula kelapa yang diminta pabrik kecap antara lain tekstur keras, rasa manis, warna merah pekat, aroma harum khas gula kelapa,

menuturkan “*dekriyine kula rewangi rekasa tahun wolung dasanan buruh tani, terus nguli bakul gula, nimbangi, madhahi*”. Pada awalnya tahun 1980-an ia buruh tani kemudian bakul gula, pekerjaannya nimbang dan menata gula dalam wadah). Di situ ia banyak kenal dengan petani gula dan pedagang gula. Sekitar tahun 1994 ia berfikir untuk mandiri, ia lalu mencari pinjaman uang ke juragannya mencoba berjualan gula kelapa, pada awalnya 50 kg, pelan-pelan berjalan terus-kemudian sekarang mencapai 2-3 ton. Saer menyadari bahwa kelancaran usahanya itu karena hubungannya dengan para penderes dan bakul, pengepul kecil. Oleh karena itu kata Saer:

“kula lih penyettor (penderes, bakul) jujur apa anane, ana barang ya terus dirembug bayarane, keuangane gampang, kudu lancar, nek bon ya diladeni ramah, ngemong, kudu bisa nahan diri, usahakke maksimal, Gusti Allah sing nggariske apa sing ana, sing diwenehke, kula tampi . . . kula lampahi”.

(saya dengan penyettor jujur apa adanya, ada barang langsung dibayar, keuangan harus lancar, kalau ngebon/hutang diberi dengan ramah, dijaga hubungannya, harus bisa menahan diri, diusahakan sebaik-baiknya, Gusti Allah yang menentukan apa yang ada, yang diberikan, saya terima, saya laksanakan).

Pengepul Pak Abi. Usahanya sebagai pengepul dimulai tahun 1983. Pak Abi memiliki 17 orang pembantu sebagai pengindal, pengemas, dan pengering gula Kristal. Ia mendapat setoran gula kelapa dari 30 orang penderes langganannya. Pak Abi menyetorkan gulanya ke Jakarta setiap lima hari sekali sebanyak 3 ton. Secara rutin setor gula kristal ke pengepul Purbalingga 4 ton. Kadang-kadang oleh pengepul ini Abi diberi modal terlebih dulu sekitar 5 - 20 juta. Kata bu Abi:

“nek boten dimodali nggih rekaos, kristal regine awis dados le nglumpuke gendis kudu ono, nek Kristal niku angel le pados, nek kangelan kula telpon laporan 'pak gulane kristal angel golekan, nek dicampuri gula pasir piye pak, kula terus terang mawon'.

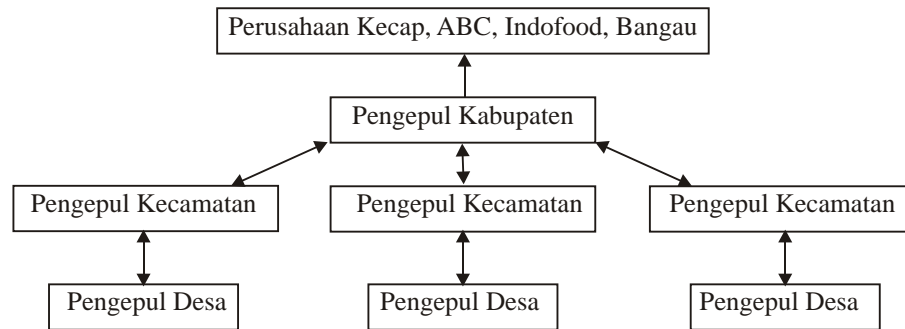
(kalau tidak diberi modal kesulitan gula kristal harganya mahal, harus dapat mencari, dan mengumpulkan sulit, kalau kesulitan, saya telpon bilang kalau gula kristal sulit mencarinya untuk setor sejumlah yang diminta, saya bilang kalau dicampur gula pasir bagaimana, saya terus terang saja)

Pengiriman satu minggu 2 kali 8 kw-1ton, kadang ngirimnya satu minggu 3 kali. Ia juga seperti pengepul lainnya memroses gula *gemblung* dicampur gula tebu menjadi gula merah/gula toko. Gula tebu mendatangkan dari Tulungagung 6 ton dalam waktu 10 hari sudah habis untuk campuran gula kelapa. Mengirim gula ke Jakarta ke Pasar Karung setiap minggu 3 ton. Bila kehabisan stok ia mengambil gula kelapa ke pengepul kecil langganannya, kadang mencari ke Majenang dan Kawunganten.

Dari pengepul Purbalingga tidak hanya diberi modal tetapi juga dipinjami alat pengering gula kristal atau oven dan ayakan. Selaku pengepul Pak Abi harus siap modal untuk berjaga bila pelanggannya sewaktu-waktu membutuhkan. Ia berusaha untuk tidak mengecewakan para penderes langganannya karena dari mereka kebutuhan gula kelapanya terpenuhi. Supaya gula tetap datang dari para pelanggannya kata bu Abi “*nek onten sing mbeler mboten kula tagih, salamine ngaten niki kula dereng tahu nagih, pangelokke*” (kalau ada yang mbeler tidak ditagih, selama jadi pengepul belum pernah menagih, menegur). Menurutny pelan-pelan akan selesai hutangnya yang penting tidak lupa menyetorkan gulanya.

Pengepul-pengepul gula di desa menguasai jaringan pemasaran gula di desa bersangkutan. Selanjutnya pengepul juga punya juragan langganan yang akan membeli gulanya di tingkat kecamatan, dan seterusnya pengepul di tingkat kecamatan akan melempar dagangan gulanya ke tingkat kabupaten. Pengepul gula yang beromset besar biasanya pelanggannya adalah pengepul-pengepul kecil di tingkat desa. Jadi ada jaringan antarpengepul dalam perdagangan gula kelapa. Antarpengepul gula kelapa beromset besar

(tingkat kecamatan, kabupaten) ada yang bekerjasama untuk penyetoran gula kelapa ke pabrik kecap Indofood, Bango, ABC. Bahkan bekerjasama sampai ke peminjaman modal. Hubungan kerjasama antarpenggepul dalam tata niaga gula kelapa di tingkat desa bersifat ekonomi dan non ekonomi, tetapi dari tingkat kecamatan-kabupaten dan pabrik-pabrik kecap, minuman dan makanan murni bersifat ekonomi. Bila digambarkan jalinan kerjasama tersebut sebagai berikut.



Skema 5. Jaringan Antarpenggepul Dalam Perdagangan Gula.

Hampir bisa dipastikan seorang penggepul gula kelapa dari yang beromset besar sampai yang kecil memiliki sebuah warung sembako. Warung sembako tersebut menjadi media bagi penggepul gula untuk mengikat penderes harus menjual gulanya ke penggepul tersebut. Ketika bu Zain menyetorkan gulanya pas pasaran legi sebanyak 80 kg ke seorang penggepul langganannya ia menerima pembayaran dari penggepul setelah dikurangi pinjaman belanja sembako. Harga jual gulanya dikurangi oleh penggepul tidak seharga pasaran pada saat itu, misalnya Rp 15.000/kg, menjadi Rp. 14.700. Bagi Bu Zain hal itu sudah '*pada-pada*'. Maksudnya ia sudah banyak ditolong, mengambil kebutuhan seperti beras, gula pasir, sabun, minyak goreng, sekarang harganya dikurangi oleh juragan, katanya '*wis pantese, kabeh ngono*' (sudah sepiutnya semua seperti itu). Demikian juga Muhsid, walaupun ia punya pohon kelapa 100, pekarangan dan tegalan ditanami kayu seperti jati, albasia, mahoni, ia menderes sendiri miliknya, langsung dimasak gula dan dijual ke penggepul tetangganya. Istrinya bekerja sebagai buruh pengindal di penggepul tersebut mendapat upah Rp 30.000/hari. Istri Muhsid juga pinjam sembako di warung juragan, harga pembelian juga dikurangi karena ia masih punya pinjaman kepada juragan. Menurut Muhsid ia tidak akan pindah ke juragan lain, meskipun harganya '*ono kacekane*' (ada bedanya), *kuwi ora bener, kuwi menthung* (itu tidak baik, itu membalas tidak baik). Penderes Rafik, sewa 20 pohon, setiap 1 pohon ia membayar 1 kg/sepasar, gula kelapa dijual ke penggepul dibayar Rp 11.000, harga pasaran Rp 12.000. Menurut Rafik, harga kontrak dikurangi agak banyak karena ia masih hutang banyak, baru saja ia mengkhitan anaknya, semua pelaksanaan dibiayai penggepul. Sebagian ia kembalikan dari uang sumbangan, tetapi tetap hutangnya masih banyak. Setelah itu penggepul tidak mau pengembalian dalam bentuk uang tetapi diangsur dengan gula

Sebelum proses produksi dimulai penderes/pengindal sudah terlibat transaksi dengan penggepul. Pada umumnya penggepul sudah memberikan pinjaman. Transaksinya adalah berantai terus menerus mengikat penderes/pengindal dalam usaha gula kelapa. Penggepul menginginkan hasilnya yaitu gula kelapa menjadi miliknya. Bentuk pengikatnya ada yang uang atau barang sesuai kebutuhan penderes/pengindal. Sementara itu penderes/pengindal membutuhkan uang atau barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Oleh karenanya untuk kelangsungan usaha gula kelapanya penderes harus melaksanakan pekerjaannya untuk mendapatkan nira. Bagi penderes/pengindal, nira adalah modal penting yang dia miliki untuk mendapatkan semua kebutuhan yang dia inginkan. Penggepul memanfaatkan posisi penderes/pengindal dengan memberikan perhatian kepada penderes/pengindal, karena menginginkan nira itu menjadi 'miliknya'. Penggepul selalu

berusaha untuk menawarkan pinjaman uang atau barang-barang kebutuhan penderes/pengindel. Pada saat proses produksi berlangsung penderes sudah bisa menghitung perolehannya.

Bila ada ikatan peminjaman antara Penderes/pengindel dengan Pengepul, berarti mereka ini mempunyai hubungan kontrak dengan pengepul untuk menyetorkan gula kelapanya kepada pengepul sampai jumlah pinjaman lunas. Di sinilah sistem kontrak yang ditanamkan pengepul kepada para penderes/pengindel menjadi tidak terputus, terus berlangsung dari waktu ke waktu. Peminjaman uang atau barang dari pengepul menjadi lebih meluas, tidak hanya kebutuhan sehari-hari saja tetapi sampai pada pinjaman untuk pernikahan, khitanan, sekolah, sakit, bahkan boleh dikatakan semua kebutuhan penderes bisa dipenuhi oleh pengepul. Pinjaman atau “pertolongan” tersebut harus dibayar dengan setoran gula kelapa ke pengepul. Inilah sebenarnya rantai yang tak terputus, pinjaman yang dimaknai sebagai “pertolongan” oleh penderes. “Pertolongan” ini dalam pergaulan Jawa harus diimbangi dengan ‘pemberian balasan’ yaitu menjual gulanya kepada ‘penolongnya’ sesuai kontrak. Seperti disampaikan oleh Muhsid, bahwa sejak dia menderes sampai sekarang menyetorkan gulanya kepada pengepul tetangganya itu. Ia mengatakan tidak akan pindah ke pengepul lain. Katanya : *“arepa sik mrika regane luwih kacek, ning ora bener, ora apik wis ditulung kok menthung”* (walaupun yang di tempat lain itu harganya lebih baik, tetapi tidak benar, tidak baik sudah ditolong malah membalas tidak baik).

Namun ada juga penderes/pengindel Pak Amin, yang pada saat proses produksi menjual gula ke pengepul (tidak semua) dan penderes tersebut juga tidak mengambil kebutuhan belanja ke warung pengepul. Ia berusaha tidak terikat kontrak dengan pengepul. Katanya: *“nek adol maring juragane, tapi semah kula ora blanja, nggih ditawari werna-werna ning apa butuhe mawon”* (kalau menjual gula ke pengepul, tetapi istrinya tidak belanja, walaupun ditawari tetapi sesuai kebutuhan). Pak Amin tidak ingin terikat, ia bisa bebas menjual gulanya kepada siapa saja yang mau membeli dengan harga bagus biasanya dengan pedagang gula langganannya yang mengambil kerumahnya. Dengan pedagang gula ini tidak ada ikatan. Tetapi kata Pak Amin: *“ nek pas butuh sik penting, butuh kathah nggih kontrak karo juragane, pun tahu nyilih rong yuta, pun rampung(kalau ada kebutuhan yang penting ia juga ikut kontrak, sudah pernah pinjam dua juta, sudah lunas dibayar gula).* Maksudnya Pak Amin masuk sistem kontrak tetapi ia tidak membuat pinjamannya itu menjadi panjang dengan cara tidak menambah pinjaman dari belanja warung.

Istri Muhsid juga bekerja sebagai pengindel (memasak gula kelapa) di pengepul yang disetori gula tersebut. Saat itu gulanya dihargai Rp. 12.000/kg oleh pengepul, tetapi karena ia berhutang kepada pengepul harganya dikurangi menjadi Rp. 11.800,-. Bagi Muhsid pengurangan harga gulanya oleh pengepul dari harga yang berlaku, menurutnya sudah pada tempatnya, katanya:

‘lhah . . . piye nyilih ngenggon . . . wis regane, kawit desit sik nganani nek butuh piyambake, arepa ana sik mbayari luwih, ya ora . . ora apik, gentenan, aku butuh blanja nyukupke omah, piyambake pancen gaweane nglumpuke gula, nulungi sik butuhe kene, . . . kene menehi gula, mik cedak tanggane dewe kari ngulungke . . . rak uwis pada entuke. . . umum ngoten niku “

(sudah langganan supah sepantasnya, sejak dulu semua kebutuhan pengepul yang membantu, walaupun ada yang mau membeli lebih dari harganya, tetapi tidak baik kalau dijual selain dia, gantian, saya butuh kebutuhan rumah cukup, pengepul memang pekerjaannya mencari gula, tetapi ia menolong kebutuhan penderes dulu. . . penderes memberi gula, hanya dekat tetangga sendiri, tinggal memberikan . . . sudah sama-sama dapatnya, . . . pada umumnya sini begitu)

Pertukaran yang berlangsung antara Muhsid dengan pengepul adalah Muhsid

memberikan hasil gula kelapanya kepada pengepul tetangganya sebagai keharusan bagi Muhsid karena pengepul tersebut sejak dulu menjadi tempat ia mendapat pertolongan. Pertolongan tersebut tidak hanya untuk kebutuhan dapur sehari-harinya tetapi juga keperluan lainnya. Kata Muhsid:

“ragade dinggo kelumrahan teng dusun mriki prasasat juragan sik nulungi, arep ngrabekke, apa ta apa pun jur nembung, balekake wektune dawa . . . bayare gula wong duwene gula... nek arta malah ora gelem ijole cukup gula . . . ”

(Biaya untuk 'kelumrahan' di dusun sini hampir semua juragan (pengepul) yang memberi bantuan, mau menikahkan anaknya, apa saja kebutuhannya langsung bilang, pengembaliannya waktunya panjang, pembayarane gula karena punyanya gula ... kalau uang malah tidak mau mintanya gantinya cukup gula...)

Apa yang disampaikan oleh Muhsid menunjukkan bahwa hampir semua kebutuhan dia baik untuk kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk ongkos sosial dalam bermasyarakat dapat dipenuhi berkat bantuan (pinjaman) dari pengepul (pinjaman kalau sakit, hajadan, sekolah, perbaikan rumah). Bantuan inilah yang secara sosial sulit diukur yang memberikan pemahaman kepada Muhsid bahwa pertolongan itu sudah sepantasnya bila dibalas dengan memberikan keuntungan kepada penolongnya. Di lain pihak pengepul kehidupannya bergantung pada perdagangan gula kelapa, berusaha untuk terus menjalin hubungan baik dengan para pelanggannya (penderes) yaitu berusaha menjamin semua yang dibutuhkan pelanggannya supaya tidak memberikan gulanya ke pengepul lainnya. Untuk itu pengepul berusaha mencari pinjaman modal ke pengepul yang ia setori gula kelapanya. Pertukaran yang terjadi antara penderes dan pengepul ini disebut pertukaran individual (*individual focused*) yang karena posisinya tidak sama cenderung ke hubungan *patronage*.

Kondisi inilah yang memungkinkan hubungan kerjasama penderes dan pengepul terus berlanjut, sulit diputus, karena ada pemaknaan dari penderes tentang pertolongan dari pengepul sebagai 'sesuatu yang sangat berarti' dalam hidup dan kehidupannya dalam bermasyarakat. Hubungan itu tampak dari sikap Muhsid, meskipun ia mempunyai pemasukan lain untuk mencukupi kebutuhannya, tetapi ia tetap memelihara hubungan dengan berhutang kepada pengepul tetangganya tersebut. Bagi Muhsid gula kelapa yang dimilikinya menjadi modal satu-satunya untuk dipertukarkan dengan berbagai kebutuhan yang dimiliki pengepul. Modal penderes adalah pohon kelapa dan tenaga untuk mendapatkan gula kelapa. Pengepul memiliki modal uang, dan akses pasar. Pertukaran yang bersifat ekonomi terjadi karena pengepul dan penderes saling membutuhkan, pengepul membutuhkan gula kelapa sebagai modal berdagang, perajin gula kelapa atau penderes butuh pasar untuk menjual gulanya. Pertukaran ini menjadi sesuatu yang mengikat karena berlangsungnya pertukaran yang bersifat non ekonomi, misalnya pengepul diminta oleh penderes untuk membiayai pernikahan atau khitanan anaknya, atau biaya sekolah, sakit, membetulkan rumah, yang pembayarannya dengan gula kelapa. Seorang pengepul menyebutkan ada beberapa penderes langgananya yang sudah lebih 10 tahun pinjaman biaya pernikahan anaknya belum lunas.

Penderes yang terikat dengan seorang pengepul menjadi anggota pengepul bersangkutan. Antarpenderes anggota pengepul tersebut saling kenal dengan baik, setiap *selapan* mereka ketemu untuk menyetorkan gulanya kepada pengepul. Tetapi setiap penderes memiliki ikatan atau hubungan kontrak yang tidak sama dengan pengepul. Dalam arti tebal tipisnya ikatan itu tergantung pada 'pemberian pertolongan' yang diberikan oleh pengepul kepada penderes yang sifatnya non ekonomi. Macam dari pertolongan tersebut juga dipengaruhi oleh sejumlah gula yang mampu disetorkan oleh seorang penderes kepada pengepul. Penderes yang biasa menyetorkan gula dalam jumlah cukup banyak juga akan mudah mendapatkan 'pertolongan' dari pengepul dalam jumlah yang diinginkan. Sebaliknya penderes yang setoran gulanya sedikit 'pertolongan' yang diberikan pengepul juga terbatas.

Muhsid memiliki sumber ekonomi tidak hanya dari usaha gula kelapa, tetapi ia juga petani yang memiliki lahan garapan seluas 40 *sangga* (1 *sangga*=70 m), jadi luasnya 280 m². Lahan tersebut ditanami padi 2 kali, kacang dan bodin (ketela 1 kali.). Ia juga punya tegalan luasnya sebahu (100 *sangga*), ditanami pohon kelapa, kayu (albasia, bambo, jati, mahoni), dan buah-buahan duku, kokosan, durian. Untuk memasak nira ia tidak pernah beli kayu, tetapi mencari di kebunnya sendiri.

Pada umumnya dalam usaha gula kelapa, penderes memiliki strategi untuk menambah pendapatan. Satu diantaranya adalah menambah garapan pohon kelapa yang dederes, atau sewa maro milik tetangga. Biasanya cara itu ditempuh karena pohon kelapa deres miliknya jumlahnya tidak banyak, atau hasil nira sedikit. Penderes yang niranya diperoleh dari menderes pohon kelapa milik sendiri, hasilnya lebih bisa dirasakan, karena perolehan dari hasil produksi nira bisa langsung dimanfaatkan, dan perolehannya menjadi bertambah dari sewa maro. Sebaliknya, ada penderes yang memiliki pohon kelapa cukup banyak, tidak semuanya dederes sendiri tetapi ada beberapa yang disewakan, hal ini dilakukan karena pertimbangan usia yang sudah tua, atau melihat harga pasaran yang kurang bagus, menolong orang lain supaya punya penghasilan. Beberapa usaha gula kelapa atau penderes pemilik pohon ada yang pelan-pelan mencoba menjadi pengepul kecil di lingkungannya.

Apa yang disampaikan penderes dalam hubungannya dengan pengepul menunjukkan bahwa mereka merasa hidupnya ditolong oleh pengepul, sehingga ketika gula yang dijual tidak dihargai sesuai harga pasaran, mereka merasa hal itu sudah sepantasnya. Penderes tidak merasa dirugikan, karena telah ditolong, ada balasannya. Hanya saja pinjaman itu adalah kiat pengepul untuk mengikat penderes selalu setia menyetorkan gulanya kepada pengepul. Pengepul selalu menawarkan belanja sembako kepada penderes secara berulang, dan dibayar dengan setoran gula. Sistem seperti ini disebut kontrak.

Setiap sepaasaran pon dan legi penderes ramai mendatangi pengepul langganannya untuk menjual gula dan belanja. Pada saat itu terjadi transaksi sosial dan ekonomi secara timbal balik antara pengepul dan penderes. Pengepul menjadi penolong kebutuhan penderes dari menyediakan sembako untuk kebutuhan sehari-hari sampai kebutuhan lainnya seperti membeli sepeda, membiayai pernikahan anak, membiayai khitanan, sekolah, biaya sakit di rumah sakit, dan sebagainya. Menurut mereka “*paribasan nek duwe hajad ora kewirangan*”.

Posisi pengepul di tingkat desa, kecamatan, kabupaten menguasai tata niaga pergulaan. Mereka tidak hanya kuat dalam perniagaan gula kelapa, tetapi dalam kehidupan sosial mereka adalah penyumbang tetap setiap desa (tempat mereka berdomisili) yang membutuhkan biaya untuk memperbaiki jalan, memperbaiki kantor desa, sumbangan khitanan masal, peringatan 17 Agustus. Peran mereka ini melegitimasi posisinya selaku pengepul di lingkungannya. Setiap lebaran mereka juga memberikan hadiah kepada penderes, bakul yang menjadi langganannya menyetorkan gula kepadanya, ada yang berupa sembako, pakaian/kaos dan uang, atau kue-kue lebaran.

Boleh dikata peran pengepul dalam tata niaga gula kelapa sangat menentukan, baik pengepul tingkat lokal, pengepul kecil sampai besar. Pengepul di dalam menjalankan usahanya sangat tergantung kepada para penderes yang memproduksi gula kelapa, oleh sebab itu mereka mengikat para penderes dengan 'pertolongan-pertolongan' yang dianggap sangat bernilai bagi penderes dalam memenuhi kebutuhan ekonomi maupun sosialnya. Pengepul juga perhatian memberi hadiah lebaran kepada anggota pelanggannya. Pengepul juga berperan memberi bantuan untuk kepentingan lokalitasnya (desa, kecamatan) perbaikan jalan, perbaikan saluran air, untuk peringatan hari besar dan sebagainya. Semuanya itu telah melegitimasi kehadiran pengepul dalam tata niaga gula kelapa.

Pertolongan-pertolongan pengepul kepada penderes dengan sistem kontrak yaitu ikatan hutang, menjadi strategi hampir semua pengepul di Banyumas (Astuti, W, dkk, 2007, Widyaningrum, N., dkk., 2003, Supomo, 2007). Pola ini melanggengkan pertukaran yang berlangsung, dan dengan demikian akan menjadi rantai yang tidak terputus karena di situ ada nilai-nilai yang dibutuhkan atau 'bermakna' bagi penderes yang merasa 'ditolong'.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam usaha gula kelapa, peranan penderes dan pengindel sangat penting, bahkan menentukan jalannya produksi gula kelapa. Nira sangat dibutuhkan sebagai bahan dasar untuk pembuatan gula kelapa. Nira hanya bisa diperoleh dari kepiawaian penderes untuk '*menek* pohon kelapa', dan melakukan penderesan sesuai kemampuan dan pengatahuannya. Pekerjaan penderes penuh risiko, tetapi risiko yang setiap waktu menemani penderes ketika naik pohon belum diperhitungkan dalam tata niaga gula kelapa. Nira hasil menderes, tanpa langsung diproses akan tidak berguna, karena mudah rusak, di sinilah peran pengindel atau pemasak nira menjadi gula kelapa.

Dalam proses produksi peran penderes sebagai pencari bahan dasar dan seorang pengindel menentukan proses produksi nira menjadi gula kelapa atau gula jawa. Tenaga kerja dalam usaha gula kelapa dominan yang mengerjakan suami dan istri. Walaupun pembagian pekerjaan bersifat tegas, tetapi jalinan kerja bersifat kerjasama. Dalam hal ini istri pemegang otoritas penjualan gula kelapa, dan manajemen usaha kelapa cenderung dipegang oleh istri. Pada umumnya dalam proses produksi mereka sudah terikat kontrak dengan pengepul.

Relasi yang terbangun antara pengepul dengan penderes berkaitan dengan produksi dan distribusi gula kelapa sangat ditentukan oleh hubungan kontrak antara pengepul dengan penderes. Kiat pengepul untuk melanggengkan hubungan dengan penderes adalah dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan keseharian pelanggannya, sampai pada kebutuhan-kebutuhan khusus lainnya. Bisa disebutkan bahwa penderes adalah aset, modal kerja bagi pengepul. Oleh karenanya untuk mempertahankan asetnya pengepul juga menempuh risiko, yaitu menyiapkan modal besar untuk memenuhi kebutuhannya.

Usaha penguasaan pengepul atas penjualan gula kelapa dari penderes ke usahanya dilakukan dengan sistem kontrak. Banyak tulisan dan penelitian yang menyebutkan sistem kontrak, telah menjadi penyebab tetap miskinnya para penderes gula kelapa. Mereka menyebut telah terjadi eksploitasi. Namun, Apa yang telah dilakukan pengepul kepada penderes dianggap penderes sebagai "pertolongan". Mungkin anggapan inilah yang telah mendukung melanggengkan sistem kontrak di kalangan perajin gula kelapa.

Dalam sistem distribusi gula kelapa sifatnya hanya pendek, dari produsen langsung ke pengepul. Pengepul yang mendistribusikan lebih luas lagi. Bagi penderes distribusi terserbut relatif menguntungkan (1) karena tempatnya dekat, penderes tidak mengeluarkan ongkos transport, (2) pemasaran terjamin karena sudah ada penyalurnya, (3) sudah kenal, dan semua kebutuhannya terpenuhi. Namun, sistem kontrak dan pemotongan harga di bawah harga pasar oleh pengepul, menjadi satu dari factor penderes hidupnya dalam kemiskinan. Di lain pihak, penderes menganggap hal itu sesuatu yang wajar, karena bagi penderes/perajin gula, pengepul sudah menolong mereka.

Jadi jalinan pertukaran antara pengepul dan penderes yang berlangsung di daerah penelitian telah mengikat hubungan antara penderes dengan pengepul. Pengepul yang memberi harapan kecukupan kebutuhan kesehariannya, bahkan terselamatkannya mereka

dari posisi pergaulan sosial di masyarakat. Hal ini menjadikan rantai hubungan tersebut sulit diputuskan. Latar belakang bahwa mereka adalah tetangga di lingkungannya telah ikut mewarnai penilaian penderes dengan pengepul, dan sebaliknya.

B. Saran

1. Gula kelapa merupakan komoditas penting, perlu ada pemikiran untuk mengurangi risiko yang harus diterima penderes ketika naik pohon.
2. Kelompok-kelompok petani gula kelapa perlu diberdayakan, supaya aspirasi perajin gula kelapa bisa terwadahi melalui organisasi ini
3. Perlu ada regulasi harga gula kelapa dari penderes yang akan dibeli pengepul, supaya penderes tidak banyak dirugikan oleh pengepul.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahimsa-Putra, H.S., 1994. "Prinsip Pranata Keluarga, Kekerabatan, dan Kerjasama Dalam masyarakat : Perpektif Pertukaran *Makalah Ceramah* Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan daerah", Balai Kajian Jarahnitra, Yogyakarta.
- Ahimsa-Putra, H.S., 2003. "Prologue: Dari Ekonomi Moral, Rasional, ke Politik Usaha", dalam *Ekonomi Moral, Rasional dan Politik Dalam Industri kecil Jawa*, oleh Heddy Shri Ahimsa-Putra (Penyunting). Yogyakarta: Kepel Press.
- Badan Pusat Statistik, Kab. Banyumas, 2011. Kecamatan Cilongok *Dalam Angka*, 2011.
- Dinas Perindagkop, Kab. Banyumas, 2010. *Industri Kecil*, Kab. Banyumas, 2010.
- Firdaus, M., dan Ratih, D., 2004. "Situasi Tanpa Perlawanan (Penelusuran Kondisi Perempuan Usaha Mikro di Jawa Tengah)". *Jurnal Perempuan*. No. 35, Jakarta.
- Hermawati, W., dan Pariyo, P., 2000. *Studi Peningkatan Kemampuan Industri Rumah Tangga Gula Kelapa Di Kecamatan Kebasen, Kabupaten Tk II Banyumas*. Provinsi Jawa Tengah. Jakarta: Pusat Analisa Perkembangan Iptek-LIPI.
- Kuswerdiningsih, R. E., 2005. *Kausalitas Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Gula Kelapa di Kecamatan Eonosegoro, Kabupaten Boyolali*. Tesis. Surakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Muhamadiyah Surakarta.
- Marijan, K., 2005. "Mengembangkan Industri Kecil Menengah Melalui Pendekatan Kluster". *Insan*, Vol.7 No.3, Desember. Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.
- Mulyoutami, E. P., dan Retno, S., 2003. "Pemusatan Pasar Pada Usaha Mikro di Pedesaan". *Jurnal Analisis Sosial*, Vol.8, No.1, Februari.
- Mulyanto, D., 2011. "Ekonomi Pekarangan di Pedesaan Jawa: Studi Kasus di Sebuah desa di Banyumas Jawa Tengah". *Jurnal Komunitas*, Vol. 5, No. 2, September.
- Praditya, M., 2010. *Analisis Usaha Industri Gula Jawa Skala Rumah Tangga di Kabupaten Wonogiri*. Skripsi UNS (Digilib.uns.ac.id).
- Prasodjo, S., 2001. *Pemberdayaan Perajin Gula Kelapa Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan*. Purbalingga: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.
- Rahardjo, D. M., 1984. *Transformasi Pertanian, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Rufaidah, E., 2005. "Analisis Sistem Pemasaran Gula Kelapa Pada Industri Rumah Tangga di Labuhan Ratu, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur". *Jurnal Sains dan Inovasi*, No.1, Januari: 29-38
- Sumintarsih, 2003. "Merajut Kerjasama Menjangkau Pasar", dalam *Ekonomi Moral, Rasional dan Politik Dalam Industri Kecil di Jawa* oleh Heddy Shri Ahimsa-Putra (Penyunting). Yogyakarta: Kepel Press.
- Supomo, 2007. "Meningkatkan Kesejahteraan Pengrajin Gula Kelapa di Wilayah Kabupaten

- Purbalingga". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol.12, No.2, Agustus.
- Supriyati dan Erma, S., 2006. "Peranan, Peluang dan Kendala Pengembangan Agroindustri di Indonesia". *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol 24, No 2, Desember .
- Tambunan, T., 2001. *Industrialisasi di Negara Sedang berkembang*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Widayanti R., A., 2011. *Evaluasi Kemitraan Antara PT. Samudra Jaya Abadi Dengan Petani Pembuat Gula Kelapa Mitra, di Kabupaten Ciamis*. Skripsi. Bogor: Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Widyaningrum, N., 2003. "Eksplotasi Terhadap Pengusaha Kecil Melalui Rantai Hulu-Hilir". *Jurnal Analisis Sosial*, Vol. 8 No.1 Februari.
- Widyaningrum, N., dkk., 2003. *Pola-Pola Eksplotasi Terhadap Usaha Kecil*. Bandung: Yayasan AKATIGA.
- Yuharminingsih dan Stiana, R., 1997. "Prospek dan Kendala Industri Gula Kelapa (kasus di Kelurahan Hargomulya, Kokap, Kulonprogo)". *Buletin Ekonomi*, No 2, Tahun Pertama, April.
- "Tangis Pilu Para Janda Penderes Nira", Yoga Putra, <http://nasional.kompas.com>, 11 Oktober 2009
- "Kemarau Produksi gula Kelapa Turun", <http://suaramerdeka.com>, 27 Juni 2008
- "Ratusan Ijazah SMP Siap Dilelang", <http://www.suaramerdeka.com>, 12 Februari 2011
- "27 Penderes Nira Tewas Tahun 2009". <http://regional.kompas.com>, 12 Januari 2010 ;
- "<http://nasional.kompas.com>, 11 oktober 2009

INFORMAN

| Nama | Pekerjaan | Pendidikan |
|------------------|---|------------|
| Surais | Pemilik pohon kelapa disewakan | SMA |
| Rusno | Penderes milik, dan disewa sistem mendreng | SD |
| Amin | Penderes sewa maro | SD |
| Rafik | Penderes sewa maro | SD |
| Muhsid | Penderes pemilik pohon kelapa | SD |
| Sabar | Pengepul, penderes | SD |
| Sura | Pengepul | SMP |
| Wasi | Pengepul | SMP |
| Subar | Pengepul | MPS |
| Zain | Pengepul | SD |
| Saryadi | Pengepul | SD |
| Ir. Sri Gito | Kasi Industri Pertanian dan Kehutanan, Ketua Appebuki | S1 |
| Muh. Bukron | Kasibang Desa Pageraji | SMA |
| Waryoko, SE | Kades Desa Sudimara | S1 |
| Ngajib Mustangin | Sekdes Desa Sudimara | SMA |

DAMPAK PEMBANGUNAN JEMBATAN SURAMADU TERHADAP MOBILITAS DAN KONDISI SOSIAL BUDAYA PENDUDUK (KASUS LIMA KELUARGA DI DESA PANGPONG, KECAMATAN LABANG, KABUPATEN BANGKALAN)

Ernawati Purwaningsih

Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta
Jalan Brigjen Katamso 139 Yogyakarta
e-mail:ernawati_purwaningsih@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi kondisi wilayah, mobilitas, dan sosial budaya penduduk Desa Pangpong, pasca pembangunan Jembatan Suramadu. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa wilayah Desa Pangpong mengalami perubahan pasca pembangunan Jembatan Suramadu. Pada awalnya sebagai daerah terisolir, kini sudah terbuka, sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, maupun jasa lainnya semakin terpenuhi. Mobilitas penduduk juga berubah pada sebagian masyarakat Desa Pangpong. Penduduk yang semula melakukan mobilitas permanen atau seminggu sekali, kini menjadi pelaku mobilitas ulang alik. Walaupun demikian, kondisi sosial budaya penduduk Desa Pangpong belum mengalami perubahan yang signifikan. Mereka masih tetap menjaga tradisi maupun tatanan yang telah mereka jalani selama ini. Kehidupan agamis masih kental, dan kiai masih tetap mempunyai peran yang kuat di masyarakat dalam mengambil kebijakan. Perubahan kehidupan sosial kemasyarakatan belum begitu tampak, meskipun pengaruh modernisasi sudah mulai terjadi.

Kata kunci: mobilitas, sosial budaya, Jembatan Suramadu

THE IMPACT OF SURAMADU BRIDGE BUILDING TOWARDS SOCIETY'S MOBILITY AND SOCIO-CULTURE CONDITION (CASE OF FIVE FAMILIES IN PANGPONG VILLAGE, LABANG SUB DISTRICT, BANGKALAN DISTRICT)

Abstract

The research have a purpose to make a description about area condition, mobility, and socio-culture of Pangpong village society after the Suramadu bridge was built. This research is using descriptive qualitative analyzing methods. The result of the research shows that Pangpong village area change significantly after Suramadu bridge was built. At first, the village was an isolated area, but now it already have numerous access, facilities such as education, health and trading and another means of economy is already exist. Society's mobility also changed for part of Pangpong village peoples. People who used to have a permanent mobility or every once a week, now change to shuttle mobility. But the socio-culture condition of Pangpong village society has not change significantly. They still regard their tradition and norm highly. Religious life is still important, and scholars still have a significant role in making policy. Change in Socio-community is not to significant, but the modernizations is already happening

Keywords : mobility, socio-culture, Suramadu bridge

I. PENDAHULUAN

Dalam upaya pemerataan pembangunan, termasuk pembangunan di Pulau Madura, maka dibangun jembatan yang menghubungkan Pulau Madura dan Pulau Jawa yang lebih dikenal sebagai Jembatan Suramadu. Dengan dibangunnya Jembatan Suramadu, diharapkan hubungan kedua pulau semakin mudah, pengembangan pembangunan wilayah di Pulau Madura dapat terwujud, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Madura.

Pencetus ide pembangunan Jembatan Suramadu adalah Raden Panji Haji Muhammad Noer.¹ Pembangunan Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa (Surabaya) dengan Pulau Madura (Bangkalan) diharapkan dapat untuk mengembangkan wilayah di Pulau Garam tersebut. Melalui proses yang panjang dan rumit, akhirnya jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa (Surabaya) dengan Pulau Madura (Bangkalan) dapat terwujud (Muthmainnah, 1998:51).

Pembangunan Jembatan Suramadu memudahkan mobilitas antar pulau (Jawa-Madura). Sebelum dibangunnya Jembatan Suramadu, mobilitas penduduk antara Pulau Madura dengan Pulau Jawa relatif sulit, mahal dan lama, karena hanya mengandalkan transportasi laut. Dengan dibangunnya Jembatan Suramadu, mobilitas antar pulau tersebut relatif lebih mudah, waktu tempuh juga semakin pendek dan biayanya lebih murah. Waktu tempuh dari Surabaya menuju Bangkalan yang semula menggunakan kapal selama 30 menit, dengan adanya Jembatan Suramadu cukup ditempuh 5-10 menit. Biaya naik kapal sekitar Rp 60.000,00 per orang dari Bangkalan ke Surabaya atau sebaliknya, setelah ada Jembatan Suramadu biaya menyeberang Selat Madura menjadi lebih murah yaitu untuk tarif motor Rp 3.000,00, dan tarif mobil Rp 30.000,00.

Pembangunan Jembatan Suramadu semakin memudahkan mobilitas penduduk antara kedua pulau tersebut. Masyarakat Madura dikenal sebagai masyarakat perantau, baik di Pulau Jawa maupun di luar Jawa, sehingga dengan dibangunnya Jembatan Suramadu, mobilitasnya semakin tinggi. Mobilitas yang dilakukan oleh masyarakat Madura salah satunya disebabkan kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Kondisi tanah yang kurang subur mendorong masyarakat Madura melakukan mobilitas dengan tujuan mencari nafkah di daerah lain. Sebagaimana dikemukakan Subahianto dalam Trisna bahwa masyarakat di Pulau Madura dikenal miskin dan terbelakang. Tekanan kehidupan sosial ekonomi yang berat memaksa mereka merantau ke daerah lain untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Dengan adanya pembangunan Jembatan Suramadu, semakin memudahkan masyarakat Madura untuk melakukan mobilitas (<http://trisna.student.umm.ac.id/2010/02/05/reformasi-kehidupan-masyarakat-madura-pasca-suramadu/>).

Pembangunan Jembatan Suramadu dan industrialisasi Madura secara teoritis merupakan salah satu wujud inovasi yang mengawali perubahan sosial. Berawal dari perubahan sosial, menimbulkan permasalahan sosial budaya yaitu kesenjangan sosial, kemiskinan, pergeseran nilai lokal, masalah kriminalitas, masalah lingkungan hidup (<http://sosialcorner.com/analisa-dampak-sosial-budaya-pasca-pembangunan-jembatan-suramadu-dan-industrialisasi-madura>)

Findley (1977 dalam Keban, 1996:138) mengungkapkan bahwa dampak sosial dari mobilitas adalah perubahan ekonomi. Mobilitas secara tidak langsung, cepat atau lambat dapat membawa dampak lanjutan yang cukup luas pada tingkat individu, daerah tujuan, daerah asal, dan tingkat nasional. Masyarakat Pulau Madura yang dikenal sebagai perantau mempunyai ikatan erat dengan daerah asalnya. Ikatan dengan daerah asal terlihat dari remitan yang dikirimkan ke daerah asal. Selain uang, juga terjadi *transfer knowledge* ke daerah asal yang berdampak pada perubahan sosial budaya di daerah asal.

Desa Pangpong merupakan salah satu desa di Kecamatan Labang yang terkena dampak pembangunan Jembatan Suramadu. Dalam rencana awal pembangunan, akan dibangun jalan tol dari Desa Pangpong menuju Tanjung Bumi. Setelah dilakukan pengukuran, pembangunan jalan tol harus menggeser 25 tanah milik warga Desa Pangpong. Dari 25 tanah tersebut,

¹ Raden Panji Haji Mohammad Noer adalah putera Madura yang dilahirkan di Kampung Beler, Desa Rong Tengah di pingiran Kota Sampang, 13 Januari 1918. Mohammad Noer pernah menjadi Bupati Bangkalan periode 1960-1965, Dubes Indonesia untuk Perancis tahun 1976-1980, anggota DPA, MPR dan rektor Unibang periode 1985-1989.

meliputi bangunan masjid, Pondok Pesantren Tarbiyatul Islam, serta tanah dan rumah 17 warga yang harus direlakan untuk pembuatan jalan tol (Muthmainnah, 1998:165).

Warga Desa Pangpong begitu mengetahui tanah di desanya akan terkena gusuran untuk pembangunan jalan tol, pada awalnya menentang pembangunan jalan tol yang melewati desanya. Dengan menempuh berbagai cara, akhirnya pembangunan jalan tol tetap dilakukan, akan tetapi tidak menggusur rumah warga, akan tetapi menggunakan tanah warga (ganti rugi tanah). Pembangunan jalan tol dibelokkan 10 meter ke arah timur menjauhi permukiman warga. Alasan utama warga Desa Pangpong tidak mau digusur karena mereka mempunyai hubungan/ikatan batin yang sangat erat dengan tanah kelahirannya. Mereka telah lama bertempat tinggal di desa tersebut sehingga sudah tercipta ikatan psikologis dengan tanah kelahirannya. Kehidupan religi dan kegotongroyongan masih sangat kental.

Desa Pangpong yang semula sebagai desa terisolir, jauh dari pelabuhan penyeberangan dari Pulau Madura menuju Surabaya, setelah dibangunnya Jembatan Suramadu tidak menjadi daerah terisolir lagi. Warga Desa Pangpong semakin mudah untuk melakukan mobilitas, terutama ke Pulau Jawa. Kemudahan dalam melakukan mobilitas dapat mempengaruhi pola mobilitas. Asumsinya, semakin mudah seseorang melakukan mobilitas, maka pola mobilitas yang terjadi adalah mobilitas nonpermanen, baik menginap atau ulang-alik.

Mobilitas penduduk dapat menimbulkan dampak terhadap kondisi sosial, ekonomi maupun budaya pada masyarakat di daerah asal. Pembangunan Jembatan Suramadu memberi kemudahan warga Desa Pangpong melakukan mobilitas nonpermanen, baik menginap maupun ulang-alik. Oleh karena itu, perlu dijelaskan melalui kajian lebih rinci dampak pembangunan Jembatan Suramadu terhadap mobilitas serta kondisi sosial budaya penduduk di sekitarnya.

Untuk menadalami kajian ini, perlu terlebih dahulu diulas beberapa makna mobilitas sebagai berikut. Mobilitas penduduk dapat dibedakan antara mobilitas penduduk horizontal dan mobilitas penduduk vertikal. Mobilitas vertikal sering disebut dengan perubahan status, misalnya perubahan status pekerjaan. Seseorang yang semula menjadi buruh, berubah bekerja menjadi pengusaha. Mobilitas penduduk horizontal adalah gerak penduduk melintasi batas wilayah menuju wilayah lain dalam periode waktu tertentu (Mantra, 1999:1).

Tinjauan tentang ada tidaknya niatan untuk menetap di daerah tujuan, mobilitas penduduk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas penduduk permanen, dan mobilitas penduduk nonpermanen (Lee, 2000). Mobilitas penduduk permanen adalah gerak penduduk yang melintas batas wilayah asal menuju wilayah lain dengan adanya niatan menetap di daerah tujuan. Sebaliknya mobilitas penduduk nonpermanen adalah gerak penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tidak ada niatan menetap di daerah tujuan. Gerak penduduk nonpermanen dibedakan menjadi dua, yaitu ulang-alik (Jawa=*nglaju*; Inggris=*commuting*) dan menginap. Mobilitas ulang-alik adalah gerak penduduk dari daerah asal menuju ke daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari itu juga.

Secara operasional, macam-macam bentuk mobilitas penduduk diukur berdasarkan konsep ruang dan waktu. Misalnya, mobilitas ulang-alik, konsep waktunya diukur dengan enam jam atau lebih meninggalkan daerah asal dan kembali pada hari yang sama. Menginap atau *mondok* diukur lamanya meninggalkan daerah asal lebih dari satu hari tetapi kurang dari enam bulan (Mantra, 1999:3). Dalam penelitian ini, mobilitas penduduk yang akan dilihat adalah mobilitas nonpermanen, yaitu mobilitas ulang-alik.

Mobilitas penduduk terjadi apabila: 1) seseorang mengalami tekanan (stres) baik ekonomi, sosial, maupun psikologi di tempat ia berada; 2) perbedaan nilai kefaedahan

wilayah antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Lee (2000:6) menjelaskan, proses migrasi dipengaruhi oleh empat faktor: 1) faktor individu; 2) faktor-faktor yang terdapat di daerah asal; 3) faktor-faktor yang terdapat di daerah tujuan; dan 4) rintangan antara daerah asal dan daerah tujuan.

Perpindahan seseorang atau sekelompok orang ke luar dari daerah asalnya memberikan implikasi yang sangat besar baik terhadap individu, keluarga, serta penduduk di daerah asal, juga bagi individu dan penduduk daerah tujuan (Abdullah, 2002). Faktor sosial budaya merupakan faktor-faktor kontekstual bisa berbeda antara suatu lingkungan masyarakat pada daerah yang satu dengan daerah lain. Pengertian konteks meliputi baik situasi fisik daerah maupun karakteristik sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat dalam daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu, mobilitas penduduk mempunyai hubungan yang saling memengaruhi dengan perubahan sosial (Saefullah, 2002).

Pembangunan dapat berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Adanya pembangunan dapat berdampak terhadap perubahan dalam kehidupan masyarakat, misalnya perubahan nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan, dan wewenang, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Ahimsa (2007:19) dalam penelitiannya tentang sosial budaya menggunakan data antara lain mengenai (1) nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan; (2) kategori-kategori sosial dan budaya; (3) cerita; (4) percakapan; (5) pola-pola perilaku dan interaksi sosial; (6) organisasi sosial; (7) lingkungan fisik.

Perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur sosial dan dalam pola-pola hubungan sosial, yang antara lain mencakup sistem status, hubungan-hubungan dalam keluarga, sistem-sistem politik dan kekuatan, dan persebaran penduduk. (Suparlan, 1986:106) menjelaskan bahwa perubahan kebudayaan adalah perubahan yang terjadi dalam sistem ide yang dimiliki bersama oleh sejumlah warga masyarakat yang bersangkutan mencakup antara lain aturan-aturan atau norma-norma yang digunakan sebagai pegangan dalam kehidupan warga masyarakat, nilai-nilai, teknologi, selera dan rasa keindahan atau kesenian, bahasa. Untuk mengungkap perubahan sosial tidak bisa lepas dari perubahan kebudayaan.

Interaksi sosial adalah aspek kelakuan dari dan yang terdapat dalam hubungan sosial. Dalam kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat, hubungan-hubungan sosial yang dilakukannya dengan para anggota masyarakatnya dalam kelompok-kelompok kekerabatan, kelompok wilayah, dan dalam kelompok-kelompok sosial lainnya, misalnya perkumpulan olahraga, arisan, teman sejawat di kantor, teman sepermainan, tetangga (Suparlan, 1986:93). Kondisi sosial budaya yang akan dilihat dalam penelitian ini meliputi nilai-nilai, bahasa, pekerjaan, kondisi fisik, kesenian.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi wilayah Desa Pangpong berkaitan dengan hadirnya Jembatan Suramadu. Selain itu untuk mendeskripsikan warga Desa Pangpong yang melakukan mobilitas berkaitan dengan dibangunnya Jembatan Suramadu, serta kondisi sosial budaya pelaku mobilitas di Desa Pangpong pasca pembangunan Jembatan Suramadu.

Pemilihan lokasi penelitian Desa Pangpong dengan pertimbangan bahwa letaknya wilayah berdekatan dengan Jembatan Suramadu, dan sebagian wilayahnya terkena gusuran untuk pembangunan prasarana jalan tol (akses jalan jembatan). Letaknya yang relatif dekat dengan Jembatan Suramadu berdampak terhadap pola mobilitas penduduknya.

Untuk melihat ada tidaknya perubahan, baik pola mobilitas maupun kondisi sosial budaya, temporal yang digunakan adalah setelah Jembatan Suramadu digunakan dan sebelum digunakan. Jembatan Suramadu secara resmi digunakan pada tahun 2009. Pola mobilitas dan

kondisi sosial budaya sebelum pembangunan Jembatan Suramadu diambil 3-5 tahun sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif.

II. DESKRIPSI DESA PANGPONG

Pangpong adalah satu di antara tiga belas desa yang ada di wilayah administrasi Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Dari arah Surabaya, Desa Pangpong terletak di sebelah kiri jalan lingkaran luar Bangkalan. Sebagian besar penggunaan tanah di Desa Pangpong untuk tanah tegalan (75,2%). Penggunaan tanah tegalan yang dominan karena keterbatasan kondisi air. Sumber pengairan hanya mengandalkan hujan sehingga hanya dapat diusahakan sawah tadah hujan. Hal ini berakibat tidak adanya perubahan penggunaan tanah yang luas di Desa Pangpong pasca pembangunan Jembatan Suramadu. Tanaman yang ditanam oleh masyarakat Desa Pangpong relatif tetap meliputi padi, jagung, kacang tanah, dan ketela pohon.

Pembangunan Jembatan Suramadu membawa perubahan lebih banyak pada ketersediaan sarana dan prasarana. Sebelum dibangun Jembatan Suramadu, lokasi antara desa satu dengan lainnya berbatasan langsung sehingga hubungan antara desa satu dengan lainnya relatif mudah. Setelah adanya pembangunan Jembatan Suramadu, maka ada beberapa desa yang dilalui jalan lingkaran luar Bangkalan, sehingga ada beberapa wilayah terpisah. Oleh karena itu, agar akses wilayah yang terpisahkan tersebut tidak terganggu, maka pemerintah memberi fasilitas berupa jembatan sebanyak dua buah, sehingga memberi keamanan warga masyarakat yang ingin bepergian ke wilayah lain.

Pembangunan jembatan penghubung antardesa di wilayah Kecamatan Labang membawa dampak terhadap kondisi sarana dan prasarana di daerah yang terkena atau berdekatan dengan jalan lingkaran luar Bangkalan. Jalan-jalan desa banyak yang diaspal maupun diperkeras. Berdasarkan BPS Kabupaten Bangkalan tahun 2003, panjang jalan di Desa Pangpong yang diaspal 1,0 km, dan berdasarkan BPS Kabupaten Bangkalan tahun 2010, panjang jalan di Desa Pangpong yang diaspal pada tahun 2010 meningkat menjadi 4 km.

Kepemilikan kendaraan bermotor masyarakat Desa Pangpong selama kurun waktu 7 tahun mengalami perubahan. Kepemilikan truk masyarakat Desa Pangpong 2 buah pada tahun 2003, meningkat menjadi 6 buah pada tahun 2010. Peningkatan kepemilikan sepeda motor cukup tinggi dibandingkan dengan kendaraan lainnya, dua kali lipat. Beberapa informan menuturkan, kondisi ini tidak lepas dari dampak pembangunan Jembatan Suramadu. Sebelum dibangunnya Jembatan Suramadu, transportasi yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura hanya melalui laut. Namun, semenjak dibukanya Jembatan Suramadu, pemanfaatan penyeberangan laut melalui Pelabuhan Kamal semakin berkurang. Jarak tempuh antardua pulau tersebut semakin dekat, mudah dan murah. Dengan memanfaatkan kendaraan sepeda motor, Bangkalan - Surabaya cukup ditempuh selama 5-10 menit dengan biaya sekali jalan Rp. 3.000,00. Kondisi ini menjadi alasan atau latar belakang semakin banyaknya kepemilikan sepeda motor pada masyarakat Madura, di antaranya masyarakat Desa Pangpong.

Tabel 1. Jumlah Kepemilikan Kendaraan Bermotor Penduduk Desa Pangpong pada Tahun 2003 dan 2010

| Jumlah kepemilikan kendaraan | Tahun 2003 | Tahun 2010 |
|------------------------------|------------|------------|
| Truk | 2 | 6 |
| Sedan | - | 2 |
| Colt/pick up | 41 | 48 |
| Sepeda motor | 23 | 45 |

Sumber: BPS Kab. Bangkalan, 2003 dan 2010

Dengan dibangunnya Jembatan Suramadu, membawa perkembangan pada wilayah Pulau Madura, terutama wilayah yang berdekatan dengan lokasi Jembatan Suramadu, wilayah di sekitarnya semakin ramai. Toko-toko kelontong maupun warung-warung mulai bermunculan, jasa kursus ketrampilan juga mulai tumbuh, misalnya kursus bahasa Inggris, komputer, musik. Masyarakat Desa Pangpong mendapatkan kemudahan dalam memperoleh jasa ketrampilan seperti disebut di atas. Dulu, masyarakat Desa Pangpong yang ingin memperoleh ketrampilan tertentu, harus pergi ke Kota Bangkalan yang jaraknya relatif jauh, atau ke Surabaya. Sejak dibukanya Jembatan Suramadu, mereka lebih mudah mendapatkan fasilitas pendidikan informal tersebut.

Desa Pangpong relatif mempunyai sarana prasarana sosial ekonomi yang lebih memadai apabila dibandingkan dengan desa lain yang ada di Kecamatan Labang. Sarana dan prasarana bidang pendidikan yang paling banyak terdapat di Desa Pangpong. Berdasarkan Kecamatan Labang Dalam Angka tahun 2011, jumlah sekolah tingkat TK, Desa Pangpong memiliki paling banyak. Prasarana pendidikan tingkat SD terdapat di semua desa. Fasilitas pendidikan untuk tingkatan SMP hanya terdapat di 5 desa, yaitu di Desa Pangpong, Sukolilo Barat, Ba'Engas, Jukong, dan Sendang Daya. Demikian pula untuk fasilitas pendidikan tingkat SMU di Kecamatan Labang terdapat 7 sekolah, yaitu di Desa Pangpong, Sukolilo Barat, Ba'Engas, dan Sendang Daya.

Dari sebaran fasilitas pendidikan di kecamatan Labang, Desa Sukolilo Barat perkembangan jumlah prasarana pendidikan paling pesat diantara desa-desa lain yang ada di Kecamatan Labang. Perkembangan fasilitas pendidikan di Desa Pangpong memang tidak sepesat di Desa Sukolilo Barat. Namun, karena letak Desa Pangpong berbatasan langsung dengan Desa Sukolilo barat, kondisi ini memberi peluang bagi penduduk di Desa Pangpong untuk mendapatkan fasilitas pendidikan. Seperti yang dituturkan oleh Kepala Desa Pangpong:

“...Fasilitas pendidikan di Desa Pangpong, awalnya memang relatif memadai, sebab di desa ini ada SMP negeri. Padahal di Kecamatan Labang hanya ada dua SMP, yaitu 1 di Desa Pangpong (SMP negeri) dan satu lagi di Desa Sukolilo Barat, tetapi SMP swasta. Namun setelah adanya Jembatan Suramadu, di Desa Sukolilo Barat memang jumlah sekolahnya tambah banyak. Ya... mungkin lokasinya yang paling dekat dengan jembatan, dan karena adanya pembebasan tanah saat akan dibangunnya jembatan. Nah, bagi kita-kita penduduk Desa Pangpong justru diuntungkan dengan keadaan itu. Sebab, anak-anak dapat memperoleh pelayanan pendidikan lebih luas dan lebih tinggi. Banyak sekolah bermunculan, baik di tingkat Taman kanak-kanak, SD, SMP, maupun SMU. Selain itu, perkembangan yang cukup pesat adalah sekolah Islam...”

Memang benar apa yang disampaikan oleh Kepala Desa Pangpong. Masyarakat di desa ini tidak perlu jauh-jauh untuk mendapatkan fasilitas pendidikan, terutama untuk tingkat SMP dan SMU. Belum lagi sekolah-sekolah Islam yang tumbuh di Kecamatan Labang. Apabila dibandingkan antara tahun 2003 dan 2010, perkembangan kuantitas fasilitas pendidikan sekolah swasta yang bersifat umum (bukan keagamaan) lebih sedikit dibandingkan dengan

sekolah yang bersifat/berbasis keagamaan (MD,MI, MTs,MA).

Berdasarkan kedua tabel di atas nampak bahwa selama kurun waktu 7 tahun, jumlah sekolah Madrasah Diniyah mengalami peningkatan kuantitas di semua desa di Kecamatan Labang. Hal ini cukup relevan apabila dikaitkan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Madura yang sangat kental dengan nuansa Islami. Pendidikan agama menempati posisi lebih tinggi daripada pendidikan umum. Pernyataan ini didasarkan pada pengamatan di lapangan bahwa setelah anak-anak pulang sekolah, pada sore harinya mereka mengikuti sekolah pendidikan Islam (istilah penduduk setempat, sekolah Madrasah) hingga magrib. Setelah magrib, anak-anak belajar mengaji hingga jam 8 malam. Mayoritas penduduk di Desa Pangpong menerapkan pendidikan anak seperti itu. Seperti penuturan informan:

“...anak-anak di sini mempunyai aktivitas pendidikan, yaitu pagi hari sekolah, kemudian nanti pulang sekolah, istirahat sebentar, mereka ikut madrasah. Nanti, malamnya mereka ikut ngaji. Hampir semua anak-anak di sini melakukannya. Seperti anak saya, saya tidak punya pembantu, sementara saya dan suami sama-sama bekerja jadi PNS. Tempat saya bekerja lumayan jauh. Jadi bila anak-anak pulang sekolah, mereka biasanya pergi ke tempat neneknya untuk makan siang di sana. Nanti anak-anak itu sudah bisa pergi sendiri ke madrasah bersama-sama temannya. Nanti malamnya mereka ngaji lagi di masjid sampai jam 8 malam. Sampai rumah sudah capek, biasanya terus ngantuk. Jadi waktu untuk belajar mereka ya semaunya. Kalau belum ngantuk, pulang ngaji ya belajar, tapi kalo sudah ngantuk, ya terus tidur...”

Fasilitas pendidikan untuk tingkat pendidikan tinggi di Madura adalah Universitas Trunojoyo yang berada di Kabupaten Bangkalan. Beberapa penduduk Desa Pangpong yang mampu secara finansial dan intelektual meneruskan di perguruan tinggi, ada yang menyekolahkan anaknya di Bangkalan atau di Surabaya. Dengan adanya Jembatan Suramadu, akses mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi semakin terbuka. Mereka yang sekolah di Surabaya tidak perlu mencari tempat tinggal di Surabaya, sebab mereka bisa nglaju.

Fasilitas kesehatan yang terdapat di Desa Pangpong adalah Polindes (Poliklinik Desa). Selain berobat ke ke Polindes, di Desa Pangpong juga ada bidan dan dukun bersalin. Pada umumnya masyarakat di Desa Pangpong pergi ke bidan apabila sakit. Jadi, bidan di Desa Pangpong selain membantu melahirkan/persalinan, juga membantu melayani penduduk yang sedang sakit. Selain pergi ke bidan, ada juga penduduk yang menggunakan dukun bersalin untuk membantu persalinan. Akan tetapi pengguna jasa dukun bersalin tidak sebanyak ke bidan. Seperti penuturan seorang informan:

“.... orang di sini biasanya kalo sedang sakit pergi ke bidan. Selain orang yang hamil atau yang melahirkan, orang-orang sini kalo sakit cukup pergi ke bidan. Bisanya dengan periksa ke bidan dan diberi obat pada cocok. Kecuali kalo penyakitnya dah parah, bisanya harus ke rumah sakit.”

Fasilitas kesehatan juga relatif mudah diperoleh penduduk Desa Pangpong. Apabila menginginkan periksa kesehatan ke dokter, maka mereka cukup ke desa sebelahnya yaitu di Desa Sukolilo Barat. Penduduk Desa Pangpong yang harus mendapatkan perawatan kesehatan lebih intensif, ada yang pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Bangkalan atau ke Surabaya. Seperti penuturan informan:

“...orang-orang di sini kalau sakit ringan cukup pergi ke Puskesmas atau bidan terdekat. Akan tetapi kalo sakitnya berat, maka akan pergi ke rumah sakit. Di Bangkalan ini ada RSUD. Tetapi menurut pengalaman keluarga saya, pelayanan di RSUD kurang bagus, sehingga ketika isteri saya sakit, saya memilih untuk ke rumah sakit di Surabaya. Alhamdulillah, setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit Surabaya, isteri saya dapat tertolong jiwanya. Meskipun biaya perawatannya lebih mahal, tetapi saya puas. Saya juga bersyukur dengan adanya Jembatan Suramadu, karena dapat bolak-balik Surabaya Bangkalan dengan mudah dan murah. Andaikata belum ada jembatan Suramadu, saya tidak bisa membayangkan betapa repotnya saya...”

Sebelum Jembatan Suramadu dibangun, warga masyarakat yang membutuhkan jasa kesehatan untuk rawat inap, selain di Bangkalan dapat juga di Surabaya. Menurut penuturan beberapa informan, fasilitas maupun pelayanan kesehatan di rumah sakit milik pemerintah yang berada di Bangkalan terkadang kurang atau bahkan tidak memuaskan. Untuk penyakit tertentu, peralatan di rumah sakit Bangkalan sangat terbatas, sehingga apabila ada pasien yang membutuhkan penanganan khusus, biasanya dirujuk ke rumah sakit di Surabaya. Ketika belum ada Jembatan Suramadu, bila ada warga yang harus dirawat di rumah sakit Surabaya yaitu di SHC (Surabaya Hospital Centre), maka mereka harus melalui Pelabuhan Kamal. Namun, setelah adanya Jembatan Suramadu, tidak sedikit warga Madura yang pergi berobat ke rumah sakit di Surabaya, yang terdekat adalah rumah sakit Dokter Sutomo.

Wilayah Kabupaten Bangkalan secara fisik mengalami perkembangan cukup pesat pasca pembangunan Jembatan Suramadu. Apabila dilihat dari bangunan perkantoran, nampak bahwa terjadi perubahan kenampakan “wajah” kantor-kantor, baik swasta maupun pemerintah. Prasarana jalan juga banyak yang diaspal, baik di jalan kabupaten, jalan kecamatan maupun jalan desa. Prasarana perekonomian juga mengalami perkembangan. Hypermart sudah masuk ke Kabupaten Bangkalan, meskipun masih agak sepi karena baru saja selesai dibangun. Tetapi toko-toko waralaba belum nampak masuk di kabupaten ini.

Kabupaten Bangkalan termasuk wilayah yang sangat minim hiburan. Obyek wisata belum ada yang tergarap secara baik, sehingga tidak ada daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke daerah ini kecuali untuk ke sentra batik Tanjung Bumi. Untuk mengakomodasi kebutuhan warga masyarakat Kabupaten Bangkalan, maka dalam mengembangkan wilayahnya, selain aspek perekonomian, juga aspek hiburan. Adapun pembangunan sarana prasarana hiburan bagi masyarakat Kabupaten Bangkalan yaitu dengan dibangunnya *sport centre* atau gedung olahraga. Warga masyarakat bisa bermain maupun berolahraga di *sport centre* tersebut. Meskipun belum selesai pembangunannya, namun *sport centre* tersebut setiap sore sudah dimanfaatkan oleh warga.

Masyarakat Madura pada umumnya adalah bekerja di bidang pertanian dan peternakan, demikian pula masyarakat Madura di Desa Pangpong. Meskipun kondisi tanahnya tandus, namun sebagian besar penduduknya sangat tergantung pada kegiatan pertanian. Selain bekerja di bidang pertanian, ada pula masyarakat Desa Pangpong yang bekerja di bidang perikanan, perdagangan, dan jasa. Masyarakat Desa Pangpong ada yang bekerja di Surabaya menjadi tukang parkir dan ada pula yang bekerja sebagai sopir angkutan, pedagang, buruh bangunan.

Pada masyarakat Madura, berlaku sistem *uxorilocal* dimana setelah menikah, pasangan suami isteri tinggal di rumah isterinya. Dengan demikian, seolah-olah menjadi kewajiban bagi setiap orang tua Madura untuk menyediakan tempat tinggal bagi anak perempuannya (Muthmainnah, 1998:23). Sistem *uxorilocal* hingga kini masih nampak dalam kehidupan orang Madura, termasuk juga masyarakat Desa Pangpong.

Citra tentang kepatuhan, ketaatan atau kefanatikan orang Madura pada agama Islam yang dianut sudah lama terbentuk. Secara harfiah orang Madura sangat patuh menjalankan syariat agama. Hasrat mereka untuk menunaikan kewajiban naik haji besar sekali, sebagaimana keinginan untuk belajar agama di pesantren. Itulah sebabnya mengapa seorang kiai haji sebagai guru dan panutan keagamaan mendapat tempat yang terhormat di mata masyarakat lingkungannya, sehingga secara keseluruhan ajaran Islam sangat pekat mewarnai budaya dan peradaban Madura ((Rifai, 2007:45). Demikian juga pada masyarakat Desa Pangpong yang merupakan orang Madura, mereka juga taat dalam menjalankan syariat Islam. Kepatuhan, ketaatan dan kefanatikan pada agama Islam nampak dari kegiatan keagamaan yang cukup kental mewarnai kehidupan masyarakat Desa Pangpong. Ada kegiatan atau sekolah khusus

belajar agama yang disebut madrasah. Kegiatan belajar ini dilakukan setelah pulang sekolah, yaitu sore hari. Malam harinya, mereka masih harus mengaji di masjid atau langgar sampai sekitar jam 8 malam. Selain untuk anak-anak, ada juga kegiatan pengajian bagi ibu-ibu atau perempuan, dan ada juga pengajian bapak-bapak. Pengajian itu bergilir dari rumah ke rumah. Seperti penuturan seroang informan:

“... saya memang bekerja di Surabaya. Setiap hari saya pulang balik Bangkalan Surabaya karena keluarga saya di Bangkalan, pekerjaan saya di Surabaya. Terkadang saya pulang kerja sudah malam hari. Ketika ada pengajian bapak-bapak, saya tetap berusaha datang. Saya lebih memilih libur bekerja daripada tidak mengikuti pengajian. Ya kalau bekerja bisa setiap hari, tetapi kalo pengajian kan tidak setiap hari, jadi kalau pas waktunya pengajian, saya memilih pamit pulang duluan atau izin tidak masuk kerja.”

Ketaatan, kepatuhan mereka terhadap kegiatan keagamaan nampak pada hampir semua orang Madura, termasuk masyarakat di Desa Pangpong. Walaupun banyak penduduk yang melakukan kegiatan keluar desa secara ulang alik, namun mereka masih tetap berusaha ikut berpartisipasi pada berbagai kegiatan di desanya, termasuk hari-hari besar keagamaan. Hari-hari besar Islam seperti Maulud Nabi Muhammad SAW, Isra' Mi'raj, Nuzulul Quran dan terutama Idul Fitri dan Idul Adha selalu diperingati dan dirayakan secara besar-besaran. Khataman Al Quran dan khitanan terkadang diselamati dengan mengarak anak yang dikhitkan berkeliling kampung. Namun, meskipun merupakan pemeluk Islam yang teguh, banyak juga orang Madura yang tanpa sadar berbuat bid'ah (perilaku keagamaan yang tidak disunahkan Nabi Muhammad SAW) seperti pergi ke makam-makam yang dianggap suci dan keramat untuk menyampaikan permohonan agar mendapat berkah dan restu sebelum melakukan sesuatu kegiatan. Sebagian lagi masih percaya bahwa kuburan, mata air, pohon besar yang dianggap angker pasti dihuni makhluk halus (Rifai, 2007:48).

Mengenai bahasa, masyarakat Desa Pangpong menggunakan dua bahasa. Bahasa untuk percakapan sehari-hari, mereka menggunakan bahasa Madura. Mereka menggunakan bahasa Indonesia ketika berkomunikasi dengan orang lain (bukan orang Madura) dan ketika belajar di sekolah. Sekalipun masyarakat Desa Pangpong menggunakan bahasa Madura untuk percakapan sehari-hari, namun untuk anak-anak dan remajanya, kurang begitu memahami bahasa yang halus dan kasar. Bahkan sesama teman, mereka menggunakan bahasa Indonesia, atau campuran bahasa Indonesia dan bahasa Madura kasar atau *bhâsa mabâ*. Sebagaimana penuturan seorang informan:

“... mengenai bahasa, anak-anak muda sekarang ini tidak tau bahasa yang benar. Mereka biasanya menggunakan bahasa sehari-hari dengan bahasa Madura kasar. Sama orang tua terkadang bahasa Indonesia atau pakai bahasa Madura kasar. Ya... pengaruh di televisi itu yang menjadikan anak-anak seperti itu. Saya sebenarnya ya sedih, tetapi mau gimana lagi. Ya karena zamannya sudah berubah...”

Betapapun telah banyak yang berubah dalam sistem sosial Madura, satu hal yang patut dicatat adalah masyarakat Madura hingga kini tetap tunduk pada kiai. Peran kiai sangat besar dalam masyarakat Madura. Kiai tetap menjadi pemimpin. Ketundukan masyarakat Madura terhadap kiai tergambar dari struktur sosial masyarakat Madura. *Buppà-Babù-Guruh-Rato* adalah unsur-unsur dalam bangunan sosial masyarakat Madura. Jika *Buppà* (bapak) dan *Babù* (ibu) adalah elemen penting dalam bangunan keluarga Madura, maka *Guruh* (tokoh panutan) dan *Rato* (pemerintah) adalah unsur penentu dalam dinamika kehidupan sosial, budaya dan politik di Madura (Muthmainnah, 1998:26). Demikian pula pada masyarakat Desa Pangpong, peran kiai masih mewarnai dalam sistem sosial kemasyarakatan.

III. MOBILITAS PENDUDUK DESA PANGPONG

A. Mobilitas Penduduk

1. Sebelum Pembangunan Jembatan Suramadu

Pada waktu belum ada pembangunan Jembatan Suramadu, hubungan antara Pulau Madura dengan Pulau Jawa menggunakan transportasi laut, yaitu melalui Selat Madura. Sebagai pelabuhan penghubung antara kedua pulau adalah Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya dan Pelabuhan Kamal di Bangkalan. Orang yang melakukan perjalanan ke dan dari Pulau Madura, harus rela menunggu antrian kapal yang membawa mereka menyeberangi Selat Madura. Meskipun membutuhkan waktu lama dan biaya transportasi yang tidak murah, namun orang Madura yang dikenal sebagai suku perantau, tetap melakukan mobilitas antarpulau. Hal ini disebabkan karena kondisi lingkungan alam Pulau Madura yang tidak mendukung (daerah kurang subur untuk pertanian).

Mobilitas penduduk sebelum dibangunnya Jembatan Suramadu berbeda-beda, sesuai dengan tujuan dan kebutuhan masing-masing orang. Ada yang melakukan mobilitas permanen dan ada pula yang melakukan mobilitas non permanen. Mereka yang melakukan mobilitas permanen adalah mereka yang menetap atau bertempat tinggal di luar Pulau Madura. Namun, ada pula yang merantau sendirian atau dengan suami, yaitu mereka yang bekerja di luar negeri menjadi TKI. Menurut penuturan informan, penduduk Desa Pangpong yang menjadi TKI hanya sedikit. Sebagian besar penduduk Desa Pangpong melakukan mobilitas non permanen. Data mengenai jumlah penduduk yang menjadi TKI maupun melakukan mobilitas non permanen, tidak tersedia, karena belum ada pendataan secara khusus mengenai hal tersebut.

Banyak penduduk Desa Pangpong yang bekerja di Surabaya menjadi tukang parkir. Mereka melakukan mobilitas non permanen, yaitu berangkat pagi dan pulang malam. Sebagaimana penuturan seorang informan:

“Banyak orang Desa Pangpong yang bekerja menjadi tukang parkir di Surabaya. Ada yang menjadi tukang parkir di Kantor Pos, di pasar atau di pertokoan. Selain tukang parkir, ada juga yang bekerja menjadi PNS di Surabaya. Mereka setiap pagi berangkat ke Surabaya, dan sore bahkan ada yang malam hari pulang lagi ke rumah. Mereka tetap melakukan rutinitas seperti tidak masalah, karena itu menjadi pekerjaan tetap mereka. Kalau mencari kerja di sini lebih sulit”

Sebagaimana penuturan seorang informan di atas, memang benar, mereka yang melakukan mobilitas ulang-alik kebanyakan adalah yang bekerja sebagai tukang parkir di Surabaya. Mereka melakukan mobilitas ulang alik. Namun demikian, ada pula yang melakukannya setiap dua minggu atau sebulan sekali, yaitu mereka yang matapencahariannya sebagai pedagang. Mereka yang bekerja sebagai pedagang, apabila akan *kulakan* atau belanja dagangannya ke Surabaya, dilakukan dua minggu sekali atau terkadang sebulan sekali, melalui Pelabuhan Kamal.

2. Setelah Pembangunan Jembatan Suramadu

Jembatan Suramadu mulai digunakan semenjak tahun 2009. Dengan keberadaan Jembatan Suramadu, sirkulasi lalu lintas antara Surabaya dan Madura menjadi jauh lebih lancar. Diperkirakan Suramadu akan dilintasi 8.000 9.000 sepeda motor per hari serta sekitar 4.000 kendaraan roda empat per hari baik dari Jawa Timur maupun dari luar Jawa Timur. Jumlah ini berdasarkan perhitungan sebelumnya, kendaraan yang melintasi Ujung Kamal dengan menggunakan kapal feri sekitar 2,4 juta sepeda motor per tahun (62 persen) serta 1,5 juta kendaraan roda empat per tahun (38 persen). Selain bakal padat, jembatan ini pun pasti akan sangat membantu masyarakat karena waktu tempuh Surabaya-Madura bisa

dipersingkat. Jika sebelumnya menggunakan feri dibutuhkan waktu sekitar 30 menit, sekarang dengan menggunakan Suramadu cukup ditempuh lima menit (Cahyo, 2010).

Pembangunan Jembatan Suramadu berdampak pada perilaku mobilitas. Pasca pembangunan jembatan, mobilitas antarpulau tersebut semakin ramai. Kalau sebelum ada jembatan, arus transportasi antarpulau tersebut tidak 24 jam karena layanan kapal yang akan menyeberang Selat Madura waktunya terbatas. Namun setelah adanya Jembatan Suramadu, maka arus lalu lintas antara Pulau Jawa dan Madura tidak terbatas waktu.

Waktu yang dibutuhkan untuk menyeberang Selat Madura melalui Jembatan Suramadu relatif lebih pendek daripada dengan menggunakan transportasi laut. Waktu yang dibutuhkan untuk menyeberang Selat Madura melalui darat lebih kurang 10-15 menit, sedangkan melalui laut sekitar 30 menit. Belum lagi waktu yang digunakan untuk menunggu keberangkatan penumpang kapal. Oleh karena itu, dengan adanya Jembatan Suramadu, ada efisiensi waktu. Dari segi biaya, transportasi darat melalui Jembatan Suramadu, lebih murah dibandingkan dengan menggunakan transportasi laut, karena biasanya memakai kendaraan pribadi.

Pasca pembangunan Jembatan Suramadu, mobilitas antarpulau tersebut semakin banyak. Tujuan mereka bermacam-macam, ada yang bermaksud untuk bekerja, sekolah, berdagang, berkunjung ke sanak saudara, berekreasi, atau bahkan hanya menikmati atau ingin merasakan melewati Jembatan Suramadu. Penduduk Desa Pangpong merasakan dampak positif dari pembangunan tersebut. Sebagai contoh, mereka yang bekerja di Surabaya, semula harus berangkat pagi dan pulang malam, maka setelah ada jembatan, mereka dapat berangkat agak siang dan pulang sore.

B. Pola Mobilitas dan Alasan Melakukan Mobilitas

Penelitian mengenai mobilitas penduduk Desa Pangpong pasca pembangunan Jembatan Suramadu menggunakan kasus 5 pelaku mobilitas. Hal ini dilakukan untuk memberi gambaran terhadap mobilitas penduduk Desa Pangpong. Berikut beberapa kasus terkait mobilitas penduduk Desa Pangpong pasca pembangunan Jembatan Suramadu. Adapun kasus lima keluarga Desa Pangpong adalah Bapak Hairi/Kelbun, Bapak haji Ilyas, Bapak Hosnan, Bapak Malik, dan Pak Mahmud. Masing-masing orang mempunyai perbedaan dalam melakukan mobilitas maupun kondisi sosial budaya pasca dibangunnya jembatan Suramadu.

1. Bapak Hairi

Pak Hairi adalah penduduk Desa Pangpong dan berasal di Desa Pangpong. Semenjak lahir hingga dewasa ia tinggal di Desa Pangpong, Bangkalan. Ia menyelesaikan sekolah menengah atas di Bangkalan. Setelah tamat SMA, ia kemudian pergi ke Surabaya untuk mencari pekerjaan, dan akhirnya diterima sebagai PNS di Kota Surabaya. Usianya 45 tahun dan hingga saat ini masih melakukan mobilitas ulang-alik setiap hari.

Semenjak bekerja di Surabaya, ia melakukan mobilitas. Pada waktu itu mobilitas yang dilakukan adalah permanen, karena menetap di Surabaya. Hanya sesekali saja pulang ke Bangkalan. Setelah menikah, pola mobilitasnya mengalami perubahan, yaitu seminggu sekali pulang ke Bangkalan, karena keluarganya tinggal di Desa Pangpong. Alasan melakukan mobilitas seminggu sekali karena waktu perjalanan yang dibutuhkan bekerja pada setiap harinya cukup lama (sekitar dua jam untuk perjalanan). Ia harus berangkat pagi-pagi sekali, dan pulang bekerja sudah malam. Biaya untuk transportasi juga relatif mahal (paling tidak Rp. 120.000,00 untuk biaya kapal saja, pulang pergi). Oleh karenanya, ia memilih pulang seminggu sekali, setiap menjelang hari libur.

Semenjak adanya Jembatan Suramadu, pola mobilitasnya mengalami perubahan lagi. Pak Hairi tidak lagi pulang satu minggu sekali, tetapi setiap hari. Ia melakukan mobilitas

ulang-alik. Waktu yang dibutuhkan untuk pergi bekerja relatif lebih singkat dan biayanya relatif lebih murah. Setiap hari ia pergi ke kantor mengendarai kendaraan pribadi. Ia tidak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk tempat kost di Surabaya. Selain itu ia bisa berkumpul dengan keluarga setiap hari.

2. Bapak Haji Ilyas

Bapak Haji Ilyas berasal dari Desa Cukong Kecamatan Labang. Ia lahir dan hidup bersama kedua orangtuanya di Cukong. Ketika beranjak dewasa, Haji Ilyas mendapatkan isteri yang berasal dari Desa Pangppong. Sesuai adat budaya Madura, apabila seorang laki-laki menikah, selanjutnya ia bertempat tinggal mengikuti isterinya. Demikian pula dengan Haji Ilyas, ia bertempat tinggal di Desa Pangppong karena mengikuti isterinya yang berasal dari Desa Pangppong.

Haji Ilyas sudah berumur 63 tahun dengan jumlah anggota rumah tangga 6 orang. Ia bekerja sebagai pedagang batu dan bekerja di sawah sebagai sambilan tetapi tidak pernah ditinggalkan. Menurutnya, bekerja di sawah itu menyenangkan, karena selain bisa bercocok tanam, bisa berolahraga, dan membuat rasa nyaman di hati ketika melihat hasil di sawah.

Sebagai pengusaha/pedagang batu, ketika belum ada Jembatan Suramadu, konsumennya terbatas di Kecamatan Labang dan sekitarnya. Ada beberapa konsumen yang berasal dari luar Madura, seperti Surabaya. Sejak adanya Jembatan Suramadu, konsumennya semakin banyak, baik di sekitar Desa Pangppong maupun di luar desa. Tentu saja, adanya pembangunan jembatan tersebut, akses semakin mudah, dan biayanya semakin murah.

Meskipun jarang melakukan mobilitas ulang-alik melewati Jembatan Suramadu, namun Haji Ilyas merasakan dampak pembangunan jembatan tersebut. Usaha dagangnya semakin lancar, karena kendaraan truk miliknya dapat melakukan ,mobilitas lebih sering. Dengan adanya Jembatan Suramadu, biaya transportasi yang dikeluarkan untuk usahanya lebih sedikit, sedangkan konsumennya semakin banyak. Keuntungan yang dirasakan oleh Haji Ilyas dengan adanya Jembatan Suramadu, usahanya semakin berkembang. Kendaraan truk yang dimiliki menjadi bertambah.

Selain bagi ia sendiri, dampak pembangunan Jembatan Suramadu juga dirasakan oleh anggota keluarganya, seperti anaknya yang kuliah di Surabaya. Ketika masih kuliah di Surabaya, belum ada Jembatan Suramadu sehingga bila akan ke Surabaya atau pulang ke Bangkalan melalui Pelabuhan Kamal. Anaknya pulang terkadang satu minggu sekali, terkadang satu bulan sekali, tergantung kondisi keuangannya. Ketika ada jembatan, anaknya melakukan mobilitas ulang alik. Meskipun tidak bekerja di Surabaya, namun Pak Ilyas acapkali ke Surabaya. Kalau ada anggota keluarganya yang sakit dan harus mendapatkan perawatan, maka dibawa ke rumah sakit di Surabaya. Dengan adanya Jembatan Suramadu, Pak Ilyas merasa mendapatkan dampak positif.

3. Bapak Haji Mahmud

Bapak Haji Mahmud adalah penduduk Desa Pangppong yang berasal dari Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Ia tinggal di Desa Pangppong sejak menikah, karena isterinya berasal dari Desa Pangppong. Pak Haji Mahmud, begitu panggilan sehari-harinya, berusia 52 tahun. Ia bekerja sebagai wiraswasta yaitu berjualan onderdil mobil. Pak Mahmud mempunyai cerita yang berbeda terkait dengan dibangunnya Jembatan Suramadu. Selain menerima dampak positif, Haji Mahmud juga merasakan dampak negatif dari pembangunan Jembatan Suramadu. Dampak positif yang dirasakan adalah kemudahan bila ia akan bepergian ke luar Pulau Madura, baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk keperluan usahanya.

Sebelum ada Jembatan Suramadu, ia mencari dagangan ke Suramadu melalui Pelabuhan Kamal, dua minggu sekali atau terkadang sebulan sekali. Ketika itu, Pak Haji Mahmud menjadi satu-satunya pedagang onderdil di Desa Pangpong, sehingga saat itu banyak konsumen yang datang kepadanya. Tetapi, dengan adanya Jembatan Suramadu, maka semakin mudah mencari dagangan. Biaya transportasi untuk mencari dagangan semakin murah dan waktu tempuhnya semakin pendek.

Di satu sisi, dengan adanya Jembatan Suramadu, biaya atau ongkos untuk mencari dagangan relatif lebih ekonomis. Tetapi, dampak negatif yang muncul adalah, konsumen yang biasanya mengambil barang dagangan ke pengusaha yang berada di Desa Pangpong (ke tempat Haji Mahmud), setelah ada jembatan Suramadu, beberapa konsumen mencari/membeli barang dagangannya langsung ke Surabaya. Bagi konsumen, kondisi ini menguntungkan mereka, karena mereka bisa mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah dan bisa memilih lebih leluasa. Akan tetapi, bagi penjualnya (pengusaha di Desa Pangpong), kondisi ini merugikan, karena konsumennya menurun.

4. Pak Hosnan

Pak Hosnan adalah orang asli Desa Pangpong, demikian pula isterinya. Pak Hosnan lahir pada tahun 1965 dengan pendidikan terakhirnya lulus SD. Ia bekerja menjadi juru parkir di Kota Surabaya sejak tahun 1980. Pak Hosnan tinggal di Surabaya, dan pindah ke Bangkalan semenjak menikah pada tahun 1988. Pak Hosnan dikaruniai tiga orang anak.

Ketika bekerja di Surabaya, ia jarang pulang, karena harus menggunakan transportasi air yang harganya relatif mahal, antriannya banyak dan jauh. Jadi ketika bekerja di Surabaya, Pak Hosnan melakukan mobilitas permanen. Setelah menikah dengan orang Desa Pangpong, Pak Hosnan tetap bekerja di Surabaya, tetapi pola mobilitasnya menjadi seminggu sekali. Alasan untuk tetap tinggal di Surabaya karena jika nglaju setiap hari melalui Kamal, lelah dan biayanya mahal.

Pembangunan jembatan ini membawa perubahan pada pola mobilitas Pak Hosnan. Sebelum ada jembatan Suramadu, ia sebagai pelaku mobilitas permanen, setelah ada Jembatan Suramadu, sebagai pelaku mobilitas ulang-alik. Setiap pagi ia berangkat ke Surabaya dan pulang pada sore hari. Perubahan pola mobilitas ini dikarenakan lebih menyingkat waktu, biayanya irit, dan bisa berkumpul dengan keluarga setiap hari. Sebelum ada jembatan Suramadu, isteri Pak Hosnan sebagai ibu rumah tangga, namun setelah ada Jembatan Suramadu, bekerja sebagai pedagang kaki lima di Suramadu dengan macam dagangannya antara lain kaos, souvenir, makanan.

5. Pak Malik

Pak Malik adalah penduduk Desa Pangpong, lahir pada tahun 1979. Masa sekolah diselesaikan di tanah kelahirannya, di Desa Pangpong, dan setelah lulus sekolah, pada tahun 1997, dan kemudian bekerja sebagai juru parkir di Surabaya. Pak Malik menikah pada tahun 2002. Isterinya berasal dari Bojonegoro. Hasil pernikahannya dikarunia dua orang anak laki-laki. Semasa menikah, ia masih tinggal di Surabaya bersama keluarga di rumah kontrakan. Namun semenjak dibangunnya Jembatan Suramadu Pak Malik beserta keluarga memutuskan pindah ke Bangkalan, ke tempat keluarga Pak Malik.

Meskipun tempat tinggalnya sekarang di Desa Pangpong, tetapi tempat kerjanya tetap di Surabaya. Ketika masih tinggal Surabaya, Pak Malik tidak melakukan mobilitas. Semenjak pindah ke Desa Pangpong, ia melakukan mobilitas ulang alik. Setiap pagi berangkat kerja ke Surabaya, dan kembali lagi ke Desa Pangpong pada sore harinya. Bagi Pak Malik, meskipun setiap hari melakukan mobilitas ulang alik, tidak menjadi beban atau masalah, karena dengan

melewati jembatan Suramadu, jarak dari tempat tinggalnya ke tempat bekerja tidak jauh dan mudah dijangkau, cukup dengan naik sepeda motor.

Uraian mengenai dampak pembangunan Jembatan Suramadu terhadap mobilitas pada lima keluarga di Desa Pangpong menunjukkan adanya keragaman atau variasi. Sebelum dibangunnya jembatan Suramadu, ada yang melakukan mobilitas permanen, ada yang tidak melakukan mobilitas, dan ada yang melakukan mobilitas ulang alik. Namun, setelah dibangunnya Jembatan Suramadu, pola mobilitas ulang alik yang banyak dilakukan. Hal ini dilakukan karena lebih hemat waktu, tenaga dan biaya.

IV. KONDISI SOSIAL BUDAYA PENDUDUK DESA PANGPONG

Masyarakat Madura dikenal memiliki budaya yang khas, unik, stereo-tipikal, dan stigmatik. Identitas budayanya itu dianggap sebagai deskripsi dari generalisasi jatidiri individual maupun komunal etnik Madura dalam berperilaku dan berkehidupan. Dalam konteks religiusitas, masyarakat Madura dikenal memegang kuat ajaran Islam dalam pola kehidupannya. Sebagai dikemukakan oleh Syariffuddin, karakter yang lekat dengan stigma orang Madura adalah perilaku yang selalu apa adanya dalam bertindak, suara yang tegas, ucapan yang jujur merupakan salah satu bentuk keseharian yang bisa dirasakan ketika berkumpul dengan orang Madura. Pribadi yang keras dan tegas adalah bentuk lain yang dimiliki suku Madura. Budaya Madura adalah budaya yang lekat dengan tradisi religious (<http://kabarmadura07.blogspot.com/2009/11/catatan-kecil-budaya-madura.html>).

Kepatuhan masyarakat Desa Pangpong terhadap syariat Islam nampak dari kehidupan sehari-hari. Fenomena kegiatan anak sepulang sekolah dilanjutkan sekolah lagi di madrasah. Mereka menimba ilmu keagamaan di sekolah madrasah. Setiap kampung pasti ada madrasah. Lokasi madrasah biasanya menyatu dengan masjid. Selanjutnya, pada malam hari mereka mengaji di masjid. Rutinitas seperti itu sudah terbentuk secara turun temurun.

Pembangunan Jembatan Suramadu secara tidak langsung membawa perubahan terhadap kondisi sosial budaya masyarakat Desa Pangpong. Kemudahan akses jalan, semakin mempermudah orang untuk melakukan mobilitas. Perilaku orang pun juga lambat laun mengalami perubahan. Sebagai contoh dalam penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari menggunakan bahasa Madura, baik anak-anak, remaja maupun orang tua. Meskipun dalam bahasa Madura ada tingkatannya, akan tetapi tidak diterapkan sesuai aturan pemakaian bahasa. Anak-anak maupun remaja biasanya menggunakan bahasa Madura dalam tingkatan yang paling kasar. Bahasa halus juga digunakan untuk orang yang dituakan dan dihormati, misalnya kepala desa (*klebun*), dan kiai. Kalau untuk bahasa pergaulan, anak-anak menggunakan bahasa “campur-campur”, artinya ada yang menggunakan bahasa Madura dan ada yang menggunakan bahasa Indonesia.

Adanya pembangunan Jembatan Suramadu belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Pangpong. Masyarakat Desa Pangpong menekankan perlunya mengikuti apa yang telah berlaku di lingkungannya. Sebagaimana dituturkan informan:

“... adanya pembangunan Jembatan Suramadu tidak mempengaruhi perilaku anak-anak untuk kegiatan yang telah dilakukan secara rutin. sebelum ada jembatan, anak-anak sudah sekolah di madrasah maupun mengaji di masjid. Kegiatan tersebut masih tetap mereka jalankan hingga saat ini. Mereka tanpa dikejar-kejar sudah tau sendiri jadwal kegiatannya. Jadi, masyarakat Desa Pangpong ini tidak ada perubahan sebelum dan sesudah ada jembatan. Kalau ada perubahan paling-paling dalam kegiatan lainnya, misalnya orang bisa dengan mudah pergi ke Surabaya, sehingga banyak orang yang pergi ke Surabaya hanya untuk keperluan tertentu...”

Kondisi perubahan sosial budaya masyarakat Desa Pangpong dapat tergambarkan dari kasus lima keluarga pelaku mobilitas. Berikut ini disajikan gambaran perubahan kondisi sosial budaya yang terjadi pada lima pelaku mobilitas di Desa Pangpong pasca pembangunan Jembatan Suramadu:

1. Perubahan berkumpul keluarga

Pembangunan Jembatan Suramadu membawa dampak kultural. Ikatan kekerabatan orang Madura cenderung makin menguat. Ungkapan “palopong tolang” (mengumpulkan tulang yang tercerai berai), kini semakin menemukan penyaluran. Tidak sedikit keluarga yang selama ini terpisah dapat berkumpul kembali (Wiyata, 2010).

Dampak pembangunan Jembatan Suramadu diantaranya perubahan berkumpul dengan keluarga. Dari lima keluarga yang menjadi informan, ada variasi. Ada informan yang semula hanya bertemu dengan keluarganya seminggu sekali, setelah dibangun Jembatan Suramadu, maka ia bisa berkumpul dengan keluarga setiap hari. Ada pula informan yang semula tinggal di Surabaya beserta keluarganya, setelah ada Jembatan Suramadu, ia beserta keluarganya pindah ke Desa Pangpong, menjadi satu dengan keluarga besarnya, meskipun kerjanya tetap di Surabaya. Berikut uraian mengenai informan yang mengalami perubahan berkumpul dengan keluarga, setelah dibangunnya Jembatan Suramadu.

Bapak Hairi adalah seorang kepala keluarga berumur 45 tahun. Awal ketika bekerja sebagai PNS di Surabaya, ia kos. Sebab, kalau akan melakukan mobilitas ulang-alik Bangkalan-Surabaya, biayanya mahal dan waktunya lama, karena menggunakan transportasi laut. Dari Desa Pangpong menuju Surabaya, paling tidak, waktu Subuh harus sudah berangkat. Oleh karena itu, ketika diterima menjadi PNS di Kota Surabaya, Pak Hairi memilih tinggal di Surabaya. Pada hari Sabtu, ia pulang ke rumahnya di Desa Pangpong, dan pada hari Senin pagi, berangkat dari Desa Pangpong menuju Surabaya.

Pak Hairi menikah selang satu tahun setelah diterima menjadi PNS, yaitu pada tahun 1992. Istrinya berasal dari Desa Pangpong juga. Hasil pernikahannya tersebut, Pak Hairi dikaruniai 4 anak. Walaupun sudah menikah, Pak Hairi tetap pulang ke Bangkalan satu minggu sekali. Ketika masih berlaku enam hari kerja, ia pulang setiap Sabtu sore, dan berangkat lagi ke Surabaya pada Senin pagi. Namun, setelah lima hari kerja, maka ia pulang hari Jumat sore. Perkecualian, apabila ada keluarga yang sakit atau sedang punya hajatan, maka ia menyempatkan pulang.

Pak Hairi tidak menjadi satu rumah dengan keluarga cukup lama, lebih kurang tujuh belas tahun, yaitu dari tahun 1992-2009. Keluarga Pak Hairi tinggal di Bangkalan, dan ia sendiri tetap tinggal di Surabaya. Selama tidak menjadi satu rumah dengan keluarganya, tentu saja ada perasaan susah. Seperti penuturan Pak Hairi:

“...wah, kalau mengingat atau menceritakan ketika masih harus berpisah dengan keluarga, rasa susah itu kembali hadir dalam hati ini. Saya jadi teringat masa-masa sulit tidak berkumpul dengan keluarga. Nampaknya sih dekat ya, antara Surabaya dengan Bangkalan, akan tetapi transportasinya yang sulit. Nah, semenjak adanya jembatan Suramadu, saya menjadi senang sekali, sebab saya bisa jadi satu tinggal bersama anak dan isteri saya. Bisa berkumpul dengan keluarga tidak bisa diukur dengan uang. Kebahagiaan dan ketenangan batin itulah yang paling penting bagi saya....”

Setelah ada pembangunan Jembatan Suramadu, maka mobilitas yang dilakukan Pak Hairi adalah mobilitas ulang alik. Dampak positif yang utama bagi Pak Hairi adalah setiap hari dapat berkumpul menjadi satu dengan keluarga. Pak Hairi tetap dapat menjalankan perannya sebagai kepala keluarga, melindungi anak isteri, memberikan rasa nyaman dalam keluarga, dapat membimbing anak-anaknya, ikut berpartisipasi dalam aktivitas baik di rumah maupun di masyarakat.

Selain Pak Hairi, perubahan berkumpul keluarga juga dialami oleh keluarga Pak Malik. Hanya saja, Pak Malik berkumpul dengan keluarga besarnya. Pak Malik adalah informan yang mengalami perubahan berkumpul keluarga setelah dibangunnya Jembatan Suramadu, karena pindah dari Surabaya ke desa asalnya, berkumpul dengan keluarga besarnya. Ia merasa lebih tenang dapat bertempat tinggal di tengah-tengah keluarga besarnya. Apalagi kehidupan di desa dengan di kota sangat berbeda.

Pak Malik dapat menjalankan aktivitasnya/bekerja tanpa harus menginap. Setiap hari bolak-balik ke tempat kerja kembali ke rumah. Kondisi seperti ini dirasakan sangat nyaman karena setiap hari bisa bertemu dengan keluarga di desanya. Menurutnya, hidup di desa berkumpul dengan keluarga membawa ketenangan dalam hidup. Kota digunakan sebagai tempat mencari nafkah, akan tetapi untuk beristirahat, ia memilih di desa. Selain suasana yang lebih tenang, suasana kekeluargaan di desa membuat nyaman dan aman.

Berbeda ketika masih tinggal di Surabaya. Seperti penuturannya:

“...Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dengan adanya Suramadu. Secara ekonomis saya diuntungkan, sebab saya tidak lagi harus mengeluarkan biaya untuk kontrak rumah. Belum lagi biaya hidup di kota yang relatif sangat mahal bila dibandingkan di desa. Setelah keluarga saya tinggal di desa ini, anak saya mempunyai kebiasaan yang berbeda. Ketika di Surabaya anak saya selalu bermain ketika pulang sekolah. Terkadang bermain sampai magrib. Waktunya shalat juga lewat. Mainannya seperti *play station*. Tetapi setelah tinggal di sini, anak saya menyesuaikan dengan lingkungannya. Setelah pulang sekolah, anak saya belajar di madrasah bersama dengan teman-temannya. Begitu juga malam harinya selalu mengaji di masjid. Saya merasa senang karena anak saya jadi pandai mengaji dan rajin shalat setelah pindah di sini. Bahasanya pun juga jadi bertambah yaitu bisa berbahasa Madura.”

Pak Malik pindah ke Desa Pangpong tahun 2009 yaitu setelah adanya jembatan. Pak Malik juga menyatakan bahwa:

“..lingkungan tempat tinggal ketika di Surabaya banyak polusi dari pabrik. Dari segi lingkungan pergaulan, di perumahan kurang bebas, lebih individualistis, sendiri-sendiri tidak bisa kompak. Lain keadaanya dengan lingkungan di kampung. Lingkungan di sini lebih religius. Anak-anak mengaji. Ada madrasah yaitu pagi dan siang, pada malam hari mengaji.”

2. Perubahan biaya hidup

Memang, semenjak dibangunnya Jembatan Suramadu, membawa perubahan bagi penduduk, diantaranya pelaku mobilitas. Dengan adanya Jembatan Suramadu, penduduk yang biasanya pulang hanya satu minggu sekali, maka sekarang dapat pulang setiap hari. Seperti Pak Hairi, ia tidak perlu kontrak rumah atau kost di Surabaya. Ia tinggal di Desa Pangpong bersama keluarganya. Dibangunnya Jembatan Suramadu membawa dampak positif bagi para pelaku mobilitas. Bagi penduduk yang melakukan mobilitas dari Desa Pangpong ke Surabaya, dengan ada Jembatan Suramadu, mengalami perubahan biaya hidup. Sebagaimana dialami oleh seorang informan, Pak Hairi. Menurutnya, biaya yang harus dikeluarkan setelah ada Jembatan Suramadu semakin kecil. Ia tidak lagi harus membayar uang kontrakan untuk tinggal di Surabaya, karena sudah tinggal bersama keluarga di Desa Pangpong. Meskipun harus melakukan mobilitas ulang alik, namun biaya tersebut relative lebih kecil dibandingkan dengan biaya untuk kontrak rumah di Surabaya.

Perubahan biaya hidup juga dialami oleh Pak Malik, karena setelah pindah rumah ke daerah asalnya, yaitu Desa Pangpong, ia tidak perlu mengeluarkan biaya untuk kontrak rumah di Surabaya. Demikian pula, dengan biaya hidup untuk keluarganya, seperti biaya untuk pendidikan anak, di Tempat yang sekarang lebih murah daripada ketika di Surabaya. Gaya hidup lingkungan sekitar ketika di kota besar yang cenderung konsumtif, sedikit banyak

mempengaruhi kehidupan keluarga Pak Malik. Sebagai contoh, anak-anaknya selalu minta jajan ketika sekolah, dan masih minta uang jajan lagi sepulang sekolah. Adanya berbagai macam makanan maupun mainan yang ditawarkan di kota besar, menggoda anak-anak untuk memilikinya. Berbeda setelah tinggal di Desa Pangpong, tidak banyak macam makanan maupun mainan yang ditawarkan. Kegiatan anak-anak setelah pulang sekolah, mengikuti sekolah Madrasah, dan sore harinya mengaji. Perubahan lingkungan tempat tinggal, berdampak terhadap perubahan biaya hidup dalam keluarga Pak Malik.

Keluarga Haji Ilyas juga mengalami perubahan biaya hidup setelah adanya Jembatan Suramadu. Meskipun Haji Ilyas tidak rutin melakukan mobilitas ke Surabaya, namun anggota keluarga (anaknya) yang sekolah di Surabaya sekarang melakukan mobilitas ulang alik. Ia harus membayar uang kos untuk anaknya yang sekolah di Surabaya. Setelah adanya Jembatan Suramadu, biaya kos tersebut tidak dikeluarkan lagi setiap bulan, karena anaknya tidak kos lagi, tetapi melakukan mobilitas ulang alik ketika ke sekolah.

3. Perubahan waktu perjalanan

Dibangunnya Jembatan Suramadu membawa dampak positif bagi para pelaku mobilitas, yaitu waktu perjalanan dari Desa Pangpong ke Surabaya relatif lebih pendek. Sebelumnya, pelaku mobilitas yang harus melalui Pelabuhan Kamal, harus menunggu waktu cukup lama, dan perjalanan dengan menggunakan kapal lebih lama. Tentu saja, setelah adanya Jembatan Suramadu, dengan menggunakan kendaraan seperti sepeda motor, waktu tempuh perjalanan Desa Pangpong - Surabaya semakin pendek. Belum lagi kalau pulangnya sudah kemalaman, sudah tidak ada kapal yang berangkat lagi, maka pelaku mobilitas harus menginap di Surabaya.

Sebagaimana yang dialami Pak Hairi, yang bekerja di Surabaya. Selain biaya yang harus dikeluarkan semakin kecil, setelah ada Jembatan Suramadu, waktu tempuhnya ke tempat bekerja relatif pendek. Waktu tempuh yang dibutuhkan dari Desa Pangpong ke Surabaya melalui jalan laut (naik kapal) paling tidak setengah jam. Belum lagi waktu menunggu keberangkatan kapal serta antrian kapal.

Pak Hairi membutuhkan waktu perjalanan dari rumah ke kantornya lebih kurang 15-20 menit. Selama menempuh perjalanan ke dan dari tempat kerja (Bangkalan ke Surabaya), Pak Hairi pernah menggunakan angkutan umum maupun sepeda motor. Ketika masih menggunakan angkutan umum menuju kantor melalui Pelabuhan Kamal, waktu yang dibutuhkan lebih lama daripada ketika sudah mempunyai sepeda motor sendiri.

Pak Ilyas mengungkapkan dampak pembangunan Suramadu terhadapnya:

“...Setelah ada Jembatan Suramadu, yang diuntungkan adalah anak-anak atau mereka yang bekerja di Surabaya. Waktu itu, sebelum adanya jembatan Suramadu, ya cukup terjangkau. Akan tetapi, sebelum ada jembatan Suramadu, orang Desa Pangpong yang bekerja di Surabaya, menggunakan alat transportasi laut melalui Pelabuhan Kamal, terkadang bisa telat sampai kantor atau tempat kerja. Setelah adanya jembatan Suramadu, mereka bisa meminimalisir keterlambatan masuk kerja. Kalau dampak pembangunan jembatan Suramadu terhadap mata pencaharian penduduk Desa Pangpong, nampaknya belum signifikan (terlihat).”

Perubahan waktu perjalanan Desa Pangpong Surabaya dirasakan oleh semua informan. Hanya saja, frekuensi melakukan mobilitas antara informan satu dengan lainnya berbeda-beda.

4. Perubahan kegiatan perdagangan

Dampak pembangunan Jembatan Suramadu juga membawa perubahan kegiatan perdagangan pada beberapa masyarakat Desa Pangpong. Kegiatan yang dimaksud adalah

frekuensi *kulakan* barang dagangan. Sebagaimana dialami oleh Bu Hairi. Ia bekerja sebagai pedagang, berjualan baju di Pasar Labang. Hari Rabu merupakan hari pasaran, sehingga Pasar Labang nampak lebih ramai dibandingkan dengan hari-hari biasa. Meskipun hari Rabu yang paling ramai, namun isteri Pak Hairi berjualan di Pasar Labang setiap hari. Ibu Hairi *kulakan* barang dagangannya di Surabaya yaitu di Pasar Kapasan Surabaya dan di grosir Pasar Turi. Sebelum ada Jembatan Suramadu, isteri Pak Hairi apabila akan *kulakan* ke Surabaya lewat pelabuhan Kamal, dua minggu sekali naik sepeda motor. Setelah dibangunnya Jembatan Suramadu, Ia *kulakan* barang dagangannya ke Surabaya seminggu sekali.

5. Perubahan perilaku sehat

Pembangunan Jembatan Suramadu juga berdampak pada perubahan perilaku sehat. Maksudnya, kemudahan untuk mendapatkan perawatan kesehatan di tempat yang lebih komplit fasilitasnya (di Surabaya), beberapa masyarakat Desa Pangpong menggunakan kesempatan tersebut. Sebagaimana diceritakan seorang informan bernama Pak Malik. Bila ada anggota keluarganya yang sakit, periksa kesehatannya di puskesmas Sukolilo, Kecamatan Labang, Bangkalan. Kalau harus opname cukup di puskesmas, karena di puskesmas ada pelayanan rawat inap. Tetapi, kalau harus dirawat lebih khusus lagi, maka memilih ke Surabaya daripada di rumah sakit daerah. selain ke Surabaya lebih dekat, fasilitasnya juga lebih komplit. Kondisi tersebut juga dialami keluarga Pak Hosan.

Fasilitas kesehatan yang biasa digunakan oleh keluarga Pak Hairi adalah ke bidan terdekat, Puskesmas maupun tukang pijat. Menurut penuturan informan, ia jarang sekali sakit. Apabila tidak enak badan, biasanya ia diurut oleh tukang pijat dan dikeroki, sudah sembuh. Apabila ada anggota keluarganya yang sakit, biasanya Pak Hairi membawa berobat ke Puskesmas atau bidan terdekat (bidan desa). Demikian pula ketika isterinya melahirkan, yang membantu persalinan adalah bidan Desa Pangpong. Namun ketika ada kerabatnya yang perlu penanganan khusus, maka dibawa ke Surabaya.

Agak berbeda dengan Pak Ilyas. Ia pergi ke Surabaya ketika mau memeriksakan kesehatan. Seperti penuturannya:

“...Saya tidak cocok berobat di rumah sakit Bangkalan karena pelayanannya tidak bagus. Kalau di Surabaya di rumah sakit swasta. Di rumah sakit swasta cepat ditangani yaitu ke Perak Hospital Centre (PHC). Meskipun agak mahal akan tetapi saya lebih mantap berobat di PHC. Kalau dulu saya di rumah sakit Budi Mulia. Kenanya cukup lumayan, selama berobat 15 hari saya kena 110 juta.”

Bagi Pak Ilyas, yang secara ekonomi berkecukupan, adanya Jembatan Suramadu memberi keuntungan bagi keluarganya, kaitannya dengan kemudahan dalam mendapatkan jasa layanan kesehatan. Ia dapat memperoleh layanan jasa kesehatan yang sesuai dengan keinginannya, sehingga ketika ia atau ada anggota keluarganya yang sakit, maka diperiksa ke Surabaya. Berbeda dengan masyarakat Desa Pangpong maupun empat informan lainnya, yang tetap menggunakan jasa kesehatan di sekitar tempat tinggalnya (Puskesmas atau bidan).

6. Perubahan pola belanja

Adanya Jembatan Suramadu membawa dampak perubahan pola belanja pada beberapa keluarga di Desa Pangpong. Ada Untuk memenuhi kebutuhan yang semula berbelanja kebutuhan rumah tangga di Bangkalan, tetapi setelah ada jembatan, untuk belanja kebutuhan rumah tangga, pergi ke Surabaya. Selain banyak pilihan tempat, harganya bisa lebih murah, dan sekaligus sambil “jalan-jalan” bersama keluarga. Sebagaimana disampaikan oleh beberapa informan. Istri Pak Hairi, tempat belanja untuk kebutuhan makan sehari-hari keluarganya, di desa atau kecamatan terdekat. Namun sesekali ia dan keluarga pergi ke Surabaya untuk membeli kebutuhan lainnya. Setelah adanya Jembatan Suramadu, pada waktu

tertentu, saat ada waktu maupun uang, Pak Hairi mengajak keluarganya ke Surabaya, misalnya ke mal. Tujuannya tidak harus berbelanja, tetapi terkadang jalan-jalan untuk *refreshing*. Selain ke mal, Pak Hairi terkadang mengajak ke kebun binatang. Paling tidak, sebulan sekali saya mengajak keluarga ke Surabaya. Dulu ketika belum ada Jembatan Suramadu, jarang sekali saya mengajak keluarga ke Surabaya, karena transportasinya susah dan mahal.

Demikian pula disampaikan oleh Pak Ilyas. Untuk kebutuhan tertentu keluarganya, istri atau anaknya memilih berbelanja ke Surabaya. Selain dekat, pilihan barangnya juga lebih banyak. Misalnya, membeli sepatu, baju, perabot rumah tangga.

7. Perubahan ekonomi

Pembangunan jembatan Suramadu berdampak terhadap kondisi ekonomi beberapa masyarakat Desa Pangpong. Ada sebagian penduduk yang mendapatkan tambahan penghasilan dengan adanya Jembatan Suramadu yaitu dengan berjualan di lapak dekat Jembatan Suramadu. Demikian juga bagi mereka yang bekerja di Surabaya, merasakan dampak positif, karena mendapatkan keuntungan yaitu dari segi biaya, tenaga, dan waktu.

Meskipun sebagian besar masyarakat Desa Pangpong mendapat peluang berusaha, seperti berjualan di sepanjang kanan kiri jalan Jembatan Suramadu, namun ada masyarakat yang merasa terkena dampak negatif dengan adanya pembangunan Jembatan Suramadu, mereka adalah sopir angkutan. Para sopir angkutan umum yang semula beroperasi di Desa Bangkalan, termasuk melayani ke dan dari Pelabuhan Kamal, semenjak ada Jembatan Suramadu pendapatannya semakin berkurang. Meski penghasilan menurun tetapi mereka tetap bekerja sebagai sopir angkutan desa, sebab ketrampilan yang dimilikinya juga sangat terbatas. Kondisi ini dialami oleh Pak Mahmud, yang dulu pernah menjadi sopir angkutan umum rute Desa Pangpong Pelabuhan Kamal.

Pak Ilyas mengemukakan bahwa ia mulai belajar bekerja adalah di material, dan sampai sekarang tidak berganti pekerjaan. Ia menuturkan kondisinya:

“...Mulai tidak punya pekerjaan hingga punya pekerjaan. Sebab pekerjaan yang lain saya tidak tahu. Pekerjaan tersebut atas kemauan saya sendiri. Ayah saya kepala desa. Pertama saya jadi kuli batu ketika masih di kampung halaman. Jadi saya cari batu sendiri dan saya jual sendiri. Akhirnya saya jadi pemborong/mandor, punya anak buah. Dari cukong dibawa ke Kesek, dari Kesek dibawa ke Surabaya naik perahu. Dulu belum ada kapal. Setelah ada kendaraan (truk, maka pasaran perahu mati, sebab batu-batu tersebut diangkut memakai truk. Material adalah pesanan maupun untuk dijual. Saya sekarang mempunyai empat truk. Truk tersebut selain untuk mengangkut punya sendiri juga disewakan bagi yang membutuhkan.”

Menurut pendapat Pak Ilyas, pembangunan Jembatan Suramadu ada yang menguntungkan Desa Pangpong, termasuk dirinya sendiri. Ia mempunyai truk untuk mengangkut barang dagangan. Sebelum ada Jembatan Suramadu, dulu truk tidak bisa mengambil dagangan kembali sebanyak dua kali, namun sekarang bisa mengambil sampai dua kali. Dengan demikian, penghasilan yang diperolehnya juga semakin meningkat. Pasca pembangunan jembatan, ia sampai bisa membeli truk lagi, karena permintaan jasa truk maupun batu yang ia jual semakin banyak.

Namun ada juga masyarakat yang terkena dampak negatif, sebagaimana penuturan seorang informan:

“Saya termasuk yang terkena dampak negatif. Usaha saya berjualan onderdil menurun dengan adanya jembatan Suramadu. Dulu, ketika belum ada jembatan suramadu, orang lebih memilih membeli di tempat saya daripada harus bersusah payah ke Surabaya. Namun, sekarang setelah ada jembatan Suramadu, akses ke Surabaya lebih mudah,

sehingga mereka yang membutuhkan onderdil mobil banyak yang membeli di Surabaya. Lebih murah dan lebih banyak pilihannya. Cara menyiasatinya, saya harus menerima apa adanya. Artinya, kalau memang rezeki saya, maka orang akan membeli ke tempat saya, dan apabila mereka membeli onderdil di Surabaya, berarti bukan rezeki saya.”

8. Perubahan permainan tradisional

Sebenarnya adanya Jembatan Suramadu tidak secara langsung membawa perubahan pada permainan tradisional anak di Desa Pangpong. Meski demikian, menurut informan, saat ini anak-anak di Desa Pangpong lebih senang bermain di *gamenet* daripada bermain permainan tradisional. Hal ini sebenarnya juga terjadi di daerah lain, karena lebih disebabkan oleh perkembangan teknologi dan komunikasi. Adanya Jembatan Suramadu, menjadikan akses pelayanan jasa, termasuk *gamenet* semakin mudah, termasuk di Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, tidak terkecuali di Desa Pangpong.

Permainan tradisional yang biasa dimainkan oleh anak-anak di Desa Pangpong adalah layang-layang, *suwangan* atau istilah setempat adalah *laki-lakian*, kelereng, sepakbola. Mereka bermain di lapangan atau kebun. Permainan *egrag* dulu ada, tapi sekarang sudah tidak dimainkan lagi. Masuknya teknologi ke desa ini membawa perubahan permainan anak. Semaraknya *gamenet*, *internet* mempengaruhi anak-anak di desa ini. Mereka mulai senang dengan *games* yang ditawarkan di *gamenet*. Jasa *gamenet* masih sedikit dan jam buka hanya siang. Ada Jembatan Suramadu, membawa dampak terhadap aksesibilitas berbagai macam jasa, diantaranya semaraknya *gamenet*. Permainan tradisional mulai ditinggalkan dan beralih pada permainan modern.

9. Perubahan kegiatan kerja

Pembangunan Jembatan Suramadu membawa dampak positif terhadap kondisi ekonomi masyarakat, paling tidak membuka peluang kerja. Meskipun membuka peluang kerja, namun kontribusi terhadap peningkatan ekonomi nampaknya belum signifikan seperti yang diharapkan, dapat mengubah perekonomian keluarga.

Bila pada hari tertentu misalnya hari libur, hasil dari berjualan di kompleks PKL Jembatan Suramadu dapat memberi kontribusi penghasilan keluarga yang cukup menyenangkan. Akan tetapi pembangunan Jembatan Suramadu membawa dampak negatif bagi beberapa orang terutama bagi mereka yang bekerja sebagai sopir angkutan umum. Bagi penduduk Desa Pangpong yang bekerja sebagai sopir, hampir semuanya mengeluh pasca pembangunan Suramadu. Mereka perlu mempunyai strategi untuk bertahan hidup. Untuk menyiasati penghasilan yang sedikit dari menyopir angkot, ada yang menjadi tukang batu, pedagang kaki lima namun ada juga yang tetap jadi sopir.

Menurut pandangan Pak Hairi, selaku pribadi maupun Kepala Desa Pangpong (Pak Klebun), dengan adanya Jembatan Suramadu membawa perubahan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik pada sebagian masyarakat Desa Pangpong. Sebelum ada Jembatan Suramadu, sebagian besar masyarakat Desa Pangpong bekerja sebagai tukang belah batu dan sopir angkutan umum. Namun, setelah adanya Jembatan Suramadu banyak yang beralih profesi menjadi pedagang kaki lima di sepanjang Jembatan Suramadu. Ada yang berjualan makanan, minuman, kain batik, baju, kaos, souvenir dan lain sebagainya. Pendapat tersebut dikuatkan oleh Haji Ilyas, dimana dampak pembangunan Jembatan Suramadu yaitu tersedianya lapangan kerja, yaitu menjadi PKL.

Pak Mahmud adalah seorang kakek dari dua orang cucu dan bapak dari dua orang anak. Sebelum menetap di Desa Pangpong, ia sempat bekerja di Arab Saudi pada tahun 1989 sebagai sopir di supermarket selama dua tahun,. Ia pulang ke Indonesia karena keluarganya menginginkan untuk bekerja di Indonesia saja. Setelah kembali di Madura, ia menjadi sopir

taksi lagi. Namun setelah ada Suramadu, para penumpang angkutan umum banyak yang beralih lewat darat (Jembatan Suramadu) dengan alasan lebih cepat, murah dan dekat. Oleh karena itu, sejak adanya Jembatan Suramadu, penghasilannya menurun drastis. Sekarang Pak Mahmud banting stir menjadi pengusaha onderdil mobil.

Keluarga Pak Hosnan termasuk yang merasa diuntungkan dengan adanya pembangunan Jembatan Suramadu. Dampak positif adalah isterinya mendapat lapangan kerja yaitu menjadi PKL di Jembatan Suramadu. Isterinya yang semula sebagai ibu rumah tangga kini telah bekerja untuk mendapat tambahan penghasilan keluarga. Ia berdagang setiap hari, karena letak lapaknya berada di depan sehingga relatif lebih banyak pembeli daripada lapak yang ada di bagian belakang.

10. Perubahan alat transportasi

Dampak pembangunan Jembatan Suramadu membawa dampak positif bagi masyarakat. Dampak pembangunan Jembatan Suramadu yang paling terlihat adalah perubahan alat transportasi (pemilikan sepeda motor). Hampir di setiap rumah tangga di Desa Pangpong mempunyai sepeda motor. Meningkatnya kepemilikan sepeda motor pada masyarakat di Desa Pangpong salah satunya karena pengaruh dari pembangunan Jembatan Suramadu, sebab dengan sepeda motor, bila bepergian lebih murah. Apalagi bila mau ke Surabaya aksesnya mudah dan murah. Sepeda motor tersebut sebagai alat transportasi warga yang dinilai secara ekonomi, murah. Sebagai contoh, mereka yang bekerja di Surabaya, semula harus mengeluarkan uang untuk biaya transportasi dari rumah menuju pelabuhan, biaya naik kapal, dan biaya transportasi dari pelabuhan di Surabaya sampai ke tempat kerja dan sebaliknya. Namun setelah adanya jembatan Suramadu, mereka membeli sepeda motor untuk digunakan sebagai alat transportasi ke tempat kerja. Selain itu, sepeda motor juga digunakan untuk keperluan lainnya, seperti keperluan keluarga.

Dampak positif pembangunan Jembatan Suramadu juga dirasakan oleh masyarakat selain Desa Pangpong. Sebagaimana hasil penelitian Yanti dkk (2013) bahwa arus transportasi di Desa Sukolilo, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan semakin lancar sehingga mempermudah masyarakat untuk menyeberang dan mendistribusikan barang/jasa ke Pulau Jawa dan sebaliknya. Selain itu, waktu dan biaya dalam distribusi barang/jasa semakin efektif dan efisien.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Desa Pangpong termasuk wilayah yang terkena dampak pembangunan Jembatan Suramadu. Sebelum ada pembangunan jembatan, kondisi wilayah desa ini relatif terisolasi, jauh dari pusat keramaian. Sebelum ada jembatan, hampir semua aktivitas terutama yang berkaitan dengan mobilitas, melalui Kamal. Namun setelah adanya Jembatan Suramadu, Desa Pangpong menjadi lebih ramai. Apalagi, sarana-prasarana baik pendidikan, kesehatan, perdagangan, transportasi semakin terjangkau karena banyak bermunculan, terutama di sekitar kota kecamatan. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa wilayah Desa Pangpong mengalami kemajuan setelah adanya Jembatan Suramadu. Masyarakat Desa Pangpong yang merasa terkena dampak negatif dengan adanya Jembatan Suramadu adalah yang bekerja sebagai sopir angkutan. Sebab, dengan adanya Jembatan Suramadu, mereka banyak kehilangan penghasilan. Para penumpang banyak yang mempunyai kendaraan pribadi untuk melakukan mobilitas terutama untuk arah Surabaya-Bangkalan dan sebaliknya.

Pembangunan Jembatan Suramadu membawa dampak terhadap perilaku mobilitas

masyarakat Desa Pangpong. Sebelum ada Jembatan Suramadu masyarakat Desa Pangpong yang akan ke Surabaya harus melalui Pelabuhan Kamal. Waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyeberang dari Bangkalan ke Surabaya atau sebaliknya relatif mahal. Setelah ada Jembatan Suramadu, waktu dan biaya yang dikeluarkan relatif lebih sedikit daripada menyeberang menggunakan transportasi air. Oleh karena itu, perilaku mobilitas masyarakat Desa Pangpong mengalami perubahan, artinya mobilitas ulang-alik lebih sering dilakukan, baik untuk kepentingan bekerja, berbelanja, sekolah, maupun rekreasi. Selain itu, kuantitas melakukan mobilitas ulang-alik juga lebih tinggi.

Perubahan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Pangpong pasca pembangunan Jembatan Suramadu dirasakan oleh sebagian penduduk, terutama bagi mereka yang bekerja di luar Desa pangpong (Surabaya). Pasca pembangunan jembatan Suramadu, mereka merasa lebih nyaman dan tenang, karena bisa bertemu dengan keluarga (anak dan isteri) setiap hari, membantu membimbing dan mengawasi anak. Selain itu, keluarga juga merasa aman karena ada pelindung keluarga setiap harinya. Pasca pembangunan jembatan Suramadu juga berdampak pada perubahan waktu perjalanan terutama bagi para pelaku mobilitas, yaitu semakin pendek/efisien. Selain itu, pembangunan jembatan Suramadu dapat membuka kesempatan untuk usaha, yaitu dengan tersedianya lapak-lapak di sekitar kawasan jembatan Suramadu.

Perubahan pola belanja juga terjadi pada sebagian masyarakat, yang juga dialami oleh beberapa informan. Kemudahan dan kelancaran untuk bepergian ke Surabaya, mengakibatkan terjadinya perubahan pola belanja, terutama bagi pedagang yang mengambil barang dagangan dari Surabaya. Perubahan perilaku sehat juga terjadi pada sebagian masyarakat Desa Pangpong. Perubahan permainan tradisional, perubahan kegiatan kerja, alat transportasi, dan biaya hidup adalah beberapa perubahan yang dialami oleh 5 keluarga yang dijadikan sebagai informan.

Pembangunan jembatan Suramadu mempunyai dampak negatif bagi beberapa penduduk di Desa Pangpong, terutama bagi mereka yang bekerja sebagai sopir angkutan umum jalur ke dan dari pelabuhan. Setelah adanya jembatan Suramadu, penghasilan sebagai sopir angkutan umum merosot. Hal ini disebabkan beralihnya penggunaan alat transportasi. Mereka yang semula menggunakan angkutan umum (untuk menuju Pelabuhan Kamal), setelah adanya Jembatan Suramadu, beralih menggunakan sepeda motor.

B. Saran

Semenjak dibangun dan dioperasionalkannya Jembatan Suramadu, warga di sekitar jembatan tersebut, khususnya di Desa Pangpong belum merasakan dampak positif yang signifikan berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan. Desa Pangpong “hanya untuk lewat” saja. Hal ini dikarenakan tidak ada daya tarik daerah yang menyebabkan orang ingin datang atau tinggal di Pangpong. Oleh karena itu, perlu kiranya mengembangkan potensi masyarakat maupun wilayah, agar daerah ini mempunyai daya tarik, dan orang dari luar ingin tinggal ataupun menanamkan sahamnya untuk usaha di daerah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., 2002. Studi Mobilitas Penduduk Antara Masa Lalu dan Masa Depan dalam *Mobilitas Penduduk Indonesia*. Tukiran (ed). Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Ahimsa-Putra, H. S., 2007. Paradigma, Epistemologi dan Metode Ilmu Sosial-Budaya Sebuah Pemetaan. *Makalah*. Disampaikan dalam pelatihan “Metodologi Penelitian” yang

- diselenggarakan oleh CRCS-UGM di Yogyakarta, 12 Februari 19 Maret 2007.
- BPS Kabupaten Bangkalan., 2003. Kabupaten Dalam Angka Tahun 2003.
- BPS Kabupaten Bangkalan., 2010. Kabupaten Dalam Angka Tahun 2010.
- Cahyo, P. N. dkk., 2010. Konsep Penataan Permukiman dalam Rangka Pembangunan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu. Makalah dalam Seminar Nasional Perumahan Permukiman dalam Pembangunan Kota 2010. (<http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Master-10269-Chapter1.pdf>).
- <http://trisna.student.umm.ac.id/2010/02/05/reformasi-kehidupan-masyarakat-madura-pasca-suramadu/> diunduh Senin, 13 Feb 2012 jam 14.00
- (<http://kabarmadura07.blogspot.com/2009/11/catatan-kecil-budaya-madura.html>).
- (<http://sosialcorner.com/analisa-dampak-sosial-budaya-pasca-pembangunan-jembatan-suramadu-dan-industrialisasi-madura>)
- Keban, Y. T., 1996. Mobilitas Penduduk dan Perubahan Sosial Budaya. Dalam *Mobilitas Penduduk di Indonesia*. Ananta, Aris & Chotib (ed.). Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN.
- Lee, E. S., 2000. *Teori Migrasi*. Diterjemahkan oleh Hans Daeng, ditinjau kembali oleh Ida bagoes Mantra (Ed.7). Yogyakarta: Pusat Penelitian kependudukan Universitas Gadjah Mada.
- Mantra, I. B., 1999. *Mobilitas Penduduk Sirkuler Dari Desa ke Kota di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.
- Muthmainnah., 1998. *Jembatan Suramadu Respon Ulama Terhadap Industrialisasi*. Kuntowijoyo (ed.). Yogyakarta: LKPSM.
- Rifai, M. A., 2007. *Manusia Madura Pembawaan, Perilaku, Etos kerja, penampilan, dan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Peribahasanya*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Saefullah, I. A. D., 2002. Migrasi, Perubahan Sosial, dan Potensi Konflik dalam *Mobilitas Penduduk Indonesia*. Tukiran (ed). Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Suparlan, P., 1986. Perubahan Sosial dalam *Manusia Indonesia Individu Keluarga dan Masyarakat*. A.W. Widjaja (Ed.). Jakarta: Akademika Pressindo.
- Wiyata, A. L., 2010. Geliat Suramadu Kian Terasa. *Kompas Jatim*, 27 Juli 2010. (<http://wiyatablog.blogspot.com/2010/07/geliat-suramadu-kian-terasa.html>).
- Yanti, A. T. D. dkk., 2013. Dampak Kebijakan Pembangunan Jembatan Suramadu terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu (Studi di Desa Sukolilo Barat, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 1 No. 2 tahun 2013*.

PETUNJUK SINGKAT BAGI PENULIS PATRAWIDYA

1. Patrawidya menerima, naskah hasil penelitian bidang sejarah dan budaya dalam dwi bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa Inggris) dan belum pernah diterbitkan.
2. Naskah yang diterbitkan melalui proses seleksi dan editing.
3. Jumlah halaman setiap artikel 30-40 halaman, diketik 1,5 spasi, dengan huruf *times new roman*, font 12. Abstrak dalam bahasa Indonesia dan Inggris maksimal 100-125 kata diketik *italic* satu spasi, dan kata kunci.
4. Judul harus informatif dan diketik dengan huruf kapital tebal (*bold*), maksimum 11 kata yang mencerminkan inti tulisan. Dewan redaksi boleh merubah judul dengan sepengetahuan penulis. Nama penulis diketik lengkap di bawah judul dan diberi tanda asterisk (*). Keterangan tanda ditulis di bagian bawah naskah yang memuat : identitas penulis, instansi, alamat.
5. Penulisan naskah disajikan dengan sistematika sebagai berikut : Bab. Pendahuluan berisi latar belakang, permasalahan, tujuan, kerangka pikir, metode. Bab selanjutnya berisi tentang deskripsi dari penelitian/obyek penelitian. Selanjutnya Bab Inti memuat tentang pembahasan/analisis bisa disertai tabel, skema, grafik, gambar, foto, peta. Pada Bab Penutup berisi kesimpulan dan saran. Naskah dilengkapi Daftar Pustaka dalam Daftar Informan/Referensi.
6. Penulisan kutipan
 - a. Kutipan langsung, adalah kutipan pendapat orang lain dalam suatu karya ilmiah yang diambil persis seperti aslinya; Kutipan langsung pendek, kutipan yang tidak melebihi tiga baris ketikan dalam baris-baris tubuh karangan dengan memberikan tanda kutip; Kutipan langsung panjang, kutipan ditulis dalam alinea tersendiri terpisah dari tubuh karangan . Kutipan diketik setelah lima ketukan garis tepi sebelah kiri atau sejajar dengan permulaan paragraf baru, jarak 1 spasi.
 - b. Kutipan tidak langsung, kutipan yang ditulis dengan bahasa penulis sendiri, ditulis terpadu dalam tubuh karangan, tanpa tanda kutip.
 - c. Mengutip ucapan sevara langsung (pidato, ceramah, wawancara, dan lain-lain) dapat dikutip secara langsung maupun tidak langsung, kutipan dengan tanda kutip.
7. Referensi sumber dicantumkan dalam kurung di dalam teks (*body note*) dengan susunan: nama pengarang, tahun karangan, nomor halaman yang dikutip. Penulisan Daftar Pustaka dengan susunan sebagai berikut: nama pengarang, tahun, judul karangan, nama kota, dan nama penerbit.

Contoh Buku

Fic, V.M., 2005. *Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi Tentang Konspirasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Contoh artikel dalam sebuah buku

Koentjaraningrat, 1985. "Persepsi Tentang Kebudayaan Nasional" dalam *Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan*, Alfian (ed). Jakarta: UI

Contoh artikel dalam majalah

Tambunan, T., 1990. "The Role of Small Industry in Indonesia: A General Review". *Ekonomi Keuangan Indonesia*, 37 (1): 85-114.

Pengacuan pustaka 80% terbitan 10 tahun terakhir dan 80% berasal dari sumber acuan primer. Catatan kaki (*footnote*) hanya berisi penjelasan tentang teks, dan diketik di bagian bawah dari lembar teks yang dijelaskan.

7. Istilah lokal dan kata asing, harus ditulis dengan huruf miring (*italic*).
8. Pengiriman naskah bisa dilakukan melalui e-mail, ataupun pos dengan disertai file/CD, dialamatkan kepada: Dewan Redaksi Patrawidya, Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta, Jalan Brigjen Katamso 139, Yogyakarta 55152, Telp (0274) 373241, Fax (0274) 381555. E-mail: patrawidya@bpnb-jogja.info
9. Penulis yang naskahnya dimuat akan mendapat tiga eksemplar buku Patrawidya dan dua reprint.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
YOGYAKARTA